



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL  
TAHUN 2010 - 2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL TAHUN 2010 - 2014.

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 -2014, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014.

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga Tahun 2010 - 2014, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJM Daerah, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun sesuai periode masing-masing pemerintah daerah.
4. Menteri adalah Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

## **Pasal 2**

- (1) RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Presiden hasil Pemilihan Umum tahun 2009.
- (2) RPJM Nasional memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (3) RPJM Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
  - a. pedoman bagi Kementerian/Lembaga dalam menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga;
  - b. bahan penyusunan dan perbaikan RPJM Daerah dengan memperhatikan tugas pemerintah daerah dalam mencapai sasaran Nasional yang termuat dalam RPJM Nasional;
  - c. pedoman Pemerintah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah.

## **Pasal 3**

Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melaksanakan program dalam RPJM Nasional yang dituangkan dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dan RPJM Daerah.

## **Pasal 4**

Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Menteri dalam menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dan RPJM Daerah.

## **Pasal 5**

Menteri melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan RPJM Nasional yang dituangkan ke dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dan RPJM Daerah.

**Pasal 6**

RPJM Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden ini dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

**Pasal 7**

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Januari 2010

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 2010  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH NASIONAL  
(RPJMN)  
TAHUN 2010--2014

BUKU I  
PRIORITAS NASIONAL

Diperbanyak Oleh:  
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)  
2010



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

## DAFTAR ISI

### BUKU I RPJMN TAHUN 2010-2014

<b>DAFTAR ISI .....</b>	i
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	I-1
<b>BAB II KONDISI UMUM .....</b>	I-3
2.1 Latar Belakang .....	I-3
2.2 Pencapaian Pembangunan Nasional 2004-2009 .....	I-4
2.3 Tantangan Pembangunan Nasional .....	I-18
<b>BAB III ARAHAN RPJPN 2005-2025 .....</b>	I-22
3.1 Visi dan Misi RPJPN 2005-2025 .....	I-22
3.2 Arah Pembangunan Jangka Menengah ke-2 (2010-2014) .....	I-25
<b>BAB IV KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL 2010-2014 .....</b>	I-28
4.1 Strategi dan Kebijakan Pembangunan Nasional .....	I-28
4.1.1 Visi Indonesia .....	I-28
4.1.2 Misi Pembangunan .....	I-37
4.1.3 Agenda Pembangunan .....	I-33
4.1.4 Sasaran Pembangunan .....	I-43
4.2 Arah Kebijakan Umum Pembangunan Nasional .....	I-49
4.2.1 Arah Kebijakan Umum .....	I-49
4.2.2 Prioritas Nasional .....	I-50
4.3 Arah Kebijakan Bidang-Bidang Pembangunan .....	I-61
4.4 Arah dan Kebijakan Pembangunan Kewilayah .....	I-62
4.4.1 Pengembangan Wilayah Pulau-Pulau Besar .....	I-64
4.4.2 Strategi Pengembangan Wilayah Laut .....	I-71
4.4.3 Pengembangan Kawasan .....	I-75
<b>BAB V KERANGKA EKONOMI MAKRO 2010-2014.....</b>	I-77
5.1 Keadaan Ekonomi 2009 .....	I-77
5.2 Prospek Ekonomi 2010-2014 .....	I-80
5.2.1 Peningkatan Kesejahteraan Rakyat melalui Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan .....	I-80
5.2.2 Stabilitas Ekonomi yang Kokoh .....	I-82
5.2.3 Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berkeadilan .....	I-84

5.2.4 Kebutuhan Investasi dan Kebijakan Pendanaan Pembangunan Nasional serta Pemanfaatannya .....	I-87
5.2.5 Pendanaan Melalui Transfer ke Daerah .....	I-93
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>I-100</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>I-101</b>
Matriks Penjabaran Prioritas Nasional .....	I-101



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Sasaran Utama Pembangunan Nasional RPJMN 2010-2014 .....	I-46
Tabel 2 Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi 2010-2014 (Dalam Persen) .....	I-81
Tabel 3 Kerangka Ekonomi Makro 2010-2014 .....	I-92

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1 Keterkaitan Buku I, Buku II, dan Buku III .....	I-2
Gambar 2 Capaian Indeks Persepsi Korupsi Indonesia .....	I-7
Gambar 3 Grafik Perbandingan Perkara Masuk dengan Sisa Perkara .....	I-8
Gambar 4 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi dan PDB Per Kapita .....	I-10
Gambar 5 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan.	I-12
Gambar 6 Jumlah Angkatan Kerja, Bekerja, dan Pengangguran Terbuka .....	I-13
Gambar 7 Perkembangan Produksi Pangan .....	I-15
Gambar 8 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka PartisipasiKasar (APK) .....	I-16
Gambar 9 Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat.....	I-17
Gambar 10 Pentahapan Pembangunan Dalam RPJPN 2005-2025 .....	I-25



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

## BAB I PENDAHULUAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 merupakan tahap kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. RPJMN 2010-2014 ini selanjutnya menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga dalam menyusun Rencana Strategis kementerian/lembaga (Renstra-KL) dan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menyusun/menyesuaikan rencana pembangunan daerahnya masing-masing dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional. Untuk pelaksanaan lebih lanjut, RPJMN akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN).

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengungkap hal sebagai berikut.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) merupakan **penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Presiden** yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), yang memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program kementerian/lembaga dan lintas kementerian/lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

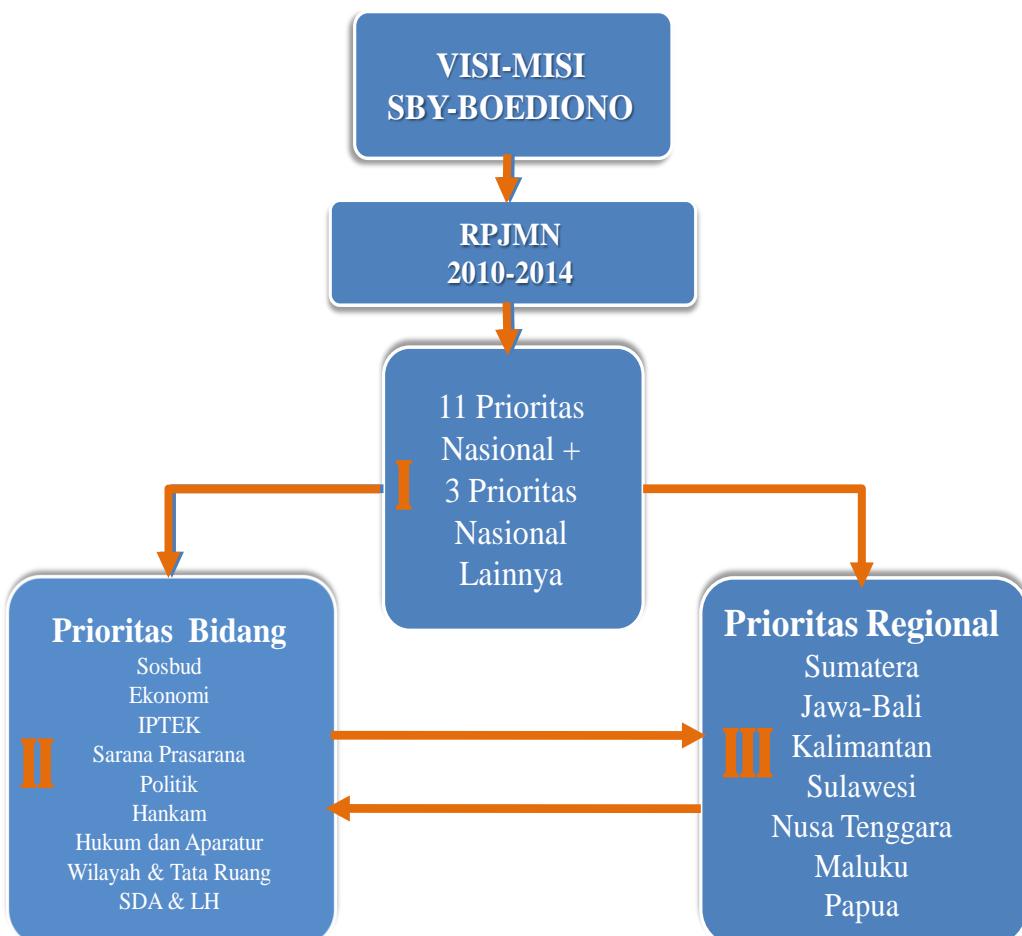
Agar dapat memenuhi amanat ini, RPJMN 2010-2014 disusun dalam tiga buku yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan masing-masing memuat hal-hal sebagai berikut:

- Buku I** memuat strategi, kebijakan umum, dan kerangka ekonomi makro yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Aksi serta sebelas prioritas pembangunan nasional dari Presiden-Wakil Presiden, Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono dengan visi: **“TERWUJUDNYA INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN.”**
- Buku II** memuat rencana pembangunan yang mencakup bidang-bidang kehidupan masyarakat sebagaimana yang tertuang dalam RPJPN 2005—2025 dengan tema: **“MEMPERKUAT SINERGI ANTARBIDANG PEMBANGUNAN”** dalam rangka mewujudkan visi pembangunan nasional yang tercantum dalam Buku I.

**Buku III** memuat rencana pembangunan kewilayahan yang disusun dengan tema: **“MEMPERKUAT SINERGI ANTARA PUSAT DAN DAERAH DAN ANTARDAERAH”** dalam rangka mewujudkan visi pembangunan nasional yang tercantum dalam Buku I.

Dengan demikian, RPJMN 2010-2014 adalah pedoman bagi Pemerintah Pusat/Daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam melaksanakan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan bernegara yang tercantum dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

**GAMBAR 1**  
**KETERKAITAN BUKU I, BUKU II, DAN BUKU III**





## BAB II

### KONDISI UMUM

#### 2.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Dalam Visi, Misi dan Programnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono, dengan tegas menyatakan keinginan dan keyakinannya untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang lebih maju dan sejahtera, lebih mandiri, lebih aman dan damai, serta lebih demokratis dan adil.

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Bangsa yang tengah mengukir sejarah baru untuk terus berkembang dan maju. Menjadi bangsa yang besar dan maju adalah cita-cita bangsa Indonesia bersama. Cita-cita untuk menjadikan negeri dan bangsa yang sejahtera, mandiri, demokratis, dan adil. Cita-cita yang luhur dan mulia dari segenap rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke; dari Miangas sampai Pulau Rote. Segenap bangsa Indonesia menginginkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Sejarah telah mengajarkan bahwa bangsa Indonesia telah berhasil melewati sejumlah cobaan, tantangan, dan hambatan. Bangsa Indonesia tetap tegak berdiri, melangkah dengan pasti, dan berhasil melewati proses sejarah yang panjang dengan selamat.

Lebih dari satu dasawarsa bangsa Indonesia telah memutuskan untuk menempuh jalur perjalanan baru dalam sejarahnya, jalur demokrasi. Setelah didera oleh krisis multidimensi yang telah mengguncang fondasi bernegara, bangsa Indonesia telah mampu bangkit kembali. Indonesia telah mampu membangun dirinya, bahkan dengan lebih baik lagi, sehingga wibawa dan kehormatannya sebagai sebuah bangsa yang bermartabat, diakui dan dihormati kembali oleh dunia.

Sepuluh tahun yang lalu, ekonomi mengalami goncangan, pertumbuhan mengalami kontraksi di atas 13%, nilai tukar rupiah runtuh, inflasi mencapai 70%, utang pemerintah melambung di atas 100% dari PDB, kemiskinan dan pengangguran melonjak tinggi. Seluruh kegiatan ekonomi praktis merosot dan terhenti. Kerusuhan sosial dan konflik berdarah merebak. Tatatan politik berubah secara fundamental dengan pelaksanaan demokrasi, desentralisasi, dan amendemen konstitusi. Tatatan hidup masyarakat berubah secara drastis. Sebagian lembaga publik, menjadi tidak berfungsi. Bangsa Indonesia, mengalami sebuah euforia reformasi dan kebebasan. Proses transisi yang tiba-tiba itu, begitu sulit dikelola karena heterogenitas dan kompleksitas persoalan yang harus kita hadapi.

Dalam lima tahun terakhir, di tengah kondisi negara yang belum sepenuhnya pulih dan tantangan global yang makin sulit, seperti gejolak harga minyak, meroketnya

harga pangan dan terjadinya krisis keuangan global yang menyebabkan resesi ekonomi dunia, Indonesia secara bertahap tetapi pasti, menata dan membangun kembali Indonesia di segala bidang. Perekonomian pulih, mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang disertai oleh pemerataan (*growth with equity*) dan bahkan memulihkan lingkungan alam yang rusak. Tatanan sosial yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang luhur dan bermartabat terbangun. Demikian pula, kehidupan politik yang aman, damai, adil, beretika, dan demokratis. Kehidupan budaya dan jati diri bangsa yang kuat dan kreatif semakin dikembangkan. Hukum semakin ditegakkan tanpa pandang bulu. Kondisi yang aman dan damai telah dipulihkan dan dipelihara di daerah-daerah konflik, utamanya di Aceh, Maluku, dan Papua.

Penyelenggaraan pembangunan dalam kurun waktu 2004-2009, telah membawa hasil yang menggembirakan, tetapi tetap menyisakan tugas ke depan. Di masa datang, Indonesia memiliki potensi yang besar untuk menjadi negara yang lebih maju lagi, tetapi tantangan dan ujian dari berbagai aspek tidaklah mudah. Penduduk dunia masih akan terus bertambah, alam sudah semakin penuh dan jenuh untuk memenuhi kebutuhan manusia yang terus akan bertambah dan berkembang. Energi, pangan, dan air akan menjadi komoditas yang makin langka dan berharga yang harus terus diamankan, dan dikelola dalam kerangka keharmonisan lingkungan. Kemajuan teknologi dan globalisasi akan memberikan peluang, tetapi juga akan menyajikan tantangan dan persoalan bagi sumber daya manusia Indonesia.

Bangsa Indonesia bertekad teguh, melangkah pasti secara strategis pada periode 2010-2014 untuk bersama-sama mengatasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi serta memanfaatkan semua potensi dan peluang yang ada. Semua ini dilakukan bangsa Indonesia untuk mencapai cita-cita luhurnya yaitu (i) terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya bangsa, yang didukung sepenuhnya oleh kemajuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, (ii) terwujudnya masyarakat, bangsa dan negara yang demokratis, berbudaya, bermartabat dan menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab serta hak asasi manusia, dan (iii) terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh seluruh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia.

## 2.2 Pencapaian Pembangunan Nasional 2004-2009

Selama periode 2004-2009, dengan kerja keras semuanya di tengah berbagai tantangan dalam negeri dan internasional yang dihadapi, bangsa Indonesia telah berhasil menciptakan Indonesia yang lebih aman, lebih damai, lebih adil, dan lebih demokratis serta lebih sejahtera. Indonesia tidak hanya sekedar pulih dari krisis, tetapi Indonesia telah mampu membangun ketahanan nasional, prestasi, serta reputasi yang baik di mata dunia.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

Keberhasilan pembangunan Indonesia, telah menuai berbagai prestasi dan penghargaan dalam skala global. Kemajuan pembangunan ekonomi dalam lima tahun terakhir, telah makin mengatasi ketertinggalan Indonesia dari negara-negara maju. Negara-negara maju yang tergabung dalam OECD (*Organization of Economic and Cooperation Development*) mengakui dan mengapresiasi kemajuan pembangunan Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia bersama Cina, India, Brazil, dan Afrika Selatan diundang untuk masuk dalam kelompok '*enhanced engagement countries*' atau negara yang makin ditingkatkan keterlibatannya dengan negara-negara maju. Indonesia juga tergabung dalam kelompok Group-20 atau G-20, yaitu dua puluh negara yang menguasai 85% Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dunia, yang memiliki peranan sangat penting dan menentukan dalam membentuk kebijakan ekonomi global.

Selama lima tahun terakhir telah banyak kemajuan yang telah dicapai di dalam mewujudkan tiga agenda pembangunan RPJMN 2004-2009.

Upaya mewujudkan Indonesia yang aman dan damai, telah membawa hasil. Di seluruh Indonesia, tidak ada gangguan keamanan yang berarti. Perdamaian di Nangroe Aceh Darusalam dan di beberapa daerah konflik lainnya seperti Maluku, Sulawesi Tengah, dan Papua telah menunjukkan kondisi keamanan yang semakin kondusif. Peningkatan mobilitas penduduk yang cukup tinggi, merupakan salah satu cermin dari perbaikan keamanan di tanah air. Begitu pula peningkatan investasi, baik investasi yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri, merupakan cerminan dari tercapainya kondisi keamanan yang semakin membaik.

Kemajuan yang berarti juga terlihat dalam upaya mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis. Indonesia berhasil melalui sebuah proses transformasi politik yang telah mengubah tatanan politik negara kita dari negara otoriter menjadi sebuah negara dengan tatanan politik yang relatif demokratis. Lembaga-lembaga penyelenggara negara yang telah ada terlihat bergerak maju secara lebih dinamis dalam melaksanakan peran dan fungsi yang diamanatkan oleh konstitusi. Lembaga-lembaga negara independen yang didirikan pada era reformasi berdasarkan amanat konstitusi UUD 1945 hasil amendemen dan perundang-undangan yang baru telah menunjukkan kinerja yang relatif sangat baik.

Pemilihan umum legislatif telah berjalan secara jujur, adil, aman, dan lancar sebanyak tiga kali setelah reformasi politik digulirkan tahun 1997/1998. Konsolidasi demokrasi mencapai puncak, dengan diberlakukannya pemilihan langsung Presiden dan Wakil Presiden untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia pada tahun 2004, yang diikuti dengan dimulainya pemilihan langsung kepala daerah pada 2005. Jika pada tahun 2003 seluruh kepala daerah masih dipilih secara tidak langsung oleh DPRD, maka pada tahun 2007 sudah dua pertiganya yang dipilih melalui pemilu langsung. Kini, seluruh kepala daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di seluruh tanah air telah dipilih langsung oleh rakyat. Yang juga membanggakan adalah Penyelenggaraan pemilu dan seluruh pemilihan kepala daerah berjalan dengan demokratis, jujur, adil, aman dan

damai.

Akuntabilitas di tingkat pemerintah daerah sudah semakin baik. Para kepala daerah yang mampu menunjukkan kinerja yang prima dalam masa pemerintahannya, pada umumnya terpilih kembali. Beberapa kepala daerah kabupaten/kota dengan kinerja yang optimal, bahkan terpilih menjadi gubernur atau wakil gubernur. Pemerintah juga terus melanjutkan proses pembangunan kelembagaan demokrasi. Mekanisme *checks and balances* telah diperluas ke seluruh lembaga penyelenggara negara di pusat dan daerah. Berbagai institusi independen telah dibentuk untuk memperkuat mekanisme *check and balances*.

Dalam 5 tahun terakhir ini pun, kebebasan sipil menunjukkan kinerja yang positif, yang dapat dilihat dari semakin baiknya jaminan terhadap kebebasan berpendapat, kebebasan dari rasa takut, kebebasan berusaha, dan kebebasan berkumpul dan berserikat.

Dengan berbagai capaian tersebut dapat dikatakan bahwa Indonesia sedang bergerak maju secara lebih mantap dalam proses konsolidasi demokrasi sesuai dengan amanat UUD 1945.

Salah satu bagian penting dalam proses transformasi dalam agenda mewujudkan keadilan adalah terbangunnya tatanan pemerintahan yang makin bersih dan makin berwibawa (*good governance and clean government*). Indonesia berhasil bangkit dari sebuah negara, yang tata kelola pemerintahannya dianggap buruk, karena praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang meluas, menjadi sebuah negara dengan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, lebih bersih dan lebih berwibawa, dan bebas dari berbagai kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan.

Dalam bidang penegakan hukum termasuk pemberantasan korupsi, penindakan terhadap pelaku tindak pidana korupsi telah dilakukan tanpa pandang bulu. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada yang kebal hukum. Termasuk juga aparat penegak hukum. Sikap tegas kejaksaan, kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah berhasil mengungkap dan mengusut kasus-kasus tindak pidana, yang merugikan keuangan negara. Perwujudan Indonesia yang bersih dari korupsi didukung oleh penyusunan perundangan-undangan yang baik dan kuat, serta pelaksanaan peraturan perundangan secara konsisten dan tanpa kompromi. Dengan langkah ini, Indonesia dapat meningkatkan martabatnya di mata dunia.

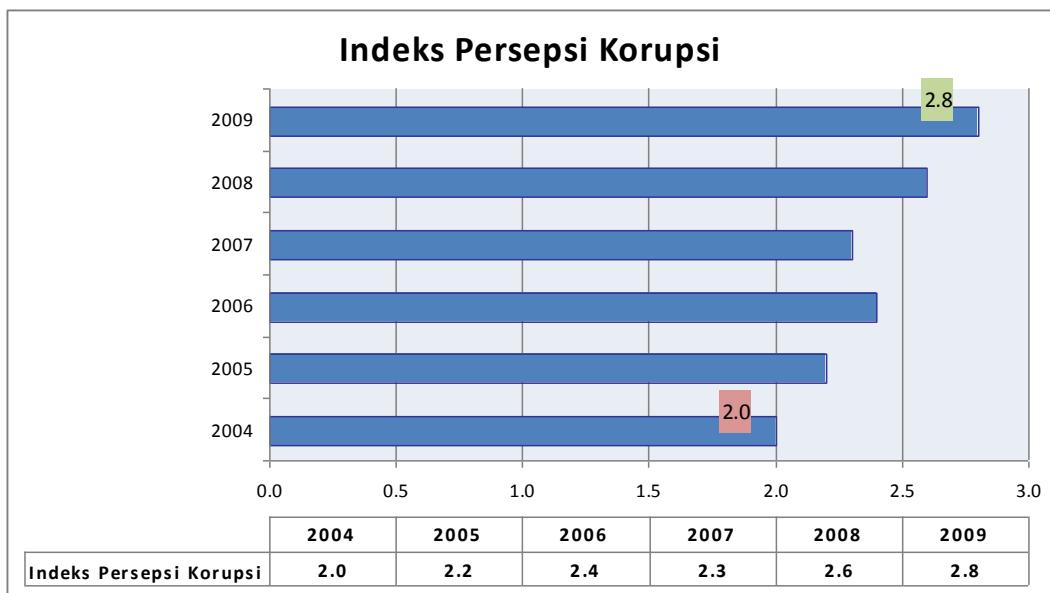
Laporan UNDP bertajuk *Tackling Corruption, Transforming Lives*, 2008, menyatakan bahwa indeks persepsi korupsi, *Corruption Perception Index* (CPI) Indonesia telah menunjukkan banyak perbaikan. Dalam skala 1 sampai dengan 10, dengan keterangan bahwa skala 1 menunjukkan persepsi terhadap suatu negara sebagai yang paling korup, dan 10 menunjukkan persepsi terhadap negara sebagai yang paling bersih, indeks persepsi korupsi Indonesia telah mengalami perbaikan dari 2,0 pada tahun 2004, menjadi 2,6 pada tahun 2008 dan 2,8 pada tahun 2009.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

Di sisi lain, upaya untuk melakukan reformasi birokrasi secara terencana, komprehensif, dan bertahap terus dimantapkan pelaksanaannya. Reformasi birokrasi, bertujuan untuk memperbaiki pelayanan publik karena jajaran birokrasi adalah pelayan dan pelindung kepentingan masyarakat. Langkah yang telah dan terus dilakukan mencakupi perbaikan sistem dan budaya kerja, pengukuran kinerja, penerapan disiplin, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, serta perbaikan sistem remunerasi yang memadai. Termasuk di dalamnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemerintahan. Semua ini merupakan esensi dari penerapan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

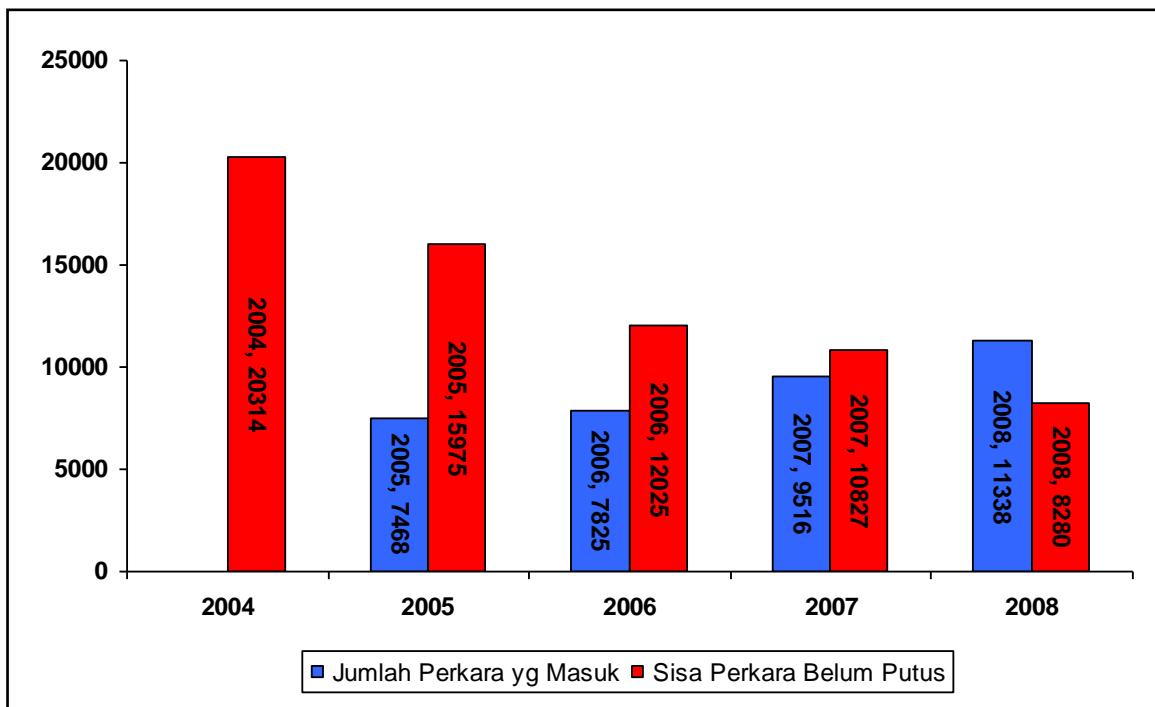
**GAMBAR 2**  
**CAPAIAN INDEKS PERSEPSI KORUPSI INDONESIA**



Sumber: UNDP

Selanjutnya, keberhasilan pembangunan hukum tidak terlepas dari peran lembaga peradilan. Penanganan perkara di 4 lingkungan peradilan, yaitu lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara, menunjukkan kinerja yang meningkat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Jika dibandingkan antara tahun 2005 dengan tahun 2008, perkara yang masuk ke Mahkamah Agung meningkat sebesar 51% (lihat Gambar 3). Dari sisi perkara yang belum diputus, efektivitas kinerja MA juga menunjukkan peningkatan dengan menurunnya jumlah sisa perkara (*backlog cases*), dimana kondisi sisa perkara pada tahun 2004 sebanyak 20.314 perkara, menurun menjadi 8.280 perkara di tahun 2008.

**GAMBAR 3**  
**GRAFIK PERBANDINGAN**  
**PERKARA MASUK DENGAN SISA PERKARA**



Dalam upaya peningkatan kesejahteraan, tantangan yang dihadapi oleh pemerintah pada periode 2004--2009 sangat besar. Pada bulan Desember 2004, bencana alam tsunami melanda Aceh, yang diikuti dengan bencana yang terjadi di kepulauan Nias. Di samping itu, goncangan ekonomi global yang berlanjut dengan krisis energi dan pangan pada akhir tahun 2006-2007, telah memberikan tekanan yang kuat terhadap perekonomian Indonesia. Tekanan ini berlanjut dengan terjadinya krisis finansial di Amerika Serikat sejak tahun 2008 yang telah memicu terjadinya krisis ekonomi global yang dicerminkan dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi di berbagai negara.

Dalam memasuki tahun 2009, tekanan tersebut terus diwaspadai karena situasi perekonomian dunia tetap mengandung ketidakpastian yang tinggi. Saat itu, prediksi banyak pihak menyatakan bahwa dampak krisis ekonomi global akan terus berlangsung hingga tahun-tahun mendatang ke seluruh dunia. Indonesia tergolong sebagai sedikit negara di dunia yang diyakini oleh beberapa lembaga internasional akan mampu mengarungi krisis global ini dengan relatif baik. Hal ini terbukti dari perekonomian Indonesia yang masih meningkat secara positif, baik dari ketika dimulainya krisis pada tahun 2008 maupun selama tahun 2009.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009, telah

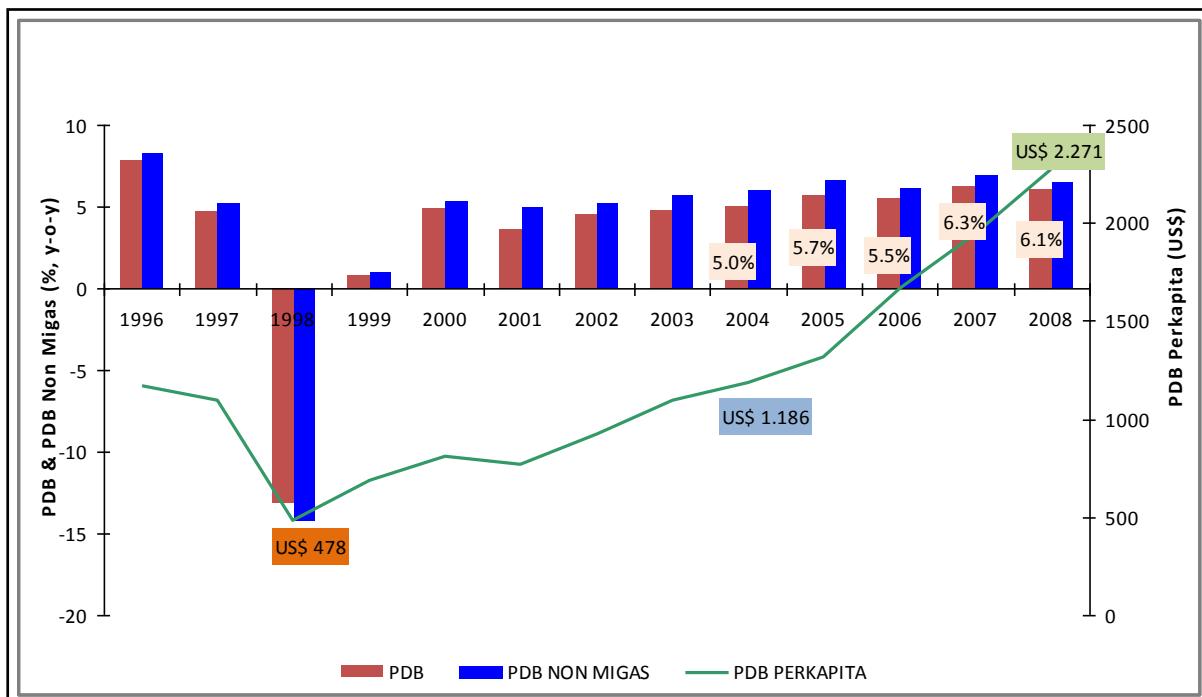


PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

ditetapkan tiga strategi pembangunan ekonomi, yaitu *pro growth, pro jobs dan pro poor*. Melalui strategi *pro growth*, terjadi percepatan laju pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan perbaikan distribusi pendapatan (*growth with equity*). Percepatan laju pertumbuhan ini ditandai dengan makin banyaknya kesempatan kerja tercipta sehingga semakin banyak keluarga Indonesia yang dapat dilepaskan dari perangkap kemiskinan, serta memperkuat perekonomian untuk menghadapi berbagai goncangan. Hal ini menunjukkan bahwa strategi *pro growth, pro jobs, dan pro poor*, telah memberikan arah pembangunan yang benar dan hasil yang diinginkan.

Secara lebih terperinci, dalam agenda *pro growth*, terjadi percepatan laju pertumbuhan ekonomi. Dalam periode 1997-1999, krisis ekonomi telah menyebabkan volume perekonomian menyusut rata-rata minus 2,9 persen per tahun. Sementara itu, dalam periode 2000-2004, pada masa pemulihan ekonomi, perekonomian kembali tumbuh positif, yaitu 4,5 persen. Sementara itu, dalam periode 2005-2008, perekonomian tumbuh rata-rata 6 persen. Bahkan, jika sektor migas dikeluarkan laju pertumbuhan sektor nonmigas sudah mendekati 7 persen per tahun yaitu 6,6 persen (2005-2008) jika dibandingkan dengan 5,4 persen dalam periode 2000-2004. Pada tahun 2009, sampai dengan triwulan III pertumbuhan ekonomi mencapai rata-rata sekitar 4,2 persen sehingga secara keseluruhan tahun 2009 pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai 4,3 persen. Perkembangan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih dikategorikan sebagai negara yang memiliki kinerja perekonomian yang baik mengingat banyaknya Negara yang pertumbuhan ekonominya negatif.

**GAMBAR 4**  
**PERKEMBANGAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PDB PERKAPITA**



Percepatan pertumbuhan ekonomi ini tercermin pula dalam peningkatan pendapatan per kapita masyarakat Indonesia. Pendapatan per kapita masyarakat Indonesia telah mencapai USD 2.271 pada akhir 2008, naik hampir dua kali lipat jika dibandingkan dengan pendapatan per kapita tahun 2004, yaitu sebesar USD 1.186. Dengan kenaikan ini, Indonesia telah masuk ke dalam kelompok negara berpendapatan menengah bawah (*lower middle income countries*)

Percepatan pertumbuhan ekonomi tersebut telah menurunkan tingkat kemiskinan. Tingkat kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan, telah menurun menjadi 14,1 persen (atau 32,5 juta orang) pada Maret 2009, jika dibandingkan dengan 16,7 persen (36,1 juta orang) pada tahun 2004. Keberhasilan penanggulangan kemiskinan selain merupakan hasil dari tercapainya laju pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi juga didukung oleh berbagai program intervensi yang merupakan bagian dari pemenuhan hak dasar rakyat, yang terus dilakukan untuk memberikan akses yang lebih luas kepada kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah agar dapat menikmati lajunya percepatan pertumbuhan ekonomi. Langkah ini ditempuh dengan antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

**Pertama** adalah melalui subsidi (seperti subsidi pangan, pupuk, benih, dan kredit program) serta dalam bentuk bantuan sosial (Bansos), seperti Program Jaminan

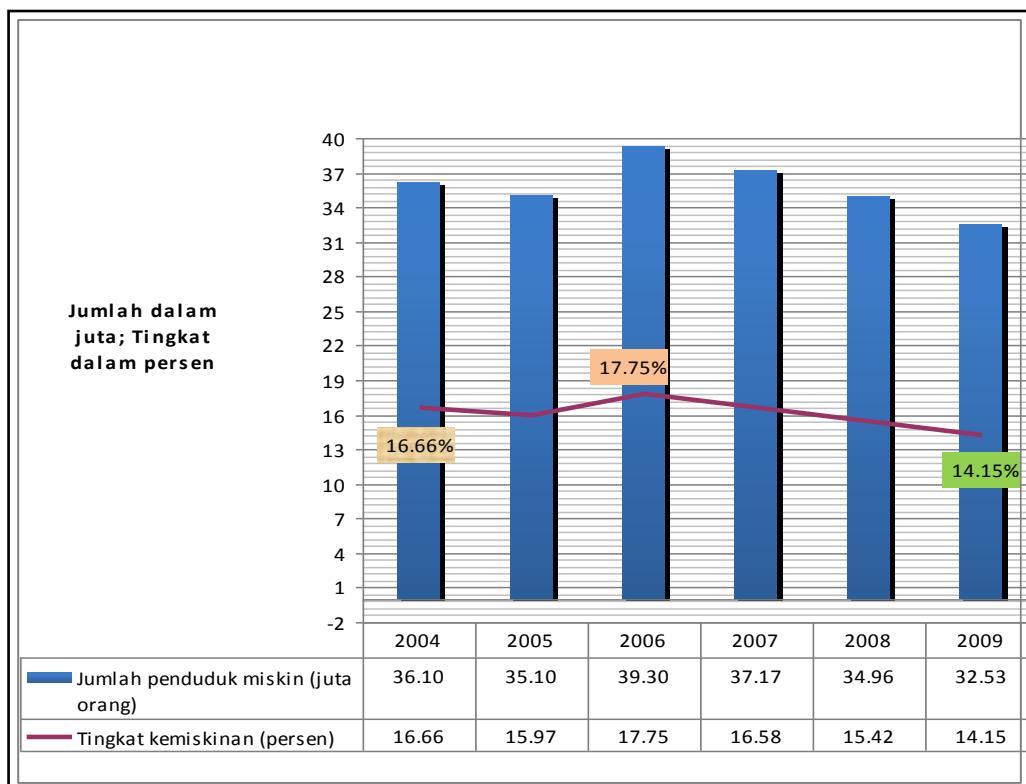


PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Bantuan Operasi Sekolah (BOS), dan Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini dilaksanakan untuk membantu pemenuhan kebutuhan dasar yang tidak atau belum mampu dipenuhi oleh kemampuan sendiri. Di samping itu, telah dialokasikan juga anggaran berupa Bantuan Langsung Masyarakat sebagai bagian Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, dan dana penjaminan kredit/pembangunan bagi usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) dan koperasi melalui Program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

**Kedua** adalah mempermudah dan memperluas kesempatan usaha dengan menghilangkan berbagai pungutan yang muncul di berbagai daerah akibat euforia reformasi dan desentralisasi yang telah banyak membebani usaha mikro, kecil dan menengah. Berbagai upaya telah ditempuh untuk memperbaiki iklim berusaha ini. Salah satunya adalah dengan melakukan amendemen UU Pajak dan Retribusi Daerah untuk mendisiplinkan pemerintah daerah dalam menetapkan pungutan baru dengan tidak menghilangkan semangat desentralisasi fiskal. Langkah lainnya, ditempuh dengan menerbitkan Inpres No 6 /2007 dan Inpres 5 /2008 yang memuat program aksi yang kongkrit dalam memperbaiki iklim berusaha bagi UMKM.

**GAMBAR 5**  
**PERKEMBANGAN JUMLAH PENDUDUK MISKIN DAN TINGKAT KEMISKINAN**

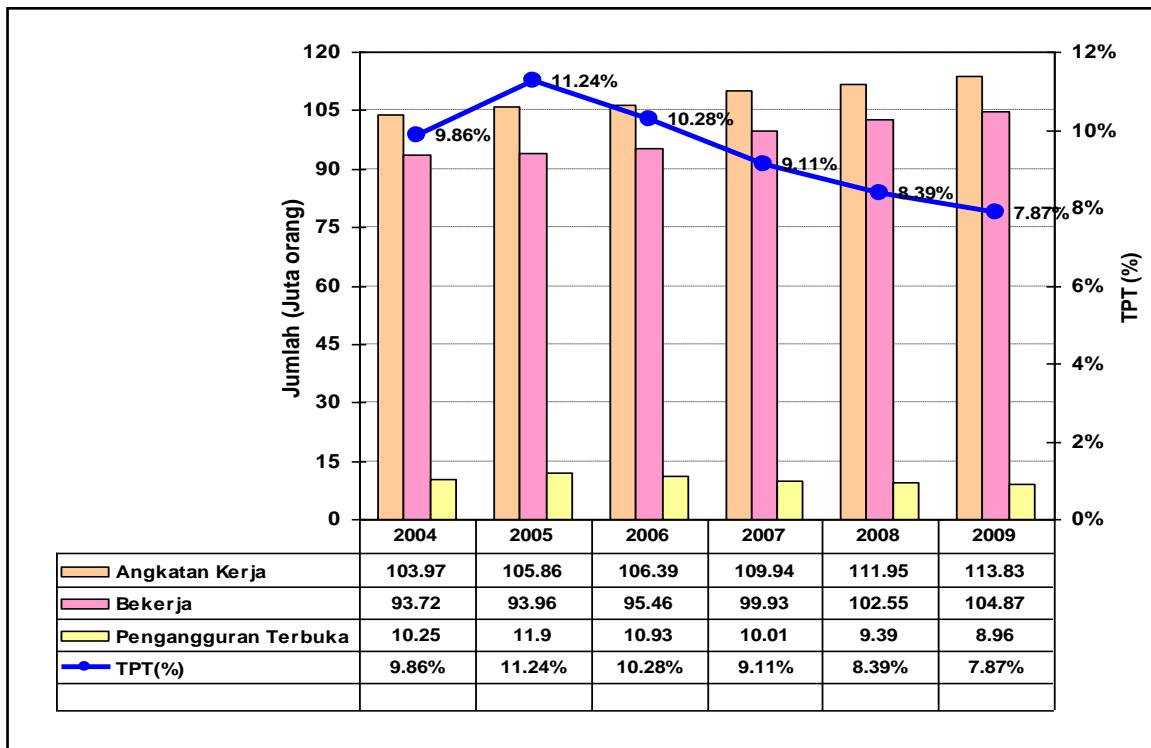


Perubahan yang berarti terlihat sebagai akibat dari strategi *pro jobs*. Pada periode tahun 2001-2004, pertambahan angkatan kerja baru sebesar 1,72 juta per tahun, sementara kesempatan kerja yang mampu tercipta hanya 970 ribu per tahun. Pada periode 2005-2009, angkatan kerja bertambah 1,99 juta per tahun sementara kesempatan kerja yang tercipta sebesar 2,73 juta per tahun. Dengan demikian, jumlah penganggur dapat diturunkan dari 10,25 juta tahun 2004 menjadi 8,96 juta tahun 2009, dan tingkat pengangguran terbuka menurun dari 9,86% menjadi 7,87%. Kesempatan kerja tetap tercipta, meskipun terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dimulai sejak akhir tahun 2008, ketika jumlah perusahaan yang mengajukan permohonan PHK cukup banyak bersamaan dengan berakhirnya kontrak produksi khususnya untuk barang tujuan ekspor. Pekerja formal bertambah 3,26 juta dan informal 7,65 juta. Perpindahan 'surplus tenaga kerja' keluar dari lapangan pekerjaan informal ke pekerjaan-pekerjaan formal yang lebih produktif dan memberikan upah yang lebih tinggi merupakan tujuan utama dari siklus pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**GAMBAR 6**  
**JUMLAH ANGKATAN KERJA, BEKERJA, DAN PENGANGGURAN TERBUKA**



Di bidang sarana dan prasarana, beberapa infrastruktur yang cukup strategis telah berhasil diselesaikan pembangunannya, antara lain penyelesaian pembangunan Bandara Hasanuddin Makassar, pembangunan Jembatan Suramadu dan pengembangan terhadap 11 pelabuhan peti kemas (*full container terminal*) untuk menunjang eksport-impor, meliputi Pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Perak, Belawan, Tanjung Emas, Panjang, Makasar, Banjarmasin, Pontianak, Bitung, Samarinda, dan Palembang. Di samping itu, telah dibangun 11 buah waduk yang mampu menampung sekitar 79 juta meter kubik untuk memenuhi kebutuhan air irigasi, rumah tangga, industri serta keperluan pembangkit listrik. Program percepatan pembangunan PLTU 10.000 MW, secara signifikan telah meningkatkan rasio elektrifikasi dan rasio desa berlistrik masing-masing sekitar 66,3 persen dan 96,8 persen dengan tingkat *losses* sekitar 11,5 persen. Program tersebut dimaksudkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap BBM sekaligus menyehatkan bauran energi di pembangkit tenaga listrik. Sementara itu, pengembangan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi telah mampu meningkatkan pertumbuhan teledensitas *fixed line* (termasuk *fixed wireless access* atau FWA) hampir 140 persen, yaitu dari 4,79 persen menjadi 11,49 persen, pertumbuhan seluler sebesar 340 persen, dan pertumbuhan pengguna internet sebesar 101 persen.

Pemerintah juga mendorong partisipasi swasta, masyarakat, dan pemerintah

daerah dalam pelayanan dan penyelenggaraan sarana dan prasarana. Skema pembangunan sarana dan prasarana melalui Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 67 Tahun 2005 terus-menerus dilakukan penyempurnaannya. Revisi terhadap Perpres tersebut disertai pula dengan pedoman teknis pelaksanaan KPS untuk tingkat pusat dan daerah. Pemerintah juga telah meluncurkan Paket Kebijakan Ekonomi 2008-2009 dalam Inpres No 5 tahun 2008 tentang Fokus Pembangunan Ekonomi Tahun 2008-2009 sebagai kelanjutan dari berbagai kebijakan sebelumnya. Upaya tersebut dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang menghambat investasi di sektor sarana dan prasarana, termasuk persoalan yang terkait dengan partisipasi sektor swasta. Elemen penting dari paket kebijakan tersebut adalah kerangka kerja bagi KPS, termasuk di dalamnya mekanisme penyiapan proyek, proses tender yang transparan dan akuntabel, alokasi risiko antara investor dan Pemerintah.

Kemajuan yang berarti juga terjadi dalam produksi pangan. Produksi semua komoditas pangan meningkat tajam, khususnya dalam dua tahun terakhir (lihat Gambar 7). Produksi beras tahun 2008 sebesar 59,9 juta ton adalah tertinggi jika dibandingkan dengan jumlah produksi yang bisa dihasilkan selama ini. Peningkatan produksi ini bukan hanya melepaskan bangsa Indonesia dari krisis pangan, tetapi juga meringankan beban bangsa lain dalam mengatasi krisis pasokan beras di pasar global. Indonesia sebelumnya merupakan salah satu importir beras dunia yang cukup besar, akibatnya setiap Indonesia mengimpor beras dalam jumlah besar, harga beras dunia akan meningkat USD 20-50/ton.

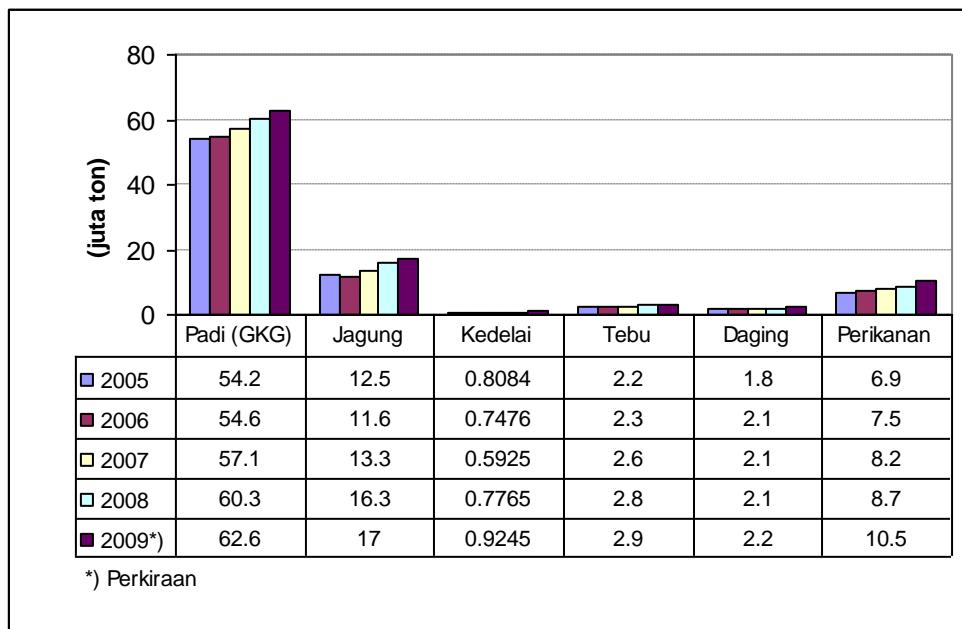
Keberhasilan meningkatkan produksi beras sekaligus mengendalikan harganya, telah menjadikan Indonesia mampu mengatasi krisis pangan. Keberhasilan ini diakui dan dihargai oleh bangsa-bangsa lain. Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pangan yang diadakan di Roma, bulan Juni 2008, Organisasi Pangan Dunia (FAO) memuji keberhasilan tersebut. FAO bahkan menyatakan bahwa keberhasilan itu layak dijadikan model bagi negara lain dalam mengatasi krisis pangan global. Keberhasilan dalam meningkatkan produksi beras ini harus terus dilanjutkan.

Kecenderungan peningkatan produksi pangan juga terjadi pada komoditas lain seperti gula, kedele dan jagung. Keberhasilan peningkatan pangan melalui peningkatan produksi akan menguntungkan produsen dan konsumen. Produsen akan mengalami peningkatan kesejahteraan, sementara konsumen memperoleh keuntungan dalam bentuk tercapainya stabilitas harga. Karena lebih dari separuh keluarga miskin menggantungkan sumber penghasilannya dari kegiatan pertanian dan pedesaan, manfaat perbaikan produksi di bidang pangan ini akan lebih banyak dinikmati oleh keluarga miskin. Kondisi ini pada gilirannya mempercepat penurunan tingkat kemiskinan di daerah perdesaan seperti yang pernah terjadi pada periode 1970an dan 1980an.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

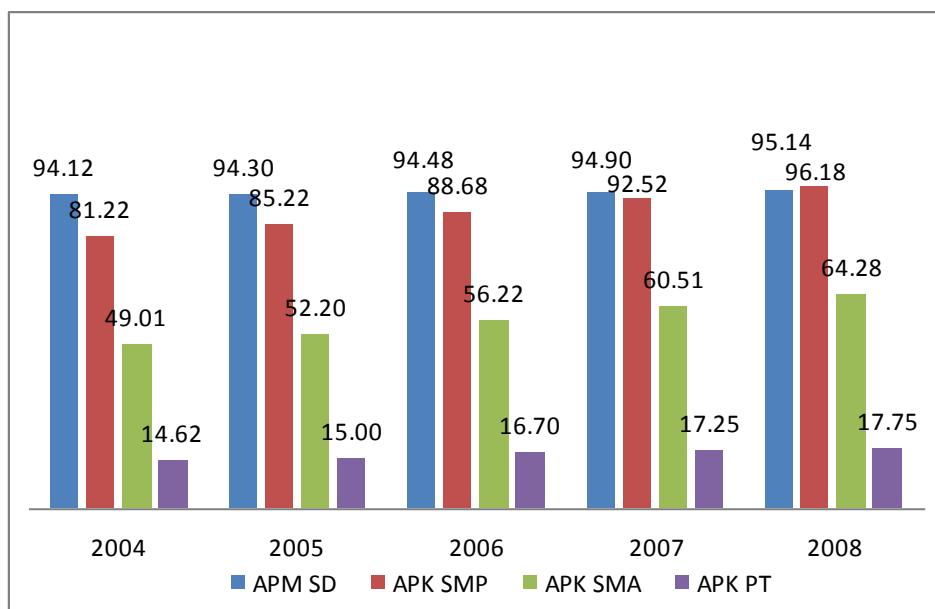
**GAMBAR 7**  
**PERKEMBANGAN PRODUKSI PANGAN**



Dalam bidang pendidikan, peningkatan anggaran secara dramatis telah dilakukan. Jika pada tahun 2005 anggaran pendidikan hanya Rp 78,5 triliun, maka sesuai dengan amanat konstitusi anggaran pendidikan telah berhasil ditingkatkan dua kali lipat, menjadi Rp 154,2 triliun pada 2008. Pada tahun 2009, amanat konstitusi telah berhasil dipenuhi dengan meningkatkan anggaran pendidikan menjadi Rp 207,4 triliun atau 20 % dari APBN. Peningkatan anggaran pendidikan dapat memperbaiki akses bidang pendidikan dan kualitas pendidikan.

Kemajuan juga terlihat dari peningkatan angka tingkat partisipasi kasar tingkat SMP/MTS/SMPLB/Paket B dan SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C yang meningkat dari 85,22 persen dan 52,20 persen (2005) menjadi 99,18 persen dan 64,28 persen (2008). Peningkatan angka tingkat partisipasi kasar ini adalah berkat dari berjalannya Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dimulai sejak tahun 2005. Program ini memungkinkan biaya sekolah yang harus dibayar oleh keluarga Indonesia secara efektif dapat ditekan hingga tingkat yang minimum dan dengan dukungan dari APBD, makin banyak daerah yang mampu membebaskan biaya pendidikannya. Dari sisi permintaan, pemerintah telah merintis skema insentif baru untuk mendorong keluarga miskin mengirimkan anaknya ke sekolah melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dengan memberikan bantuan tunai bersyarat. Kombinasi program BOS yang bersifat universal dari sisi penawaran dan program PKH yang terbatas, diharapkan bukan hanya mampu memutuskan rantai kemiskinan antargenerasi, tetapi juga memperkuat daya saing bangsa dalam persaingan global yang makin ketat.

**GAMBAR 8**  
**PERKEMBANGAN ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) DAN  
 ANGKA PERTISIPASI KASAR (APK)**



Keberhasilan program pendidikan sangat bergantung pada pasokan dan kualitas guru dan dosen. Ekspansi anggaran bidang pendidikan di samping digunakan untuk membantu pemerintah daerah dalam merehabilitasi gedung sekolah – yang dibangun tahun 1970-an dan 1980-an – serta penambahan ruang kelas dan unit sekolah baru, digunakan pula untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan dosen.

Peningkatan kualitas pendidikan dilakukan juga dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengembangkan sekolah dan universitas berkualitas internasional. Dimulai pada tingkat SMA pada sekolah negeri, pemerintah telah secara bertahap meningkatkan kualitasnya menjadi bertaraf internasional dengan melakukan komputerisasi dan meningkatkan penguasaan bahasa asing yang disertai dengan akses internasional.

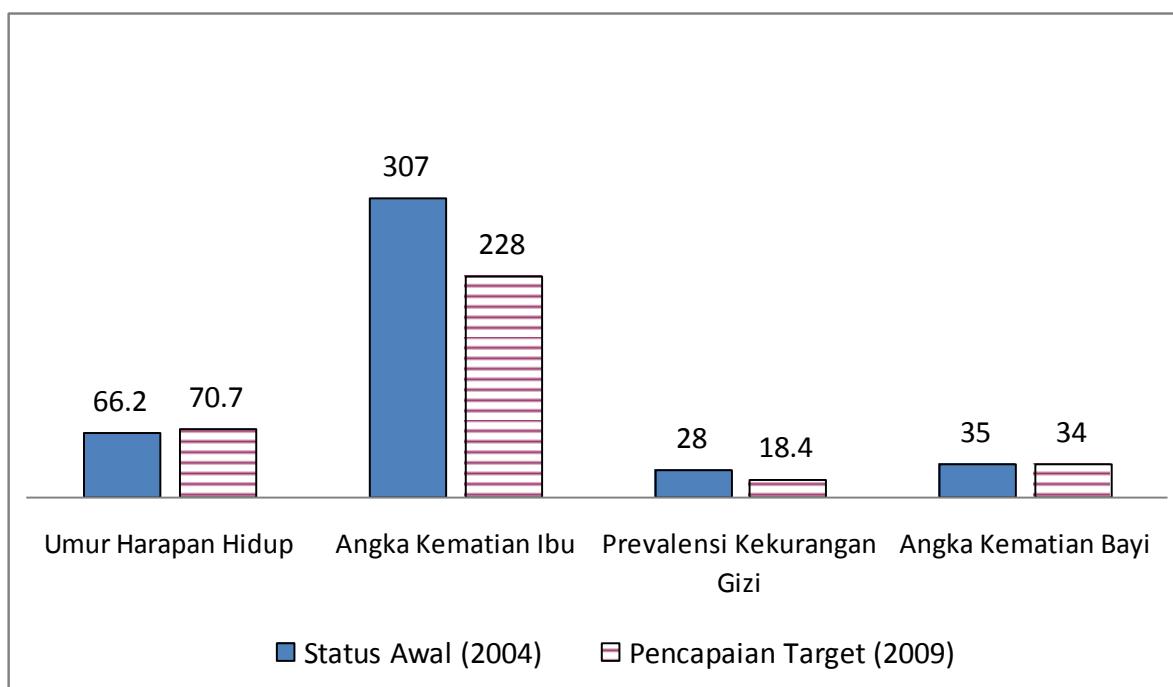
Selain dalam bidang pendidikan, pelayanan di bidang kesehatan juga terus ditingkatkan. Jika pada tahun 2005 anggaran kesehatan hanya mencapai Rp 7,7 triliun maka pada tahun 2008 anggaran kesehatan menjadi sekitar Rp 17,9 triliun. Sebagian besar tambahan anggaran kesehatan itu digunakan untuk menggulirkan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Posyandu yang dibiayai antara lain melalui Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Masyarakat kurang mampu (Jamkesmas). Program ini pada tahun 2008 berhasil melayani 76,4 juta jiwa. Untuk lebih meningkatkan keterjangkauan masyarakat terhadap obat, harga obat generik telah diturunkan secara substansial dan terus menerus. Sebagian dari anggaran kesehatan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

yang terus meningkat, digunakan untuk merekrut tenaga dokter dan paramedis baru serta membantu pemerintah daerah dalam melakukan rehabilitasi puskesmas dan membangun rumah sakit baru di berbagai daerah. Sebagian dana kesehatan juga telah digunakan untuk program Revitalisasi Keluarga Berencana yang sempat terlantar pada awal reformasi dan desentralisasi. Ekspansi sektor kesehatan sebagian telah memberikan hasil yang nyata, seperti penurunan tingkat prevalensi anak gizi buruk.

**GAMBAR 9**  
**STATUS KESEHATAN DAN GIZI MASYARAKAT**



Dalam kaitannya dengan upaya menghadapi dan mengatasi krisis ekonomi global, hingga saat ini Indonesia relatif lebih siap jika dibandingkan dengan banyak negara lain. Sektor keuangan jauh lebih sehat jika dibandingkan dengan keadaan sebelum krisis ekonomi 1997/1998. Kredit bermasalah pada akhir September 2009 hanya sebesar 3,8 persen, jauh di bawah 35 persen pada saat menjelang krisis 1997/1998. Fungsi supervisi perbankan dan sektor keuangan berjalan semakin baik. Resiko ekonomi makro juga cenderung menurun, antara lain dapat dilihat dari rasio utang pemerintah termasuk utang luar negeri. Keberhasilan menghadapi krisis ekonomi global ini menyebabkan Indonesia menjadi bangsa yang lebih dihargai. Jika di masa lalu, Indonesia selalu mendapat rekomendasi dalam kebijakan mengatasi krisis, kini beberapa negara di dunia meminta rekomendasi dan belajar dari Indonesia tentang cara mengatasi krisis.

Kemajuan-kemajuan yang dicapai diperoleh melalui kebersamaan dan kerja

keras di antara pemerintah, dunia usaha, dan segenap rakyat Indonesia. Salah satu hasilnya adalah dalam peningkatan pengelolaan dan kesadaran pembayaran pajak. Sumber pendanaan pembangunan Pemerintah kini lebih banyak mengandalkan penerimaan pajak dan pembiayaan dari pasar domestik. Konsolidasi fiskal yang dilakukan di masa lalu telah membawa hasil yang memadai, bukan hanya untuk memperkuat fiskal secara berkelanjutan, tetapi juga menciptakan ketersediaan dana pembangunan yang memadai untuk mendorong perekonomian domestik.

Inti dari konsolidasi fiskal terletak pada perbaikan struktur penerimaan negara, peningkatan efektivitas pengeluaran pemerintah baik pusat maupun daerah, serta terkendalinya risiko fiskal terutama menyangkut sisi pembiayaan defisit anggaran. Struktur penerimaan makin sehat dengan meningkatnya peran penerimaan nonmigas, khususnya pajak penghasilan. Jumlah penduduk yang memiliki NPWP telah melebihi 10 juta pada tahun 2008. Peningkatan jumlah wajib pajak di samping meningkatkan penerimaan pajak juga mengurangi risiko dalam penerimaan. Rasio pajak terhadap PDB meningkat dari 12,5 persen pada tahun 2005 menjadi 14,1 persen pada tahun 2008. Peningkatan penerimaan ini merupakan hasil dari reformasi perpajakan secara komprehensif sehingga telah menimbulkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

Dari sisi pengeluaran, belanja negara untuk kebutuhan yang penting bagi pembangunan terus meningkat terutama untuk keperluan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Efektivitas pengeluaran pemerintah makin mendekati tingkat optimal dan makin mengarah pada kegiatan-kegiatan yang penting. Meskipun masih ada pengeluaran yang tidak dapat direalisasikan, namun hal ini sebagian disebabkan oleh efisiensi sebagai hasil sistem pengadaan yang makin baik, antara lain melalui *e-procurement* dapat menghemat pengeluaran hingga 15 persen.

Konsolidasi fiskal telah menghasilkan perbaikan risiko ekonomi makro Indonesia. Rasio utang pemerintah terhadap PDB yang mencapai 56,4 persen pada tahun 2004 secara bertahap menurun menjadi sekitar 30 persen pada tahun 2009. Penurunan rasio ini diikuti pula dengan penurunan jumlah stok utang luar negeri. Pembiayaan defisit anggaran kini lebih mengandalkan pada sumber domestik. Penurunan rasio utang ini, juga lebih baik dibandingkan dengan kecenderungan penurunan rasio utang di negara Asia lainnya. Dengan demikian, proses konsolidasi fiskal ini bisa menjadi motor untuk mempercepat perbaikan peringkat *investment grade* Indonesia dalam 2 tahun mendatang.

### 2.3 Tantangan Pembangunan Nasional

Dalam kurun waktu lima tahun mendatang (2010-2014), tantangan pembangunan tidaklah semakin ringan. Terdapat beberapa tantangan yang dihadapi untuk mencapai perwujudan masyarakat Indonesia yang sejahtera di tengah persaingan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

global yang meningkat.

**Pertama**, capaian laju pertumbuhan ekonomi sekitar 6% selama periode 2004-2008 belum cukup untuk mewujudkan tujuan masyarakat Indonesia yang sejahtera. Masih banyak masyarakat Indonesia yang tertinggal dan tidak dapat menikmati buah dari pertumbuhan ekonomi jika laju pertumbuhan hanya mencapai 6% per tahun. Teknologi yang makin maju telah mengurangi jumlah tenaga kerja dalam kegiatan produksi. Untuk menciptakan pembangunan yang inklusif, pembangunan memerlukan percepatan pertumbuhan ekonomi menuju di atas 6,5 persen per tahun dalam lima tahun mendatang.

**Kedua**, percepatan pertumbuhan ekonomi yang diinginkan adalah pertumbuhan ekonomi yang mengikutsertakan sebanyak mungkin penduduk Indonesia (*inclusive growth*). Hal ini untuk mempercepat penurunan jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan serta memperkuat kapasitas keluarga Indonesia dalam menghadapi berbagai goncangan. Pengurangan kemiskinan tidak sepenuhnya dapat mengandalkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memerlukan berbagai intervensi yang efektif. Pola pertumbuhan yang inklusif memerlukan intervensi pemerintah yang tepat memihak (afirmatif) kepada kelompok yang terpinggirkan, untuk memastikan semua kelompok masyarakat memiliki kapasitas yang memadai dan akses yang sama terhadap kesempatan ekonomi yang muncul. Mengingat peningkatan kapasitas ini memerlukan waktu, maka program afirmatif perlu dilakukan dengan secara konsisten dan kontinu dengan sasaran yang terarah, jelas, dan tepat.

**Ketiga**, untuk mengurangi kesenjangan antardaerah, pertumbuhan ekonomi harus tersebar ke seluruh wilayah Indonesia, terutama daerah-daerah yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi. Pertumbuhan di seluruh wilayah perlu memperhatikan keterkaitan terhadap pelaku dan sumber daya lokal sehingga masyarakat lebih banyak berperan di dalamnya dan ikut menikmati hasil pertumbuhan, sekaligus nilai tambah yang dinikmati di daerah-daerah.

**Keempat**, untuk mengurangi kesenjangan antarpelaku usaha, pertumbuhan ekonomi yang tercipta harus dapat memberikan kesempatan kerja seluas-luasnya dan lebih merata ke sektor-sektor pembangunan, yang banyak menyediakan lapangan kerja. Pertumbuhan ekonomi melalui investasi, diharapkan dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Usaha mikro, kecil, dan menengah, diharapkan juga dapat tumbuh dan berkembang dengan sehat agar dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing yang lebih baik. Harapan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dapat dicapai jika para pekerja tersebut dilengkapi dengan keahlian, kompetensi, kemampuan untuk bekerja (*employable*) dan disiapkan untuk menghadapi persaingan global dalam pasar kerja. Pendidikan saja tidak cukup, karena banyak para pekerja masih belum siap untuk memasuki pasar kerja.

**Kelima**, pertumbuhan ekonomi tidak boleh merusak lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan hidup akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi tidak

berkelanjutan. Pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang tidak tepat akan mengakibatkan sumber daya menyusut lebih cepat dan dengan mudah mengembalikan krisis pangan dan energi seperti yang terjadi tahun 2007-2008 yang lalu. Kerusakan lingkungan hidup mengakibatkan biaya hidup meningkat yang pada gilirannya menurunkan kualitas hidup. Kerusakan lingkungan hidup juga diduga menjadi salah satu penyebab utama munculnya epidemik dan penyakit saluran pernapasan. Dimensi lingkungan hidup pun makin luas berkaitan dengan perubahan iklim yang mempunyai keterkaitan kuat dengan kerusakan lingkungan hidup dan pembangunan yang tidak ramah lingkungan. Ancaman perubahan iklim ini bukan hanya meningkatkan kemungkinan terjadinya goncangan yang tidak terduga seperti bencana alam, tetapi juga dapat mengancam produktivitas dari sumber daya alam. Jika hal ini terjadi, krisis pangan pun dapat kembali terjadi setiap saat.

**Keenam**, pembangunan infrastruktur makin penting jika dilihat dari berbagai dimensi. Percepatan pertumbuhan ekonomi jelas membutuhkan tambahan kuantitas dan perbaikan kualitas infrastruktur. Revitalisasi pertanian tidak mungkin berhasil tanpa infrastruktur yang memadai, mengingat biaya pemasaran makin dominan dalam struktur biaya akhir suatu komoditas pertanian. Keluarga miskin tidak akan mampu ikut dalam gelombang pertumbuhan ekonomi jika terisolasi akibat ketiadaan infrastruktur. Masalah lingkungan hidup seperti polusi air, udara dan tanah, atau banjir di lingkungan perkotaan memiliki keterkaitan yang kuat dengan ketiadaan infrastruktur yang memadai. Walaupun pengeluaran dalam bidang infrastruktur telah ditingkatkan, kesenjangan infrastruktur masih terasa, baik di tingkat nasional maupun antardaerah. Karena itu, pembangunan infrastruktur dasar harus menjadi prioritas pembangunan.

**Ketujuh**, sumber pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan harus berasal dari peningkatan produktivitas. Peningkatan produktivitas sangat ditentukan oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia, utamanya dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sumber daya manusia, bukan hanya sebagai faktor produksi melainkan ikut berfungsi mengkoordinasi faktor produksi lain dalam kegiatan ekonomi. Karenanya, peningkatan kualitas manusia Indonesia, khususnya dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, menjadi faktor penentu dalam mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Peningkatan sumber daya manusia di Indonesia dalam lima tahun ke depan harus terfokus pada peningkatan kualitas manusia Indonesia secara keseluruhan dan memperbaiki kesenjangan kualitas manusia, baik dilihat dari status golongan pendapatan, gender maupun antardaerah. Hanya dengan intervensi pemerintah, kesenjangan kualitas sumber daya manusia dapat teratasi.

**Kedelapan**, keberhasilan proses pembangunan ekonomi tergantung pada kualitas birokrasi. Pada saat ini kualitas birokrasi Indonesia perlu ditingkatkan untuk menghadapi persaingan di era globalisasi. Ekonomi biaya tinggi yang terjadi hingga dewasa ini tidak terlepas dari rendahnya kualitas birokrasi. Oleh karena itu, keberhasilan reformasi birokrasi merupakan kunci utama yang membawa Indonesia



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

dalam kancang persaingan di pasar global dan meningkatkan daya saing nasional.

**Kesembilan**, demokrasi telah diputuskan sebagai dasar hidup berbangsa. Dewasa ini pelaksanaan demokrasi telah mengalami kemajuan. Harus diakui, sebagian masih demokrasi prosedural. Masih banyak esensi demokrasi yang substansial yang belum mampu dijalankan sepenuhnya. Oleh karena itu, konsolidasi demokrasi harus terus diperkuat. Selanjutnya, terkait erat dengan demokrasi adalah desentralisasi. Desentralisasi sejak hampir 10 tahun lalu telah berhasil dijalankan. Proses transformasi sistem pemerintahan ini belum berjalan sempurna. Pemantapan proses desentralisasi melalui penguatan sinergi pusat-daerah dan antar daerah merupakan agenda penting dalam rangka memperoleh manfaat yang optimal dari integrasi dengan ekonomi global. Dalam kaitan itu, salah satu langkah strategis yang harus dilakukan adalah peningkatan kapasitas pemerintah daerah.

**Kesepuluh**, dalam sistem yang demokratis, hukum harus menjadi panglima. Penegakan hukum secara konsisten, termasuk pemberantasan korupsi, dapat memberikan rasa aman, adil, dan kepastian berusaha. Banyak upaya perbaikan sistem hukum yang sudah dibenahi. Namun, saat ini fungsi hukum untuk menuntun perilaku berkehidupan Bangsa Indonesia sehari-hari masih harus banyak diperbaiki.

## **BAB III**

### **ARAHAN RPJPN 2005-2025**

#### **3.1 Visi dan Misi RPJPN 2005-2025**

Berdasarkan kondisi bangsa Indonesia saat ini, tantangan yang dihadapi dalam 20 tahunan mendatang dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, dan amanat pembangunan yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka **Visi Pembangunan Nasional tahun 2005-2025** adalah:

#### **INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR**

Dengan penjelasan sebagai berikut:

**Mandiri:** Bangsa mandiri adalah bangsa yang mampu mewujudkan kehidupan sejarah dan sederajat dengan bangsa lain yang telah maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri.

**Maju:** Suatu bangsa dikatakan makin maju apabila sumber daya manusianya memiliki kepribadian bangsa, berakhlak mulia, dan berkualitas pendidikan yang tinggi.

**Adil:** Sedangkan Bangsa adil berarti tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antarindividu, gender, maupun wilayah.

**Makmur:** Kemudian Bangsa yang makmur adalah bangsa yang sudah terpenuhi seluruh kebutuhan hidupnya, sehingga dapat memberikan makna dan arti penting bagi bangsa-bangsa lain di dunia.

**Delapan Misi Pembangunan Nasional** adalah sebagai berikut:

1. **Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila** adalah memperkuat jati diri dan karakter bangsa melalui pendidikan yang bertujuan membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antarumat beragama, melaksanakan interaksi antarbudaya, mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan bangsa.
2. **Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing** adalah mengedepankan pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan iptek melalui penelitian;



pengembangan, dan penerapan menuju inovasi secara berkelanjutan; membangun infrastruktur yang maju serta reformasi di bidang hukum dan aparatur negara; dan memperkuat perekonomian domestik berbasis keunggulan setiap wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan termasuk pelayanan jasa dalam negeri.

3. **Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum** adalah memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat peran masyarakat sipil; memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah; menjamin pengembangan media dan kebebasan media dalam mengomunikasikan kepentingan masyarakat; dan melakukan pemberahan struktur hukum dan meningkatkan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil, konsekuensi, tidak diskriminatif, dan memihak rakyat kecil.
4. **Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu** adalah membangun kekuatan TNI hingga melampaui kekuatan esensial minimum serta disegani di kawasan regional dan internasional; memantapkan kemampuan dan meningkatkan profesionalisme Polri agar mampu melindungi dan mengayomi masyarakat; mencegah tindak kejahatan, dan menuntaskan tindakan kriminalitas; membangun kapabilitas lembaga intelijen dan kontra-intelijen negara dalam penciptaan keamanan nasional; serta meningkatkan kesiapan komponen cadangan, komponen pendukung pertahanan dan kontribusi industri pertahanan nasional dalam sistem pertahanan semesta.
5. **Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan** adalah meningkatkan pembangunan daerah; mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang masih lemah; menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara drastis; menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi; serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.
6. **Mewujudkan Indonesia asri dan lestari** adalah memperbaiki pengelolaan pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk pemukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi; meningkatkan pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan; memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan; memberikan

keindahan dan kenyamanan kehidupan; serta meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan.

7. **Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional** adalah menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah agar pembangunan Indonesia berorientasi kelautan; meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan kelautan melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan; mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan kemakmuran; dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.
8. **Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional** adalah memantapkan diplomasi Indonesia dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional; melanjutkan komitmen Indonesia terhadap pembentukan identitas dan pemantapan integrasi internasional dan regional; dan mendorong kerja sama internasional, regional dan bilateral antarmasyarakat, antarkelompok, serta antarlembaga di berbagai bidang.

Strategi untuk melaksanakan Visi dan Misi tersebut dijabarkan secara bertahap dalam periode lima tahunan atau RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah). Masing-masing tahap mempunyai skala prioritas dan strategi pembangunan yang merupakan kesinambungan dari skala prioritas dan strategi pembangunan pada periode-periode sebelumnya.

Tahapan skala prioritas utama dan strategi RPJM secara ringkas adalah sebagai berikut:

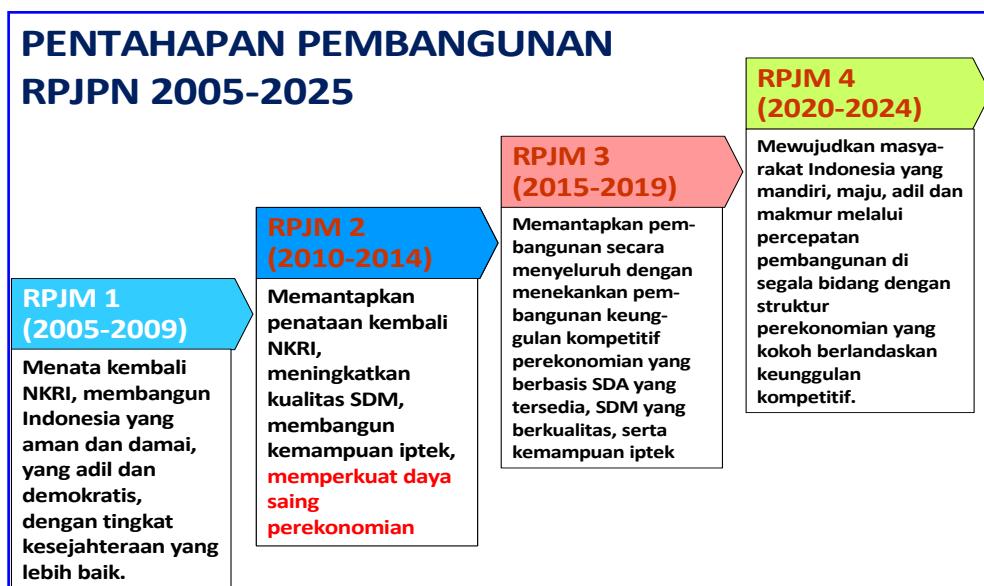
1. **RPJM ke-1 (2005–2009)** diarahkan untuk menata kembali dan membangun Indonesia di segala bidang yang ditujukan untuk menciptakan Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dan yang tingkat kesejahteraan rakyatnya meningkat.
2. **RPJM ke-2 (2010–2014)** ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan iptek serta penguatan daya saing perekonomian.
3. **RPJM ke-3 (2015–2019)** ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan iptek yang terus meningkat.
4. **RPJM ke-4 (2020–2025)** ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

**GAMBAR 10**  
**PENTAHAPAN PEMBANGUNAN DALAM RPJPN 2005-2025**



### 3.2 Arah Pembangunan Jangka Menengah Ke-2 (2010—2014)

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJM ke-1, RPJM ke-2 ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian.

Kondisi aman dan damai di berbagai daerah Indonesia terus membaik dengan meningkatnya kemampuan dasar pertahanan dan keamanan negara yang ditandai dengan peningkatan kemampuan postur dan struktur pertahanan negara serta peningkatan kemampuan lembaga keamanan negara.

Kondisi itu sejalan dengan meningkatnya kesadaran dan penegakan hukum, tercapainya konsolidasi penegakan supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia, serta kelanjutan penataan sistem hukum nasional. Sejalan dengan itu, kehidupan bangsa yang lebih demokratis semakin terwujud ditandai dengan membaiknya pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah serta kuatnya peran masyarakat sipil dan partai politik dalam kehidupan bangsa. Posisi penting Indonesia

sebagai negara demokrasi yang besar makin meningkat dengan keberhasilan diplomasi di fora internasional dalam upaya pemeliharaan keamanan nasional, integritas wilayah, dan pengamanan kekayaan sumber daya alam nasional. Selanjutnya, kualitas pelayanan publik yang lebih murah, cepat, transparan, dan akuntabel makin meningkat yang ditandai dengan terpenuhinya standar pelayanan minimum di semua tingkatan pemerintah.

Kesejahteraan rakyat terus meningkat ditunjukkan oleh membaiknya berbagai indikator pembangunan sumber daya manusia, antara lain meningkatnya pendapatan per kapita; menurunnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas disertai dengan berkembangnya lembaga jaminan sosial; meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat yang didukung dengan pelaksanaan sistem pendidikan nasional yang mantap; meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatnya kesetaraan gender; meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan, dan perlindungan anak; terkendalinya jumlah dan laju pertumbuhan penduduk; menurunnya kesenjangan kesejahteraan antarindividu, antarkelompok masyarakat, dan antardaerah; dipercepatnya pengembangan pusat-pusat pertumbuhan potensial di luar Jawa; serta makin mantapnya nilai-nilai baru yang positif dan produktif dalam rangka memantapkan budaya dan karakter bangsa.

Daya saing perekonomian meningkat melalui penguatan industri manufaktur sejalan dengan penguatan pembangunan pertanian dan peningkatan pembangunan kelautan dan sumber daya alam lainnya sesuai dengan potensi daerah secara terpadu serta meningkatnya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; percepatan pembangunan infrastruktur dengan lebih meningkatkan kerja sama antara pemerintah dan dunia usaha; peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan; serta penataan kelembagaan ekonomi yang mendorong prakarsa masyarakat dalam kegiatan perekonomian. Kondisi itu didukung oleh pengembangan jaringan infrastruktur transportasi, serta pos dan telematika; peningkatan pemanfaatan energi terbarukan, khususnya bioenergi, panas bumi, tenaga air, tenaga angin, dan tenaga surya untuk kelistrikan; serta pengembangan sumber daya air dan pengembangan perumahan dan permukiman. Bersamaan dengan itu, industri kelautan yang meliputi perhubungan laut, industri maritim, perikanan, wisata bahari, energi dan sumber daya mineral dikembangkan secara sinergi, optimal, dan berkelanjutan.

Dalam kerangka pencapaian pembangunan yang berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup makin berkembang melalui penguatan kelembagaan dan peningkatan kesadaran masyarakat yang ditandai dengan berkembangnya proses rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang disertai dengan menguatnya partisipasi aktif masyarakat; terpeliharanya keanekaragaman hayati dan kekhasan sumber daya alam tropis lainnya yang dimanfaatkan untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing bangsa, serta modal pembangunan nasional pada masa yang akan datang; mantapnya kelembagaan dan kapasitas antisipatif serta penanggulangan bencana di setiap tingkatan pemerintahan;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

serta terlaksananya pembangunan kelautan sebagai gerakan yang didukung oleh semua sektor. Kondisi itu didukung dengan meningkatnya kualitas perencanaan tata ruang serta konsistensi pemanfaatan ruang dengan mengintegrasikannya ke dalam dokumen perencanaan pembangunan dan penegakan peraturan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang.

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL 2010--2014**

#### **4.1 Strategi dan Kebijakan Pembangunan Nasional**

##### **4.1.1 Visi Indonesia**

Indonesia memiliki modal yang sangat besar, baik sumber daya alam, letak geografis yang strategis, struktur demografis penduduknya yang ideal, sumber daya kultural yang beragam dan kuat, dan manusia-manusia yang memiliki potensi dan kreativitas yang tidak terbatas. Krisis dan tantangan telah diubah menjadi peluang dan kesempatan. Di bidang energi, Indonesia memiliki berbagai sumber energi mulai dari minyak bumi, gas, batubara dan sumber energi yang terbarukan yang melimpah seperti geothermal dan air. Di samping itu, tersedia lahan yang luas dan subur yang bisa ditanami oleh berbagai komoditas pangan dan pertanian. Penduduk Indonesia memiliki potensi tinggi di berbagai bidang, ilmu pengetahuan dan teknologi, kesenian dan budaya, olahraga, serta kreativitas.

Dengan perkiraan ekonomi dunia akan mengalami pemulihan secara bertahap, serta tidak lagi terjadi gejolak (*shock*) berskala global yang baru, maka kinerja ekonomi nasional juga akan pulih secara bertahap. Kinerja ekonomi Indonesia telah dan terus diupayakan untuk mengatasi dampak krisis dengan memacu potensi ekonomi dalam negeri. Dalam meniti upaya pemulihan ini, fondasi ekonomi dan stabilitas harus tetap dapat dipelihara dan bahkan harus diperkuat. Dengan kondisi itulah, rata-rata pertumbuhan ekonomi dalam lima tahun kedepan akan dapat dijaga pada kisaran 6,3%-6,8%. Jika pemulihan ekonomi global terjadi secara lebih cepat dan tidak terjadi gejolak ekonomi baru, melalui strategi penguatan ekonomi domestik dan penguatan ekspor, maka pertumbuhan ekonomi rata-rata tersebut dapat dipacu lebih tinggi dan pada akhir periode lima tahun ke depan mencapai 7% atau lebih. Dengan pertumbuhan ini, tingkat kemiskinan akan dapat diturunkan menjadi 8%-10% dan tingkat pengangguran terbuka menjadi 5%-6%.

Pengalaman lima tahun terakhir memberikan pelajaran bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, bila disertai pemerataan kesejahteraan melalui kebijakan ekonomi yang berpihak nyata pada kelompok masyarakat yang paling lemah. Kebijakan ekonomi harus dengan pendekatan yang menyeluruh dan seimbang, konsisten dan adil. Kemiskinan terjadi bukan sekadar karena belum terpenuhinya kebutuhan pokok, tetapi kemiskinan terjadi karena tidak adanya hak dan akses untuk memenuhi kebutuhan pokok. Akses tidak hanya mencakup ketersediaan pasokan kebutuhan pokok yang berkualitas sesuai dengan lokasi kebutuhan, tetapi juga keterjangkauan harganya, dan keamanan pasokan sepanjang waktu. Oleh karena itu, rakyat Indonesia akan menjadi sejahtera bila hak dan aksesnya



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

untuk memenuhi kebutuhan dasarnya terjamin.

Mekanisme pasar dan globalisasi tidak dapat diandalkan untuk secara otomatis menyejahterakan rakyat. Bahkan, mekanisme pasar yang liberal tanpa batas telah membawa krisis keuangan global yang berdampak luas dan dapat menyengsarakan masyarakat dunia. Peranan pemerintah yang kuat, cerdas, bersih, dan efisien sangat penting dalam melindungi kelompok masyarakat yang rentan, dan menjaga kepentingan negara dan rakyat dari eksploitasi pasar yang tidak terbatas. Reformasi birokrasi dan peranan pemerintah yang efektif dan bebas dari konflik kepentingan menjadi suatu keharusan dalam menjaga kepentingan nasional dan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi dalam lima tahun terakhir telah mencapai hampir 6%, yang merupakan pertumbuhan tertinggi sejak krisis ekonomi terjadi tahun 1998. Tingkat pengangguran dan kemiskinan juga mengalami penurunan. Namun, tingkat pengangguran dan kemiskinan masih harus terus diturunkan. Saat ini masih banyak masyarakat yang hidup di sekitar dan di bawah garis kemiskinan. Kehidupan mereka masih sangat rentan terhadap berbagai gejolak, terutama gejolak harga pangan. Persoalan kemiskinan adalah persoalan yang harus ditangani secara lebih substantif dan mendasar.

Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan menjamin pemerataan (*growth with equity*) mensyaratkan stabilitas dan dukungan fundamental negara yang kuat. Suatu proses pertumbuhan ekonomi yang mengikutisertakan semua lapisan masyarakat hanya tercapai bila keberpihakan dalam alokasi anggaran belanja pemerintah secara sungguh-sungguh, dirancang untuk membantu mereka keluar dari lingkaran kemiskinan. Perlindungan sosial, juga harus terus diberikan bukan hanya karena merupakan kewajiban konstitusional, namun juga karena pertimbangan strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang produktif, terdidik, terampil, dan sehat. Manusia seperti ini akan menjadi modal berharga bagi bangsa yang kuat, kukuh dan berdaya saing dalam menghadapi berbagai tantangan, baik pada lingkup nasional, regional maupun global.

Perbaikan kualitas sumber daya manusia dalam lima tahun ini telah membawa hasil. Namun, usaha ini harus tetap dilanjutkan. Kita harus menunjukkan proses perjalanan sejarah bangsa ini dalam sebuah kontinuitas proses yang konsisten. Untuk menjamin berlangsungnya proses perbaikan itu, diperlukan sebuah sistem pemerintahan yang demokratis. Sebuah sistem yang memberikan jaminan akses kepada setiap rakyatnya untuk memenuhi kebutuhannya. Perbaikan kesejahteraan rakyat hanya dimungkinkan bila proses *checks and balances* berjalan dengan baik. Kebijakan untuk kesejahteraan rakyat terus menerus diuji melalui proses ini. Tujuannya, untuk menjamin bahwa kebijakan yang diambil memang bermanfaat dan ditujukan sebesar-besarnya untuk mencapai kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, upaya konsolidasi demokrasi harus tetap dilanjutkan. Kebebasan berpendapat harus makin dijamin, dan pilar-pilar demokrasi harus makin ditegakkan yang diimbangi dengan peningkatan

kepatuhan terhadap pranata hukum.

Salah satu elemen penting di dalam demokrasi adalah aspek kesetaraan. Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Amanat konstitusi mewajibkan negara untuk melindungi segenap warga negara tanpa membedakan paham, asal-usul, golongan, dan jender. Sejarah perjalanan bangsa mengajarkan bahwa demokrasi di Indonesia tidak bisa diletakkan dalam kerangka monolitik. Demokrasi Indonesia adalah sebuah sejarah keberagaman. Oleh karena itu, demokrasi menjamin keberagaman ini. Keberagaman yang telah dinyatakan dalam semboyan Bhineka Tunggal Eka tersebut harus terus dijaga dan dijadikan modal dasar kultural yang membuat Indonesia menjadi khas dibandingkan negara-negara lain di dunia.

Indonesia berhasil melalui sebuah proses transformasi politik dari negara otoriter menjadi sebuah negara dengan tatanan politik yang lebih demokratis. Konsolidasi demokrasi telah berhasil dilaksanakan dengan baik, melalui proses pemilihan umum baik di tingkat nasional maupun lokal. Ke depan, berbagai usaha harus dilakukan untuk membawa demokrasi prosedural ini menjadi demokrasi substansial. Upaya penguatan pilar-pilar demokrasi yang dapat sepenuhnya menjamin proses *checks and balances* harus dilakukan agar hak-hak rakyat dapat dijaga.

Di dalam konstitusi Indonesia, dengan tegas dinyatakan prinsip-prinsip pengawasan antarkekuasaan secara timbal balik dan berimbang. Konstitusi juga secara tegas memuat sejumlah pasal yang berisi pengakuan terhadap hak asasi manusia. Sebagai negara hukum yang demokratis, supremasi hukum, pemerintahan yang bertanggung jawab, partisipatif dan terbuka, serta penghargaan terhadap hak asasi manusia, mutlak harus diwujudkan.

Indonesia saat ini telah menjadi sebuah negara dengan tata kelola pemerintah yang lebih baik, lebih bersih dan lebih berwibawa dan bebas dari berbagai kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan. Upaya ini harus terus diperkuat untuk mewujudkan Indonesia yang bersih, berwibawa dan bebas KKN serta memberikan pelayanan publik yang baik, efisien dan murah bagi berbagai pelaku kepentingan, sehingga dihormati oleh dunia internasional.

Memperhatikan uraian di atas dan mencermati tantangan ke depan, maka kerangka Visi Indonesia 2014 adalah :

#### **“TERWUJUDNYA INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN”**

dengan penjelasan sebagai berikut:

**Kesejahteraan Rakyat.** Terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing,



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya bangsa. Tujuan penting ini dikelola melalui kemajuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

**Demokrasi.** Terwujudnya masyarakat, bangsa dan negara yang demokratis, berbudaya, bermartabat dan menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab serta hak asasi manusia.

**Keadilan.** Terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh seluruh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia.

#### 4.1.2 Misi Pembangunan

Keberhasilan penyelenggaraan pembangunan yang telah menuai beragam hasil pada periode 2004-2009, tentu harus terus dipelihara dan ditumbuh-kembangkan. Capaian dan prestasi pembangunan di periode 2004-2009 itu, pada hakekatnya adalah salah satu modal dasar yang harus dilanjutkan untuk meraih capaian dan prestasi pembangunan yang lebih baik lagi, pada periode lima tahun yang akan datang, 2010-2014. Pada periode 2010-2014, bangsa Indonesia harus terus berupaya keras untuk mencapai perbaikan di bidang kesejahteraan rakyat, membangun keadilan, penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, peningkatan kualitas demokrasi, serta menjaga kesatuan dan keamanan negara.

Misi Pembangunan Indonesia 2010-2014 merupakan bagian awal dari proses menuju cita-cita tersebut. Dalam menjalankan misinya, Indonesia tidak dapat terlepas dari pengaruh kondisi regional dan pengaruh global. Krisis dan gejolak harga pangan dan energi serta krisis ekonomi global yang terjadi sejak awal 2008 dan belum pulih sepenuhnya hingga saat ini, telah mempengaruhi kondisi dunia. Ekonomi dunia mengalami kontraksi ekonomi pada tahun 2009, yang disebabkan rusaknya lembaga-lembaga keuangan dunia yang pada akhirnya akan mempengaruhi secara negatif kegiatan ekonomi riel dan perdagangan dunia. Pada akhirnya tingkat kesejahteraan masyarakat dunia akan mengalami penurunan, dan target penurunan kemiskinan global pada 2015 seperti yang tertuang dalam Millenium Development Goals (MDG) juga akan mengalami hambatan.

Meskipun pada tingkat pimpinan dunia terdapat inisiatif untuk mengatasi krisis global, antara lain, yang telah dilakukan oleh forum G-20, namun pemulihan ekonomi global sepenuhnya masih akan memerlukan proses yang cukup panjang. Hal ini disebabkan perbaikan kembali sektor keuangan, memperbaiki regulasi dan pengawasan sektor keuangan, melakukan program counter cyclical melalui stimulus fiskal, dan mencegah proteksionisme dengan terus menjaga arus perdagangan antarnegara membutuhkan koordinasi yang rumit antarnegara, selain juga melalui proses politik di masing-masing negara yang tidak mudah.

Sementara itu, munculnya kesadaran kolektif global mengenai masalah perubahan iklim (climate change) juga akan mempengaruhi strategi pembangunan di semua negara. Setiap negara, baik yang sudah maju maupun yang sedang berkembang memiliki tanggung jawab yang sama meskipun dengan peran serta cara yang berbeda-beda dalam mengatasi masalah perubahan iklim global. Wujud dari makin maraknya kesadaran kolektif global atas dampak dari fenomena perubahan iklim adalah makin mengemukanya strategi pembangunan ekonomi yang harus menempatkan kesadaran akan daya dukung lingkungan alam pada prioritas yang tinggi. Bila hal tersebut tidak dilakukan, rangkaian bencana alam akibat ulah manusia dan dampak industrialisasi akan makin sering terjadi dan dapat membahayakan umat manusia sendiri.

Upaya Indonesia untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat pada periode 2010-2014 masih akan dibayangi oleh kondisi krisis ekonomi global dan agenda perubahan iklim (climate change) tersebut. Indonesia memiliki potensi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,3%-6,8% pada periode 2010-2014 dengan asumsi perekonomian global tidak akan mengalami pemburukan dalam periode 2010, stabilitas sektor keuangan dunia sudah pulih, serta harga komoditas pangan dan energi menyesuaikan secara bertahap dan tidak mengalami gejolak tajam.

Indonesia memiliki potensi geografi yang strategis yang ditopang oleh sumber daya alam yang memadai, warisan luhur budaya yang kuat, dan sumber daya manusia yang besar dan mendapat pendidikan makin baik dari waktu ke waktu. Dalam lima belas tahun mendatang, komposisi penduduk usia produktif masih akan meningkat, yang berarti menjadi tantangan dan sekaligus kesempatan bagi Indonesia untuk melakukan investasi sumber daya manusia yang bermutu dan berkesinambungan untuk menciptakan bangsa yang memiliki daya saing yang makin tinggi.

Bangsa Indonesia saat ini menjadi model transisi demokrasi dunia - yang sebelumnya diragukan keberhasilannya akibat kompleksitas dan heterogenitasnya. Proses desentralisasi sistem pemerintahan yang telah dijalankan dari waktu ke waktu telah menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Demokrasi dan desentralisasi adalah suatu kombinasi yang kompatibel dan dapat menjadi kekuatan yang dahsyat dalam tatanan ekonomi dan politik global. Untuk mewujudkannya diperlukan upaya yang secara konsisten terus membangun lembaga pemerintahan yang kompeten, bersih, dan dapat dipercaya melalui proses reformasi yang konsisten.

Misi pembangunan 2010-2014 adalah rumusan dari usaha-usaha yang diperlukan untuk mencapai visi Indonesia 2014, yaitu terwujudnya Indonesia Sejahtera, Demokratis dan Berkeadilan, namun tidak dapat terlepas dari kondisi dan tantangan lingkungan global dan domestik pada kurun waktu 2010-2014 yang mempengaruhinya. Misi pemerintah dalam periode 2010-2014 diarahkan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera, aman dan damai, serta meletakkan fondasi yang lebih kuat bagi Indonesia yang adil dan demokratis. Usaha-usaha Perwujudan visi Indonesia 2014 akan dijabarkan dalam misi pemerintah tahun 2010-2014 sebagai berikut.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

## Misi 1: Melanjutkan Pembangunan Menuju Indonesia yang Sejahtera

Pembukaan UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa Indonesia yang sejahtera merupakan tujuan akhir dari pembentukan negara Indonesia. Kesejahteraan rakyat tidak hanya diukur secara material, tetapi juga secara rohani yang memungkinkan rakyat Indonesia menjadi manusia yang utuh dalam mengejar cita-cita ideal, dan berpartisipasi dalam proses pembangunan secara kreatif, inovatif, dan konstruktif.

Pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera mengandung pengertian yang dalam dan luas, mencakup keadaan yang mencukupi dan memiliki kemampuan bertahan dalam mengatasi gejolak yang terjadi, baik dari luar maupun dari dalam. Ancaman krisis energi dan pangan yang terjadi pada periode 2005-2008 dengan harga komoditas pangan dan energi mengalami gejolak naik dan turun secara amat tajam dalam kurun waktu yang sangat cepat, telah mengakibatkan banyak rakyat merasa terancam kesejahteraannya meskipun pemerintah telah berupaya melindungi masyarakat melalui kebijakan subsidi pangan dan energi yang sangat besar. Dengan demikian, membangun dan mempertahankan ketahanan pangan (*food security*) dan ketahanan energi (*energy security*) secara berkelanjutan merupakan salah satu elemen penting dalam misi mencapai kesejahteraan rakyat Indonesia.

Sesuai dengan tantangan perubahan iklim yang semakin nyata, pembangunan ekonomi Indonesia harus mengarusutamakan masalah lingkungan di dalam strateginya melalui kebijakan adaptasi dan mitigasi. Kerusakan lingkungan hidup yang telah terjadi terus diperbaiki, melalui kebijakan antara lain: rehabilitasi hutan dan lahan, peningkatan pengelolaan daerah aliran sungai, dan pengembangan energi dan transportasi yang ramah lingkungan, pengendalian emisi gas rumah kaca (GRK) dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Krisis keuangan global yang menghancurkan sendi-sendi perekonomian global, terjadinya gejolak harga pangan dan energi di seluruh dunia, serta makin pentingnya isu perubahan iklim global dalam beberapa tahun ini, akan mengakibatkan tuntutan dan reaksi akan perubahan dasar dalam tatanan ekonomi dunia. Tatanan ekonomi global yang baru harus mengedepankan aspek kemakmuran masyarakat dunia secara bersama, merata, adil dan berkelanjutan. Untuk itu, model pembangunan ekonomi yang tidak memberikan ruang dan peran yang penting serta proporsional bagi munculnya negara-negara berkembang tidak dapat terus dipertahankan. Koreksi terhadap kebebasan pasar yang tanpa batas, tanpa disertai regulasi dan pengawasan yang cukup, untuk menjaga aspek keadilan dan kepentingan masyarakat luas, harus dilakukan. Pasar harus dilindungi dari tindakan dan keputusan pelaku pasar yang sembrono dan tamak yang hanya memperhitungkan keuntungan bisnis pribadi dalam jangka pendek, dengan menggesampingkan azas kehati-hatian, kepatutan, dan keberlanjutan.

Situasi ini mengharuskan Indonesia untuk mampu mengantisipasi dan harus tercermin dalam penetapan misi dan arah kebijakan pembangunan Indonesia, serta

dalam langkah dan peran strategis Indonesia di dunia Internasional. Hal ini untuk menjamin agar Indonesia dapat terus mencapai cita-cita kemandirian dan kemajuan dalam kemakmuran rakyatnya. Keberhasilan bangsa Indonesia dalam menghadapi dan mengatasi krisis ekonomi dan transisi demokrasi yang sangat rumit dalam satu dasawarsa ini, serta kesiapan yang terus ditingkatkan dalam mengelola dampak krisis keuangan global, akan menjamin terpeliharanya momentum perbaikan kesejahteraan rakyat. Keberhasilan ini juga menandai bangkitnya Indonesia kembali dalam kancah internasional serta memperoleh respek dunia karena kebangkitan Indonesia tersebut dibangun atas dasar prinsip-prinsip universal yang mulia, yaitu azas tata kelola yang baik dan bersih (*good governance and clean government*), penghormatan kepada Hak Azasi Manusia, pluralisme, demokrasi, transparansi dan keterbukaan, akuntabilitas, serta berpartisipasi dalam tanggung jawab memelihara keseimbangan lingkungan alam dan keamanan dunia.

Di dalam negeri, tuntutan perbaikan kesejahteraan telah memasuki tahapan baru. Lapangan kerja yang tercipta harus mampu memberikan nilai tambah yang tinggi, baik secara ekonomis maupun harkat hidup manusia (*decent jobs*). Rakyat berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hal ini hanya dapat diciptakan bila ekonomi tumbuh secara cukup tinggi, sehat, dan dibangun di atas prinsip tata kelola yang baik, efisien, dan terus menjaga keadilan.

Kemajuan ekonomi, juga telah mendorong perubahan struktural dalam banyak elemen bangsa Indonesia. Pembangunan ekonomi yang terkonsentrasi di perkotaan, dan mengakibatkan tingginya urbanisasi dari wilayah perdesaan ke wilayah perkotaan serta menyebabkan kesenjangan kesejahteraan antara perdesaan-perkotaan, memerlukan perhatian tidak saja diberikan kepada perkotaan, namun juga perlu diberikan kepada perdesaan dengan menciptakan daya tarik wilayah perdesaan serta keterkaitan pembangunan ekonomi antara desa-kota. Pembangunan perkotaan yang difokuskan kepada sarana prasarana pelayanan publik perkotaan, harus memperhatikan pembangunan potensi sosial budaya heterogen, khususnya di kota-kota metropolitan dan kota besar. Dalam hal keterkaitan desa-kota yang dibutuhkan dalam mengurangi kesenjangan kesejahteraan, maka pembangunan perkotaan harus memperhatikan pembangunan kota-kota menengah dan kota-kota kecil di sekitarnya.

## **Misi 2: Memperkuat Pilar-Pilar Demokrasi**

Indonesia telah tumbuh sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. Proses demokrasi yang berjalan dalam lima tahun terakhir ini menunjukkan proses demokrasi yang makin matang dan makin dewasa. Meskipun demikian, masih diperlukan penyempurnaan struktur politik yang dititikberatkan pada proses pelembagaan demokrasi dengan menata hubungan antara kelembagaan politik dan kelembagaan pertahanan keamanan dalam kehidupan berbangsa. Penyempurnaan struktur politik, juga harus dititik-beratkan pada peningkatan kinerja lembaga-lembaga



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

penyelenggara negara dalam menjalankan kewenangan dan fungsi-fungsi yang diberikan oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Seiring dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, proses demokrasi di berbagai daerah yang ditandai dengan pemilihan langsung kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun walikota oleh rakyat telah dilakukan di seluruh pelosok tanah air. Demokrasi telah berjalan pada arah yang benar. Di era reformasi dan demokratisasi saat ini, penataan proses politik yang dititikberatkan pada pengalokasian/representasi kekuasaan harus terus diwujudkan dengan meningkatkan secara terus menerus kualitas proses dan mekanisme seleksi publik yang lebih terbuka bagi para pejabat politik dan publik serta mewujudkan komitmen politik yang tegas terhadap pentingnya kebebasan media massa serta keleluasaan berserikat, berkumpul, dan berpendapat setiap warga negara berdasarkan aspirasi politiknya masing-masing.

Pengembangan budaya politik yang dititikberatkan pada penanaman nilai-nilai demokratis terus diupayakan melalui penciptaan kesadaran budaya dan penanaman nilai-nilai politik demokratis, terutama penghormatan nilai-nilai HAM, nilai-nilai persamaan, anti-kekerasan, serta nilai-nilai toleransi, melalui berbagai wacana dan media serta upaya mewujudkan berbagai wacana dialog bagi peningkatan kesadaran mengenai pentingnya memelihara persatuan bangsa.

Penguatan pilar-pilar demokrasi yang sehat, harus terus dibangun menuju demokrasi yang lebih matang dan dewasa. Perbedaan dan benturan kepentingan serta sikap kritis berbagai pihak terhadap pemerintah, merupakan realitas kehidupan demokrasi dan merupakan hak politik yang harus dihormati. Yang penting, semua itu harus tetap berada dalam bingkai konstitusi, aturan main dan etika yang harus sama-sama dijunjung tinggi sehingga stabilitas yang dinamis dan menampung berbagai perbedaan aspirasi, tetap dapat dijaga bersama. Karena itulah, mewujudkan masyarakat yang demokratis dengan tetap berlandaskan pada aturan hukum terus dibangun melalui pemantapan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat peran masyarakat sipil; memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah; menjamin pengembangan media dan kebebasan media dalam mengomunikasikan kepentingan masyarakat; dan melakukan pembenahan struktur hukum dan meningkatkan budaya hukum serta menegakkan hukum secara adil, konsekuensi, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil.

### **Misi 3: Memperkuat Dimensi Keadilan di Semua Bidang**

Pembangunan yang adil dan merata, serta dapat dinikmati oleh seluruh komponen bangsa di berbagai wilayah Indonesia akan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan, mengurangi gangguan keamanan, serta menghapuskan potensi konflik sosial untuk tercapainya Indonesia yang maju, mandiri dan adil.

Percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh, perlu didorong sehingga dapat melahirkan rasa keadilan bagi masyarakat di berbagai daerah dengan mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal di sekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang sinergis, tanpa mempertimbangkan batas wilayah administrasi, tetapi lebih ditekankan pada pertimbangan keterkaitan mata-rantai proses industri dan distribusi. Upaya itu dapat dilakukan melalui pengembangan produk unggulan daerah, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerja sama antarsektor, antarpemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di daerah.

Pendekatan pembangunan ke depan harus dilakukan dengan mengedepankan rasa keadilan dan pemerataan, selain dengan pemberdayaan masyarakat secara langsung melalui skema pemberian dana alokasi khusus, termasuk jaminan pelayanan publik dan keperintisan.

Wilayah-wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar perlu dikembangkan dengan mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi *inward looking* menjadi *outward looking* sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga. Pendekatan pembangunan yang dilakukan, selain menggunakan pendekatan yang bersifat keamanan, juga diperlukan pendekatan kesejahteraan, keadilan, dan pemerataan. Perhatian khusus diberikan bagi pengembangan pulau-pulau kecil di perbatasan yang selama ini luput dari perhatian .

Keadilan dalam pembangunan, juga perlu ditunjukkan dengan pembangunan yang merata di semua bidang, baik pembangunan antara kota-kota metropolitan, besar, menengah, dan kecil yang diseimbangkan pertumbuhannya baik dengan mengacu pada sistem pembangunan perkotaan nasional maupun pembangunan di berbagai bidang yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan rakyat. Keadilan dalam pemerataan pembangunan diperlukan untuk mencegah terjadinya pertumbuhan fisik kota yang tidak terkendali serta untuk mengendalikan arus migrasi langsung dari desa ke kota-kota besar dan metropolitan, dengan cara menciptakan kesempatan kerja dan peluang usaha di kota-kota menengah dan kecil, terutama di luar Pulau Jawa. Oleh karena itu, harus dilakukan peningkatan keterkaitan kegiatan ekonomi sejak tahap awal.

Dalam kaitan itu, percepatan pembangunan kota-kota kecil dan menengah yang telah berjalan selama ini harus terus ditingkatkan, terutama di luar Pulau Jawa, sehingga diharapkan dapat menjalankan perannya sebagai penggerak pembangunan wilayah-wilayah di sekitarnya dan melayani kebutuhan warga kotanya. Pendekatan pembangunan yang perlu dilakukan, antara lain, dengan memenuhi kebutuhan pelayanan dasar perkotaan sesuai dengan tipologi kota masing-masing.

Di sisi lain, pembangunan perdesaan harus terus didorong melalui pengembangan agroindustri padat pekerja, terutama bagi kawasan yang berbasis



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

pertanian dan kelautan; peningkatan kapasitas sumber daya manusia di perdesaan khususnya dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna; pengembangan jaringan infrastruktur penunjang kegiatan produksi di kawasan perdesaan dan kota-kota kecil terdekat dalam upaya menciptakan keterkaitan fisik, sosial, dan ekonomi yang saling melengkapi dan saling menguntungkan; peningkatan akses informasi dan pemasaran, lembaga keuangan, kesempatan kerja, dan teknologi; pengembangan *social capital* dan *human capital* yang belum tergali potensinya sehingga kawasan perdesaan tidak semata-mata mengandalkan sumber daya alam saja; serta intervensi harga dan kebijakan perdagangan yang berpihak ke produk pertanian, terutama terhadap harga dan upah.

Dalam rangka pembangunan berkeadilan, pembangunan kesejahteraan sosial juga dilakukan dengan memberi perhatian yang lebih besar pada kelompok masyarakat yang kurang beruntung, termasuk masyarakat miskin dan masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil, tertinggal, dan wilayah bencana. Pembangunan kesejahteraan sosial dalam rangka memberikan perlindungan pada kelompok masyarakat yang kurang beruntung disempurnakan melalui penguatan lembaga jaminan sosial yang didukung oleh peraturan-peraturan perundang-undangan, pendanaan, serta penerapan sistem nomor induk kependudukan (NIK) tunggal. Pemberian jaminan sosial dilaksanakan dengan mempertimbangkan budaya dan kelembagaan yang sudah berakar di masyarakat.

Untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender, peningkatan akses dan partisipasi perempuan dalam pembangunan harus dilanjutkan. Demikian pula peningkatan kualitas perlindungan perempuan dan anak dilanjutkan. Keberadaan berbagai fasilitas yang telah dibangun pada periode 2004-2009, antara lain, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pusat Krisis Terpadu, dan Ruang Pelayanan Khusus di sejumlah provinsi dan kabupaten/ kota, harus terus kita perluas di seluruh pelosok tanah air. Untuk mewujudkan peningkatan peran kaum perempuan dalam pembangunan, peran kaum perempuan di sektor publik harus terus ditingkatkan. Untuk itu, harus terus diperluas ruang untuk meningkatnya peran, keterlibatan aktif dan bahkan kepemimpinan kaum perempuan di luar pemerintahan, di dunia usaha dan organisasi sosial.

#### 4.1.3 Agenda Pembangunan

Dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional 2009-2014, ditetapkan lima agenda utama pembangunan nasional tahun 2009-2014, yaitu:

- Agenda I : Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat
- Agenda II : Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan
- Agenda III : Penegakan Pilar Demokrasi
- Agenda IV : Penegakkan Hukum Dan Pemberantasan Korupsi

## Agenda V : Pembangunan Yang Inklusif Dan Berkeadilan

### **Agenda I: Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat**

Agenda peningkatan kesejahteraan rakyat tetap menjadi prioritas dari pemerintah mendatang. Wujud akhir dari perbaikan kesejahteraan akan tercermin pada peningkatan pendapatan, penurunan tingkat pengangguran dan perbaikan kualitas hidup rakyat. Perbaikan kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan melalui sejumlah program pembangunan untuk penanggulangan kemiskinan dan penciptaan kesempatan kerja, termasuk peningkatan program di bidang pendidikan, kesehatan, dan percepatan pembangunan infrastruktur dasar.

Pelaksanaan pembangunan pada periode 2004-2009 telah meletakkan fondasi dalam berbagai bidang perbaikan kesejahteraan rakyat, termasuk masyarakat miskin. Beberapa landasan kebijakan tersebut adalah: (i) penyusunan data dasar (dengan nama dan alamat) rumah tangga sangat miskin, miskin, dan hampir miskin yang sangat penting untuk mengarahkan program perlindungan dan bantuan sosial; (ii) pengelompokan program-program penanggulangan kemiskinan untuk mempermudah dan memperjelas koordinasi; (iii) harmonisasi dan integrasi program-program pemberdayaan masyarakat dalam PNPM Mandiri; (iv) regulasi yang mengatur koordinasi penanggulangan kemiskinan dari pusat sampai ke daerah, termasuk tanggung jawab pelaksanaanya secara bersama. Adanya fondasi tersebut tercermin pada pelaksanaan program Jamkesmas, beasiswa untuk siswa miskin, Raskin, PNPM Mandiri dan Kredit untuk Usaha Rakyat. Hasil yang telah dicapai antara lain tercermin pada penurunan kemiskinan dan penurunan tingkat pengangguran serta tercapainya berbagai sasaran lain dalam *Millineum Development Goals*.

Program pembangunan 2010--2014 tetap konsisten untuk melanjutkan berbagai program perbaikan kesejahteraan rakyat yang sudah berjalan dengan memberikan penekanan lebih lanjut dalam membuat kebijakan yang lebih efektif dan terarah dalam bentuk pengarustamaan anggaran dan kebijakan. Pengarusutamaan ini tidak hanya terbatas antarsektor tetapi juga antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pengarusutamaan harus juga mencakup kebijakan agar tujuan dapat tercapai dengan sumber daya yang minimal.

Penyelenggaraan program peningkatan kesejahteraan rakyat akan dilaksanakan seiring dengan upaya peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi akan mendukung terciptanya penyelenggaraan program pembangunan ekonomi yang makin berkualitas, yaitu pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada peningkatan produktivitas dan daya saing, serta makin memacu terciptanya kreativitas dan inovasi. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi juga akan mempercepat tercapainya tataran pembangunan ekonomi yang makin mandiri.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi diarahkan untuk tercapainya peningkatan kapasitas dan kemampuan bangsa dalam memadukan sumber daya alam (*resource based*), sumber daya pengetahuan (*knowledge based*) dan sumber daya yang berasal dari warisan tradisi budaya bangsa (*culture based*). Dengan cara itu, akan diperoleh ranah pembangunan ekonomi produktif yang makin luas, antara lain, ekonomi kreatif --*creative economy*--, yang dapat memberikan peran konstruktif untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Program peningkatan kesejahteraan dilakukan melalui mendorong sektor riil dan pemihakan kepada usaha kecil menengah dan koperasi serta terus menjaga stabilitas ekonomi makro. Upaya-upaya menggerakkan sektor riil telah dan akan terus dilakukan melalui berbagai intervensi pemerintah yang konstruktif dan terukur. Sedangkan pelaksanaan kebijakan ekonomi makro (fiskal dan moneter) dilakukan selaras dengan tujuan mengelola ekonomi secara sehat dan berkelanjutan. Kebijakan tersebut dapat membawa hasil apabila didukung oleh birokrasi yang efektif, efisien dan bebas dari konflik kepentingan.

## **Agenda II. Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan**

Perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik menjadi isu yang penting dalam konteks nasional dan internasional. Krisis ekonomi yang lalu tidak terlepas dari buruknya tata kelola pemerintahan, baik di sektor pemerintahan maupun swasta. Krisis keuangan global, juga tidak terlepas dari masalah ini. Oleh karena itu, negara-negara yang tergabung dalam G-20 sepakat untuk menempatkan perbaikan tata kelola pemerintahan menjadi salah satu agenda perbaikan untuk mencegah krisis berulang. Wujud dari perbaikan tata kelola pemerintahan ini antara lain dapat dilihat dari penurunan tingkat korupsi, perbaikan pelayanan publik, dan pengurangan ekonomi biaya tinggi.

Di sisi lain, indeks persepsi korupsi terus membaik secara signifikan. Hal ini memberikan indikasi bahwa upaya keras pemerintah untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan selama lima tahun terakhir telah berada pada arah yang benar. Meskipun demikian, capaian selama periode sebelumnya masih belum memadai. Perlu upaya yang lebih keras dan sistematis untuk memperbaiki praktik tata kelola pemerintahan ini.

Pembangunan birokrasi yang kuat merupakan elemen penting untuk menjaga agar kelangsungan pembangunan tetap berkelanjutan. Untuk itu, reformasi birokrasi akan dilaksanakan di seluruh kementerian/lembaga untuk selanjutnya diteruskan di pemerintah daerah. Selanjutnya dalam penyusunan perencanaan dan anggaran, akan diterapkan sistem anggaran berbasis kinerja secara menyeluruh. Reformasi ini diharapkan dapat membawa hasil yang positif khususnya dalam perbaikan kualitas pelayanan publik, efektivitas dan akuntabilitas kegiatan kementerian/lembaga dan penanggulangan korupsi.

Langkah-langkah yang disebutkan di atas, akan dipercepat dengan memantapkan dan memperluas program percepatan reformasi birokrasi yang dikombinasikan dengan sejumlah program aksi lainnya seperti reformasi bidang hukum.

Cakupan perbaikan dalam tata kelola pemerintahan tidak hanya terbatas pada sektor pemerintahan, tetapi juga meliputi sektor swasta termasuk pengelolaan BUMN. Untuk mendorong perbaikan tata kelola swasta, pemerintah akan mendorong lebih banyak perusahaan untuk mengubah statusnya menjadi perusahaan publik. Perubahan ini akan mendorong keterbukaan dan akuntabilitas publik dari sektor korporasi di Indonesia. Hal ini juga penting untuk mencegah kolusi, nepotisme, serta konflik kepentingan yang dapat mengganggu roda perekonomian.

### **Agenda III. Penegakan Pilar Demokrasi**

Transisi dari kehidupan demokrasi masa lalu dengan segala keberhasilan dan kegalangannya menuju Indonesia masa depan yang lebih sejahtera, demokratis, dan adil menuntut penegakan pilar-pilar demokrasi yang lebih konsisten. Oleh karena itu agenda penegakan pilar demokrasi merupakan agenda yang tetap penting dalam periode 2010-2014.

Wujud dari Indonesia yang demokratis adalah penghargaan terhadap hak asasi manusia, terjaminnya kebebasan berpendapat, adanya checks and balances, jaminan akan keberagaman yang tercermin dengan adanya perlindungan terhadap segenap warga negara tanpa membedakan paham, asal-usul, golongan, dan gender.

Selama ini, konsolidasi demokrasi telah dilakukan dengan menjamin kebebasan berpendapat, menghormati hak asasi manusia, serta terus menjaga berjalannya proses checks and balances. Lembaga-lembaga demokrasi terus diperkuat dengan cara memberikan contoh dan menegakkan nilai-nilai demokrasi, misalnya dengan menjaga kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan mengutamakan supremasi hukum. Demokrasi harus terus dijaga agar berada pada arah yang benar, yaitu demokrasi yang egaliter.

Selain itu, di dalam konsolidasi demokrasi telah berhasil dilakukan pemilihan umum baik di tingkat nasional maupun lokal. Pembangunan demokrasi diarahkan untuk mencapai pada tingkat demokrasi yang substansial. Namun, sebelum bisa beranjak kepada demokrasi substansial harus diselesaikan terlebih dahulu semua masalah prosedural. Di dalam proses pemilihan umum misalnya, tidak boleh terulang kesalahan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang membawa persoalan, baik di dalam pemilihan umum legislatif maupun pemilihan kepala negara dan kepala daerah. Ke depan, berbagai usaha perbaikan harus dilakukan, sebelum melangkah menuju demokrasi substansial.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

## **Agenda IV. Penegakan Hukum**

Sistem yang demokratis juga harus disertai tegaknya "rule of law." Oleh karena itu, agenda penegakan hukum masih merupakan agenda yang penting dalam periode 2010-2014. Wujud dari penegakan hukum adalah munculnya kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. Kepastian hukum akan memberikan rasa aman, rasa adil dan kepastian berusaha bagi masyarakat. Terkait dengan kepastian usaha, salah satu persoalan yang dianggap kerap menganggu masuknya investasi ke Indonesia adalah lemahnya kepastian hukum. Karenanya penegakan hukum akan membawa dampak yang positif bagi perbaikan iklim investasi yang pada gilirannya akan memberi dampak positif bagi perekonomian Indonesia.

Agenda dalam bidang hukum juga mencakup proses pembuatan undang-undang, proses penjabarannya, proses pengawasan, dan juga penegakan aturan hukum. Selain itu, wujud dari agenda hukum adalah menjamin proses peradilan yang bebas. Hal ini semua akan membantu di dalam upaya konsolidasi demokrasi. Penegakan hukum merupakan elemen yang sangat penting di dalam pemberantasan korupsi.

Selama ini, telah dan terus dilakukan pemberahan pada substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Tumpang tindih dan inkonsistensi peraturan perundang-undangan harus diperkecil. Demikian juga hambatan pada implementasi peraturan perundangan harus dihilangkan. Akan terus diupayakan perjanjian ekstradisi dengan negara-negara yang berpotensi menjadi tempat pelarian pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya. Dalam usaha pemberantasan korupsi, berbagai kasus telah ditindaklanjuti tanpa pandang bulu. Proses penegakan hukum dalam bidang korupsi dilakukan tanpa tebang pilih. Semua warga negara sama kedudukannya di muka hukum.

Selanjutnya, permasalahan terkait dengan struktur hukum akan diatasi dengan peningkatan independensi dan akuntabilitas kelembagaan hukum, peningkatan kemampuan sumber daya manusia di bidang hukum, serta mendorong berlakunya sistem peradilan yang transparan dan terbuka. Oleh karena itu, semua pihak, baik pemerintah, pengusaha, maupun aparat penegak hukum mulai dari polisi dan jaksa sampai kepada hakim dan pengacara benar-benar harus menegakkan aturan main dan tatanan hukum yang pasti agar hukum semakin tegak dan pasti.

## **Agenda V. Pembangunan yang Inklusif dan Berkeadilan**

Peningkatan kualitas pembangunan yang inklusif dan berkeadilan terus menjadi agenda prioritas dalam pemerintahan 2010-2014 mengingat pelaksanaan agenda keadilan sampai saat ini belum mampu mewujudkan sepenuhnya hasil yang diinginkan. Penyebabnya antara lain proses pembangunan yang tidak partisipatif belum banyak diterapkan sehingga keadilan dan keikutsertaan secara luas belum diterapkan.

Perwujudan keadilan keikutsertaan dapat diwujudkan dalam berbagai dimensi. Dalam bidang ekonomi, keadilan dapat diwujudkan dalam bentuk perbaikan, atau terjadinya proses afirmasi terhadap kelompok yang tertinggal, orang cacat, dan terpinggirkan. Dalam bidang sosial-politik, perwujudan keadilan keikutsertaan (inklusif) dapat berupa perbaikan akses semua kelompok terhadap kebebasan berpolitik, kesetaraan gender dalam politik dan penghapusan segala macam bentuk diskriminasi.

Upaya pengurangan kesenjangan pendapatan telah dilakukan oleh pemerintah dalam periode 2004-2009 dengan berbagai kebijakan. Misalnya, untuk mengurangi kesenjangan pendapatan, pemerintah melakukan realokasi subsidi yang diterima oleh kelompok yang berpenghasilan atas kepada masyarakat miskin melalui program-program yang bersifat langsung dan *targeted*. Realokasi subsidi BBM kepada program pendidikan dan kesehatan pada periode 2005-2008 juga merupakan bukti nyata dari upaya tersebut. Langkah konkret lain adalah pelaksanaan 3 gugus (*cluster*) program penanggulangan kemiskinan secara intensif dan koordinatif.

Proses perencanaan yang bersifat *bottom up* dan inklusif telah dipraktekkan dalam beberapa program, misalnya PNPM. Masyarakat dilibatkan sejak proses perencanaan, pemilihan proyek hingga evaluasi. Di sini pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan menjadi komponen yang amat penting. Dengan pola ini masyarakat akan merasa lebih memiliki dan secara sukarela akan menjalankannya dan sekaligus mendapatkan manfaat dari program tersebut.

Dalam lima tahun ke depan, penguatan dimensi keadilan dan keikutsertaan akan dilakukan untuk setiap kegiatan atau program pembangunan. Misalnya melalui Program Keluarga Harapan (PKH), bagi masyarakat sangat miskin akan diberikan bantuan tunai bersyarat dalam bentuk dukungan biaya pendidikan dan kesehatan. Langkah ini diharapkan dalam jangka pendek akan memberikan penghasilan tambahan bagi keluarga tersebut (memperbaiki distribusi pendapatan) dan dalam jangka panjang akan dihasilkan generasi baru yang lebih baik tingkat pendidikan dan kesehatannya. Di samping itu, pemerintah akan mempertajam kualitas program perlindungan dan bantuan sosial dalam gugus (*cluster*) 1 untuk menjadi bantuan sosial berbasis keluarga.

Program lain yang akan dilanjutkan untuk memperbaiki distribusi pendapatan adalah program aksi perkuatan usaha mikro, kecil, dan menengah. Perluasan cakupan program PNPM meliputi seluruh kecamatan per tahun 2009 diharapkan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan di tingkat perdesaan dan kecamatan. Diharapkan modal sosial masyarakat ini meningkatkan mutu proses perencanaan *bottom-up* yang akan menjalar pada tingkat kabupaten dan propinsi dan seterusnya pada periode berikutnya.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

#### 4.1.4 Sasaran Pembangunan

Persoalan dan dimensi pembangunan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia selalu berubah dan makin kompleks. Permasalahan dan tuntutan pembangunan yang dihadapi akan bertambah banyak, sedangkan kemampuan dan sumber daya pembangunan yang tersedia cenderung terbatas. Pemerintah harus mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk memenuhi tuntutan yang tidak terbatas dengan membuat pilihan dalam bentuk skala prioritas. Dalam menentukan pilihan tersebut, pemerintah bersikap realistik, dengan tidak membuat sasaran-sasaran yang sejak semula disadari tidak bisa dipenuhi.

Pengalaman selama periode 2004-2009 menjadi modal utama dalam menyusun agenda dan strategi pembangunan ini. Sejumlah indikator digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan. Banyak faktor yang bersifat eksogen (di luar kendali pemerintah) akan mempengaruhi capaian tersebut. Faktor eksogen, dapat mempermudah pencapaian atau sebaliknya ia dapat pula menyebabkan sasaran yang ingin dicapai tidak terpenuhi atau hanya terpenuhi sebagian. Misalnya, kenaikan harga komoditas energi dapat mempunyai dampak positif terhadap pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi mengingat Indonesia masih tergolong sebagai negara produsen dan pengekspor energi neto. Sebaliknya, bencana alam seperti gelombang panas El Nino seperti yang terjadi sebelum krisis ekonomi tahun 1997 dapat menghambat upaya peningkatan produksi pangan dan berperan terhadap kenaikan tingkat kemiskinan pada saat itu. Meskipun kemungkinan terjadinya faktor eksogen tersebut tidak dapat diperkirakan dengan pasti, beberapa perubahan dapat dimitigasi dan diubah ke arah yang menguntungkan dengan kebijakan yang tepat.

#### Sasaran Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan

Sesuai dengan persoalan utama yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, pemerintah bertekad untuk melanjutkan proses percepatan pembangunan ekonomi selama lima tahun ke depan. Dengan pulihnya perekonomian global dalam 1-2 tahun mendatang, capaian tertinggi yang pernah dicapai oleh laju pertumbuhan perekonomian Indonesia sebelum krisis sekitar 7 persen sudah dapat dipenuhi sebelum tahun terakhir masa 2010-2014.

Percepatan laju pertumbuhan ekonomi ini diharapkan mampu menurunkan tingkat pengangguran terbuka hingga di sekitar 5-6 persen pada akhir tahun 2014, dan kesempatan kerja yang tercipta antara 9,6 juta-10,7 juta pekerja selama periode 2010-2014. Kombinasi antara percepatan pertumbuhan ekonomi dan berbagai kebijakan intervensi pemerintah yang terarah diharapkan dapat mempercepat penurunan tingkat kemiskinan menjadi sekitar 8-10 persen pada akhir 2014.

Untuk memenuhi sasaran percepatan pertumbuhan ekonomi tersebut, pemerintah akan terus melanjutkan kebijakan makroekonomi yang terukur dan berhati-

hati, sehingga inflasi dapat dikendalikan pada tingkat rendah yang sebanding dengan negara-negara setaraf dengan Indonesia yaitu sekitar 4-6 persen per tahun. Inflasi yang terkendali memungkinkan nilai tukar dan suku bunga yang kompetitif sehingga mendorong sektor riil bergerak dan berkembang dengan sehat.

Dalam bidang pendidikan, sasaran pembangunan ditujukan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan dan meningkatnya mutu pendidikan, yang antara lain ditandai oleh menurunnya jumlah penduduk buta huruf; meningkatnya secara nyata persentase penduduk yang dapat menyelesaikan program wajib belajar 9 tahun dan pendidikan lanjutan dan berkembangnya pendidikan kejuruan yang ditandai oleh meningkatnya jumlah tenaga terampil.

Sementara itu, di bidang kesehatan peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, antara lain, ditandai oleh meningkatnya angka harapan hidup, menurunnya tingkat kematian bayi, dan kematian ibu melahirkan.

Dalam bidang pangan, terciptanya kemandirian dalam bidang pangan pada akhir tahun 2014 ditandai dengan meningkatnya ketahanan pangan rakyat, berupa perbaikan status gizi ibu dan anak pada golongan masyarakat yang rawan pangan, membaiknya akses rumah tangga golongan miskin terhadap pangan, terpelihara dan terus meningkatnya kemampuan swasembada beras dan komoditas pangan utama lainnya, menjaga harga pangan yang terjangkau bagi masyarakat kelompok pendapatan menengah bawah, menjaga nilai tukar petani agar dapat menikmati kemakmuran, dan meningkatkan daya tawar komoditas Indonesia dan keunggulan komparatif (*comparative advantage*) dari sektor pertanian Indonesia di kawasan regional Asia dan Global.

Bidang energi membangun ketahanan energi dengan mencapai diversifikasi energi yang menjamin keberlangsungan dan jumlah pasokan energi di seluruh Indonesia dan untuk seluruh penduduk Indonesia dengan tingkat pendapatan yang berbeda-beda, meningkatkan penggunaan energi terbarukan (*renewable energy*) dan berpartisipasi aktif dan memanfaatkan berkembangnya perdagangan karbon secara global, meningkatkan efisisensi konsumsi dan penghematan energi baik di lingkungan rumah tangga maupun industri dan sektor transportasi, dan memproduksi energi yang bersih dan ekonomis.

Dalam bidang lingkungan hidup, sasaran yang hendak dicapai adalah perbaikan mutu lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam di perkotaan dan pedesaan, penahanan laju kerusakan lingkungan dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan; peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Selain itu terus dilakukan program reboisasi, penghutanan kembali (reforestasi) dan program pengurangan emisi karbon.

Dalam rangka mengatasi dampak pemanasan global untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, Indonesia, pada tahun 2009, dalam pertemuan G 20 di Pittsburgh dan Konvensi Internasional tentang Perubahan Iklim di Copenhagen telah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

berinisitaif memberikan komitmen mitigasi dampak perubahan iklim berupa penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) pada tahun 2020 sebesar 26% dari kondisi tanpa rencana *aksi (business as usual – BAU)* dengan usaha sendiri serta penurunan sebesar 41% dengan dukungan internasional. Upaya penurunan emisi GRK tersebut terutama difokuskan pada kegiatan-kegiatan kehutanan, lahan gambut, limbah dan energi yang didukung oleh langkah-langkah kebijakan di berbagai sektor dan kebijakan fiskal.

Bidang infrastruktur meneruskan pembangunan dan pasokan infrastruktur yang ditunjukkan oleh meningkatnya kuantitas dan kualitas berbagai prasarana penunjang pembangunan seperti jalan raya, jalan kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan udara, listrik, irigasi, air bersih dan sanitasi serta pos dan telekomunikasi.

Dalam bidang Usaha Kecil dan Menengah langkah-langkah yang dilakukan adalah, meningkatkan dan memajukan usaha kecil menengah dengan menambah akses terhadap modal termasuk perluasan Kredit Usaha Rakyat (KUR), meningkatkan bantuan teknis dalam aspek pengembangan produk dan pemasaran, melaksanakan kebijakan pemihakan untuk memberikan ruang usaha bagi pengusaha kecil dan menengah, serta menjaga fungsi, keberadaan serta efisiensi pasar tradisional.

### **Sasaran Perkuatan Pembangunan Demokrasi**

Sasaran penegakan pilar demokrasi adalah membangun dan semakin memantapkan sistem demokrasi di Indonesia yang dapat menghasilkan pemerintahan dan lembaga legislatif yang kredibel, bermutu, efektif, dan mampu menyelenggarakan amanah dan tugas serta tanggung jawabnya secara baik, seimbang dengan peningkatan kepatuhan terhadap pranata hukum. Dengan demikian, fungsi *checks and balances* dapat dilakukan secara santun, beretika, dan efektif sehingga penyelenggaraan negara tidak terhambat oleh mekanisme dan sistem demokrasi, namun sebaliknya akan makin meningkat kualitas hasil dan akuntabilitasnya. Sasaran di bidang ini juga adalah untuk menjamin setiap lima tahun terselenggaranya proses pemilu yang memenuhi azas-azas demokrasi yang baik, yaitu jujur, adil, dan menjamin seluruh warga negara pemilih dapat melaksanakan hak memilihnya secara bebas dan bertanggung jawab.

### **Sasaran Penegakan Hukum**

Penegakan Hukum merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan dan sangat penting dalam menjaga sistem demokrasi yang berkualitas dan juga mendukung iklim berusaha yang baik agar kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan pasti, aman dan efisien, dalam rangka mencapai kesejahteraan rakyat.

Sasaran reformasi penegakan hukum adalah tercapainya suasana dan kepastian keadilan melalui penegakan hukum (*rule of law*) dan terjaganya ketertiban umum.

Sasaran tersebut tercermin dari persepsi masyarakat pencari keadilan untuk merasakan kenyamanan, kepastian, keadilan dan keamanan dalam berinteraksi dan mendapat pelayanan dari para penegak hukum (kepolisian dan kejaksaaan). Dengan demikian, reformasi kepolisian dan kejaksaan, dan lembaga peradilan harus dilakukan untuk dapat menghasilkan sasaran berupa muncul dan tumbuhnya kepercayaan dan penghormatan publik kepada aparat dan lembaga penegak hukum karena mereka dipercaya akan selalu melindungi masyarakat berdasarkan azas keadilan dan kepatuhan pada aturan dan hukum tanpa pembedaan dan diskriminasi.

Selain berbagai bidang yang telah disebutkan di atas, pemerintah tetap mengembangkan sektor-sektor pembangunan lainnya secara konsisten, terkoordinasi dan terintegrasi. Dengan demikian, pada akhir RPJMN 2010 -2014 Indonesia berhasil mencapai berbagai sasaran pembangunan nasional untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan.

**TABEL 1**  
**SASARAN UTAMA PEMBANGUNAN NASIONAL**  
**RPJMN 2010-2014**

No.	PEMBANGUNAN	SASARAN			
<b>I. SASARAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>					
<b>1. Ekonomi</b>					
a)	Pertumbuhan Ekonomi	Rata-rata 6,3 – 6,8 persen pertahun Sebelum tahun 2014 tumbuh 7%			
b)	Inflasi	Rata-rata 4 - 6 persen pertahun			
c)	Tingkat Pengangguran (terbuka)	5 - 6 persen pada akhir tahun 2014			
d)	Tingkat Kemiskinan	8 - 10 persen pada akhir tahun 2014			
<b>2. Pendidikan</b>					
		Status Awal (tahun 2008)	Target tahun 2014		
a)	Meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk berusia 15 tahun ke atas (tahun)	7,50	8,25		
b)	Menurunnya angka buta aksara penduduk berusia 15 tahun ke atas (persen)	5,97	4,18		
c)	Meningkatnya APM SD/SDLB/	95,14	96,0		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

No.	PEMBANGUNAN	SASARAN	
	MI/Paket A (persen)		
d)	Meningkatnya APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B (persen)	72,28	76,0
e)	Meningkatnya APK SMA/SMK/MA/Paket C (persen)	64,28	85,0
f)	Meningkatnya APK PT usia 19-23 tahun (persen)	21,26	30,0
g)	Menurunnya disparitas partisipasi dan kualitas pelayanan pendidikan antarwilayah, gender, dan sosial ekonomi, serta antarsatuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat		
<b>3. Kesehatan</b>			
		Status Awal (tahun 2008)	Target tahun 2014
a)	Meningkatnya umur harapan hidup (tahun)	70,7	72,0
b)	Menurunnya angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup	228	118
c)	Menurunnya angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup	34	24
d)	Menurunnya prevalensi kekurangan gizi(gizi kurang dan gizi buruk) pada anak balita (persen)	18,4	< 15,0
<b>4. Pangan</b>			
a)	Produksi Padi	Tumbuh 3,22 persen per tahun	
b)	Produksi Jagung	Tumbuh 10,02 persen per tahun	
c)	Produksi Kedelai	Tumbuh 20,05 persen per tahun	
d)	Produksi Gula	Tumbuh 12,55 persen per tahun	
e)	Produksi Daging Sapi	Tumbuh 7,30 persen per tahun	
<b>5. Energi</b>			
a)	Peningkatan kapasitas pembangkit listrik	3.000 MW pertahun	
b)	Meningkatnya rasio elektrifikasi	Pada tahun 2014 mencapai 80 persen	
c)	Meningkatnya produksi minyak bumi	Pada tahun 2014 mencapai 1,01 juta barrel perhari	
d)	Peningkatan pemanfaatan energi panas bumi	Pada tahun 2014 mencapai 5.000 MW	

No.	PEMBANGUNAN	SASARAN
<b>6. Infrastruktur</b>		
a)	Pembangunan Jalan Lintas Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Papua	Hingga tahun 2014 mencapai sepanjang 19.370 km
b)	Pembangunan jaringan prasarana dan penyediaan sarana transportasi antar-moda dan antar-pulau yang terintegrasi sesuai dengan Sistem Transportasi Nasional dan Cetak Biru Transportasi Multimoda	Selesai tahun 2014
c)	Penuntasan pembangunan Jaringan Serat Optik di Indonesia Bagian Timur	Selesai sebelum tahun 2013
d)	Perbaikan sistem dan jaringan transportasi di 4 kota besar (Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Medan)	Selesai tahun 2014
<b>II. SASARAN PERKUATAN PEMBANGUNAN DEMOKRASI</b>		
1.	Meningkatnya kualitas demokrasi Indonesia	<p>1) Semakin terjaminnya peningkatan iklim politik kondusif bagi berkembangnya kualitas kebebasan sipil dan hak-hak politik rakyat yang semakin seimbang dengan peningkatan kepatuhan terhadap pranata hukum;</p> <p>2) Meningkatnya kinerja lembaga-lembaga demokrasi, dengan indeks rata-rata 70 pada akhir tahun 2014;</p> <p>3) Menyelenggarakan pemilu tahun 2014 yang dapat dilaksanakan dengan adil dan demokratis, dengan tingkat partisipasi politik rakyat 75% dan berkurangnya diskriminasi hak dipilih dan memilih;</p> <p>4) Meningkatnya layanan informasi dan komunikasi</p>
		<p>Pada tahun 2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Indeks Demokrasi Indonesia: 73</li> </ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

No.	PEMBANGUNAN	SASARAN
<b>III. SASARAN PEMBANGUNAN PENEGAKAN HUKUM</b>		
1	Tercapainya suasana dan kepastian keadilan melalui penegakan hukum ( <i>rule of law</i> ) dan terjaganya ketertiban umum.	<p>1) Persepsi masyarakat pencari keadilan untuk merasakan kenyamanan, kepastian, keadilan dan keamanan dalam berinteraksi dan mendapat pelayanan dari para penegak hukum</p> <p>2) Tumbuhnya kepercayaan dan penghormatan publik kepada aparat dan lembaga penegak hukum</p> <p>3) Mendukung iklim berusaha yang baik sehingga kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan pasti dan aman serta efisien</p> <p>Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2014 sebesar 5,0 yang meningkat dari 2,8 pada tahun 2009</p>

## 4.2 Arah Kebijakan Umum Pembangunan Nasional

### 4.2.1 Arah Kebijakan Umum

Mengacu pada permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa dan negara Indonesia baik dewasa ini maupun dalam lima tahun mendatang, maka arah kebijakan umum pembangunan nasional 2010-2014 adalah sebagai berikut:

1. Arah kebijakan umum untuk melanjutkan pembangunan mencapai Indonesia yang sejahtera. Indonesia yang sejahtera tercermin dari peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dalam bentuk percepatan pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengurangan kemiskinan, pengurangan tingkat pengangguran yang diwujudkan dengan bertumpu pada program perbaikan kualitas sumber daya manusia, perbaikan infrastruktur dasar, serta terjaganya dan terpeliharanya lingkungan hidup secara berkelanjutan.
2. Arah kebijakan umum untuk memperkuat pilar-pilar demokrasi dengan penguatan yang bersifat kelembagaan dan mengarah pada tegaknya ketertiban umum, penghapusan segala macam diskriminasi, pengakuan dan penerapan hak asasi manusia serta kebebasan yang bertanggung jawab.

3. Arah kebijakan umum untuk memperkuat dimensi keadilan dalam semua bidang termasuk pengurangan kesenjangan pendapatan, pengurangan kesenjangan pembangunan antar daerah (termasuk desa-kota), dan kesenjangan jender. Keadilan juga hanya dapat diwujudkan bila sistem hukum berfungsi secara kredibel, bersih, adil dan tidak pandang bulu. Demikian pula kebijakan pemberantasan korupsi secara konsisten diperlukan agar tercapai rasa keadilan dan pemerintahan yang bersih.

Berdasarkan keberhasilan pencapaian program pembangunan dalam lima tahun sebelumnya (2004-2009), pemerintah akan melanjutkan pendekatan pembangunan kelembagaan dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan. Pendekatan yang bersifat kelembagaan ini dimaksudkan sebagai pendekatan yang menyeimbangkan antara pentingnya proses yang berlandaskan pada tatakelola yang baik, bersih, transparan, adil, dan akuntabel, dengan hasil yang baik dan efisien. Pemerintahan tidak seharusnya hanya berorientasi pada hasil jangka pendek, dengan tidak mengindahkan azas-azas kepatutan, keadilan, dan keberlanjutan. Pendekatan ini dipandang akan memberikan hasil yang berkelanjutan karena dibangun di atas fondasi yang lebih kokoh, melewati proses yang telah disetujui bersama secara demokratis, serta dengan rasa memiliki yang tinggi dan akuntabel.

Pembangunan kelembagaan ini tidak hanya membangun mekanisme kelembagaan yang baru, tetapi juga mengembalikan kembali aturan lama yang dipandang lebih berkelanjutan ke dalam sistem. Sebagai contoh, program BOS selama ini lebih banyak dilakukan pemerintah pusat, padahal UU Otonomi Daerah menetapkan bahwa pendidikan merupakan tugas pemerintah kabupaten/kota, selanjutnya program ini akan lebih mengedepankan dan mengaktifkan peran pemerintah daerah.

#### **4.2.2 Prioritas Nasional**

Visi dan Misi pemerintah 2009-2014, perlu dirumuskan dan dijabarkan lebih operasional ke dalam sejumlah program prioritas sehingga lebih mudah diimplementasikan dan diukur tingkat keberhasilannya. Sebelas Prioritas Nasional di bawah ini bertujuan untuk sejumlah tantangan yang dihadapi oleh bangsa dan negara di masa mendatang.

Sebagian besar sumber daya dan kebijakan akan diprioritaskan untuk menjamin implementasi dari 11 prioritas nasional yaitu: (1) reformasi birokrasi dan tata kelola; (2) pendidikan; (3) kesehatan; (4) penanggulangan kemiskinan; (5) ketahanan pangan; (6) infrastruktur; (7) iklim investasi dan usaha; (8) energi; (9) lingkungan hidup dan bencana; (10) daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan paska konflik; serta (11) kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

## **Prioritas 1: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola**

Pemantapan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, taat kepada hukum yang berwibawa, dan transparan. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditopang oleh efisiensi struktur pemerintah di pusat dan di daerah, kapasitas pegawai pemerintah yang memadai, dan data kependudukan yang baik.

Oleh karena itu, substansi inti dari reformasi birokrasi dan tata kelola adalah sebagai berikut :

1. Struktur: Konsolidasi struktural dan peningkatan kapasitas kementerian/lembaga yang menangani aparatur negara yaitu Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN), Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) pada 2010; restrukturisasi lembaga pemerintah lainnya, seperti di bidang keberdayaan UMKM, pengelolaan energi, pemanfaatan sumber daya kelautan, restrukturisasi BUMN, hingga pemanfaatan tanah dan penataan ruang bagi kepentingan rakyat banyak selambat-lambatnya 2014;
2. Otonomi daerah: Penataan otonomi daerah melalui 1) penghentian/pembatasan pemekaran wilayah; 2) peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana perimbangan daerah; dan 3) penyempurnaan pelaksanaan pemilihan kepala daerah;
3. Sumber daya manusia: penyempurnaan pengelolaan PNS yang meliputi sistem rekrutmen, pendidikan, penempatan, promosi, dan mutasi PNS secara terpusat selambat-lambatnya 2011;
4. Regulasi: Percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah hingga tercapai keselarasan arah dalam implementasi pembangunan, di antaranya penyelesaian kajian 12.000 peraturan daerah selambat-lambatnya 2011;
5. Sinergi antara pusat dan daerah: Penetapan dan penerapan sistem Indikator Kinerja Utama Pelayanan Publik yang selaras antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
6. Penegakan Hukum: Peningkatan integrasi dan integritas penerapan dan penegakan hukum oleh seluruh lembaga dan aparat hukum
7. Data Kependudukan: Penetapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan pengembangan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIAK) dengan aplikasi pertama pada kartu tanda penduduk selambat-lambatnya pada 2011.

## Prioritas 2: Pendidikan

Peningkatan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, relevan, dan efisien menuju terangkatnya kesejahteraan hidup rakyat, kemandirian, keluhuran budi pekerti, dan karakter bangsa yang kuat. Pembangunan bidang pendidikan diarahkan demi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang didukung keselarasan antara ketersediaan tenaga terdidik dengan kemampuan: 1) menciptakan lapangan kerja atau kewirausahaan dan 2) menjawab tantangan kebutuhan tenaga kerja.

Oleh karena itu, substansi inti program aksi bidang pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Akses pendidikan dasar-menengah: Peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan dasar dari 95% di 2009 menjadi 96% di 2014 dan APM pendidikan setingkat SMP dari 73% menjadi 76% dan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan setingkat SMA dari 69% menjadi 85%; Pemantapan/rasionalisasi implementasi BOS, penurunan harga buku standar di tingkat sekolah dasar dan menengah sebesar 30-50% selambat-lambatnya 2012 dan penyediaan sambungan internet ber-content pendidikan ke sekolah tingkat menengah selambat-lambatnya 2012 dan terus diperluas ke tingkat sekolah dasar;
2. Akses pendidikan tinggi: Peningkatan APK pendidikan tinggi dari 18% di 2009 menjadi 25% di 2014;
3. Metodologi: Penerapan metodologi pendidikan yang tidak lagi berupa pengajaran demi kelulusan ujian (*teaching to the test*), namun pendidikan menyeluruh yang memperhatikan kemampuan sosial, watak, budi pekerti, kecintaan terhadap budaya-bahasa Indonesia melalui penyesuaian sistem Ujian Akhir Nasional pada 2011 dan penyempurnaan kurikulum sekolah dasar-menengah sebelum tahun 2011 yang diterapkan di 25% sekolah pada 2012 dan 100% pada 2014;
4. Pengelolaan: Pemberdayaan peran kepala sekolah sebagai manajer sistem pendidikan yang unggul, revitalisasi peran pengawas sekolah sebagai entitas *quality assurance*, mendorong aktivasi peran Komite Sekolah untuk menjamin keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses pembelajaran, dan Dewan Pendidikan di tingkat Kabupaten;
5. Kurikulum: Penataan ulang kurikulum sekolah yang dibagi menjadi kurikulum tingkat nasional, daerah, dan sekolah sehingga dapat mendorong penciptaan hasil didik yang mampu menjawab kebutuhan SDM untuk mendukung pertumbuhan nasional dan daerah dengan memasukkan pendidikan kewirausahaan (diantaranya dengan mengembangkan model *link and match*);



6. Kualitas: Peningkatan kualitas guru, pengelolaan dan layanan sekolah, melalui: 1) program remediasi kemampuan mengajar guru; 2) penerapan sistem evaluasi kinerja profesional tenaga pengajar; 3) sertifikasi ISO 9001:2008 di 100% PTN, 50% PTS, 100% SMK sebelum 2014; 4) membuka luas kerja sama PTN dengan lembaga pendidikan internasional; 5) mendorong 11 PT masuk Top 500 THES pada 2014; 6) memastikan perbandingan guru:murid di setiap SD & MI sebesar 1:32 dan di setiap SMP & MTs 1:40; dan 7) memastikan tercapainya Standar Nasional Pendidikan (SNP) bagi Pendidikan Agama dan Keagamaan paling lambat tahun 2013.

### Prioritas 3: Kesehatan

Penitikberatan pembangunan bidang kesehatan melalui pendekatan preventif, tidak hanya kuratif, melalui peningkatan kesehatan masyarakat dan lingkungan di antaranya dengan perluasan penyediaan air bersih, pengurangan wilayah kumuh sehingga secara keseluruhan dapat meningkatkan angka harapan hidup dari 70,7 tahun pada 2009 menjadi 72,0 tahun pada 2014, dan pencapaian keseluruhan sasaran Millenium Development Goals (MDGs) tahun 2015.

Oleh karena itu, substansi inti program aksi bidang kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Program kesehatan masyarakat: Pelaksanaan Program Kesehatan Preventif Terpadu yang meliputi pemberian imunisasi dasar kepada 90% balita pada 2014; Penyediaan akses sumber air bersih yang menjangkau 67% penduduk dan akses terhadap sanitasi dasar berkualitas yang menjangkau 75% penduduk sebelum 2014; Penurunan tingkat kematian ibu saat melahirkan dari 307 per 100.000 kelahiran pada 2008 menjadi 118 pada 2014, serta tingkat kematian bayi dari 34 per 1.000 kelahiran pada 2008 menjadi 24 pada 2014;
2. Program KB: Peningkatan kualitas dan jangkauan layanan KB melalui 23.500 klinik pemerintah dan swasta selama 2010-2014;
3. Sarana kesehatan: Ketersediaan dan peningkatan kualitas layanan rumah sakit berakreditasi internasional di minimal 5 kota besar di Indonesia dengan target 3 kota pada 2012 dan 5 kota pada 2014;
4. Obat: Pemberlakuan Daftar Obat Esensial Nasional sebagai dasar pengadaan obat di seluruh Indonesia dan pembatasan harga obat generik bermerek pada 2010;
5. Asuransi Kesehatan Nasional: Penerapan Asuransi Kesehatan Nasional untuk seluruh keluarga miskin dengan cakupan 100% pada 2011 dan diperluas secara bertahap untuk keluarga Indonesia lainnya antara 2012-2014.

## **Prioritas 4: Penanggulangan Kemiskinan**

Penurunan tingkat kemiskinan absolut dari 14,1% pada 2009 menjadi 8-10% pada 2014 dan perbaikan distribusi pendapatan dengan perlindungan sosial yang berbasis keluarga, pemberdayaan masyarakat dan perluasan kesempatan ekonomi masyarakat yang berpendapatan rendah.

Oleh karena itu, substansi inti program aksi penanggulangan kemiskinan adalah sebagai berikut:

1. Bantuan Sosial Terpadu: Integrasi program perlindungan sosial berbasis keluarga yang mencakup program Bantuan Langsung Tunai (BLT) baik yang bersifat insidensial atau kepada kelompok marginal, bantuan pangan, jaminan sosial bidang kesehatan, beasiswa bagi anak keluarga berpendapatan rendah, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan Parenting Education mulai 2010 dan program keluarga harapan diperluas menjadi program nasional mulai 2011—2012;
2. PNPM Mandiri: Penambahan anggaran PNPM Mandiri dari Rp 10,3 triliun pada 2009 menjadi Rp 12,1 triliun pada 2010, pemenuhan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Rp 3 miliar per kecamatan untuk minimal 30% kecamatan termiskin di pedesaan, dan integrasi secara selektif PNPM Pendukung;
3. Kredit Usaha Rakyat (KUR): Pelaksanaan penyempurnaan mekanisme penyaluran KUR mulai 2010 dan perluasan cakupan KUR mulai 2011;
4. Tim Penanggulangan Kemiskinan: Revitalisasi Komite Nasional Penanggulangan Kemiskinan di bawah koordinasi Wakil Presiden, penggunaan unified database untuk penetapan sasaran program mulai 2009-2010, dan penerapan sistem monitoring dan evaluasi yang akurat sebagai dasar keputusan dan alokasi anggaran.

## **Prioritas 5: Ketahanan Pangan**

Peningkatan ketahanan pangan dan lanjutan revitalisasi pertanian untuk mewujudkan kemandirian pangan, peningkatan daya saing produk pertanian, peningkatan pendapatan petani, serta kelestarian lingkungan dan sumber daya alam. Peningkatan pertumbuhan PDB sektor pertanian sebesar 3,7% per tahun dan Indeks Nilai Tukar Petani sebesar 115-120 pada 2014.

Oleh karena itu, substansi inti program aksi ketahanan pangan adalah sebagai berikut:



1. Lahan, Pengembangan Kawasan dan Tata Ruang Pertanian: Penataan regulasi untuk menjamin kepastian hukum atas lahan pertanian, pengembangan areal pertanian baru seluas 2 juta hektar, penertiban serta optimalisasi penggunaan lahan terlantar;
2. Infrastruktur: Pembangunan dan pemeliharaan sarana transportasi dan angkutan, pengairan, jaringan listrik, serta teknologi komunikasi dan sistem informasi nasional yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi serta kemampuan pemasarannya;
3. Penelitian dan Pengembangan: Peningkatan upaya penelitian dan pengembangan bidang pertanian yang mampu menciptakan benih unggul dan hasil peneilitian lainnya menuju kualitas dan produktivitas hasil pertanian nasional yang tinggi;
4. Investasi, Pembiayaan, dan Subsidi: Dorongan untuk investasi pangan, pertanian, dan industri perdesaan berbasis produk lokal oleh pelaku usaha dan pemerintah, penyediaan pembiayaan yang terjangkau, serta sistem subsidi yang menjamin ketersediaan benih varietas unggul yang teruji, pupuk, teknologi dan sarana pasca panen yang sesuai secara tepat waktu, tepat jumlah, dan terjangkau;
5. Pangan dan Gizi: Peningkatan kualitas gizi dan keanekaragaman pangan melalui peningkatan pola pangan harapan;
6. Adaptasi Perubahan Iklim: Pengambilan langkah-langkah kongkrit terkait adaptasi dan antisipasi sistem pangan dan pertanian terhadap perubahan iklim.

#### **Prioritas 6: Infrastruktur**

Pembangunan infrastruktur nasional yang memiliki daya dukung dan daya gerak terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial yang berkeadilan dan mengutamakan kepentingan masyarakat umum di seluruh bagian negara kepulauan Republik Indonesia dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Oleh karena itu, substansi inti program aksi bidang infrastruktur adalah sebagai berikut:

1. Tanah dan tata ruang: Konsolidasi kebijakan penanganan dan pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum secara menyeluruh di bawah satu atap dan pengelolaan tata ruang secara terpadu;
2. Jalan: Penyelesaian pembangunan Lintas Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Papua sepanjang total 19.370 km pada 2014;

3. Perhubungan: Pembangunan jaringan prasarana dan penyediaan sarana transportasi antarmoda dan antarpulau yang terintegrasi sesuai dengan Sistem Transportasi Nasional dan Cetak Biru Transportasi Multimoda dan penurunan tingkat kecelakaan transportasi sehingga pada 2014 lebih kecil dari 50% keadaan saat ini;
4. Perumahan rakyat: Pembangunan 685.000 Rumah Sederhana Sehat Bersubsidi, 180 Rusunami dan 650 *twin block* berikut fasilitas pendukung kawasan permukiman yang dapat menampung 836.000 keluarga yang kurang mampu pada 2012;
5. Pengendalian banjir: Penyelesaian pembangunan prasarana pengendalian banjir, diantaranya Banjir Kanal Timur Jakarta sebelum 2012 dan penanganan secara terpadu Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo sebelum 2013;
6. Telekomunikasi: Penuntasan pembangunan jaringan serat optik di Indonesia bagian timur sebelum 2013 dan maksimalisasi tersedianya akses komunikasi data dan suara bagi seluruh rakyat;
7. Transportasi perkotaan: Perbaikan sistem dan jaringan transportasi di 4 kota besar (Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan) sesuai dengan Cetak Biru Transportasi Perkotaan, termasuk penyelesaian pembangunan angkutan kereta listrik di Jakarta (MRT dan Monorail) selambat-lambatnya 2014.

### **Prioritas 7: Iklim Investasi dan Iklim Usaha**

Peningkatan investasi melalui perbaikan kepastian hukum, penyederhanaan prosedur, perbaikan sistem informasi, dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Oleh karena itu, substansi inti program aksi bidang iklim investasi dan iklim usaha adalah sebagai berikut:

1. Kepastian hukum: Reformasi regulasi secara bertahap di tingkat nasional dan daerah sehingga terjadi harmonisasi peraturan perundang-undangan yang tidak menimbulkan ketidakjelasan dan inkonsistensi dalam implementasinya;
2. Penyederhanaan prosedur: Penerapan sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik (SPSIE) pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di beberapa kota yang dimulai di Batam, pembatalan perda bermasalah dan pengurangan biaya untuk memulai usaha seperti Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);



3. Logistik nasional: Pengembangan dan penetapan Sistem Logistik Nasional yang menjamin kelancaran arus barang dan mengurangi biaya transaksi/ekonomi biaya tinggi;
4. Sistem informasi: Beroperasinya secara penuh *National Single Window* (NSW) untuk impor (sebelum Januari 2010) dan ekspor. Percepatan realisasi proses penyelesaian bea cukai di luar pelabuhan dengan implementasi tahap pertama *Custom Advanced Trade System* (CATS) di *dry port* Cikarang;
5. KEK: Pengembangan KEK di 5 (lima) lokasi melalui skema Public-Private Partnership sebelum 2012;
6. Kebijakan ketenagakerjaan: Sinkronisasi kebijakan ketenagakerjaan dan iklim usaha dalam rangka memperluas penciptaan lapangan kerja.

### Prioritas 8: Energi

Pencapaian ketahanan energi nasional yang menjamin kelangsungan pertumbuhan nasional melalui restrukturisasi kelembagaan dan optimalisasi pemanfaatan energi alternatif seluas-luasnya.

Oleh karena itu, substansi inti program aksi bidang energi adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan: Pengambilan kewenangan atas kebijakan energi ke dalam Kantor Presiden untuk memastikan penanganan energi nasional yang terintegrasi sesuai dengan Rencana Induk Energi Nasional;
2. Restrukturisasi BUMN: Transformasi dan konsolidasi BUMN bidang energi dimulai dari PLN dan Pertamina yang selesai selambat-lambatnya 2010 dan diikuti oleh BUMN lainnya;
3. Kapasitas energi: Peningkatan kapasitas pembangkit listrik sebesar rata-rata 3.000 MW per tahun mulai 2010 dengan rasio elektrifikasi yang mencakup 62% pada 2010 dan 80% pada 2014; dan produksi minyak bumi sebesar lebih dari 1,01 juta barrel per hari mulai 2014;
4. Energi alternatif: Peningkatan pemanfaatan energi terbarukan termasuk energi alternatif *geothermal* sehingga mencapai 2.000 MW pada 2012 dan 5.000 MW pada 2014 dan dimulainya produksi *coal bed methane* untuk membangkitkan listrik pada 2011 disertai pemanfaatan potensi tenaga surya, *microhydro*, serta nuklir secara bertahap;

5. Hasil ikutan dan turunan minyak bumi/gas: Revitalisasi industri pengolah hasil ikutan/turunan minyak bumi dan gas sebagai bahan baku industri tekstil, pupuk dan industri hilir lainnya;
6. Konversi menuju penggunaan gas: Perluasan program konversi minyak tanah ke gas sehingga mencakup 42 juta Kepala Keluarga pada 2010; penggunaan gas alam sebagai bahan bakar angkutan umum perkotaan di Palembang, Surabaya, dan Denpasar.

#### **Prioritas 9: Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana**

Konservasi dan pemanfaatan lingkungan hidup mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang keberlanjutan, disertai penguasaan dan pengelolaan risiko bencana untuk mengantisipasi perubahan iklim.

Oleh karena itu, substansi inti program aksi bidang lingkungan hidup dan pengelolaan bencana adalah sebagai berikut:

1. Perubahan iklim: Peningkatan keberdayaan pengelolaan lahan gambut, peningkatan hasil rehabilitasi seluas 500,000 ha per tahun, dan penekanan laju deforestasi secara sungguh-sungguh di antaranya melalui kerja sama lintas kementerian terkait serta optimalisasi dan efisiensi sumber pendanaan seperti dana Iuran Hak Pemanfaatan Hutan (IHPH), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), dan Dana Reboisasi;
2. Pengendalian Kerusakan Lingkungan: Penurunan beban pencemaran lingkungan melalui pengawasan ketaatan pengendalian pencemaran air limbah dan emisi di 680 kegiatan industri dan jasa pada 2010 dan terus berlanjut; Penurunan jumlah *hotspot* kebakaran hutan sebesar 20% per tahun dan penurunan tingkat polusi keseluruhan sebesar 50% pada 2014; Penghentian kerusakan lingkungan di 11 Daerah Aliran Sungai yang rawan bencana mulai 2010 dan seterusnya;
3. Sistem Peringatan Dini: Penjaminan berjalannya fungsi Sistem Peringatan Dini Tsunami (TEWS) dan Sistem Peringatan Dini Cuaca (MEWS) mulai 2010 dan seterusnya, serta Sistem Peringatan Dini Iklim (CEWS) pada 2013;
4. Penanggulangan bencana: Peningkatan kemampuan penanggulangan bencana melalui: 1) penguatan kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat dalam usaha mitigasi risiko serta penanganan bencana dan bahaya kebakaran hutan di 33 propinsi, dan 2) pembentukan tim gerak cepat (unit khusus penanganan bencana) dengan dukungan peralatan dan alat transportasi yang memadai dengan basis di dua lokasi strategis (Jakarta dan Malang) yang dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

## **Prioritas 10: Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-Konflik**

Program aksi untuk daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik ditujukan untuk pengutamaan dan penjaminan pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar serta keberlangsungan kehidupan damai di wilayah pascakonflik dengan substansi inti sebagai berikut:

1. Kebijakan: Pelaksanaan kebijakan khusus dalam bidang infrastruktur dan pendukung kesejahteraan lainnya yang dapat mendorong pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik selambat-lambatnya dimulai pada 2011;
2. Kerjasama internasional: Pembentukan kerja sama dengan negara-negara tetangga dalam rangka pengamanan wilayah dan sumber daya kelautan;
3. Keutuhan wilayah: Penyelesaian pemetaan wilayah perbatasan RI dengan Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste, dan Filipina pada 2010;
4. Daerah tertinggal: Pengentasan daerah tertinggal di sedikitnya 50 kabupaten paling lambat 2014.

## **Prioritas 11: Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi**

Pengembangan dan perlindungan kebhinekaan budaya, karya seni, dan ilmu serta apresiasinya, untuk memperkaya khazanah artistik dan intelektual bagi tumbuh-mapannya jati diri dan kemampuan adaptif kompetitif bangsa yang disertai pengembangan inovasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang dilandasi oleh keunggulan Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan.

Oleh karena itu, substansi inti program aksi bidang kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi adalah sebagai berikut:

1. Perawatan: Penetapan dan pembentukan pengelolaan terpadu untuk pengelolaan cagar budaya, revitalisasi museum dan perpustakaan di seluruh Indonesia ditargetkan sebelum Oktober 2011;
2. Sarana: Penyediaan sarana yang memadai bagi pengembangan, pendalaman dan pagelaran seni budaya di kota besar dan ibu kota kabupaten selambat-lambatnya Oktober 2012;
3. Penciptaan: Pengembangan kapasitas nasional untuk pelaksanaan penelitian, penciptaan dan inovasi dan memudahkan akses dan penggunaannya oleh masyarakat luas;

4. Kebijakan: Peningkatan perhatian dan kesertaan pemerintah dalam program-program seni budaya yang diinisiasi oleh masyarakat dan mendorong berkembangnya apresiasi terhadap kemajemukan budaya;
5. Inovasi teknologi: Peningkatan keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif yang mencakup pengelolaan sumber daya maritim menuju ketahanan energi, pangan, dan antisipasi perubahan iklim; dan pengembangan penguasaan teknologi dan kreativitas pemuda.

Pada dasarnya kesebelas Prioritas Nasional di atas merupakan upaya untuk :

**Pertama, Percepatan Pembangunan Infrastruktur Fisik** (meliputi Prioritas 5 Ketahanan Pangan, Prioritas 6 Infrastruktur, Prioritas 8 Energi, serta Prioritas 10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-Konflik).

**Kedua, Perbaikan Infrastruktur Lunak** (Prioritas 1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola dan Prioritas 7 Iklim Investasi dan Iklim Usaha)

**Ketiga, Penguatan Infrastruktur Sosial** (Prioritas 2 Pendidikan, Prioritas 3 Kesehatan, Prioritas 4 Penanggulangan Kemiskinan dan Prioritas 9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana)

**Keempat, Pembangunan Kreativitas** (Prioritas 11 Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi).

### **Prioritas Lainnya**

Di samping sebelas prioritas nasional tersebut di atas, upaya untuk mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Nasional juga melalui pencapaian prioritas nasional lainnya di bidang politik, hukum, dan keamanan, di bidang perekonomian, dan di bidang kesejahteraan rakyat.

Di bidang politik, hukum, dan keamanan mencakup: (a) pelaksanaan koordinasi terhadap mekanisme prosedur penanganan terorisme; (b) pelaksanaan program deradikalisasi untuk menangkal terorisme; (c) peningkatan peran Republik Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia; (d) peningkatan pelayanan dan perlindungan tenaga kerja indonesia (TKI) di luar negeri; (e) penguatan dan pemantapan hubungan kelembagaan pencegahan dan pemberantasan korupsi; (f) pelaksanaan perlindungan saksi dan pelapor; (g) pengembalian aset (*asset recovery*); (h) peningkatan kepastian hukum; (i) penguatan perlindungan HAM; dan (i) pemberdayaan industri strategis pertahanan.

Di bidang perekonomian mencakup: (a) pelaksanaan pengembangan industri sesuai dengan Peraturan Presiden No.28/2008 tentang Kebijakan Industri Nasional; (b) peningkatan peran dan kemampuan Republik Indonesia dalam diplomasi perdagangan internasional; (c) peningkatan pelayanan dan perlindungan tenaga kerja indonesia



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

(TKI) selama proses penyiapan, pemberangkatan, dan kepulangan; serta (d) peningkatan upaya pelayanan dan perlindungan tenaga kerja indonesia (TKI) di luar negeri.

Di bidang kesejahteraan rakyat mencakup: (a) pelaksanaan ibadah haji yang tertib dan lancar paling lambat pada 2010; (b) peningkatan kerukunan umat beragama melalui pembentukan dan peningkatan efektivitas Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB); (c) peningkatan jumlah wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara sebesar 20% secara bertahap dalam 5 tahun; (d) promosi 10 tujuan pariwisata Indonesia melalui saluran pemasaran dan pengiklanan yang kreatif dan efektif; (e) perbaikan dan peningkatan kualitas jaringan prasarana dan sarana pendukung pariwisata; (f) peningkatan kapasitas pemerintah dan pemangku kepentingan pariwisata lokal untuk mencapai tingkat mutu pelayanan dan *hospitality management* yang kompetitif di kawasan Asia; (g) perumusan kebijakan dan pedoman bagi penerapan pengarusutamaan (*mainstreaming*) Gender dan Anak (PUG & A) oleh Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian lainnya; (h) pencapaian posisi papan atas pada *South East Asia (SEA) Games* pada tahun 2011, peningkatan perolehan medali di Asian Games tahun 2010 dan Olimpiade tahun 2012; (i) peningkatan *character building* melalui gerakan, revitalisasi dan konsolidasi gerakan kepemudaan; serta (j) revitalisasi gerakan pramuka.

#### 4.3 Arah Kebijakan Bidang-Bidang Pembangunan

Pembangunan Nasional dilakukan secara menyeluruh di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Untuk itu, perencanaan pembangunan nasional dikelompokkan ke dalam 9 (sembilan) bidang pembangunan menurut Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, yaitu:

1. Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama
2. Bidang Ekonomi
3. Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
4. Bidang Sarana dan Prasarana
5. Bidang Politik
6. Bidang Pertahanan dan Keamanan
7. Bidang Hukum dan Aparatur
8. Bidang Wilayah dan Tataruangan
9. Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Arah dan kebijakan masing-masing bidang pembangunan tersebut diuraikan dalam Buku II.

Sinergi antar bidang pembangunan sangat penting untuk kelancaran pelaksanaan dan tercapainya berbagai sasaran dalam RPJMN 2010-2014. Pada dasarnya pembangunan di setiap bidang untuk mencapai keberhasilan, tidak dapat

berdiri sendiri, tetapi saling terkait dengan pembangunan di bidang lainnya. Dengan pembiayaan yang terbatas, untuk mencapai efektifitas, efisiensi dan hasil yang maksimal dalam mencapai sasaran pembangunan, harus dilakukan sinkronisasi pembangunan di setiap bidang, sehingga kegiatan di setiap bidang saling terpadu, mendukung dan saling memperkuat.

Selanjutnya, di dalam melaksanakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMN terdapat prinsip pengarusutamaan yang menjadi landasan operasional bagi seluruh pelaksanaan pembangunan. Prinsip-prinsip pengarusutamaan ini diarahkan untuk dapat tercermin di dalam keluaran pada kebijakan pembangunan, yang mencakup: (1) pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan; (2) pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik; dan (3) pengarusutamaan gender. Prinsip-prinsip pengarusutamaan ini akan menjadi jiwa dan semangat yang mewarnai berbagai kebijakan pembangunan di setiap bidang pembangunan. Dengan dijwainya prinsip-prinsip pengarustamaan ini, pembangunan jangka menengah ini akan memperkuat upaya mengatasi berbagai permasalahan yang ada.

RPJMN 2010-2014 ini juga diarahkan untuk menjadi sebuah rencana kerja jangka menengah yang bersifat menyeluruh. Persoalan yang bersifat lintas bidang harus ditangani secara holistik dan tidak terfragmentasi sehingga dapat menyelesaikan persoalan yang sebenarnya. Pencapaian kinerja pembangunan tersebut menjadi komitmen semua pihak khususnya instansi pemerintah untuk dapat merealisasikannya secara sungguh-sungguh untuk kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia. Oleh karena itu disusun pula rencana kerja yang bersifat lintas bidang meliputi (1) penanggulangan kemiskinan ; (2) perubahan iklim global; (3) pembangunan kelautan berdimensi kepulauan, dan (4) perlindungan anak. Kebijakan lintas bidang ini akan menjadi sebuah rangkaian kebijakan antarbidang yang terpadu meliputi prioritas, fokus prioritas serta kegiatan prioritas lintas bidang untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan yang semakin kompleks.

#### **4.4 Arah dan Kebijakan Pembangunan Kewilayah**

Salah satu misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025 adalah terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan ditandai oleh tingkat pembangunan yang makin merata ke seluruh wilayah diwujudkan dengan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, termasuk berkurangnya kesenjangan antarwilayah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, strategi dan arah kebijakan pembangunan kewilayah adalah sebagai berikut :

1. Mendorong pertumbuhan wilayah-wilayah potensial di luar Jawa-Bali dan Sumatera dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa-Bali dan Sumatera.



2. Meningkatkan keterkaitan antarwilayah melalui peningkatan perdagangan antarpulau untuk mendukung perekonomian domestik.
3. Meningkatkan daya saing daerah melalui pengembangan sektor-sektor unggulan di tiap wilayah.
4. Mendorong percepatan pembangunan daerah tertinggal, kawasan strategis dan cepat tumbuh, kawasan perbatasan, kawasan terdepan, kawasan terluar, dan daerah rawan bencana.
5. Mendorong pengembangan wilayah laut dan sektor-sektor kelautan.

Strategi pengembangan wilayah dilaksanakan dalam kerangka sinergi pusat-daerah dan antardaerah dalam seluruh proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi yang mencakup kerangka kebijakan, regulasi, anggaran, kelembagaan, dan pengembangan wilayah. Salah satu faktor terpenting dalam sinergi pusat dan daerah adalah terwujudnya sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah sehingga setiap kebijakan dirumuskan dengan memperhatikan dan menampung aspirasi daerah, serta mengutamakan penyelesaian permasalahan secara nyata di daerah. Selain itu, sinergi kebijakan juga dimaksudkan agar pemerintah daerah mampu memahami dan melaksanakan kebijakan pemerintah pusat dengan efisien dan efektif, serta mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut dengan berbagai sumber daya yang tersedia.

Sinergi dalam perencanaan kebijakan pembangunan pusat dan daerah, baik lima tahunan maupun tahunan akan dilaksanakan dengan mengoptimalkan penyelenggaran Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di semua tingkat pemerintahan (desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan nasional) sehingga terwujud sinkronisasi antara kebijakan, program dan kegiatan antarsektor, antarwaktu, antarwilayah, dan antara pusat dan daerah. Selain itu, Musrenbang juga diharapkan dapat lebih mendorong terciptanya proses partisipatif semua pelaku pembangunan dan berkembangnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan.

Sinergi dalam kerangka regulasi diarahkan untuk mendorong harmonisasi peraturan perundang-undangan baik dalam bentuk Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah sehingga mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang tercantum dalam RPJMN 2010-2014. Selain itu, sinergi juga diarahkan untuk meningkatkan kesepahaman, kesepakatan dan ketaatan dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan. Sinergi tersebut dilaksanakan selaras dengan upaya penataan dan penguatan kerangka perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah melalui restrukturisasi dan penataan instrumen pendanaan melalui transfer ke daerah termasuk dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) dan dana bagi hasil (DBH) yang secara

keseluruhan disebut dana perimbangan (DP), serta dana otonomi khusus (Dana Otsus) untuk menjaga harmonisasi kepentingan nasional dan kebutuhan daerah.

Selain itu, dalam upaya menjamin efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan dana dekonsentrasi untuk mencapai prioritas pembangunan nasional, memperkuat kapasitas pemerintah daerah, dan meningkatkan penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan di daerah, langkah yang akan ditempuh dalam lima tahun mendatang adalah (1) mempertegas kerangka organisasi dan personil pelaksana pemanfaatan dana dekonsentrasi; (2) sinkronisasi perencanaan program antara kementerian/lembaga dan satuan kerja perangkat daerah; dan (3) penentuan sasaran fungsional program secara bersama.

Sinergi Pusat-Daerah dalam bidang pemerintahan diarahkan untuk memperbaiki tata kelola kelembagaan pemerintahan daerah dan meningkatkan kapasitas aparatur daerah. Dalam upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan daerah akan dilakukan upaya percepatan reformasi organisasi perangkat daerah agar mampu menyelenggarakan urusan pemerintahan secara lebih efisien dan efektif, meningkatkan mutu dan jangkauan publik pelayanan sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM) yang ditetapkan oleh pemerintah Pusat, melaksanakan kaidah penyelenggaraan pemerintahan yang baik; serta meningkatkan daya saing daerah. Sementara itu, upaya peningkatan kapasitas aparatur daerah diarahkan untuk menjadi aparatur yang lebih handal, kompeten dan profesional dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Dalam mempercepat pengembangan wilayah akan dilakukan upaya untuk mendorong penataan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang dengan prinsip harmonisasi kepentingan nasional dan kebutuhan daerah serta keserasian antardaerah. Strategi pengembangan wilayah ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kementerian/Lembaga dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) kementerian/lembaga dengan memperhatikan potensi dan permasalahan wilayah serta menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Sejalan dengan pelaksanaan 11 prioritas nasional, arah dan kebijakan pengembangan kewilayahan ditujukan untuk mewujudkan sasaran-sasaran 11 prioritas nasional sejalan dengan isu strategis yang ada di setiap wilayah.

#### **4.4.1 Pengembangan Wilayah Pulau-Pulau Besar**

Kebijakan pengembangan wilayah diarahkan untuk mendorong percepatan pembangunan di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua dengan tetap mempertahankan momentum pembangunan di wilayah Jawa-Bali dan Sumatera. Percepatan pembangunan wilayah ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengurangi kesenjangan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

## I. Pengembangan Wilayah Sumatera

Wilayah pulau Sumatera merupakan salah satu pulau terbesar di Indonesia yang berperan penting dalam mendukung peningkatan kinerja pembangunan nasional. Wilayah Sumatera memiliki posisi geografis yang relatif strategis di wilayah barat Indonesia dan berhadapan langsung dengan kawasan Asia Timur yang menjadi salah pusat perekonomian dunia dan memiliki hubungan interaksi paling dekat dengan pulau Jawa sebagai pusat perekonomian di Indonesia.

Pembangunan wilayah Sumatera diarahkan untuk menjadi pusat produksi dan industri pengolahan hasil pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan; lumbung energi nasional, pusat perdagangan dan pariwisata sehingga wilayah Sumatera menjadi salah satu wilayah utama dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN. Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), pengembangan wilayah Sumatera diarahkan untuk (1) memantapkan interaksi antar-kawasan pesisir timur, kawasan tengah, dan kawasan, pesisir barat Sumatera melalui pengembangan sistem jaringan transportasi darat, laut, dan transportasi udara lintas Sumatera yang handal; (2) mendorong berfungsinya pusat-pusat permukiman perkotaan sebagai pusat pelayanan jasa koleksi dan distribusi di Pulau Sumatera; (3) mengembangkan akses bagi daerah terisolir dan pulau-pulau kecil di pesisir barat dan timur Sumatera sebagai sentra produksi perikanan, pariwisata, minyak dan gas bumi ke pusat kegiatan industri pengolahan serta pusat pemasaran lintas pulau dan lintas negara; (4) mempertahankan kawasan lindung sekurang-kurangnya 40% dari luas Pulau Sumatera dalam rangka mengurangi resiko dampak bencana lingkungan yang dapat mengancam keselamatan masyarakat dan asset-asset sosial-ekonominya yang berbentuk prasarana, baik pusat permukiman maupun kawasan budidaya; (5) mengembangkan komoditas unggulan wilayah yang memiliki daya saing tinggi melalui kerjasama lintas sektor dan lintas wilayah provinsi dalam pengelolaan dan pemasarannya dalam rangka mendorong kemandirian akses ke pasar global dengan mengurangi ketergantungan pada negara-negara tetangga; (6) menghindari konflik pemanfaatan ruang pada kawasan perbatasan lintas wilayah meliputi lintas wilayah provinsi, lintas wilayah kabupaten dan kota; (7) mempertahankan dan melestarikan budaya lokal dari pengaruh negatif globalisasi dan liberalisasi perdagangan dunia; (8) memantapkan keterkaitan antara kawasan andalan, kawasan budidaya lainnya, berikut kota-kota pusat-pusat kegiatan di dalamnya dengan kawasan-kawasan dan pusat-pusat pertumbuhan antar pulau di wilayah nasional, serta dengan pusat-pusat pertumbuhan di kawasan subregional ASEAN, Asia Pasifik dan kawasan internasional lainnya.

Pusat-pusat pengembangan di wilayah Sumatera yang merupakan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) diarahkan untuk: (1) mendorong pengembangan kota Lhokseumawe, Dumai dan Batam di wilayah Timur dan kota Padang di wilayah Barat sebagai pusat pelayanan primer; (2) mengendalikan pengembangan kawasan perkotaan Medan-Binjai-Deli Serdang, Bandar Lampung dan sekitarnya (dsk), dan Palembang dsk,

sebagai pusat pelayanan primer yang sesuai dengan daya dukung lingkungannya; dan (3) mendorong pengembangan kota Pekanbaru dan Jambi sebagai pusat pelayanan sekunder.

## II. Pengembangan Wilayah Jawa-Bali

Pengembangan wilayah Jawa dan Bali sebagai pusat kegiatan ekonomi nasional memiliki tantangan yang kompleks. Wilayah Jawa Bali relatif maju dan berkembang dibanding wilayah lainnya. Namun, dalam 20 tahun ke depan Wilayah Jawa Bali akan menghadapi berbagai isu strategis. *Pertama*, peningkatan jumlah penduduk perkotaan. *Kedua*, perubahan struktur ekonomi yang mengarah pada peningkatan sektor jasa. *Ketiga*, menurunnya daya dukung sumber daya alam dan lingkungan. *Keempat*, meningkatnya kelas menengah yang disertai dengan menguatnya kesadaran tentang hak-hak dasar. *Kelima*, pergeseran cara pandang, nilai dan gaya hidup yang lebih mengglobal. Berbagai isu strategis tersebut akan mempunyai implikasi pada perubahan tatanan sosial, ekonomi, sumberdaya, tata ruang, budaya dan politik.

Dalam lima tahun ke depan, pembangunan regional Jawa-Bali diarahkan untuk tetap mempertahankan fungsi lumbung pangan nasional, mengembangkan industri pengolahan secara terkendali, memperkuat interaksi perdagangan, serta meningkatkan mutu pelayanan jasa dan pariwisata bertaraf internasional sebagai wilayah utama dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN, dengan tetap memperhatikan keseimbangan ekosistem dan kaidah pembangunan yang berkelanjutan.

Sesuai dengan arahan RTRWN, pengembangan wilayah Jawa-Bali diarahkan untuk: (1) mempertahankan Pulau Jawa-Bali sebagai lumbung pangan nasional melalui berbagai upaya menetapkan dan mempertahankan kawasan produksi pangan; (2) mempertahankan dan merehabilitasi kawasan lindung yang semakin terdesak oleh kegiatan budidaya hingga mencapai luasan minimal 30% dari keseluruhan luas Wilayah Pulau Jawa-Bali, khususnya di Pulau Jawa bagian selatan dan Pulau Bali bagian tengah; (3) mempertahankan sumber-sumber air dan merehabilitasi daerah resapan air untuk menjaga ketersedian air sepanjang tahun; (4) mengendalikan pertumbuhan pusat-pusat permukiman perkotaan dan perdesaan yang berpotensi mengganggu kawasan-kawasan yang rawan bencana serta mengancam keberadaan kawasan lindung dan kawasan produksi pangan melalui pengendalian aspek kependudukan dan kegiatan sosial-ekonominya; (5) mengendalikan secara ketat pengembangan industri hingga ambang batas toleransi lingkungan yang aman bagi keberlanjutan pembangunan; (6) mengintegrasikan kegiatan industri ke dalam zona-zona dan kawasan-kawasan industri yang telah ditetapkan; (7) mendorong pusat-pusat permukiman perkotaan sebagai pusat pelayanan jasa koleksi dan distribusi di Pulau Jawa-Bali; (8) mengembangkan zona-zona pemanfaatan minyak dan gas untuk wilayah perairan laut dan/atau lepas pantai; (9) mempertahankan dan merehabilitasi kawasan cagar budaya.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

Pusat-pusat pengembangan di Wilayah Jawa-Bali yang merupakan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) diarahkan untuk: (1) mengendalikan pengembangan secara fisik kawasan perkotaan Jabodetabek, Bandung, Gerbangkertosusila, dan Denpasar sebagai pusat pelayanan primer dengan memperhatikan daya dukung lingkungannya; (2) mendorong pengembangan kawasan perkotaan Yogyakarta dan sekitarnya dan perkotaan Semarang sebagai pusat pelayanan primer; (3) mendorong pengembangan kawasan perkotaan Serang dan sekitarnya, Cilacap dan sekitarnya, Cirebon dan sekitarnya, dan Surakarta dan sekitarnya sebagai pusat pelayanan sekunder.

### III. Pengembangan Wilayah Kalimantan

Pengembangan wilayah Kalimantan mempunyai peran yang sangat penting dalam mendukung peningkatan kinerja pembangunan nasional. Wilayah Kalimantan memiliki posisi geografis yang relatif strategis di wilayah tengah Indonesia, berhadapan langsung dengan pulau-pulau besar di Indonesia. Di sebelah utara, wilayah Kalimantan berbatasan langsung dengan Negara Malaysia. Posisi ini sangat penting mengingat dalam konteks penguatan keterkaitan antarwilayah.

Pembangunan wilayah Kalimantan diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah perkebunan, peternakan, perikanan, dan pengolahan hasil hutan; serta meningkatkan nilai tambah hasil pertambangan dan berfungsi sebagai lumbung energi nasional dengan tetap memperhatikan keseimbangan ekosistem dan kaidah pembangunan yang berkelanjutan. Sesuai dengan RTRWN, pengembangan wilayah Kalimantan diarahkan untuk: (1) memelihara dan memulihkan kawasan-kawasan yang berfungsi lindung dan kritis lingkungan dalam rangka mendukung keberlanjutan pemanfaatan sumber daya kehutanan, pertambangan, dan pertanian, serta sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil, serta mengurangi resiko dampak bencana alam; (2) mendayagunakan posisi strategis secara geografis yang berdekatan dengan negara bagian Malaysia di Sarawak dan Sabah dalam kerangka kerjasama ekonomi subregional BIMP-EAGA (*Brunei Darussalam – Indonesia – Malaysia – Philippines East ASEAN Growth Area*); (3) mendorong percepatan penanganan kawasan perbatasan antar negara dengan negara Malaysia di Serawak dan Sabah sebagai beranda depan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia di Pulau Kalimantan; (4) meningkatkan aksesibilitas internal wilayah Pulau Kalimantan untuk mewujudkan sinergi pengembangan potensi wilayah dan pemerataan tingkat perkembangan antar wilayah melalui percepatan fungsionalisasi jaringan jalan lintas Kalimantan secara terpadu dengan pengembangan jaringan angkutan sungai, angkutan laut, jaringan jalan rel kereta api dan angkutan udara; (5) mendorong peran kawasan andalan sebagai penggerak pengembangan ekonomi wilayah Kalimantan; (6) mengembangkan industri pengolahan yang berbasis pada sektor kelautan, pertanian, perkebunan, pertambangan, dan kehutanan secara berkelanjutan, serta industri pariwisata yang berbasis pada penguatan dan pengembangan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat lokal dan kelestarian

lingkungan hidup; (7) mendorong pusat-pusat permukiman perkotaan sebagai pusat pelayanan jasa koleksi dan distribusi di Pulau Kalimantan.

Pusat-pusat pengembangan di Pulau Kalimantan yang merupakan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) diarahkan untuk: (1) mendorong pengembangan kota Balikpapan, Banjarmasin, dan Pontianak sebagai pusat pelayanan primer; (2) mendorong pengembangan kota Palangka Raya, Samarinda, Bontang, dan Tarakan, sebagai pusat pelayanan sekunder. Selanjutnya, pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) di Pulau Kalimantan terutama kawasan perbatasan negara diarahkan untuk mendorong pengembangan Kota Aruk, Jagoibabang, Nangabadau, Entikong, Jasa, Nunukan, Simanggaris, Long Midang, dan Long Pahangai.

#### **IV. Pengembangan Wilayah Sulawesi**

Pengembangan wilayah Sulawesi, sebagai salah satu pulau besar di Indonesia, sangat penting dalam mendukung peningkatan kinerja pembangunan nasional. Wilayah Sulawesi berpotensi besar sebagai pusat pertumbuhan di kawasan Timur Indonesia dan sub-regional ASEAN. Dengan kondisi ini, wilayah Sulawesi memiliki akses perdagangan yang cukup strategis.

Pembangunan Wilayah Sulawesi diarahkan untuk menjadi salah satu lumbung pangan nasional dengan meningkatkan produktivitas dan nilai tambah pertanian tanaman pangan, perkebunan dan perikanan; mengembangkan bioenergi; serta meningkatkan dan memperluas perdagangan, jasa dan pariwisata bertaraf internasional. Sesuai dengan RTRWN pengembangan wilayah Sulawesi diarahkan untuk: (1) mendorong perkembangan peran Pulau Sulawesi sebagai salah satu wilayah yang memiliki peluang-peluang eksternal cukup besar; (2) mengembangkan komoditas unggulan Pulau Sulawesi yang memiliki daya saing tinggi melalui kerjasama lintas sektor dan lintas wilayah provinsi dalam pengelolaan dan pemasarannya; (3) memprioritaskan kawasan-kawasan tertinggal dan kawasan perbatasan dalam rangka pencapaian pemerataan tingkat perkembangan antar wilayah, termasuk pengembangan pulau-pulau kecil dan gugus kepulauan; (4) memanfaatkan potensi sumber daya di darat dan laut secara optimal serta mengatasi potensi konflik lintas wilayah provinsi yang terjadi di beberapa wilayah perairan dan daratan; (5) mempertahankan keberadaan sentra-sentra produksi pangan nasional, khususnya bagi sawah-sawah beririgasi teknis dari ancaman konversi lahan; (6) memantapkan keterkaitan antara kawasan andalan dan kawasan budidaya lainnya, berikut kota-kota pusat-pusat kegiatan di dalamnya, dengan kawasan-kawasan dan pusat-pusat pertumbuhan antar pulau di wilayah nasional, serta dengan pusat-pusat pertumbuhan di kawasan subregional ASEAN, Asia Pasifik dan kawasan internasional lainnya dalam menciptakan daya saing wilayah; (7) mempertahankan dan merehabilitasi kawasan lindung hingga mencapai luasan minimal 40% dari luas Pulau Sulawesi dalam rangka mengurangi resiko dampak bencana lingkungan yang dapat mengancam keselamatan masyarakat dan asset-asset



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

sosial-ekonominya yang berbentuk prasarana, pusat permukiman maupun kawasan budidaya; (8) mempertahankan dan merehabilitasi kawasan cagar budaya sebagai asset sosialbudaya masyarakat yang memiliki nilai-nilai budaya tradisional dan kearifan lokal; (9) mengembangkan industri pengolahan yang berbasis pada sektor kelautan, pertanian, perkebunan, pertambangan, dan kehutanan secara berkelanjutan; dan (10) mengembangkan pemanfaatan ruang untuk mewadahi dinamika kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya.

Pusat-Pusat pengembangan di Pulau Sulawesi yang merupakan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) diarahkan untuk: (1) mendorong optimalisasi pengembangan kawasan perkotaan Maminasata (Makassar-Maros-Sungguminasa-Takalar) dan Manado - Bitung sebagai pusat pelayanan primer yang sesuai dengan daya dukung lingkungannya; dan (2) mendorong pengembangan kota-kota Gorontalo, Palu, Kendari dan Mamuju sebagai pusat pelayanan sekunder.

## V. Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara

Pengembangan wilayah Nusa Tenggara, sebagai salah satu wilayah kepulauan dengan gugusan pulau yang tersebar dan berbatasan dengan negara tetangga Timor Leste, perlu dilakukan dengan kebijakan dan program yang terpadu dan tepat sesuai dengan potensi yang dimiliki dan berbagai hambatan yang dihadapi. Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara yang terletak di sebelah timur wilayah Jawa-Bali belum sepenuhnya mendapat manfaat dari interaksi ekonomi dengan pusat kegiatan ekonomi nasional tersebut.

Pembangunan wilayah Kepulauan Nusa Tenggara diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah perkebunan, peternakan dan perikanan dengan memperhatikan keterkaitan wilayah-wilayah pulau. Sesuai dengan RTRWN, pengembangan wilayah Nusa Tenggara diarahkan untuk: (1) mengembangkan kota-kota di kawasan pesisir sebagai pusat pelayanan kegiatan industri kemaritiman terpadu sebagai sektor basis yang didukung oleh prasarana dan sarana yang memadai, khususnya transportasi, energi, dan sumber daya air; (2) mengembangkan wilayah darat, laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil sebagai satu kesatuan wilayah Kepulauan Nusa Tenggara melalui kegiatan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang terpadu didukung oleh prasarana dan sarana yang memadai; (3) meningkatkan aksesibilitas antar kota-kota pesisir yang menghubungkan poros Banda Aceh-Atambua, sehingga membentuk keterkaitan sosial ekonomi yang kuat; (4) meningkatkan keterkaitan pengembangan antarkawasan (Kawasan Andalan dan Kawasan Andalan Laut) untuk mengoptimalkan potensi wisata budaya dan wisata alam, termasuk wisata bahari, dengan mengembangkan jalur wisata terpadu Bali -Lombok -Komodo-Tana Toraja; (5) menetapkan fokus spesialisasi penanganan komoditas unggulan termasuk pemasarannya, yang berorientasi ekspor, dengan mengutamakan pengelolaan sumberdaya alam terbarukan berdasarkan prinsip kemanfaatan bersama baik

antarwilayah maupun antarkawasan; (6) memanfaatkan keberadaan Forum Kerjasama Daerah dan Forum Kerjasama Ekonomi Internasional baik secara bilateral dengan Australia dan Timor Leste, maupun secara multilateral dalam konteks kerjasama ekonomi sub-regional; (7) meningkatkan perlindungan kawasan konservasi nasional di Kepulauan Nusa Tenggara khususnya konservasi laut agar kelestariannya terpelihara; (8) mengelola kawasan perbatasan darat dengan Timor Leste dan Kawasan perbatasan laut dengan Timor Leste dan Australia sebagai ‘beranda depan’ Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pusat pengembangan di Wilayah Nusa Tenggara yang merupakan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) diarahkan untuk mendorong pengembangan kota Mataram dan Kupang sebagai pusat pelayanan primer yang sesuai dengan daya dukung lingkungannya.

## **VI. Pengembangan Wilayah Maluku**

Pengembangan wilayah Kepulauan Maluku, sebagai salah satu wilayah kepulauan dengan gugusan pulau yang tersebar dan berbatasan dengan negara tetangga, perlu dilakukan dengan kebijakan dan program yang terpadu dan tepat sesuai dengan potensi yang dimiliki dan berbagai hambatan yang dihadapi. Pembangunan wilayah Maluku diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah perkebunan, peternakan dan perikanan dengan memperhatikan keterkaitan wilayah-wilayah pulau.

Sesuai dengan RTRWN, pengembangan wilayah Maluku diarahkan untuk: (1) mengembangkan kota-kota pesisir sebagai pusat pelayanan kegiatan industri kemaritiman terpadu yang merupakan sektor basis dengan dukungan prasarana dan sarana yang memadai, khususnya tansportasi, energi, dan sumber daya air; (2) mengembangkan wilayah darat, laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil sebagai satu kesatuan wilayah Kepulauan Maluku melalui kegiatan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang terpadu yang didukung oleh prasarana dan sarana yang memadai; (3) mempertahankan kawasan konservasi untuk menjamin daya dukung lingkungan yang optimal bagi pengembangan wilayah; (4) memacu pertumbuhan ekonomi wilayah Kepulauan Maluku melalui pengembangan sektor-sektor unggulan yang berbasis sumber daya setempat dan meningkatkan keterkaitan antarpusat-pusat pertumbuhan di darat, pesisir, dan pulau-pulau kecil; (5) memanfaatkan sumber daya alam secara produktif dan efisien, agar terhindar dari pemborosan sehingga dapat memberi manfaat sebesar-besarnya berdasarkan prinsip-prinsip kelestarian; serta (6) meningkatkan ketersediaan, kualitas, dan memperluas jangkauan pelayanan prasarana dasar, khususnya transportasi laut dan udara yang didukung oleh transportasi antar moda secara terpadu dan optimal dengan mengikutisertakan dunia usaha.

Pengembangan PKN di Kepulauan Maluku diarahkan untuk mengendalikan pengembangan kota Ambon dan Ternate - Sofifi, sebagai pusat pelayanan primer yang sesuai dengan daya dukung lingkungannya.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

## VII. Pengembangan Wilayah Papua

Pengembangan wilayah Pulau Papua sebagai salah satu pulau terbesar di Indonesia dengan posisi paling timur dan berbatasan langsung dengan negara tetangga Papua Nugini memiliki tantangan yang lebih sulit jika dibanding dengan wilayah lainnya. Tantangan terbesar adalah memberikan perhatian yang sama terhadap seluruh wilayah pesisir, wilayah pegunungan, dan wilayah dataran, serta sekaligus membangun keterkaitan antarwilayah dalam satu kesatuan tata ruang wilayah.

Pembangunan wilayah Papua diarahkan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia; produktivitas dan nilai tambah perkebunan, peternakan dan perikanan dengan memperhatikan keterkaitan wilayah-wilayah pulau. Sesuai RTRWN, pengembangan wilayah Papua diarahkan untuk: (1) mendukung peningkatan serta memperkuat persatuan, kesatuan dan keutuhan kehidupan bangsa dan pertahanan negara; (2) menempatkan hak ulayat dalam penataan ruang sebagai salah satu upaya untuk mempertahankan nilai-nilai sosial budaya setempat; (3) memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara produktif dan efisien agar terhindar dari pemborosan dan penurunan daya dukung lingkungan sehingga dapat memberi manfaat sebesar-besarnya berdasarkan prinsip-prinsip kelestarian dan berkelanjutan; (4) mempertahankan kawasan lindung sekurang-kurangnya 50 persen dari luas wilayah Pulau Papua; (5) memacu pertumbuhan ekonomi wilayah Pulau Papua melalui pengembangan sektor-sektor unggulan yang berbasis sumber daya setempat dan meningkatkan keterkaitan antarpusat-pusat pertumbuhan; (6) menampung kegiatan ekonomi, memperluas lapangan kerja, dan sekaligus memenuhi fungsi sebagai pusat pelayanan usaha melalui pengembangan kawasan dan pusat pertumbuhan; (7) meningkatkan keterkaitan yang saling menguntungkan antara kawasan andalan dan tertinggal dalam rangka peningkatan kesejahteraan ekonomi daerah di sekitar kawasan andalan; (8) meningkatkan ketersediaan dan kualitas, serta memperluas jangkauan pelayanan prasarana dasar, khususnya transportasi laut yang didukung oleh transportasi antarmoda secara terpadu dan optimal dengan mengikutsertakan dunia usaha; (9) meningkatkan pengembangan wilayah pedalaman dan perbatasan yang tertinggal dan terisolasi dengan menyerasikan laju pertumbuhan antar wilayah.

Pusat-pusat pengembangan di Pulau Papua yang merupakan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) diarahkan untuk: (1) mendorong pengembangan kota Sorong dan Jayapura sebagai pusat pelayanan primer yang sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan; (2) mendorong pengembangan kota Manokwari dan Timika sebagai pusat pelayanan sekunder yang sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

### 4.4.2 Strategi Pengembangan Wilayah Laut

Pengembangan wilayah laut dilaksanakan melalui pendekatan kewilayahan terpadu dengan memperhatikan aspek-aspek geologi, oseanografi, biologi atau

keragaman hayati, habitat, potensi mineral dan energi, potensi perikanan, potensi wisata bahari, potensi industri maritim, potensi transportasi, dan teknologi. Pendekatan ini merupakan sinergi dari pengembangan pulau-pulau besar dalam konteks pengembangan wilayah dan pemerataan pembangunan. Pendekatan ini memandang wilayah laut Indonesia atas dua fungsi: (i) sebagai perekat integrasi kegiatan perekonomian antarwilayah, dan (ii) sebagai pendukung pengembangan potensi setiap wilayah.

Pengembangan wilayah laut didasarkan pada sektor unggulan dan potensi keterkaitan depan dan belakang dengan sektor-sektor lain. Melalui pendekatan ini, pengembangan wilayah laut dikelompokkan sebagai berikut: (1) wilayah pengembangan kelautan Sumatera; (2) wilayah pengembangan kelautan Malaka; (3) wilayah pengembangan kelautan Sunda; (4) wilayah pengembangan kelautan Jawa; (5) wilayah pengembangan kelautan Natuna; (6) wilayah pengembangan kelautan Makassar-Buton; (7) wilayah pengembangan kelautan Banda-Maluku; (8) wilayah pengembangan kelautan Sawu, dan (9) wilayah pengembangan kelautan Papua-Sulawesi. Dari sepuluh wilayah pengembangan kelautan ini, dengan memperhatikan fungsi strategisnya dalam penguatan keterkaitan antarwilayah maka dipilih lima wilayah prioritas pengembangan untuk periode 2010-2014 yaitu Wilayah Pengembangan Kelautan Sumatera, Malaka, Jawa, Makassar-Buton, dan Banda-Maluku.

## I. Wilayah Pengembangan Kelautan Sumatera

Wilayah pengembangan kelautan Sumatera terletak di sebelah barat Pulau Sumatera yang memanjang dari Sabang di bagian utara hingga Lampung di bagian selatan. Potensi perikanan meliputi ikan hias di Pulau Breuh dan Sibolga, ikan kakap, kerapu, kerang-kerangan, teripang, dan tiram merata di bagian barat Sumatera. Di samping itu juga terdapat potensi rumput laut di pesisir Painan dan Lampung. Aneka jenis terumbu karang dapat ditelusuri di Kepulauan Simeulue dan Mentawai. Potensi migas ditemukan di Cekungan Busur Muka lepas pantai Bengkulu serta potensi pasir besi di sepanjang pantai Padang. Potensi wisata bahari dan budaya sangat potensial dikembangkan di Kepulauan Nias dan Mentawai. Wilayah ini hanya dilewati oleh satu jalur pelayaran nasional dan nusantara, namun wilayah perbatasan internasional di bagian barat merupakan jalur pelayaran internasional yang cukup sibuk.

Arah kebijakan pengembangan wilayah kelautan Sumatera adalah pengembangan industri berbasis kelautan, khususnya pengolahan hasil laut, dengan memperkuat keterkaitan dengan wilayah Jawa. Strategi yang ditempuh adalah: (1) penyiapan sumber daya manusia terampil di bidang kelautan; (2) pembangunan transportasi laut dan wilayah pesisir; (3) peningkatan kapasitas energi listrik; (4) pengembangan skema pembiayaan perbankan yang mudah diakses nelayan dan pelaku usaha kecil menengah di kawasan pesisir; (5) dan fasilitasi pengembangan sistem jaminan atau perlindungan risiko.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

Arah kebijakan dan strategi wilayah kelautan ini diintegrasikan dengan arah kebijakan dan strategi wilayah Sumatra dan Jawa-Bali.

## II. Wilayah Pengembangan Kelautan Selat Malaka

Secara geografis wilayah pengembangan kelautan Selat Malaka terbentang dari perairan Selat Malaka hingga Kepulauan Riau, serta berbatasan dengan perairan Aceh di utara, perairan Malaysia dan Singapura di timur, wilayah pengembangan kelautan Natuna di selatan, dan daratan Sumatera di barat. Wilayah ini merupakan jalur pelayaran internasional yang padat dan wilayah yang berisiko tinggi terjadinya konflik dengan negara tetangga. Potensi granit tua dan endapan pasir ditemukan di Kepulauan Riau. Potensi timah terdapat di Kepulauan Singkep, sedangkan pasir kuarsa yang cukup besar ditemukan di lepas pantai Riau dekat Pulau Rupat. Wilayah ini memiliki potensi perikanan budidaya (kakap putih, kerapu, kerang-kerangan, teripang, tiram, dan rumput laut. Potensi perikanan tangkap (ikan hias) juga ditemukan di sekitar Pulau Sabang dan Pulau Bintan. Keragaman hayati di perairan ini dicirikan oleh keluarga Moluska dan Teripang serta spesies penyu. Habitat terumbu karang didominasi oleh terumbu karang tepi (*fringing reef*). Namun, padatnya aktivitas pelayaran dan eksplorasi migas di wilayah ini menghadirkan ancaman pencemaran minyak dan limbah lainnya.

Pengembangan wilayah kelautan Selat Malaka diarahkan pada peningkatan keamanan dan ketertiban serta keberlanjutan ekosistem laut sehingga pemanfaatan sumber daya alam bisa dilakukan secara optimal. Untuk itu strategi yang diperlukan adalah: (1) penegasan batas-batas teritorial dan yuridiksi wilayah dengan negara tetangga; (2) peningkatan pengawasan kawasan perbatasan untuk menghindari penyelundupan, perompakan, illegal fishing, dan perdagangan pasir ilegal; (3) penegakan peraturan terkait dengan pemeliharaan dan pelestarian lingkungan laut; (4) pemanfaatan pulau-pulau terdepan sebagai kawasan wisata atau pusat konservasi satwa laut.

Arah kebijakan dan strategi wilayah kelautan ini diintegrasikan dengan arah kebijakan dan strategi wilayah Sumatra dan Jawa-Bali.

### **III. Wilayah Pengembangan Kelautan Jawa**

Wilayah pengembangan kelautan Jawa terletak di antara Pulau Kalimantan dan Pulau Jawa. Di sebelah timur wilayah ini berbatasan dengan wilayah pengembangan kelautan Makassar dan di barat berbatasan dengan Pulau Sumatera. Karena letak di wilayah laut dalam di antara pulau-pulau besar, perairan ini merupakan jalur pelayaran nasional dan nusantara yang padat. Pelayaran internasional juga melintasi bagian timur perairan ini. Ancaman turunnya kualitas lingkungan berasal dari pencemaran minyak dan limbah yang dialirkan sungai-sungai di Pulau Jawa.

Pengembangan wilayah perairan ini diarahkan pada penguatan fungsi wilayah kelautan sebagai perekat integrasi ekonomi antarwilayah (antarpulau) dengan tetap menjaga kelestarian ekosistem laut. Untuk itu strategi yang diterapkan adalah: (1) peningkatan sistem transportasi laut untuk mempermudah arus barang antarpulau khususnya ke wilayah timur Indonesia; (2) penegakan peraturan terkait dengan pemeliharaan dan pelestarian lingkungan laut; (3) pengendalian pembuangan limbah industri dan rumah tangga melalui sungai-sungai yang bermuara di perairan Jawa; (4) pengendalian erosi di wilayah daerah aliran sungai (DAS) untuk menghindari pendangkalan pelabuhan ikan dan pelabuhan laut; (5) pengembangan perikanan budidaya; dan (6) minimalisasi risiko pencemaran perusakan habitat laut oleh kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas lepas pantai.

Arah kebijakan dan strategi wilayah kelautan ini diintegrasikan dengan arah kebijakan dan strategi wilayah Jawa-Bali dan Kalimantan.

### **IV. Wilayah Pengembangan Kelautan Makassar-Buton**

Secara geografis, wilayah pengembangan kelautan Makassar diapit oleh Pulau Sulawesi di sebelah timur dan Pulau Kalimantan di sebelah barat. Kecuali Selat Makassar, tingkat pemanfaatan potensi perikanan masih memungkinkan untuk ditingkatkan. Dari sisi sistem transportasi, wilayah ini dilalui jalur pelayaran nasional dan Nusantara yang cukup aktif. Di samping itu Selat Makassar juga dilintasi jalur pelayaran internasional yang cukup padat.

Kebijakan pengembangan wilayah ini diarahkan pada optimalisasi peran strategis kelautan dalam meningkatkan interaksi perdagangan intra pulau (antar provinsi di Sulawesi) maupun dalam mendukung peran wilayah Sulawesi sebagai penggerak Kawasan Timur Indonesia. Untuk itu strategi yang diterapkan adalah: (1) peningkatan sistem transportasi laut yang menghubungkan provinsi-provinsi di Pulau Sulawesi; (2) pemantapan sistem transportasi laut untuk memperkuat fungsi intermediasi Sulawesi bagi KBI dan KTI; (3) pembangunan pelabuhan-pelabuhan ikan dalam klaster-klaster industri pengolahan hasil laut; (4) pengembangan pelabuhan hub ekspor komoditas unggulan; (5) peningkatan pengawasan jalur pelayaran internasional



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

untuk mencegah aktivitas penyelundupan; (6) pengembangan lembaga pendidikan dan kurikulum berbasis kelautan (perikanan, pariwisata, perkapanalan); (7) pengembangan industri angkutan laut (perkapalan); dan (8) pengembangan wisata bahari.

Arah kebijakan dan strategi wilayah kelautan ini diintegrasikan dengan arah kebijakan dan strategi wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara.

## V. Wilayah Pengembangan Kelautan Banda-Maluku

Wilayah pengembangan kelautan Banda-Maluku terletak di Kawasan Timur Indonesia (KTI), berbatasan dengan wilayah pengembangan kelautan Papua di utara, dengan daratan Pulau Papua di timur, dengan wilayah pengembangan kelautan Sawu di selatan, dan dengan wilayah pengembangan kelautan Makassar di barat. Potensi migas ditemukan di daerah kepala burung, Seram dan Halmahera. Bahan semen juga ditemukan di Pulau Misool. Namun demikian wilayah ini baru dilayani beberapa jalur pelayaran nasional dan nusantara. Dengan demikian ancaman pencemaran laut masih rendah, terlihat dari relatif terjaganya keragaman hayati yang tinggi. Wilayah ini merupakan tempat bertelur beberapa spesies seperti penyu-penyan. Potensi perikanan dan budidaya rumput laut juga sangat tinggi dengan tingkat pemanfaatan yang relatif rendah. Karakter gugus-gugus pulau yang khas juga merupakan potensi wisata alam wilayah ini seperti ditemukan di perairan Raja Ampat.

Arah kebijakan pengembangan wilayah kelautan Banda-Maluku adalah perintisan pengembangan industri berbasis sumber daya kelautan dan wisata bahari. Sejalan dengan arah ini, strategi yang diperlukan meliputi: (1) pengembangan sumber daya manusia berketrampilan tinggi di bidang kelautan (pendidikan dan pelatihan); (2) pengembangan komoditas unggulan bernilai tinggi berbasis kelautan seperti kerang mutiara dan ikan hias; (3) pengembangan industri angkutan laut (perkapalan); (4) pemberdayaan dan pengorganisasian masyarakat khususnya wilayah pesisir untuk memperkuat modal sosial; (5) peningkatan akses permodalan bagi nelayan; (6) pengembangan wisata bahari.

Arah kebijakan dan strategi wilayah kelautan ini diintegrasikan dengan arah kebijakan dan strategi wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Papua.

### 4.4.3. Pengembangan Kawasan

Dalam upaya mendukung percepatan pembangunan wilayah, kebijakan pembangunan wilayah juga diarahkan untuk: (1) pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh, (2) pengembangan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, dan rawan bencana, (3) pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan, dan (4) penataan dan pengelolaan pertanahan. Strategi yang diterapkan adalah sebagai berikut:

1. Mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh sehingga dapat mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal di sekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang sinergis, tanpa mempertimbangkan batas wilayah administrasi, tetapi lebih ditekankan pada pertimbangan keterkaitan mata-rantai proses industri dan distribusi;
2. Meningkatkan keberpihakan pemerintah untuk mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal dan terpencil sehingga wilayah-wilayah tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara lebih cepat dan dapat mengurangi ketertinggalan pembangunannya dengan daerah lain;
3. Mengembangkan wilayah-wilayah perbatasan dengan mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi *inward looking* menjadi *outward looking* sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga;
4. Menyeimbangkan pertumbuhan pembangunan kota-kota metropolitan, besar, menengah, dan kecil dengan mengacu pada sistem pembangunan perkotaan nasional yang diperlukan untuk mencegah terjadinya pertumbuhan fisik kota yang tidak terkendali (*urban sprawl & conurbation*), seperti yang terjadi di wilayah pantura Pulau Jawa, serta untuk mengendalikan arus migrasi masuk langsung dari desa ke kota-kota besar dan metropolitan, dengan cara menciptakan kesempatan kerja, termasuk peluang usaha, di kota-kota menengah dan kecil, terutama di luar Pulau Jawa;
5. Mempercepat pembangunan kota-kota kecil dan menengah terutama di luar Pulau Jawa, sehingga diharapkan dapat menjalankan perannya sebagai ‘motor penggerak’ pembangunan wilayah-wilayah di sekitarnya maupun dalam melayani kebutuhan warga kotanya;
6. Mendorong keterkaitan kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan dengan kegiatan ekonomi di wilayah perdesaan secara sinergis (hasil produksi wilayah perdesaan merupakan *backward linkages* dari kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan) dalam suatu ‘sistem wilayah pengembangan ekonomi;’
7. Menerapkan sistem pengelolaan pertanahan yang efisien, efektif, serta melaksanakan penegakan hukum terhadap hak atas tanah dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan demokrasi;
8. Mendorong perencanaan wilayah yang peduli/peka terhadap bencana alam, mengingat secara geografis Indonesia berada di wilayah pertemuan tiga lempeng tektonik yang rawan bencana alam.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

## BAB V

### KERANGKA EKONOMI MAKRO 2010—2014

Kerangka ekonomi makro memberikan gambaran mengenai kemajuan ekonomi yang akan dicapai dalam tahun 2010-2014, berdasarkan berbagai langkah kebijakan yang telah dituangkan dalam lima agenda pembangunan dan pembiayaan pembangunannya.

#### 5.1 Keadaan Ekonomi 2009

Secara umum kondisi ekonomi makro pada tahun 2009 adalah sebagai berikut Pertama, perekonomian nasional sedikit menurun setelah mendapatkan imbas global akibat krisis keuangan dunia pada 2008 namun tetap tumbuh cukup tinggi. Pada pertengahan 2009 perekonomian nasional telah mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang sejalan dengan membaiknya perekonomian dunia dan mulai naiknya harga-harga komoditi internasional; Kedua, konsumsi domestik sejak awal 2009 menjadi penyumbang utama pertumbuhan ekonomi, terutama terkait dengan terjadinya daya beli masyarakat, kegiatan kampanye Pemilu, dan juga upaya mempercepat penyerapan anggaran; Ketiga, sebagian besar indikator ekonomi domestik menguat sejak awal 2009, seperti keyakinan konsumen meningkat, penjualan barang ritel dan otomotif membaik, aktivitas industri kembali meningkat setelah mengalami penurunan pada akhir tahun 2008.

Dampak krisis global mulai dirasakan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sejak triwulan IV tahun 2008. Pertumbuhan ekonomi triwulan IV tahun 2008 menurun minus 3,6 persen jika dibandingkan dengan triwulan III tahun 2008 (q-t-q) atau meningkat 5,2 persen (y-o-y), sementara itu pada triwulan sebelumnya ekonomi tumbuh positif, yaitu 6,2 persen pada triwulan I; 6,4 persen pada triwulan II; dan 6,4 persen pada triwulan III (y-o-y). Krisis global—yang berdampak pada turunnya permintaan dunia, menurunnya harga minyak dan komoditas—menyebabkan eksport barang dan jasa tumbuh negatif 5,5 persen pada triwulan IV tahun 2008 dibanding triwulan sebelumnya. Dampak global juga mendorong pembalikan aliran modal dari Indonesia ke luar negeri, sehingga investasi/Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTB) hanya tumbuh 0,8 persen pada triwulan IV dibanding triwulan sebelumnya.

Penurunan pertumbuhan ekonomi berlanjut sampai dengan triwulan II tahun 2009. Pertumbuhan ekonomi triwulan I tahun 2009 adalah 4,4 persen dan pada triwulan II laju pertumbuhan menurun menjadi 4 persen. Pada triwulan III tahun 2009 laju pertumbuhan ekonomi meningkat kembali menjadi 4,2 persen yang menunjukkan tanda-tanda pemulihan ekonomi nasional sejalan dengan membaiknya ekonomi dunia.

Pertumbuhan ekonomi sampai dengan triwulan III tahun 2009 tumbuh 4,2

persen. Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi didorong oleh pengeluaran pemerintah dan pengeluaran masyarakat yang masing masing tumbuh 15,1 persen dan 5,2 persen. Sementara itu ekspor masih tumbuh negatif, yaitu 14,1 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi tinggi terutama didorong oleh sektor pertanian meningkat sebesar 3,4 persen; dan sektor tersier, yaitu sektor listrik, gas dan air; dan pengangkutan dan telekomunikasi yang masing masing tumbuh 13,9 persen dan 17,6 persen.

Perkembangan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih dikategorikan memiliki kinerja perekonomian yang baik mengingat banyak negara yang pertumbuhannya negatif, sementara itu Indonesia tumbuh positif 4 persen bersama Cina dan India yang masing masing tumbuh 7,9 persen dan 6,1 persen pada triwulan II tahun 2009.

Untuk mempercepat pemulihan ekonomi, upaya untuk mengurangi kemerosotan ekspor dan lambatnya pertumbuhan investasi semakin ditingkatkan. Di samping itu, konsumsi masyarakat diupayakan untuk tetap dijaga dengan memelihara daya beli masyarakat melalui pengendalian inflasi dan berbagai program pengurangan kemiskinan. Efektivitas pengeluaran pemerintah juga ditingkatkan dengan program stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat dan peningkatan investasi. Dengan memperhatikan pengaruh eksternal dan berbagai kebijakan yang diambil, pertumbuhan ekonomi tahun 2009 diperkirakan sekitar 4,3 persen.

Dari sisi moneter, setelah mengalami tekanan akibat gejolak ekonomi dunia tahun 2008, perkembangan indikator moneter diperkirakan akan terus membaik sampai akhir 2009. Laju inflasi yang mencapai 11,1 persen pada tahun 2008 menurun menjadi 2,8 persen pada akhir tahun 2009, seiring dengan menurunnya harga-harga komoditas dunia, penurunan harga BBM dalam negeri, membaiknya ekspektasi inflasi serta terjadinya pasokan bahan pangan pokok domestik. Meskipun nilai tukar rupiah agak melemah menjadi Rp 10.950,00/USD pada awal 2009, secara bertahap menguat kembali menjadi Rp 9.400,00/USD pada akhir 2009. Penguatan nilai tukar rupiah didukung oleh neraca pembayaran yang surplus, imbal hasil rupiah yang menarik, premi resiko yang menurun, melemahnya mata uang dollar AS terhadap beberapa mata uang utama dunia, serta meningkatnya keyakinan investor global terhadap kinerja perekonomian Indonesia.

Pada tahun 2009, kebijakan fiskal tetap diarahkan untuk memberi stimulus kepada perekonomian namun dengan terus menjaga ketahanannya. Hal ini dilakukan mengingat dampak terberat dari krisis ekonomi global diperkirakan terjadi pada tahun 2009. Oleh karena itu, kebijakan fiskal yang ditempuh ditujukan untuk menyelamatkan perekonomian nasional dengan memperluas program stimulus ekonomi melalui APBN 2009; melakukan perubahan asumsi dasar untuk memberikan sinyal yang tepat kepada publik; serta melakukan beberapa penyesuaian terhadap besaran pendapatan negara, belanja negara, defisit, dan pembiayaan anggaran.

Arah kebijakan stimulus fiskal yang ditempuh bertujuan untuk: (i)



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

mempertahankan sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat antara lain melalui berbagai insentif perpajakan dan pemberian subsidi, serta bantuan langsung tunai; (ii) mencegah timbulnya PHK secara luas dan meningkatkan daya tahan usaha dalam menghadapi krisis antara lain melalui penurunan berbagai tarif perpajakan dan bea masuk, potongan tarif listrik, subsidi bunga, serta pemberian kredit usaha rakyat; (iii) menangani dampak PHK dan mengurangi tingkat pengangguran dengan meningkatkan belanja infrastruktur padat karya melalui penambahan anggaran untuk infrastruktur; serta (iv) mempercepat laju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan meneruskan reformasi di seluruh kementerian negara/lembaga (K/L).

Dengan langkah-langkah tersebut di atas, pendapatan negara dan hibah mencapai sekitar Rp 866,8 triliun atau 16,3 persen PDB, lebih rendah Rp 118,9 triliun bila dibandingkan dengan sasaran yang ditetapkan dalam APBN 2009, yaitu sebesar Rp 985,7 triliun atau 18,5 persen PDB. Penurunan tersebut terutama didorong oleh penurunan penerimaan dalam negeri, baik berupa penerimaan perpajakan maupun penerimaan negara bukan pajak sebagai dampak dari krisis ekonomi global.

Sementara itu, belanja negara mencapai sekitar Rp 954,0 triliun atau 17,9 persen PDB, yang lebih rendah Rp 83,1 triliun apabila dibandingkan dengan anggaran belanja negara yang ditetapkan dalam APBN 2009 yang besarnya Rp 1.037,1 triliun atau 19,5 persen PDB. Penurunan anggaran belanja tersebut antara lain disebabkan oleh beban belanja subsidi yang menurun menjadi Rp 159,5 triliun atau 3,0 persen PDB dari Rp 166,7 triliun atau 3,1 persen PDB yang ditetapkan dalam APBN 2009. Penurunan subsidi ini disebabkan oleh perubahan asumsi harga minyak yang cukup besar dari US\$80 per barel menjadi US\$61,6 per barel.

Perkembangan penerimaan dan belanja negara di atas, mendorong peningkatan defisit anggaran dalam tahun 2009 menjadi sebesar 1,6 persen PDB, atau meningkat sebesar 0,6 persen PDB jika dibandingkan dengan defisit yang ditetapkan dalam APBN tahun 2009 yang besarnya 1,0 persen PDB. Selanjutnya stok utang pemerintah dapat diturunkan menjadi sebesar 30,0% PDB.

Menjelang akhir tahun 2009, proses pemulihan ekonomi dunia terus menunjukkan peningkatan dan berdampak positif terhadap kinerja sektor eksternal pada keseluruhan tahun 2009. Kondisi Neraca Pembayaran sampai triwulan III tahun 2009 terjaga. Total nilai ekspor sampai triwulan III tahun 2009 mencapai USD 84,1 miliar atau turun 23,4 persen jika dibanding dengan triwulan III tahun 2008. Total nilai impor sampai triwulan III tahun 2009 mencapai USD 91,1 miliar atau menurun 33,3 persen dibanding triwulan III tahun 2008. Secara keseluruhan, neraca transaksi berjalan sampai triwulan III tahun 2009 mengalami surplus sebesar USD 7,4 miliar. Pada triwulan II tahun 2009 arus modal dan finansial mengalami defisit, namun sampai dengan triwulan III tahun 2009 secara keseluruhan arus modal dan finansial surplus sebesar USD 4,7 miliar, surplus ini didorong oleh arus masuk investasi langsung asing sebesar USD 3,8 miliar serta arus masuk investasi portfolio sebesar USD 6,6 miliar,

sedangkan investasi lainnya (neto) masih mengalami defisit sebesar USD 5,6 miliar. Neraca keseluruhan sampai triwulan III tahun 2009 mencapai USD 8,6 miliar dengan cadangan devisa mencapai USD 62,3 miliar atau setara dengan 6,1 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri.

Dengan perkembangan pertumbuhan ekonomi tersebut diatas, dan berbagai kebijakan ketenagakerjaan dan penanggulangan kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka menurun dari 8,39 persen pada tahun Agustus 2008 menjadi 7,87 persen Agustus 2009 dan tingkat kemiskinan menurun dari 15,4 persen di tahun 2008 (Maret) menjadi 14,1 persen pada tahun 2009 (Maret).

## 5.2 Prospek Ekonomi 2010-2014

### 5.2.1 Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Melalui Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan

Gambaran ekonomi Indonesia tahun 2010-014 tidak akan terlepas dari pengaruh perkembangan lingkungan eksternal. Setelah mengalami resesi global sejak pertengahan 2008, tanda tanda pemulihan ekonomi dunia telah sudah mulai terlihat sejak akhir 2009. IMF (Oktober 2009) telah melakukan revisi terhadap prospek ekonomi global pada tahun 2009 dari tumbuh negatif -1,4 persen menjadi -1,1 persen; dan pada tahun 2010 diperkirakan lebih baik dari perkiraan awal dari tumbuh 2,5 persen menjadi 3,1 persen. Pemulihan ini terutama disebabkan oleh berhasilnya intervensi pemerintah di berbagai negara yang telah (i) mendorong sisi permintaan dan (ii) mengurangi ketidakpastian dan terjadinya resiko sistemik pada pasar keuangan. Meskipun pemulihan telah terjadi, perekonomian global masih menghadapi tantangan dalam lima tahun ke depan, yaitu: (i) utang negara maju yang meningkat sejalan dengan upaya peningkatan stimulus fiskal; (ii) tingkat pengangguran yang tinggi di Negara-negara maju; (iii) ketidakpastian harga minyak di pasar dunia.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**TABEL 2**  
**PERKIRAAN PERTUMBUHAN EKONOMI**  
**2010 - 2014**  
**(Dalam Persen)**

	2010	2011	2012	2013	2014	Rata-rata 2010- 2014
<b>Pertumbuhan Ekonomi</b>	5,5-5,6	6,0-6,3	6,4-6,9	6,7-7,4	7,0-7,7	6,3-6,8
<b>Sisi Pengeluaran</b>						
Konsumsi Masyarakat	5,2-5,2	5,2-5,3	5,3-5,4	5,3-5,4	5,3-5,4	5,3-5,4
Konsumsi Pemerintah	10,8-10,9	10,9-11,2	12,9-13,2	10,2-13,5	8,1-9,8	10,6-11,7
Investasi	7,2-7,3	7,9-10,9	8,4-11,5	10,2-12,0	11,7-12,1	9,1-10,8
Ekspor Barang dan Jasa	6,4-6,5	9,7-10,6	11,4-12,0	12,3-13,4	13,5-15,6	10,7-11,6
Impor Barang dan Jasa	9,2-9,3	12,7-15,2	14,3-15,9	15,0-16,5	16,0-17,4	13,4-14,9
<b>Sisi Produksi</b>						
Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan	3,3-3,4	3,4-3,5	3,5-3,7	3,6-3,8	3,7-3,9	3,6-3,7
Pertambangan dan Penggalian	2,0-2,1	2,1-2,3	2,3-2,4	2,4-2,5	2,5-2,6	2,2-2,4
Industri Pengolahan	4,2-4,3	5,0-5,4	5,7-6,5	6,2-6,8	6,5-7,3	5,5-6,0
Industri Bukan Migas	4,8-4,9	5,6-6,1	6,3-7,0	6,8-7,5	7,1-7,8	6,1-6,7
Listrik, Gas dan Air	13,4-13,5	13,7-13,8	13,8-13,9	13,9-14,0	14,1-14,2	13,8-13,9
Konstruksi	7,1-7,2	8,4-8,5	8,8-9,3	8,9-10,1	9,1-11,1	8,4-9,2
Perdagangan, Hotel, dan Restoran	4,0-4,1	4,2-4,8	4,4-5,2	4,5-6,4	4,6-6,6	4,3-5,4
Pengangkutan dan Telekomunikasi	14,3-14,8	14,5-15,2	14,7-15,4	14,9-15,6	15,1-16,1	14,7-15,4
Keuangan, Real Estat, dan Jasa Perusahaan	6,5-6,6	6,6-6,7	6,8-7,0	6,9-7,0	7,2-7,3	6,8-6,9
Jasa-jasa	6,7-6,9	6,9-7,0	7,0-7,1	7,1-7,2	7,2-7,4	6,9-7,1

Walaupun diperkirakan terjadi pergeseran kekuatan ekonomi global dari barat ke timur (west to east), perekonomian Amerika Serikat dan negara industri maju lainnya masih tetap menjadi penggerak perekonomian dunia dan pasar komoditi eksport negara berkembang. Perekonomian Asia diperkirakan tetap menjadi kawasan dinamis dengan motor penggerak perekonomian Cina, India dan negara-negara industri di Asia lainnya dan kawasan yang menarik bagi penanaman modal.

Berdasarkan berbagai langkah kebijakan yang dilakukan di berbagai bidang, sebagaimana telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya; pemulihan ekonomi di Asia yang membaik pada triwulan terakhir 2009 serta pemulihan ekonomi dunia pada tahun

2010 yang lebih baik; ketahanan ekonomi nasional yang tetap terjaga dalam menghadapi krisis keuangan dan penurunan ekonomi global; ekspektasi yang baik terhadap kelanjutan pemerintahan lima tahun mendatang, dan perkiraan lingkungan eksternal pada tahun 2010-2014 maka perekonomian dapat dijaga secara berkelanjutan dengan prospek ekonomi makro tahun 2010-2014 sebagai berikut.

Selama kurun waktu 2010-2014 ekonomi Indonesia diperkirakan tumbuh secara bertahap dari 5,5-5,6 persen pada tahun 2010 menjadi 7,0-7,7 persen pada tahun 2014 atau dengan rata-rata 6,3-6,8 persen pertahun selama lima tahun.

Dari sisi pengeluaran, sumber pertumbuhan ekonomi didorong oleh konsumsi masyarakat yang merupakan komponen utama dari permintaan domestik, serta investasi dan ekspor barang dan jasa. Konsumsi masyarakat diproyeksikan pada tingkat pertumbuhan 5,3-5,4 persen per tahun, sedangkan investasi dan ekspor diharapkan akan meningkat secara bertahap mulai tahun 2010 setelah mengalami pertumbuhan negatif. Investasi diperkirakan tumbuh rata-rata 9,1-10,8 persen dan ekspor barang dan jasa meningkat rata-rata 10,7-11,6 persen per tahun.

Konsumsi masyarakat terus didorong dengan meningkatkan daya beli masyarakat melalui upaya mengendalikan inflasi dan menjaga ketersediaan bahan pokok. Upaya untuk mendorong investasi dilakukan dengan peningkatan harmonisasi kebijakan dan penyederhanaan prosedur perijinan investasi; dan peningkatan fasilitas investasi. Ekspor terus dipacu pertumbuhannya dengan berbagai kebijakan, antara lain: peningkatan akses pasar internasional terutama pasar non tradisional; peningkatan kualitas dan diversifikasi produks ekspor; dan peningkatan fasilitas ekspor.

Dari sisi produksi, setelah mengalami pertumbuhan rendah selama 2004-2009, pertumbuhan industri pengolahan non migas akan didorong kembali sebagai penggerak pertumbuhan dengan rata rata pertumbuhan 6,1-6,7 persen. Upaya mendorong pertumbuhan industri dilakukan dengan kebijakan penumbuhan populasi usaha industri, penguatan struktur industri, dan peningkatan produktivitas usaha industri. Sementara itu sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan diperkirakan tumbuh rata-rata 3,5-3,6 persen per tahun, dengan kebijakan antara lain mewujudkan kemandirian pangan, peningkatan daya saing produk pertanian, serta peningkatan pendapatan petani.

Dengan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan ini, kesejahteraan rakyat akan senantiasa bisa ditingkatkan.

### **5.2.2. Stabilitas Ekonomi yang Kokoh**

Dalam jangka menengah, terutama melalui kebijakan Inflation Targetting Framework dan koordinasi kebijakan makro antara Pemerintah, Bank Indonesia dan Pemerintah Daerah, laju inflasi diarahkan untuk menurun secara bertahap dengan besaran sekitar 4 – 6 persen. Perkiraan tersebut didasarkan dengan sasaran tingkat



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

inflasi yang cukup rendah dan stabil tetapi tetap memperhatikan pertumbuhan ekonomi. Pencapaian sasaran inflasi tersebut didukung oleh relatif stabilitas nilai tukar, yang dimungkinkan dengan perkiraan masuknya dana investasi luar negeri (capital inflow), baik investasi di sektor keuangan (pasar modal) maupun di sektor riil, akibat meningkatnya iklim usaha dan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang terjaga.

Terkendalinya laju inflasi memberi dorongan bagi penurunan tingkat suku bunga perbankan, yang juga dipengaruhi oleh tingkat risiko dunia usaha. Meskipun tingkat suku bunga perbankan domestik juga akan dipengaruhi oleh peningkatan suku bunga utama internasional pada masa mendatang namun, dalam jangka menengah diharapkan akan terus menurun secara bertahap sehingga dapat mendorong kegiatan ekonomi di sektor riil, baik kegiatan investasi maupun produksi.

Di sisi pengelolaan keuangan negara, ketahanan fiskal yang membaik harus terus dipertahankan. Ketahanan fiskal harus terus diperkuat demi mendukung pencapaian stabilitas ekonomi. Di sisi penerimaan negara, dengan dilanjutkannya berbagai upaya untuk peningkatan penerimaan pajak diharapkan penerimaan pajak meningkat rata-rata sebesar 16,8 persen tiap tahunnya selama periode 2010-2014. Di sisi belanja negara, terjadi peningkatan alokasi anggaran untuk transfer ke daerah rata-rata sebesar 14,0 persen. Di samping itu, selama periode 2010-2014 anggaran belanja pegawai diperkirakan meningkat, seiring dengan upaya reformasi birokrasi yang terus dilakukan pemerintah.

Terkait dengan upaya mengatasi ancaman krisis ekonomi, defisit APBN 2009 masih cukup tinggi hingga mencapai 1,6 persen PDB seiring dengan pemberian stimulus fiskal. Namun dengan kebijakan yang terus berlanjut, seperti peningkatan pendapatan dan optimalisasi belanja negara, serta pulihnya kondisi perekonomian, selama lima tahun ke depan defisit APBN diperkirakan mampu turun menjadi sekitar 1,2 persen PDB.

Sementara itu untuk pembiayaan defisit, strategi diarahkan dalam rangka pencapaian 3 sasaran utama yaitu: (a) penurunan rasio stok utang terhadap PDB; (b) penggunaan utang secara selektif; (c) optimalisasi pemanfaatan hibah dan utang. Peningkatan pengelolaan pinjaman pemerintah diarahkan untuk menurunkan stok pinjaman luar negeri, tidak saja relatif terhadap PDB, tetapi juga secara absolut. Sementara itu, untuk pinjaman dalam negeri, terutama melalui penerbitan surat berharga negara, diupayakan tetap adanya ruang gerak yang cukup pada sektor swasta. Dengan demikian, rasio stok utang terhadap PDB diperkirakan dapat diturunkan mencapai sekitar 24 persen pada tahun 2014.

Perkiraan neraca pembayaran didasarkan atas dua asumsi pokok, yaitu perkembangan ekonomi dunia dan perkembangan ekonomi makro di dalam negeri. Asumsi perkembangan ekonomi dunia mencakup laju pertumbuhan ekonomi, terutama negara maju, tingkat inflasi dunia, tingkat suku bunga, serta nilai paritas antara valuta

negara industri utama. Di dalam negeri, perkiraan neraca pembayaran sangat terkait dengan sasaran laju pertumbuhan dan pola pertumbuhan ekonomi, perkiraan pertumbuhan investasi, serta perkiraan sumber pembiayaan investasi, baik dari dalam maupun luar negeri.

Walaupun persaingan di pasar internasional semakin ketat, dengan perkiraan membaiknya perkembangan ekonomi dunia pada tahun 2010—setelah mengalami krisis keuangan global sejak pertengahan 2008—and didorong oleh pemanfaatan peningkatan daya saing serta upaya-upaya untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi kegiatan ekspor, maka nilai ekspor nonmigas dalam periode 2010-2014 diperkirakan meningkat bertahap. Setelah mengalami pertumbuhan negatif di tahun 2009, ekspor non migas pada tahun 2010 diperkirakan tumbuh 7-8 persen hingga mencapai 14,5-16,5 persen pada tahun 2014.

Dari sisi impor, permintaan domestik yang meningkat akan mendorong kembali kebutuhan impor non migas dari 8-9 persen pada tahun 2010 menjadi 18-19 persen pada tahun 2014. Dengan defisit jasa-jasa yang diperkirakan tetap tinggi pada tahun 2010 hingga tahun 2014, surplus neraca transaksi berjalan diperkirakan menurun hingga tahun 2014.

Investasi asing langsung (foreign direct investment) neto diperkirakan terus meningkat dalam kurun waktu 2010–2014 sedangkan arus modal asing dalam bentuk portfolio diperkirakan tetap terjaga. Dengan perkembangan tersebut, cadangan devisa diperkirakan meningkat menjadi sekitar USD 100 miliar pada tahun 2014.

### 5.2.3. Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berkeadilan

Target pertumbuhan ekonomi tersebut akan disertai dengan berbagai kebijakan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan antara lain kebijakan dalam ketenagakerjaan, pemberdayaan usaha kecil dan menengah, dan penanggulangan kemiskinan. Dengan tambahan angkatan kerja baru rata-rata sebesar 2 juta orang per tahun, pengangguran terbuka diperkirakan dapat diturunkan menjadi 5 – 6 persen pada tahun 2014. Sejalan dengan itu, jumlah penduduk miskin diperkirakan terus berkurang dari 14,1 persen (Maret 2009) hingga mencapai 8 – 10 persen di tahun 2014.

Pembangunan nasional yang dilakukan di berbagai bidang melalui berbagai prioritas sebagaimana diuraikan di atas, masih menyisakan berbagai kesenjangan yang menjadi tantangan yang perlu diselesaikan. Hal tersebut antara lain tercermin pada permasalahan sebagai berikut. Pertama, tingkat kemiskinan antarprovinsi yang masih cukup tinggi perbedaannya. Sebagai contoh DKI Jakarta memiliki tingkat kemiskinan sebesar 3,6 persen, sementara di provinsi Papua tingkat kemiskinan pada tahun 2009 mencapai 37,5 persen. Kedua, tingkat pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar antarkelompok masyarakat juga masih memiliki perbedaan yang cukup besar. Kelompok masyarakat dengan pendapatan 40 persen terendah masih mengkonsumsi kalori di bawah 2.100 kkal/kapita/hari, yang merupakan persyaratan minimum



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

kecukupan kalori. Layanan kesehatan melalui Puskesmas dan dokter juga masih rendah. Demikian pula untuk akses terhadap air bersih. Ketiga, penyerapan tenaga kerja baru sebagian besar adalah berupa pekerja informal, yang biasanya tergantung pada usaha kecil dan mikro yang memiliki keterbatasan terhadap akses sumber daya produktif untuk mengembangkan usahanya. Keempat, kesetaraan gender di berbagai bidang masih terbatas. Sementara peran perempuan dalam peningkatan kualitas keluarga, di dalam kegiatan ekonomi serta berbagai bidang lainnya sangat besar.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif termasuk menyertakan semua kelompok masyarakat dan golongan serta masyarakat yang berada di wilayah-wilayah yang terpencil dan terisolasi, dilakukan kebijakan dan langkah-langkah sebagai berikut.

Pertama, meningkatkan efektivitas kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan sebagaimana diuraikan di dalam Prioritas Penanggulangan Kemiskinan agar dapat melayani dan menjangkau masyarakat miskin, yang selama ini memiliki tingkat pendapatan yang rendah serta keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar. Arah kebijakan yang tercermin dalam berbagai fokus di dalam prioritas tersebut merupakan langkah keberpihakan terhadap masyarakat yang masih memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan. Program-program bantuan sosial berbasis keluarga dilakukan untuk membantu kelompok masyarakat ini, agar mereka tetap terpenuhi kebutuhan dasarnya, sehingga pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar yang masih rendah dapat ditingkatkan dan kesenjangan akses antar kelompok pendapatan akan dapat dikurangi. Selanjutnya, program bantuan sosial ini juga akan lebih memperhatikan kelompok masyarakat penyandang cacat, lansia terutama yang berasal dari keluarga miskin, anak terlantar, serta masyarakat terpinggirkan, agar mereka mendapatkan akses terhadap kebutuhan dan layanan dasar serta sumber daya produktif untuk meningkatkan kesejahteraannya. Sementara itu, program PNPM Mandiri dikhkususkan untuk membantu masyarakat bersama penduduk miskin agar mereka berdaya dan akhirnya mampu berpartisipasi aktif dalam mengentaskan dirinya dari kemiskinan dan pada gilirannya mampu berpartisipasi dalam pembangunan di wilayahnya secara lebih luas. Selanjutnya, program dalam cluster Pemberdayaan Usaha Kecil dan Mikro juga diarahkan untuk dapat membantu pekerja informal, sehingga mereka memiliki akses yang sama untuk berusaha dan meningkatkan pendapatan untuk memperbaiki kesejahteraannya. Secara keseluruhan program-program dalam tiga cluster penanggulangan kemiskinan ditingkatkan efektivitasnya untuk dapat meningkatkan jangkauan dan pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar bagi masyarakat miskin, penyandang cacat, lansia dan terpinggirkan sehingga proses pembangunan dapat mengikutsertakan seluruh komponen bangsa dan hasil pembangunan dapat dinikmati semua lapisan masyarakat dan pada akhirnya dapat secara aktif berpartisipasi dalam pembangunan.

Kedua, peran perempuan dalam peningkatan kesejahteraan keluarga sangat besar terutama dalam keluarga miskin, baik melalui peningkatan kegiatan ekonomi

maupun dalam meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar. Namun demikian, peran mereka dalam pengambilan keputusan di dalam keluarga masih terbatas. Keterbatasan terjadi karena minimnya wawasan dan kemampuan mereka. Hambatan lain adalah karena wanita belum mendapatkan tempat dan kesempatan yang setara dengan laki-laki. Bahkan banyak wanita yang menjadi korban tindak kekerasan dalam rumah tangga. Demikian pula, anak yang seharusnya menjadi generasi muda berkualitas agar dapat menjadi pemutus rantai kemiskinan antar generasi belum mendapatkan perlindungan dan kesempatan di masa mudanya sebagai fondasi untuk membangun masa depannya. Sehubungan dengan itu, perhatian khusus melalui kebijakan dan program yang berpihak kepada perempuan dan anak terus dilakukan, terutama pembinaan anak-anak terlantar yang tidak memiliki keluarga dan orang tua yang dapat membantu mereka untuk membangun masa depan demi peningkatan kualitas kesejahteraannya. Kebijakan dan program untuk memberi perhatian pada perempuan dan anak dilakukan melalui kebijakan dan program dalam Prioritas Nasional lainnya Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Ketiga, sebagian besar masyarakat miskin berada di daerah perdesaan yang memiliki keterbatasan infrastruktur, dan sebagian dari mereka berada di daerah-daerah yang terpencil dan terisolasi, termasuk daerah perbatasan yang sebagian besar jauh dari ibu kota wilayah kabupaten dan kota lainnya. Untuk itu, pembangunan infrastruktur perdesaan merupakan program penting yang akan dilakukan untuk memberi kesempatan sama kepada masyarakat di daerah perdesaan, dan daerah terpencil dan terisolasi. Berkaitan dengan itu, pembangunan daerah perbatasan memerlukan perhatian khusus, sehingga masyarakat di daerah perbatasan akan memiliki kesempatan yang sama dengan masyarakat di wilayah lainnya untuk menikmati hasil pembangunan dan berpartisipasi serta berkontribusi dalam pembangunan nasional. Kebijakan dan program yang diarahkan untuk ini semua dilakukan melalui Prioritas Pembangunan Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik.

Berbagai kebijakan dan program untuk mengikutisertakan seluruh lapisan dan berbagai kelompok masyarakat yang tersebar di berbagai wilayah, akan didukung dengan penyempurnaan berbagai mekanisme keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Saat ini mekanisme keuangan ke daerah dilakukan melalui DAU, DAK, dan Dana Bagi Hasil. Mekanisme keuangan ini terus disempurnakan dan dilengkapi dengan berbagai instrumen yang akan mendukung proses pembangunan yang sudah lebih terdesentralisasi ke daerah, serta meningkatkan kualitas pendanaan pembangunan nasional.

Pembangunan yang inklusif dan berkeadilan juga dicerminkan dari segi proses perumusan kebijakan dan implementasinya, yaitu harus melibatkan para pemangku kepentingan untuk dapat berperan aktif dan bekerjasama dengan membangun konsensus pemihakan kepada masyarakat yang masih tertinggal. Kebijakan yang afirmatif harus dijalankan untuk mengatasi kesenjangan, ketertinggalan, maupun kemiskinan yang masih mewarnai kehidupan sebagian besar bangsa Indonesia. Kebijakan yang afirmatif akan berhasil apabila didukung dengan koordinasi dan proses



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

konsultasi yang efektif antar para pemangku kepentingan.

#### **5.2.4 Kebutuhan Investasi dan Kebijakan Pendanaan Pembangunan Nasional serta Pemanfaatannya**

Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan, kebijakan pendanaan investasi diarahkan untuk menjamin ketersediaan dan mengoptimalkan pendanaan pembangunan menuju kemandirian pendanaan pembangunan. Dalam kaitan itu, strategi utama pendanaan pembangunan adalah (i) optimalisasi sumber dan skema pendanaan pembangunan baik yang telah ada maupun yang akan dikembangkan, dan (ii) peningkatan kualitas pemanfaatan sumber dan skema pendanaan pembangunan.

Untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,3–6,8 persen pertahun dibutuhkan total investasi kumulatif selama lima tahun sebesar Rp 11.913,2-Rp 12.462,6 triliun. Dari total kebutuhan investasi tersebut, sekitar 18 persen pada tahun 2014 diharapkan dapat dipenuhi oleh pemerintah. Pembiayaan belanja pemerintah diperoleh dari penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak, dapat berasal dari hibah, pembiayaan luar negeri, dan pembiayaan dalam negeri. Sisa kebutuhan investasi dapat dipenuhi oleh dunia usaha dan masyarakat yang berasal dari perbankan, lembaga keuangan non bank, pasar modal (saham dan obligasi), dana luar negeri, laba ditahan, dan lainnya. Peningkatan proporsi pendanaan investasi dunia usaha diharapkan terutama terjadi pada komponen PMA dan PMDN sejalan dengan penciptaan iklim usaha yang kondusif, serta peningkatan pasar modal sejalan perbaikan regulasi, dan penguatan manajemen pasar modal, serta meningkatnya tata kelola dan kinerja perusahaan.

Dalam rangka peningkatan penerimaan negara, pemerintah terus melakukan pengembangan dan penyempurnaan kebijakan perpajakan dan penerimaan bukan pajak dengan tetap menjaga iklim investasi yang kondusif. Sementara itu, untuk meningkatkan efektivitas belanja negara dilakukan beberapa upaya sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas belanja melalui pemantapan pelaksanaan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) atau *Medium-Term Expenditure Framework* (MTEF) dan pemantapan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*), antara lain melalui restrukturisasi program dan kegiatan, serta penyusunan indikator kinerja yang tepat dan terukur.
2. Meningkatkan dan memperkuat keterkaitan perencanaan dengan penganggaran Pemerintah Pusat melalui penyempurnaan penyusunan RPJMN, Renstra, RKP, Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, dan lainnya. Demikian pula Pemerintah Daerah untuk RPJMD, Rencana Kerja dan Anggaran Pemerintah Daerah, dan lainnya.
3. Menyusun alokasi belanja yang lebih tepat sasaran dan menempatkan prioritas pendanaan pada kegiatan-kegiatan yang dapat melipatgandakan kegiatan

perekonomian domestik dan mampu menciptakan lapangan kerja yang tinggi serta mendukung peningkatan kualitas layanan.

4. Memperkuat pemantauan dan evaluasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan penganggaran.
5. Menyempurnakan mekanisme pengadministrasian dan pencairan anggaran agar lebih cepat, dan akuntabel.

Sumber pembiayaan luar negeri, baik berupa hibah maupun pinjaman luar negeri (PHLN), terus diupayakan dengan tetap mengutamakan kedaulatan dan kepentingan nasional serta meningkatkan efektivitas pemanfaatannya sesuai prioritas pembangunan nasional. Pemanfaatan PHLN harus dilihat tidak hanya dari sisi pendanaan tetapi juga sebagai sarana untuk bertukar informasi dan pembelajaran dalam rangka memperkuat dan menyempurnakan sistem perencanaan, anggaran, pengadaan, pemantauan dan evaluasi nasional serta kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia.

Sumber pendanaan melalui hibah luar negeri dapat berasal dari mitra pembangunan internasional, baik negara maupun lembaga/badan internasional. Walaupun hibah sebagai penerimaan negara mempunyai proporsi yang kecil, namun sifat hibah yang tidak memiliki resiko pengembalian merupakan sumber pendanaan yang potensial untuk dimanfaatkan. Dalam upaya optimalisasi penggunaan hibah, pemerintah akan terus meningkatkan kapasitas lembaga penerima hibah dan menyempurnakan peraturan pelaksanaan mengenai tata kelola hibah pemerintah yang lebih kondusif dan fleksibel namun tetap akuntabel disesuaikan dengan karakteristik hibah.

Sumber pendanaan dari pinjaman luar negeri dapat berupa pinjaman program maupun pinjaman proyek yang berasal dari lembaga multilateral, bilateral dan lembaga keuangan komersial. Sehubungan dengan meningkatnya peringkat Indonesia sebagai negara Lower Middle Income Country (LMIC) maka sumber pinjaman yang sangat murah dari lembaga keuangan multilateral sudah tidak dapat diperoleh lagi. Karena itu, pengelolaan pinjaman luar negeri semakin diperkuat dan pemanfaatannya semakin dioptimalkan.

Untuk mengurangi beban utang pemerintah, maka rasio stok utang pemerintah, termasuk utang luar negeri, terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) secara konsisten akan diturunkan hingga mencapai sekitar 24% pada akhir tahun 2014 dengan tetap menjaga target negative net transfer. Pengelolaan utang Pemerintah akan terus ditingkatkan, antara lain melalui peningkatan efektivitas pengelolaan portofolio, diversifikasi sumber-sumber utang, pengembangan skema pendanaan utang yang lebih aman dan pengelolaan resiko utang pemerintah.

Selanjutnya, dalam meningkatkan kualitas pemanfaatan pinjaman dan hibah luar



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

negeri, dilakukan upaya (i) penyempurnaan peraturan-peraturan perundangan mengenai perencanaan dan pengelolaan PHLN pemerintah (Peraturan Pemerintah No. 2/2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri dan Peraturan Menteri Negara PPN No. 05/2006 tentang Tata Cara Perencanaan dan Pengajuan Usulan Serta Penilaian Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri), (ii) peningkatan kualitas perencanaan dan kapasitas pelaksanaan proyek antara lain melalui penegakan aturan kesiapan proyek, penajaman fokus pemanfaatan PHLN yang lebih selektif untuk membiayai atau mendukung program/kegiatan prioritas nasional, (iii) peningkatan penggunaan sistem nasional (alignment) dan harmonisasi kegiatan mitra-mitra pembangunan, (iv) penguatan kualitas pemantauan dan evaluasi. Pemerintah terus meningkatkan efektifitas pemanfaatan pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN) bersama-sama mitra pembangunan dengan melaksanakan secara konsisten agenda Paris Declaration, yang telah dijabarkan lebih lanjut ke dalam Jakarta Commitment.

Pembiayaan dalam negeri Pemerintah terdiri dari pembiayaan perbankan dan bukan perbankan. Pembiayaan dalam negeri Pemerintah yang peranannya sangat penting adalah pembiayaan bukan perbankan, terutama Surat Berharga Negara (SBN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan pinjaman dalam negeri. SBN/SBSN dijual secara luas kepada lembaga keuangan maupun masyarakat. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan portofolio SBN/SBSN terus dilakukan pengembangan instrumen baru, perkuatan infrastruktur dan koordinasi pengelolaannya.

Sedangkan pinjaman dalam negeri diperoleh melalui pembiayaan perbankan BUMN, perbankan swasta dalam negeri dan Pemerintah Daerah. Pinjaman dalam negeri Pemerintah dijaga supaya tidak mengganggu penyerapan kredit sektor swasta dan dilakukan terutama untuk mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman komersial luar negeri. Dalam upaya tersebut, kebijakan pemerintah diprioritaskan untuk penyempurnaan peraturan-peraturan perundangan dan penguatan kapasitas lembaga yang terkait dengan pengadaan pinjaman dalam negeri. Hal ini diarahkan untuk memperkuat mekanisme koordinasi kelembagaan dalam pemanfaatan pinjaman, baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan dan evaluasi.

Perbankan sebagai lembaga intermediasi pendanaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam penyediaan sumber dana investasi yang berasal dari tabungan masyarakat. Skema pendanaan dari perbankan dapat bersifat konvensional maupun syariah. Di samping perbankan, dana masyarakat dapat disalurkan melalui lembaga keuangan bukan bank antara lain terdiri dari lembaga pembiayaan termasuk lembaga pembiayaan infrastruktur dan lembaga pembiayaan ekspor, lembaga asuransi, lembaga dana pensiun, lembaga pegadaian, lembaga pasar modal dan sebagainya. Potensi lembaga-lembaga keuangan ini perlu lebih diarahkan pada pembiayaan di sektor riil untuk mendorong investasi. Untuk itu terus dilakukan upaya penyempurnaan peraturan dan kebijakan untuk mendukung peran perbankan, non-perbankan, dan pasar modal

sebagai sumber pendanaan jangka menengah dan jangka panjang.

Selain berperan sebagai penyedia sumber pembiayaan pembangunan nasional, PMDN/PMA juga berperan sebagai aktor/pelaku penting pembangunan nasional. Untuk meningkatkan PMDN/PMA, strategi utamanya adalah penyempurnaan kebijakan untuk mencapai iklim investasi yang lebih kondusif serta penyediaan infratruktur yang andal dan memadai.

Potensi untuk meningkatkan sumber pendanaan pembangunan nasional juga dapat dilakukan dengan mendorong dan mengembangkan skema pendanaan pembangunan yang melibatkan peran dan kontribusi pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Beberapa skema pendanaan yang dapat dimanfaatkan antara lain: (i) Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS)/Public Private Partnership (PPP), (ii) Corporate Social Responsibility (CSR), dan (iii) Donasi/Zakat.

Kemampuan pihak swasta dalam menurunkan biaya, memperpendek waktu penyediaan, serta mengelola manajemen konstruksi dan fasilitas secara lebih efisien menyebabkan KPS dapat menawarkan nilai uang (value for money) dibandingkan dengan pembangunan fasilitas yang sama yang dikelola oleh pemerintah. Dalam upaya meningkatkan pemanfaatan skema pendanaan melalui Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS), dilakukan dua hal utama yaitu optimalisasi skema KPS dan peningkatan kualitas pemanfaatan skema KPS.

Upaya optimalisasi skema KPS dilakukan melalui hal-hal berikut:

1. Pengembangan, penyempurnaan dan harmonisasi berbagai kebijakan dan peraturan sektoral maupun regional, untuk memfasilitasi dan memperlancar pembentukan KPS terutama penyempurnaan Peraturan Presiden 67/2005 dan peraturan penyediaan lahan untuk pembangunan prasarana publik.
2. Pengembangan peraturan perundang-undangan untuk memperluas bidang prioritas KPS selain di bidang infrastruktur.

Upaya peningkatan efektivitas pemanfaatan skema KPS dilakukan melalui hal-hal berikut:

1. Penyusunan buku kerjasama pemerintah dan swasta (*PPP book*) yang berisi tentang daftar proyek pemerintah yang dapat dikerjasamakan dengan swasta setiap awal tahun, sesuai dengan siklus rencana kerja pemerintah. Sesuai dengan amanat Inpres 5/2008, *PPP Book* disusun dan diterbitkan sebagai upaya menciptakan mekanisme penyiapan proyek yang lebih terintegrasi dengan siklus anggaran pemerintah, transparan dan akuntabel. Dalam upaya optimalisasi partisipasi swasta dalam pembangunan, rencana penyiapan proyek pemerintah yang dikerjasamakan dengan swasta harus terintegrasi dengan rencana kerja pemerintah agar kemudian dapat diimplementasikan oleh kementerian/lembaga dan satuan kerja perangkat daerah.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

2. Penguatan peran kelembagaan KPS untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan pelaksanaan KPS dalam menyusun strategi perencanaan dan prioritas sektor yang akan dikerjasamakan.

Pelaksanaan CSR oleh badan usaha yang beroperasi di Indonesia telah diamanatkan dalam UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. CSR selanjutnya lebih diarahkan kepada peningkatan keselarasan kegiatannya dengan program pemerintah dalam mendukung pembangunan nasional, antara lain termasuk pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) serta penanganan perubahan iklim. Mengingat potensi CSR cukup besar dalam menunjang pencapaian tujuan pembangunan, maka harus dilakukan upaya harmonisasi kebijakan lembaga/perusahaan dengan pemerintah dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan.

Skema pendanaaan pembangunan lain yang semakin berkembang adalah yang terkait dengan keagamaan, seperti zakat. Beberapa badan pengelola zakat sudah mulai mengembangkan sistem pengelolaan zakat secara lebih profesional dan juga berpotensi untuk mendukung program pemerintah. Untuk itu, sumber dana ini terus didorong agar semakin meningkat, antara lain melalui penguatan lembaga dan manajemen pengelolaan dana berbasis keagamaan serta pemanfaatannya selaras dengan pembangunan nasional.

Selain sumber dan skema pendanaan di atas, terdapat skema global yang berpotensi sebagai sumber pendanaan pembangunan nasional, seperti: Carbon Trade, Clean Development Mechanism (CDM), Copenhagen Green Climate Fund, dan lain sebagainya. Dalam upaya pemanfaatan sumber pendanaan tersebut, dilakukan pengembangan dan penguatan kebijakan dan kapasitas kelembagaan yang dapat mendukung pemanfaatan dana-dana tersebut.

**TABEL 3**  
**KERANGKA EKONOMI MAKRO**  
**2010-2014**

	Proyeksi Jangka Menengah				
	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Pertumbuhan Ekonomi</b>	5,5 - 5,6	6,0 - 6,3	6,4 - 6,9	6,7 - 7,4	7,0 - 7,7
<b>Pertumbuhan PDB Sisi Pengeluaran (%)</b>					
Konsumsi					
Masyarakat	5,2 - 5,3	5,2 - 5,3	5,3 - 5,4	5,3-5,4	5,3 - 5,4
Pemerintah	10,8 - 10,9	10,9 - 11,2	12,9 - 13,2	10,2 - 13,5	8,1 - 9,8
Investasi	7,2 - 7,3	7,9 - 10,9	8,4 - 11,5	10,2 - 12,0	11,7 - 12,1
Ekspor	6,4 - 6,5	9,7 - 10,9	11,4 - 12,0	12,3 - 13,4	13,5 - 15,6
Impor	9,2 - 9,3	12,7 - 15,2	14,3 - 15,9	15,0 - 16,5	16,0 - 17,4
<b>Pertumbuhan PDB Sisi Produksi (%)</b>					
Pertanian	3,3 - 3,4	3,4 - 3,5	3,5 - 3,7	3,6 - 3,8	3,7 - 3,9
Industri Pengolahan	4,2 - 4,3	5,0 - 5,4	5,7 - 6,5	6,2 - 6,8	6,5 - 7,3
Nonmigas	4,8 - 4,9	5,6 - 6,1	6,3 - 7,0	6,8 - 7,5	7,1 - 7,8
Lainnya	6,5 - 6,7	7,0 - 7,3	7,3 - 7,7	7,5 - 8,4	7,8 - 8,6
<b>PDB per Kapita</b>					
(US\$)	2.555	2.883	3.170	3.445	3.811
Riil Harga Konstan 2000 (Ribu Rp)	9.785	10.255	10.790	11.389	12.058
<b>Stabilitas Ekonomi</b>					
Laju Inflasi, Indeks Harga Konsumen (%)	4,0 - 6,0	4,0 - 6,0	4,0 - 6,0	3,5 - 5,5	3,5 - 5,5
Nilai Tukar Nominal (Rp/US\$)	9.750 - 10.250	9.250 - 9.750	9.250 - 9.750	9.250 - 9.850	9.250 - 9.850
Suku Bunga SBI 3 bln (%)	6,0 - 7,5	6,0 - 7,5	6,0 - 7,5	5,5 - 6,5	5,5 - 6,5
<b>Neraca Pembayaran</b>					
Pertumbuhan Ekspor Nonmigas (%)	7,0 - 8,0	11,0 - 12,0	12,5 - 13,5	13,5 - 14,5	14,5 - 16,5
Pertumbuhan Impor Nonmigas (%)	8,0 - 9,0	14,0 - 15,6	16,0 - 17,5	17,0 - 18,3	18,0 - 19,0
Cadangan Devisa (US\$ miliar)	74,7 - 75,6	82,4 - 84,1	89,6 - 92,0	96,1 - 99,2	101,4 - 105,5
<b>Keuangan Negara *)</b>					
Surplus/Defisit APBN/PDB (%)	-1,6	-1,9	-1,6	-1,4	-1,2
Penerimaan Pajak/PDB (%)	12,4	12,6	13,0	13,6	14,2
Stok Utang Pemerintah/PDB (%)	29	28	27	25	24
<b>Pengangguran dan Kemiskinan</b>					
Tingkat Pengangguran (%)	7,6	7,3 - 7,4	6,7 - 7,0	6,0 - 6,6	5,0 - 6,0
Tingkat Kemiskinan (%)	12,0 - 13,5	11,5 - 12,5	10,5 - 11,5	9,5 - 10,5	8,0 - 10,0

\* ) Angka tahun 2010 adalah angka APBN 2010 yang akan disesuaikan pada saat APBN-P 2010



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

ditetapkan

### 5.2.5 Pendanaan melalui Transfer ke Daerah

Pendanaan pembangunan melalui transfer ke Daerah merupakan salah satu instrumen utama dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal. Dana transfer ke daerah terdiri dari Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Penyesuaian. Seiring dengan pelaksanaan desentralisasi atau penyerahan kewenangan atas sebagian urusan pemerintahan ke daerah yang dimulai sejak tahun 2001, alokasi transfer ke daerah terus meningkat. Pada tahun 2001, alokasi transfer ke daerah baru mencakup Dana Perimbangan, tetapi sejak tahun 2002, juga mencakup Dana Otsus dan Dana Penyesuaian.

Dalam periode 2010-2014 akan dilakukan restrukturisasi dan penataan instrumen pendanaan melalui transfer ke daerah serta memperjelas kedudukan Dana Perimbangan dalam kerangka perimbangan keuangan pusat dan daerah yang lebih selaras dengan perimbangan kewenangan Pusat dan Daerah. Sehubungan dengan itu, pengalokasian transfer ke daerah dalam RPJMN 2010-2014 diarahkan untuk:

1. meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah dan antar daerah;
2. menyelaraskan besaran kebutuhan pendanaan di daerah sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar daerah;
4. meningkatkan daya saing daerah;
5. mendukung kesinambungan fiskal nasional dalam kerangka kebijakan ekonomi makro;
6. meningkatkan kemampuan daerah dalam menggali potensi ekonomi daerah;
7. meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya nasional;
8. meningkatkan sinkronisasi antara rencana pembangunan nasional dengan rencana pembangunan daerah.

Pengelolaan transfer ke daerah senantiasa didorong untuk memenuhi pelaksanaan tata kelola keuangan yang baik, yaitu tepat sasaran, tepat waktu, efisien, adil, transparan, akuntabel, serta memiliki kinerja terukur.

## **Dana Perimbangan**

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), merupakan pendanaan pelaksanaan desentralisasi yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain karena masing-masing jenis dana perimbangan tersebut saling mengisi dan melengkapi.

### **Arah Kebijakan Pengalokasian Dana Bagi Hasil**

Dana Bagi Hasil (DBH) terdiri dari DBH pajak dan DBH sumber daya alam (SDA) merupakan hak daerah atas pengelolaan sumber-sumber penerimaan negara yang dihasilkan masing-masing daerah, yang besarnya memperhitungkan potensi daerah penghasil (*by origin*). DBH merupakan bagian dari dana perimbangan yang dialokasikan untuk mengatasi masalah ketimpangan vertikal antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam hal kemampuan keuangan (kapasitas fiskal). Sumber-sumber penerimaan yang dibagihasilkan yaitu penerimaan dari pajak (pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan cukai hasil tembakau) dan dana bagi hasil sumberdaya alam (minyak bumi, gas alam, pertambangan umum, kehutanan dan perikanan). Penggunaan DBH tersebut telah menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan daerah dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah penerima kecuali untuk dana bagi hasil cukai tembakau, yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah pusat.

Arah kebijakan pengalokasian DBH dalam RPJMN 2010-2014 adalah:

1. Meningkatkan akurasi data melalui koordinasi dengan institusi pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
2. Menyempurnakan proses penghitungan dan penetapan alokasi DBH secara lebih transparan dan akuntabel;
3. Menyempurnakan sistem penyaluran DBH sehingga alokasi DBH ke daerah penghasil lebih tepat waktu dan tepat jumlah.
4. Mendorong daerah penghasil SDA, terutama SDA tidak terbarukan, untuk meningkatkan upaya konservasi dan penanganan terhadap dampak lingkungan hidup pascakegiatan eksplorasi.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

## Arah Kebijakan Pengalokasian Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku sekurang-kurangnya 26 persen dari pendapatan dalam negeri netto yang ditetapkan dalam APBN.

DAU merupakan transfer pemerintah Pusat kepada Daerah dan bersifat *Block Grant* yang berarti daerah diberi keleluasaan dalam penggunaannya sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. DAU terdiri dari DAU untuk daerah provinsi dan DAU untuk daerah kabupaten/kota. Pengalokasian DAU kepada masing-masing daerah menggunakan formula dan mekanisme sebagaimana diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 dan PP Nomor 55 Tahun 2005. Alokasi DAU untuk daerah otonom baru (DOB) dilakukan dengan mekanisme sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu 2010-2014 adalah meningkatnya efektivitas dan akuntabilitas DAU sebagai instrumen untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan mengurangi ketimpangan fiskal antar daerah, dalam rangka menjamin terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan daerah yang efektif serta pelayanan publik yang lebih merata di daerah sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM).

Untuk mencapai sasaran tersebut, arah kebijakan pengalokasian DAU dalam RPJMN 2010-2014 adalah:

1. meningkatkan proporsi DAU terhadap Pendapatan Dalam Negeri (PDN) neto secara bertahap;
2. menyempurnakan formula alokasi DAU antara lain dengan meniadakan penggunaan variabel belanja pegawai, menambahkan variabel untuk memberikan insentif kepada daerah-daerah yang berprestasi dalam bidang ekonomi dan kesejahteraan sosial, dan/atau kompensasi kepada daerah-daerah yang sebagian besar wilayahnya merupakan kawasan lindung;
3. menyempurnakan penilaian kebutuhan fiskal dalam formula alokasi DAU berdasarkan perhitungan belanja untuk memenuhi SPM sesuai dengan Analisis Standar Belanja (ASB);

## Arah Kebijakan Pengalokasian Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai

kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

DAK sebagai salah satu instrumen Dana Perimbangan terus mengalami perkembangan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun, baik dari sisi besaran alokasi, cakupan bidang DAK, maupun jumlah daerah yang memperoleh alokasi DAK. Beberapa kendala dan permasalahan dalam pengelolaan DAK selama ini meliputi : 1) masih adanya kekurangtepatan pemahaman tentang konsep DAK baik di pusat maupun di daerah; 2) masih relatif kecilnya pagu nasional DAK dibandingkan dengan kebutuhan; 3) batasan penggunaan DAK sesuai peraturan perundungan yang ada masih menekankan pada kegiatan fisik, sehingga kurang dapat mengakomodasi kebutuhan terhadap perencanaan kegiatan secara utuh; 4) masih terbatasnya kapasitas perencanaan DAK yang berbasis kinerja, serta selaras dan terpadu dengan perencanaan sektoral nasional; 5) masih rendahnya akurasi data teknis yang diperlukan untuk perencanaan dan alokasi DAK; 6) formula alokasi DAK yang ada belum sepenuhnya dapat menjamin kesesuaian antara kepentingan nasional dan kebutuhan daerah; 7) masih kurang terintegrasinya DAK ke dalam siklus dan mekanisme perencanaan pembangunan nasional dan daerah; 8) belum tersedianya pedoman yang jelas tentang koordinasi pengelolaan DAK secara utuh dan terpadu di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota; 9) masih kurangnya sinkronisasi kegiatan DAK dengan kegiatan lain yang didanai APBD; 10) masih kurangnya koordinasi dan keterpaduan dalam pemantauan dan evaluasi DAK serta rendahnya kepatuhan daerah dalam penyampaian laporan pelaksanaan DAK ke pusat; dan 11) masih relatif lemahnya pengawasan daerah terhadap pelaksanaan kegiatan DAK.

Berdasarkan kendala dan permasalahan tersebut, sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu 2010-2014 adalah meningkatnya efektivitas DAK sebagai instrumen pendanaan dalam rangka mendorong pembangunan daerah untuk mendukung pencapaian berbagai prioritas pembangunan nasional dalam RPJMN 2010-2014.

Untuk mencapai sasaran tersebut, arah kebijakan DAK dalam RPJMN 2010-2014 adalah sebagai berikut:

1. Menyempurnakan desain konsep DAK dalam rangka memperjelas kedudukan, peran dan misi DAK sebagai salah satu instrumen pendanaan desentralisasi yang efektif untuk membantu mengurangi kesenjangan antar daerah dalam penyediaan pelayanan dasar publik dan memberikan insentif kepada daerah tertentu untuk meningkatkan upaya pencapaian sasaran prioritas nasional;
2. Meningkatkan secara bertahap pagu nasional DAK agar lebih optimal untuk mendukung pencapaian prioritas nasional. Selain itu akan dilakukan transformasi dari dana K/L yang digunakan untuk mendanai urusan daerah, seperti antara lain: dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) dan dana pengembangan infrastruktur perdesaan, ke DAK;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

3. Mendukung program yang menjadi prioritas nasional dalam RPJMN 2010-2014 sesuai kerangka pengeluaran jangka menengah dan penganggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*), termasuk program yang bersifat lintas (*cross cutting*) sektor dan program yang bersifat kewilayahan yang menjadi prioritas nasional;
4. Diprioritaskan untuk membantu daerah-daerah yang memiliki kemampuan keuangan relatif rendah dalam membiayai pelayanan publik sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM);
5. Meningkatkan kualitas perencanaan melalui penajaman indikator kinerja, dan penyediaan data teknis yang akurat;
6. Meningkatkan koordinasi pengelolaan DAK secara utuh dan terpadu di pusat dan daerah, meningkatkan sinkronisasi kegiatan DAK dengan kegiatan lain yang didanai APBN dan APBD, serta meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan DAK di daerah.;

Alokasi DAK ke daerah ditentukan berdasarkan kriteria alokasi yang ditetapkan dalam undang-undang. Menurut UU No. 33 Tahun 2004, kriteria tersebut terdiri dari kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Kriteria tersebut disempurnakan sejalan dengan revisi UU No. 33 Tahun 2004.

Bidang DAK ditentukan berdasarkan identifikasi kebutuhan DAK untuk mendukung pencapaian prioritas nasional. Sehubungan dengan itu, dalam RPJMN 2010-2014 bidang-bidang yang layak dipertimbangkan untuk didanai DAK meliputi antara lain: pelayanan dasar publik yang bersifat wajib seperti pendidikan dasar, kesehatan dasar, keluarga berencana, ketahanan pangan; infrastruktur dasar; logistik nasional; lingkungan hidup; dan kewilayahan (daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca konflik).

Dalam RPJMN 2010-2014 bidang-bidang yang didanai DAK adalah:

1. Khusus tahun 2010, bidang DAK telah ditetapkan meliputi: a) Pendidikan, b) Kesehatan, c) Infrastruktur Jalan, d) Infrastruktur Irigasi, e) Infrastruktur Air Minum, f) Infrastruktur Sanitasi, g) Prasarana Pemerintahan Daerah, h) Kelautan dan Perikanan, i) Pertanian, j) Lingkungan Hidup, k) Keluarga Berencana, l) Kehutanan, m) Sarana dan Prasarana Perdesaan, dan n) Sarana Perdagangan.
2. Pada tahun-tahun selanjutnya bidang kegiatan yang didanai DAK akan ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun anggaran bersangkutan.

Arah Kebijakan Pengalokasian Dana Otonomi Khusus

Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi undang-undang, Dana Otsus dialokasikan baik untuk Provinsi Papua maupun Provinsi Papua Barat beserta seluruh kabupaten/kota yang berada di daratan Papua, dengan ketentuan: (i) dana otonomi khusus yang besarnya 2 persen dari total DAU Nasional akan dibagi antara Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; (ii) tambahan dana otonomi khusus untuk infrastruktur akan diberikan kepada Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat secara terpisah sesuai dengan kesepakatan antara pemerintah dan DPR. Jika dalam perkembangannya terdapat daerah pemekaran baru maka kebijakan dan alokasinya akan dikoordinasikan terlebih dahulu antara Pemerintah Pusat, provinsi, dan kabupaten/kota terkait.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Dana Otsus juga dialokasikan untuk Provinsi NAD dengan nilai setara 2 persen dari pagu DAU nasional selama 15 tahun, untuk tahun ke-16 hingga ke-20 menjadi sebesar 1 persen dari pagu DAU nasional. Dalam rangka optimalisasi pemanfaatan Dana Otsus, kebijakan yang ditempuh hingga saat ini antara lain dengan mensyaratkan adanya rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri pada setiap tahap penyaluran, agar pemanfaatan Dana Otsus direncanakan dengan baik dan menghasilkan output bagi peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam RPJMN 2010-2014, kebijakan pengalokasian Dana Otsus berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2008 dan UU Nomor 11 Tahun 2006 terus dilanjutkan, dan arah kebijakannya adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan evaluasi secara menyeluruh terhadap pemanfaatan Dana Otsus selama ini;
2. Melakukan transformasi secara bertahap Dana Otsus ke Dana Perimbangan;
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas Dana Otsus Papua dan Papua Barat untuk mendanai pendidikan dan kesehatan;
4. Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat diberikan dalam rangka otonomi khusus yang diutamakan untuk pendanaan pembangunan infrastruktur, sesuai dengan Pasal 34 ayat (3) huruf f Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008;
5. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas Dana Otsus NAD untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, penanggulangan kemiskinan, serta pendidikan, sosial, dan kesehatan sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Untuk melaksanakan arah kebijakan dana perimbangan dan dana otonomi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

khusus tersebut diperlukan penyempurnaan berbagai peraturan perundang-undangan terutama terkait Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

## **BAB VI**

## **PENUTUP**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program aksi pembangunan nasional dari pasangan Presiden/Wakil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono – Boediono. RPJMN ini terdiri atas 3 (tiga) buku: yang pertama memuat prioritas pembangunan nasional, kedua memuat arah dan kebijakan bidang-bidang pembangunan, dan ketiga memuat arah kebijakan pembangunan kewilayahan. Dokumen ini selanjutnya menjadi pedoman bagi pemerintah dan masyarakat di dalam penyelenggaraan pembangunan nasional lima tahun ke depan.

Dokumen ini juga menjadi acuan di dalam penyusunan RPJM Daerah dan menjadi pedoman bagi pimpinan nasional dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan. Keberhasilan pembangunan nasional dalam mewujudkan visi TERWUJUDNYA INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN harus didukung oleh (1) komitmen dari kepemimpinan nasional yang kuat dan demokratis; (2) konsistensi kebijakan pemerintah; (3) keberpihakan kepada rakyat; dan (4) peran serta masyarakat dan dunia usaha secara aktif (5) sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien. Selain itu, sektor-sektor pembangunan lainnya serta penyelenggaraan fungsi pemerintahan yang tidak disebutkan secara spesifik di dalam dokumen ini tetap dilanjutkan di dalam rangka mencapai visi di atas.

Ke depan, melalui kerja keras, kebersamaan, dan kesungguhan segenap komponen bangsa, Bangsa Indonesia akan menjadi sebuah bangsa yang besar, maju, dan bermartabat. Bangsa yang menjadi kekuatan terpenting di Asia dan sejajar dengan bangsa dan negara-negara maju di dunia.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

## LAMPIRAN

### MATRIKS PENJABARAN PRIORITAS NASIONAL

<b>REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA</b>	
PRIORITAS 1	
TEMA PRIORITAS	<i>Pemantapan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, taat kepada hukum yang berwibawa, dan transparan. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditopang oleh efisiensi struktur pemerintah di pusat dan di daerah, kapasitas pegawai pemerintah yang memadai, dan data kependudukan yang baik</i>
PENANGGUNGJAWAB	Wakil Presiden
BEKERJASAMA	Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; Menteri Sekretaris Negara; Menteri Pendidikan Nasional; Menteri Perindustrian; Menteri Negara Koperasi dan UKM; Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; Menteri Kelautan dan Perikanan; Menteri Keuangan; Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas; Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara; Menteri Pekerjaan Umum; Menteri Kehutanan; Menteri Pertanian; Menteri Dalam Negeri; Menteri Negara Riset dan Teknologi; Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; Kepala Badan Pertanahan Nasional; Sekretaris Kabinet

NO	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Milyar Rupiah)	K/L						
				2010	2011	2012	2013	2014								
<b>1. STRUKTUR</b>																
Konsolidasi struktural dan peningkatan kapasitas kementerian/lembaga yang menangani aparatur negara yaitu Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN), Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) pada 2010; Restrukturisasi lembaga pemerintah lainnya, terutama bidang penguatan keberdayaan UMKM, pengelolaan energi, pemanfaatan sumber daya kelautan, restrukturisasi BUMN, hingga pemanfaatan tanah dan penataan ruang bagi kepentingan rakyat banyak selambat-lambatnya 2014:																
1.	Koordinasi perencanaan dan evaluasi program kelembagaan	Terlaksananya konsolidasi struktural dan peningkatan kapasitas Kemene PAN dan RB, BKN, dan LAN.	Percentase penyelesaian konsolidasi struktural dan peningkatan kapasitas Kemene PAN dan RB, BKN, dan LAN.	100%						29,35	Kemeneg PAN dan RB					
		Terlaksananya penataan kelembagaan instansi pemerintah lainnya	Percentase instansi pemerintah (PPK-BLU) yang telah tertata kelembagaannya	20%	30%	50%	85%	100%								
			Percentase LNS yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya	20%	30%	50%	85%	100%								
2.	Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Evaluasi Kelembagaan Polhukam	Terlaksananya penataan kelembagaan instansi pemerintah lainnya, bidang polhukam	Percentase Kementerian Negara bidang Polhukam yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya (antara lain Kementerian Setneg)	20%	30%	50%	85%	100%								
			Percentase LPNK bidang polhukam yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya, terutama bidang pemanfaatan tanah dan penataan ruang bagi kepentingan rakyat (BPN)	20%	30%	50%	85%	100%								

I.M- 2

NO	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Miliar Rupiah)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	TOTAL	
			Persentase Sekretariat Lembaga Negara yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya	20%	30%	50%	85%	100%		
3.	Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Evaluasi Kelembagaan Perekonomian I	Terlaksananya penataan kelembagaan instansi pemerintah lainnya, bidang perekonomian I	Persentase Kementerian Negara bidang perekonomian I yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya, terutama bidang penguatan keberdayaan UMKM (Kemeneg UKMK, Kemen. Perindustrian, Kemen. Perdagangan), pemanfaatan sumber daya kelautan (Kemen. Kelautan dan Perikanan), pemanfaatan tanah dan penataan ruang bagi kepentingan rakyat (Kemen. PU, Kemen. Kehutanan) dan Kemeneg PPN	20%	30%	50%	85%	100%		
			Persentase LPNK bidang Perekonomian I yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya	20%	30%	50%	85%	100%		
			Persentase Perwakilan RI yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya	20%	30%	50%	85%	100%		
4.	Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Evaluasi Kelembagaan Perekonomian II	Terlaksananya penataan kelembagaan instansi pemerintah lainnya, bidang perekonomian II	Persentase Kementerian Negara bidang perekonomian II yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya, terutama bidang pengelolaan energi (Kemen. ESDM, restrukturisasi BUMN (Kemeneg BUMN)), pemanfaatan tanah dan penataan ruang bagi kepentingan rakyat (Kemen. Pertanian) dan Kemeneg. Ristek).	20%	30%	50%	85%	100%		
			Persentase LPNK bidang Perekonomian II yang	20%	30%	50%	85%	100%		

I.M- 3

NO	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Miliar Rupiah)	K/L	
				2010	2011	2012	2013	2014	TOTAL		
5.	Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Evaluasi Kelembagaan Kesra	Terlaksananya penataan kelembagaan instansi pemerintah lainnya, bidang kesra	telah tertata organisasi dan tata kerjanya								
			Persentase Kementerian Negara bidang kesra yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya (antara lain Kemendiknas)	20%	30%	50%	85%	100%			
			Persentase LPNK bidang Kesra yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya	20%	30%	50%	85%	100%			
6.	Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi	Meningkatnya koordinasi penyusunan kebijakan dan pelaksanaan reformasi birokrasi	Jumlah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi yang diterbitkan (grand design RBN dan kebijakan pelaksanaannya)	100%						62,67	Kemeneg PAN dan RB
			Tingkat kualitas pelak sanaan RB yang terukur sesuai dengan kebijakan RB Nasional	70%	80%	85%	90%	100%			
			Persentase instansi yang menerima sosialisasi	100% K/L 30% Pemda	50% Pemda	70% Pemda	80% Pemda	100% Pemda			
			Persentase instansi pusat dan daerah yang dilakukan konsultasi asistensi reformasi birokrasi	100% K/L, 10% Pemda	40 pemda	60 pemda	80 pemda	100% Pemda			
			Jumlah laporan monitoring dan evaluasi	4 lap	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan			

NO	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Miliar Rupiah)	K/L	
				2010	2011	2012	2013	2014	TOTAL		
			Percentase K/L yang telah melaksanakan Reformasi Birokrasi sesuai kebijakan nasional	triwulanan	triwulanan	triwulanan	triwulanan	triwulanana	100%		
				20 %							
7.	Pembinaan dan koordinasi penyiapan produk hukum dan penalaan organisasi KKP	Terselenggaranya pemenuhan peraturan perundang-undangan serta organisasi dan tata laksana	Persentase pemenuhan peraturan perundang-undangan serta efektivitas dan kemutakhiran hukum laut, perjanjian, pelirizinan, organisasi dan tata laksana sesuai kebutuhan nasional dan tantangan global serta pelayanan bantuan hukum yang akuntabel	50%	60%	70%	80%	90%	66,0	KKP	
<b>2. OTONOMI DAERAH</b> Penataan Otonomi Daerah melalui: 1) Penghentian/pembatasan pemekaran wilayah; 2) Peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana perimbangan daerah; dan 3) Penyempurnaan pelaksanaan pemilihan kepala daerah											
1.	Penghentian/ Pembatasan Pemekaran Wilayah	Terlaksananya seluruh mekanisme pengusulan pemekaran dan pengabungan daerah sesuai dengan PP No 78 tahun 2007, dalam rangka penghentian/ pembatasan pemekaran wilayah/pembentukan daerah otonom baru.	Jumlah Strategi Dasar Penataan Daerah	1 paket					20,00	Kemendagri	
			Persentase evaluasi setiap usulan pemekaran, pengabungan, dan penghapusan daerah sesuai dengan PP No 78 tahun 2007		100%	100%	100%	100%			
			Jumlah daerah otonom baru yang terbentuk berdasarkan usulan Pemerintah		0 (nol)	0 (nol)	0 (nol)	0 (nol)			
2.	Pembinaan Fasilitasi Dana Perimbangan	Peningkatan efektifitas pemanfaatan DAK sesuai Petunjuk Pelaksanaan (Juklak)	Persentase Provinsi, Kab/Kota yang telah memanfaatkan DAK sesuai Juklak	70 %	75 %	80 %	85 %	90 %	73,77	Kemendagri	
		Optimalisasi penyerapan DAK oleh daerah	Persentase daerah yang telah Optimal (100%) menyerap DAK	70 %	75 %	80 %	85 %	90 %			
		Terwujudnya tertib administrasi	Jumlah rekomendasi kebijakan untuk dukungan	1 paket							

NO	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Miliar Rupiah)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	TOTAL	
		Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel dan transparan	materi sebagai masukan terhadap revisi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah.							
		Tersusunnya kebijakan/ regulasi di bidang fasi-litasi dana perimbangan yang dapat diterapkan di daerah	Jumlah Permendagri	6	3	3	3	3		
			Jumlah Surat Edaran Mendagri	2 SE	1 SE	1 SE	1 SE	1 SE		
3.	Pembinaan Administrasi Anggaran Daerah	Peningkatan kualitas belanja daerah dalam APBD	Persentase daerah yang proporsi belanja langsungnya lebih besar dari belanja tidak langsung	30%	40%	50%	55%	60%		
			Persentase rata-rata belanja modal terhadap total belanja daerah	26%	27%	28%	29%	30%		
		Penetapan APBD secara tepat waktu	Persentase jumlah APBD yang disahkan secara tepat waktu.	60%	70%	80%	85%	90%		
4.	Pembinaan dan Fasilitasi Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan daerah	Provinsi dan kabupaten/ kota memiliki Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berstatus Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).	Persentase daerah provinsi, Kab/Kota ber-LKPD dengan status WTP.	15%	30%	50%	75%	100%		
		Penetapan dan penyampaian Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD secara tepat waktu	Persentase penetapan dan penyampaian Raperda pertanggung jawaban pelaksanaan APBD yang disahkan secara tepat waktu.	40%	60%	70%	80%	90%		
5.	Perumusan kebijakan, bimbingan teknis, dan	Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Dana Transfer	1. Persentase ketepatan jumlah penyaluran jumlah dana transfer ke daerah	100%	100%	100%	100%	100%	86,38	Kemenkeu

NO	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Miliar Rupiah)	K/L	
				2010	2011	2012	2013	2014			
	pengelolaan transfer ke Daerah	Terciptanya Tata Kelola yang Tertib Sesuai Peraturan Perundang-undangan, Transparan, adil, proporsional, Kredibel, Akuntabel, dan Profesional dalam Pelaksanaan Transfer ke Daerah	2. Ketepatan waktu penyelesaian dokumen pelaksanaan penyaluran dana transfer ke daerah	4 hari	4 hari	4 hari	4 hari	3 hari			
6.	Penyempurnaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah	Tersusunnya UU tentang PEMILU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan terselenggaranya Pilkada yang efisien.	Persentase revisi terbatas UU No. 32 tahun 2004 terkait dengan efisiensi pelaksanaan Pilkada	100%					3,0	Kemendagri	
			Jumlah UU tentang PEMILU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1 UU							
<b>3. SUMBER DAYA MANUSIA</b> Penyempurnaan pengelolaan PNS yang meliputi sistem rekrutmen, pendidikan, penempatan, promosi, dan mutasi PNS secara terpusat selambat-lambatnya 2011											
1.	Penyusunan kebijakan perencanaan SDM aparatur	Tersusunnya kebijakan (PP) tentang sistem pengadaan /rekrutmen dan Seleksi PNS	Jumlah PP	1 PP	sosialisasi	sosialisasi			20,06	Kemeneg PAN dan RB	
		Tersusunnya kebijakan (PP) tentang Kebutuhan Pegawai (Formasi)	Jumlah PP	1 PP							
2.	Pengembangan kebijakan pemantapan pengembangan SDM aparatur	Tersusunnya kebijakan tentang manajemen ke-pegawaiannya ( <i>UU tentang SDM Aparatur Negara</i> ).	- Jumlah UU dan peraturan pelaksanaannya		1 RUU	1 UU & peraturan pelaksanaannya	Sosialisasi	Sosialisasi	11,27	Kemeneg PAN dan RB	

NO	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Miliar Rupiah)	K/L	
				2010	2011	2012	2013	2014	TOTAL		
		Tersusunnya kebijakan tentang pola dasar karir PNS	- Jumlah Perpres;	1 Prepres	Sosialisasi						
		Tersusunnya kebijakan tentang penilaian kinerja pegawai (SKP)	- Jumlah PP	1PP							
		Tersusunnya kebijakan tentang penilaian, peng-angkatan, pemindahan dan pemberhentian dlm dr jabatan struktural	Jumlah Perpres	1 Perpres							
		Tersusunnya kebijakan diklat jabatan PNS	Jumlah PP		1 PP						
		Tersusunnya kebijakan tentang pengangkatan PNS dalam jabatan struktural	Jumlah PP		1 PP						
		Pengembangan kebijakan kesejahteraan SDM aparatur	Tersusunnya kebijakan (UU/ PP) ttg remunerasi/ tunjangan kinerja Pegawai Negeri;	Jumlah UU/PP ttg remunerasi/ tunjang an kinerja Pegawai Negeri;	1 UU/ PP					16,25	Kemeneg PAN dan RB
3.		Tersusunnya kebijakan sistem pensiun PNS	Jumlah UU/PP tentang Pensiu PNS		1 UU/ PP						
		Tersusunnya kebijakan ttg sistem pengelolaan dana pensiun PNS	Jumlah kebijakan tentang pengelolaan dana pensiu PNS	1 PP							
4.	<b>REGULASI</b>	Percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundungan di tingkat pusat maupun daerah hingga tercapai keselarasan arah dalam implementasi pembangunan, di antaranya penyelesaian kajian 12.000 peraturan daerah selambat-lambatnya 2011.									

NO	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Miliar Rupiah)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	TOTAL	
1.	Penataan Produk Hukum dan Pelayanan Bantuan Hukum Departemen	Percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang- undangan di tingkat pusat dan daerah hingga tercapai keselarasan arah dalam implementasi pembangunan	Jumlah perda yang dikaji	3.000 perda	9.000 perda	3.000 perda	2.500 perda	2.500 perda	12,50	Kemendagri
2.	Kegiatan fasilitasi perancangan peraturan daerah	Meningkatnya pemerintahan provinsi, kab/kota yang di petakan dan yang mempublikasikan perdanya dalam sistem informasi peraturan daerah	% pemerintahan daerah	20%	40%	60%	80%	100%	9.0	Kemenkumham
3.	Perumusan kebijakan bimbingan teknis, monitoring, dan evaluasi di bidang PDRD	1. Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2. Mewujudkan Kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mendukung Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	1. Persentase jumlah kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dapat diimplementasikan 2. Realisasi janji pelayanan evaluasi Perda/Raperda PDRD ke pihak eksternal dalam bentuk rekomendasi Menteri Keuangan 3. Evaluasi dan rekomendasi Perda dan Raperda PDRD bermasalah 4. Program transisi/pengalihan PBB menjadi Pajak Daerah 5. Pengalihan BPHTB menjadi Pajak Daerah 6. Penerapan Pajak Rokok menjadi Pajak Daerah 7. RPP tentang sistem pemungutan pajak daerah 8. RPMK pemberian sanksi terhadap daerah yang	80%  15 hari  75%  -  -  100%  100%	80%  15 hari  80%  50%  100%  50%  -  -	82%  14 hari  85%  50%  -  75%  -  -	84%  13 hari  90%  100%  100%  -  -	85%  12 hari  100%  -  -  -  -	68,69	Kemenkeu

NO	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Miliar Rupiah)	K/L	
				2010	2011	2012	2013	2014	TOTAL		
			melanggar ketentuan PDRD 9. Mengkaji penerapan PBBKB di daerah berkaitan dengan harga dan subsidi BBM	100%	-	-	-	-			
<b>5. SINERGI ANTARA PUSAT DAN DAERAH</b>											
Penetapan dan penerapan sistem Indikator Kinerja Utama Pelayanan Publik yang selaras antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah											
1.	Penetapan Indikator Kinerja Utama Pelayanan Publik yang selaras antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah	Tersusunnya SPM Bidang lainnya yang belum diterbitkan sampai dengan akhir tahun 2009	Jumlah SPM yang ditetapkan	13 S PM	17 SPM				7,50	Kemendagri	
2	Penerapan Indikator Utama Pelayanan Publik di Daerah	Meningkatnya Implementasi Urusan Pemerintahan Daerah dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah.	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah diterapkan oleh Daerah	5 SPM	10 SPM	17 SPM			20,0	Kemendagri	
			Jumlah bidang SPM yang dimonitor penerapannya				17 Bidang SPM				
			Jumlah bidang SPM yang dievaluasi penerapannya					17 Bidang SPM			
3	Koordinasi perencanaan dan evaluasi program pelayanan publik	Tersusunnya peraturan pelaksanaan dari UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik	Jumlah PP	5					18,28	Kemeneg PAN dan RB	
			Jumlah Perpres	1							
			Persentase instansi yg mendapat sosialisasi	35%	70%	100%					
4	Peningkatan koordinasi dan evaluasi pelayanan di bidang kesejahteraan sosial	Terlaksananya penilaian, monitoring dan evaluasi pelayanan publik	Jumlah instrumen penilaian, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik	1					23,92	Kemeneg PAN dan RB	
			Laporan hasil pelaksanaan penilaian pelayanan		1	1	1	1			

NO	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Miliar Rupiah)	K/L					
				2010	2011	2012	2013	2014	TOTAL						
		Tersusunnya kebijakan percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik	Jlh inpres tentang percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik	1											
		Terlaksananya asistensi untuk mendorong penerapan OSS/PTSP	Persentase Pemda yang menerapkan OSS (pelayanan terpadu satu pintu)	70%	75%	88%	90%	95%							
5	Peningkatan koordinasi dan evaluasi pelayanan publik di bidang pemerintahan umum, hukum dan keamanan	Terlaksananya kompetisi antar unit pelayanan publik/antar instansi dan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pelayanan yang dinilai berdasarkan usulan	150 unit	200 unit	250 unit	300 unit	350 Unit	23,63	Kemeneg PAN dan RB					
			Jumlah Pemda yang dinilai berdasarkan usulan Provinsi	100 Kab/Kota	105 Kab/Kota	110 Kab/Kota	115 Kab/Kota	120 Kab/Kota							
			Percentase unit pelayanan/Pemda yang berkategori terbaik sesuai penilaian	50%	60%	70%	80%	90%							
			Percentase unit pelayanan/Pemda yang berkategori baik sesuai penilaian	50%	60%	70%	80%	90%							
<b>6. PENEGAKAN HUKUM</b>															
Peningkatan integrasi dan integritas penerapan dan penegakan hukum oleh seluruh lembaga dan aparat hukum															
1.	Penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana Kewilayah	Meningkatnya clearance rate tindak pidana di tingkat masyarakat	Jumlah perkara dan clearance rate seluruh tindak pidana di wilayah Polda	55%	55%	57%	57%	58%	2.697,63	POLRI					
2.	Pengawasan dan pemeriksaan kinerja serta perilaku aparat MA dan badan peradilan di bawahnya	Meningkatnya kualitas kinerja hakim dan aparat peradilan dan kepercayaan publik kepada lembaga peradilan	Jumlah laporan pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan kinerja serta perilaku hakim dan aparat peradilan	100	100	100	100	100	10.50	MA-RI					
3.	Penyelenggaran Kegiatan di bidang Pengelolaan Benda	pengelolaan benda sitaan Negara dan barang rampasan Negara	• Persentase benda sitaan negara dan barang rampasan negara yang dikelola secara tepat	70%	75%	80%	85%	90%	2.0	Kemenkumha					

NO	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Miliar Rupiah)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	TOTAL	
	Sitaan Negara dan barang Rampasan Negara		waktu dan akuntabel							m
4.	Pembinaan Kegiatan di bidang Keamanan dan Keteriban	Lapas rutan memenuhi standar hunian dan keamanan, penangan-an kasus NAPZA, penangan aduan masyarakat / tahanan	• Persentase	10%	15%	20%	25%	30%	5.8	Kemenkumha m
5.	Penyelenggaran Kegiatan di Bidang Pelayanan Tahanan dan Pembinaan Narapidana	Tahanan dan narapidana yang teregistrasi dan terklasifikasi secara tepat dan akuntabel	• Persentase	62%	67%	72%	77%	82%	3.4	Kemenkumha m
		Narapidana terserap di kegiatan kerja secara tepat dan akuntabel	• Persentase	60%				80%		
		Narapidana yang memperoleh pembinaan kepribadian secara tepat dan akuntabel	• Persentase	60%				90%		
6.	Pembinaan kegiatan di bidang Bimbingan kemasyarakatan dan Anak	Penyelegaraan kegiatan bimbingan kemasyarakatan dan anak yang berkualitas	• Persentasi anak didik pemasyarakatan • Persentase klien pemasyarakatan • Persentase anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan yang mendapatkan litmas secara tepat dan akuntabel	62%	67%	72%	77%	82%	7.1	Kemenkumha m
7.	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen	Peningkatan kualitas SDM hukum dan HAM	• peningkatan kenerja lulusan diklat kepemimpinan dan manajemen pada unit kerja	10%	21%	31%	41%	51% atau 1377 Pegawai	38.0	Kemenkumha m

NO	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Miliar Rupiah)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	TOTAL	
8.	Kegiatan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis	Peningkatan kualitas SDM hukum dan HAM	Persentase peningkatan kinerja lulusan diklat di bidang teknis pada unit kerjanya	25%	47%	62%	85%	100% atau 5400 Pegawai	37.0	Kemenkumham
9.	Kegiatan Penye-lenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional HAM	Peningkatan kualitas SDM hukum dan HAM	Persentase pening-katan kinerja lulusan diklat di bidang fungsional dan HAM pada unit kerjanya	20%	40%	60%	80%	100% atau 2400 pegawai	40.60	Kemenkumham
10.	Kegiatan Pendidikan Kedinasan	Peningkatan kualitas SDM hukum dan HAM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian teknis pemasyarakatan</li> <li>• Persentase lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian teknis keimigrasian</li> </ul>	92%	93%	95%	97%		50.2	Kemenkumham
11.	Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Kepegawaian Kemenkumham	Peningkatan kualitas SDM Kemenkumham	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase unit kerja yang memiliki kaderisasi berkesinambungan dan pegawai yang memperoleh pengembangan karir</li> </ul>	100%	100%	100%	100%	100%	108.2	Kemenkumham
12.	Kegiatan pengawasan Inspektorat khusus	Tersedianya mekanisme pengaduan masyarakat yang responsif terhadap kinerja lembaga peradilan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase pengaduan dan kasus yang dituntaskan secara tepat waktu</li> <li>• Jumlah unit pengaduan masyarakat di tiap lembaga penegak hukum</li> </ul>	20%	40%	60%	80%	100%	19.0	Kemenkumham
13.	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan	Meningkatnya kemampuan profesional, integritas kepribadian dan disiplin di lingkungan Kejaksaan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah pendidikan dan pelatihan baik penjenjangan maupun fungsional</li> </ul>	35 diklat	36 diklat	36 diklat	38 diklat	40 diklat	420.00	Kejaksaan Agung
14	Penyelidikan Tindak Pidana	Penyelidikan	Kasus Potensial (Kasus)	60	65	70	75	80	45.24	KPK

NO	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Miliar Rupiah)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	TOTAL	
	Korupsi		Kasus Solid (Kasus)	28	30	40	42	45		
15	Penyidikan Tindak Pidana Korupsi	Penyidikan	Penyidikan (Perkara)	55	60	65	70	75	44.85	KPK
			Penyidikan Lengkap (Perkara)	38	40	42	45	47		
16	Penuntutan dan Eksekusi Tindak Pidana Korupsi	Penuntutan	Penuntutan (Perkara)	45	50	55	60	65	50.48	KPK
			Berkas Perkara yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri(Perkara)	38	40	42	45	47		
		Eksekusi	Pelaksanaan Pidana Badan (Persen)	100%	100%	100%	100%	100%		
17	Koordinasi dan Supervisi Penindakan (Korsup) TPK	Korsup Penindakan	Peningkatan Perkara yang disupervisi KPK (Persen)	100%	100%	100%	100%	100%	22.52	KPK
			Peningkatan Jumlah Penerimaan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan/SPDP (Persen)	100%	100%	100%	100%	100%		
18	Pengelolaan LHKPN	Penanganan LHKPN	LHKPN yang diumumkan dalam TBN (Jumlah Penyelenggara Negara)	21.000	17.000	17.000	17.000	17.000	45.82	KPK
			Klarifikasi kepada Penyelenggara Negara	330	400	440	480	510		
			Kasus diserahkan kepada Dit.Lidik (Jumlah)	3	4	4	5	5		
19.	Pengelolaan Gratifikasi	Penanganan Gratifikasi	Jumlah SK Penetapan Status Gratifikasi	300	330	360	390	420	15.42	KPK
			Kasus diserahkan kepada Dit.Lidik (Jumlah)	6	8	8	10	10		
			Jumlah Instansi/ Lembaga (Pem., BUMN dan Swasta) yang melaksanakan Program Pengendalian Anti Gratifikasi	2	4	6	8	10		

NO	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Miliar Rupiah)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	TOTAL	
20.	Penyelenggaraan Pendidikan, Sosialisasi, dan Kampanye Anti Korupsi	Pendidikan, Sosialisasi, dan Kampanye	Jumlah Sekolah/ Lembaga pendidikan yang menerapkan Modul Anti Korupsi	60	75	90	110	125	57.83	KPK
			Peningkatan Komunitas Anti Korupsi	15	15	20	20	30		
			Instansi/Lembaga (Pem, Swasta, Masy) yang Melaks. Zona Anti Korupsi (Jumlah)	10	15	20	25	25		
21.	Pengembangan dan Pemanfaatan Jaringan Kerjasama Antara Lembaga/Instansi	Kerjasama dengan Lembaga/Instansi	Tingkat Kepuasan Layanan Kerja sama Antar Lembaga (Indeks)	70%	75%	75%	80%	80%	24.71	KPK
22.	Penyediaan Data dan Informasi untuk Pemberantasan Korupsi	Teknologi Informasi	Pemenuhan permintaan informasi dan data (Percentase)	60%	65%	70%	70%	75%	15.69	KPK
23.	Penanganan Pengaduan Masyarakat	Penanganan Dumas	Kasus siap LIDIK (Jumlah)	56	72	80	88	96	24.98	KPK
24.	Seleksi Hakim Agung, seleksi ha-kim dan Pemberian Penghargaan Hakim	Memperoleh calon hakim agung kompeten untuk diajukan ke DPR, serta pemberian apresiasi terhadap kinerja para hakim, serta hakim yang kompeten untuk bertugas dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara	Jumlah calon Hakim Agung yang mendaftar	80 pendaftar	--	79 pendaftar	84 pendaftar	90 pendaftar	45,8	Komisi Yudisial
			Jumlah calon Hakim Agung yang lulus seleksi	6 CHA	--	30 CHA	27 CHA	9 CHA		
			Jumlah hakim berprestasi yg diusulkan menerima penghargaan	4 hakim	4 hakim	4 hakim	4 hakim	4 hakim		
			Jumlah pelaksanaan monitoring profesionalisme hakim agung	1 keg	1 keg	2 keg	2 keg	3 keg		

NO	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Miliar Rupiah)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	TOTAL	
			Jumlah putusan hakim yang diteliti dan dianalisa	200 penelitian						
			% putusan hakim yang benar	100%	100%	100%	100%	100%		
			Biaya penelitian putusan hakim (dlm ribu)	Rp.50.000 0	Rp.50.00 0	Rp.50.000	Rp.50.000	Rp.50.00 0		
			% peserta yg mendaftar dalam seleksi calon hakim agung	75%	--	75%	80%	85%		
			% Hakim Agung yang profesional hasil seleksi	75%	--	75%	80%	85%		
			% calon Hakim Agung yang lulus seleksi	75%	--	75%	80%	85%		
			% calon hakim yg me ndapat penghargaan	75%	75%	80%	85%	90%		
			Jumlah peserta seleksi calon hakim yang mendaftar	1000 org	1000 org	1200 org	1200 org	1300 org		
			Jumlah peserta seleksi calon hakim yang lulus seleksi	500 peserta	500 peserta	600 peserta	600 peserta	650 peserta		
			% peserta seleksi calon hakim yang lulus sesuai kompetensi	80%	80%	80%	80%	80%		
			Penurunan biaya rata-rata seleksi calon hakim	20%	20%	20%	20%	20%		
			Biaya seleksi hakim agung per pendaftar (dlm ribu)	Rp.32.500	--	Rp.42.350	Rp.46.580	Rp.51.24 0		
			Biaya pemberian penghargaan hakim (dlm ribu)	Rp.1.000.00 0	Rp.1.000.00 0	Rp.1.100.000	Rp.1.000.00 0	Rp.1.200.0 00		

NO	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Miliar Rupiah)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	TOTAL	
25.	Pelayanan Pengawasan Perilaku Hakim dan peningkatan kompetensi hakim	Penyelesaian laporan pengaduan hakim yang diduga melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim serta meningkatnya kemampuan profesionalisme hakim	Jumlah pengaduan masyarakat	1.719 lap	1.540 lap	1.390 lap	1.250 lap	1.130 lap	47,5	Komisi Yudisial
			Jumlah yang diproses melalui Majelis Kehormatan Hakim (MKH)	15 sidang	20 sidang	20 sidang	25 sidang	25 sidang		
			% pengaduan masyarakat yang ditangani	70%	70%	75%	75%	75%		
			% hasil putusan Majelis Kehormatan Hakim yang sesuai dengan prinsip kode etik dan pedoman perilaku hakim	100%	100%	100%	100%	100%		
			Biaya penanganan laporan pengaduan masyarakat hingga tuntas	Peng- hematan 20%	Peng- hematan 20%	Penghematan 20%	Peng- hematan 20%	Peng- hematan 20%		
			Jumlah pelatihan kemampuan dan profesionalisme hakim yang dilaksanakan	5 pelatihan	5 pelatihan	7 pelatihan	7 pelatihan	9 pelatihan		
			% Peningkatan kemampuan dan profesionalisme hakim	80%	80%	85%	85%	90%		

NO	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Miliar Rupiah)	K/L						
				2010	2011	2012	2013	2014								
<b>7. DATA KEPENDUDUKAN</b>																
Penetapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan pengembangan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIAK) dengan aplikasi pertama pada Kartu Tanda Penduduk selambat-lambatnya pada 2011																
1.	Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu	Terlaksananya terlibat administrasi kependudukan dengan tersedianya data dan informasi penduduk yang akurat dan terpadu.	Jumlah kabupaten/kota yang memberikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepada setiap penduduk.	497	497					6.600 (Angka sementara untuk 5 tahun. Kepastian alokasi dana pertahun menunggu penyelesaian Grand Design)	Kemendagri					
			Jumlah penduduk yang menerima e-KTP berbasis NIK dengan perekaman sidik jari	4,2 juta jiwa di 6 kab/kota	67,29 juta jiwa di 191 kab/kota	100,51 juta jiwa di 300 kab/kota										

PRIORITAS 2		PROGRAM AKSI BIDANG PENDIDIKAN					
TEMA PRIORITAS		<i>Peningkatan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, relevan, dan efisien menuju terangkatnya kesejahteraan hidup rakyat, kemandirian, keluhuran budi pekerti, dan karakter bangsa yang kuat. Pembangunan bidang pendidikan diarahkan demi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang didukung keselarasan antara ketersediaan tenaga terdidik dengan kemampuan: 1) menciptakan lapangan kerja atau kewirausahaan dan 2) menjawab tantangan kebutuhan tenaga kerja.</i>					
PENANGGUNGJAWAB		Menteri Pendidikan Nasional					
BEKERJASAMA DENGAN		Menteri Komunikasi dan Informatika; Menteri Agama					

No	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp. Miliar)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014		
1.	AKSES PENDIDIKAN DASAR-MENENGAH									
	Peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan dasar dari 95% di 2009 menjadi 96% di 2014 dan APM pendidikan setingkat SMP dari 73% menjadi 76% dan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan setingkat SMA dari 69% menjadi 85%; Pemantapan/ rasionalisasi implementasi BOS, penurunan harga buku standar di tingkat sekolah dasar dan menengah sebesar 30-50% selambat-lambatnya 2012 dan penyediaan sambungan internet ber-content pendidikan ke sekolah tingkat menengah selambat-lambatnya 2012 dan terus diperluas ke tingkat sekolah dasar.						184.789			
a.	Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD	Tecapainya Keluasan dan Kemerataan Akses Jenjang SD Bermutu di Semua Kab/Kota	APM Jenjang SD/sederajat	95,2%	95,3%	95,7%	95,8%	96,0%		Kemendikna s Kemenag
	Peningkatan Akses dan Mutu Madrasah Ibtidaiyah									
b.	Penjaminan Kepastian Pendidikan SMP/SMPLB	Tercapainya Keluasan dan kemerataan Akses Jenjang SMP Bermutu di Semua Kab/Kota	APM Jenjang SMP/sederajat	74,0%	74,7%	75,4%	75,7%	76,0%		Kemendikna s Kemenag
	Peningkatan Akses dan Mutu Madrasah Tsanawiyah									
c.	Penyediaan dan Penin-gkatan Pendidikan SMK	Tercapainya Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan Jenjang Menengah Bermutu, dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat, di Semua Kab/Kota	APK Jenjang Menengah	73,0%	76,0%	79,0%	82,0%	85,0%		Kemendikna s Kemenag
	Penyediaan dan Penin-gkatan Pendidikan SMA/SMLB									
	Peningkatan Akses dan Mutu Madrasah Aliyah									
d.	Penyediaan subsidi Pendidikan SD/SDLB berkualitas	Tersalirkannya subsidi pendidikan bagi siswa SD/ SDLB	Jumlah Siswa SD/SDLB Sasaran BOS	27.672.820	27.973.000	28.006.000	28.085.000	28.211.000		Kemendikna s Kemenag
	Penyediaan subsidi Pendidikan SMP/SMPLB berkualitas	Tersalirkannya bantuan sosial pendidikan bagi siswa SMP/SMPLB	Jumlah Siswa SMP/SMPLB Sasaran BOS	9.660.639	9.965.000	10.354.000	10.632.000	10.870.000		

No	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp. Miliar)	K/L

				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
	Penyediaan Subsidi Pendidikan Madrasah Bermutu Penyediaan Subsidi Pendidikan Agama Islam Bermutu	Tersedianya anggaran BOS MI, MTs, Diniyah Ula, Dlniyah Wustha	Siswa MI/Diniyah Ula penerima BOS	3.555.803	3.626.919	3.681.322	3.736.543	3.791.591		
			Siswa MTs/Diniyah Wustha penerima BOS	3.238.713	3.303.487	3.353.039	3.403.335	3.454.385		
e.	Penyediaan Buku Ajar yang Bermutu dan Murah serta Pembinaan, Pengembangan, Kegrafikaan dan Pendidikan	Tersedianya Buku Ajar yang Bermutu dan Murah melalui pembelian Hak Cipta	Percentase Mata Pelajaran SD/Sederajat (Total 78 Jilid Mapel)	100,0	-	-	-	-		Kemendikna s
			Percentase Mata Pelajaran SMP/Sederajat (Total 47 Jilid Mapel)	100,0	-	-	-	-		
			Percentase Mata Pelajaran SMA/Sederajat (Total 93 Jilid Mapel)	100,0	-	-	-	-		
			Percentase Mata Pelajaran SMK (Total 493 Jilid Mapel)	52,0	64,0	76,0	88,0	100,0		
f.	Penyediaan dan Peningkatan Pendidikan SMK Penyediaan dan Peningkatan Pendidikan SMA/SMALB Peningkatan Akses dan Mutu Madrasah Aliyah Penjaminan Kepastian Pendidikan SMP/ SMPLB Peningkatan Akses dan Mutu Madrasah Tsanawiyah Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD Peningkatan Akses dan Mutu Madrasah Ibtidaiyah	Tersedianya sambungan internet ber-content pendidikan di sekolah	Percentase SMK menerapkan pembelajaran berbasis TIK	50,0%	60,0%	70,0%	82,0%	100,0%		Kemendikna s Kemenag
			Percentase SMA yang menerapkan pebelajaran berbasis TIK	40,0%	50,0%	60,0%	70,0%	80,0%		
			Percentase satuan pendidikan jenjang SMP Menerapkan e-Pembelajaran dengan pendekatan CTL berbasis TIK	21,4%	34,8%	48,2%	61,6%	75,0%		
			Percentase SD Menerapkan e-Pembelajaran	16%	22%	28%	34%	40%		
g.	Fasilitasi Penerapan dan Pengembangan E-Government	Kebijakan, regulasi, bimbingan teknis dan evaluasi pengembangan e-government nasional untuk mendorong peningkatan nilai e-government nasional menjadi 3,4 dan tingkat e-literasi menjadi 50%	Jumlah sekolah di 5 kab/kota provinsi DIY yang memiliki sistem e-pendidikan	50 sekolah	200 sekolah	250 sekolah	-	-	877,88	Kemenkomin fo
2.	AKSES PENDIDIKAN TINGGI Peningkatan APK pendidikan tinggi menjadi 25% di 2014								126.584	
No	Substansi Inti/ Kegiatan Prioritas	Sasaran	Indikator	Target					Indikasi Pagu (Rp. Miliar)	K/L

				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
a.	Penyediaan Layanan Akademik Program Studi Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Tinggi Islam	Tersedianya Prodi yang Bermutu, Berdaya Saing Internasional, dan Relevan	APK PT dan PTA (Usia 19-23 Tahun)	24,80%	26,10%	27,40%	28,70%	30,0%		Kemendiknas Kemenag
3.	<b>METODOLOGI</b> Penerapan metodologi pendidikan yang tidak lagi berupa pengajaran demi kelulusan ujian (teaching to the test), namun pendidikan menyeluruh yang memperhatikan kemampuan sosial, watak, budi pekerti, kecintaan terhadap budaya-bahasa Indonesia melalui: Penyesuaian sistem Ujian Akhir Nasional pada 2011; dan Penyempurnaan kurikulum sekolah dasar-menengah sebelum tahun 2011 yang diterapkan di 25% sekolah pada 2012 dan 100% pada 2014								6.492	
a.	Penyediaan Informasi Hasil Penilaian Pendidikan	Tersedianya Informasi Penilaian Kualitas Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah	Kesesuaian Sistem Ujian Akhir Nasional dengan memperhatikan kemampuan sosial, watak, budi pekerti, kecintaan terhadap budaya-bahasa Indonesia	80%	100%	-	-	-		Kemendiknas
b.	Penyediaan Sistem Pembelajaran, Penyempurnaan Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah	Tersedianya Model Kurikulum dan Pembelajaran Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.	Percentase penerapan kurikulum sekolah dasar-menengah yang disempurnakan	10%	15%	25%	65%	100%		
4.	<b>PENGELOLAAAN</b> Pemberdayaan peran Kepala Sekolah sebagai manager sistem pendidikan yang unggul, revitalisasi peran Pengawas Sekolah sebagai entitas <i>quality assurance</i> , mendorong aktivasi peran Komite Sekolah untuk menjamin keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses pembelajaran, dan Dewan Pendidikan di tingkat Kabupaten.								436	
a.	Penyediaan Tenaga Kependidikan Formal untuk Seluruh Jenjang Pendidikan Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Madrasah	Tersedianya Tena-ga Kependidikan SD/MI, SMP/MTs, SMA/ SMK/MA Bermutu yang merata di Kabupaten dan Kota	Percentase Kepala SD/MI yang Sudah Mengikuti Training Kepala Sekolah Terakreditasi yang Berkualifikasi Menurut Kab/Kota	15%	25%	45%	70%	90%		Kemendiknas Kemenag
			Percentase Kepala SMP/MTs yang Sudah Mengikuti Training Kepala Sekolah Terakreditasi yang Berkualifikasi Menurut Kab/Kota	15%	30%	50%	75%	100%		
			Percentase Kepala SMA/SMK/MA yang Sudah Mengikuti Training Kepala Sekolah Terakreditasi yang Berkualifikasi Menurut Kab/Kota	15%	30%	50%	75%	100%		

No	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp. Miliar)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014		
b.	Penyediaan Tenaga Kependidikan Formal untuk Seluruh Jenjang Pendidikan	Tersedianya Tenaga Kependidikan SD/MI, SMP/MTs, SMA/ SMK/MA Bermutu yang merata di Kabupaten dan Kota	Percentase Pengawas SD/MI yang Sudah Mengikuti Training Kepala Sekolah Terakreditasi yang Berkualifikasi Menurut Kab/ Kota	10%	25%	50%	70%	90%	*) sudah termasuk dalam pagu substansi inti 3	Kemendiknas Kemenag
	Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Madrasah		Percentase Pengawas SMP/MTs yang Sudah Mengikuti Training Kepala Sekolah Terakreditasi yang Berkualifikasi Menurut Kab/ Kota	35%	50%	70%	85%	90%		
			Percentase Pengawas SMA/SMK/MA yang Sudah Mengikuti Training Kepala Sekolah Terakreditasi yang Berkualifikasi Menurut Kabupaten/Kota	35%	50%	70%	85%	90%		
c.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan TK dan Pendidikan Dasar	Menguatnya tata kelola dan sistem pengendalian manajemen di Ditjen MPDM	Percentase Komite Sekolah yang berfungsi efektif	75%	80%	85%	90%	95%		
d.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan TK dan Pendidikan Dasar	Menguatnya tata kelola dan sistem pengendalian manajemen di Ditjen MPDM	Peran serta masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pendanaan pendidikan melalui Dewan Pendidikan	meningkat	meningkat	meningkat	meningkat	meningkat		
5.	<b>KURIKULUM</b> Penataan ulang kurikulum sekolah yang dibagi menjadi kurikulum tingkat nasional, daerah, dan sekolah dengan memasukkan pendidikan kewirausahaan.								*) sudah termasuk dalam pagu substansi inti 3	Kemendiknas
a.	Penyediaan Sistem Pembelajaran, Penyempurnaan Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah	Tersedianya Model Kurikulum dan Pembelajaran Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah	Jumlah Model Kurikulum SD/MI	1	4	4	4	4		
			Jumlah Model Kurikulum SMP/MTs	1	3	3	3	3		
			Jumlah Model Kurikulum SMA/MA	1	3	3	3	3		
			Jumlah Model Kurikulum SMK	1	5	5	5	5		

6.	KUALITAS Peningkatan kualitas guru, pengelolaan dan layanan sekolah, melalui: 1) program remediasi kemampuan mengajar guru; 2) penerapan sistem evaluasi kinerja profesional tenaga pengajar; 3) sertifikasi ISO 9001:2008 di 100% PTN, 50% PTS, 100% SMK sebelum 2014; 4) membuka luas kerjasama PTN dengan lembaga pendidikan internasional; 5) mendorong 11 PT masuk Top 500 THES pada 2014; 6) memastikan perbandingan guru:murid di setiap SD & MI sebesar 1:32 dan di setiap SMP & MTs 1:40; dan 7) memastikan tercapainya Standar Nasional Pendidikan (SNP) bagi Pendidikan Agama dan Keagamaan paling lambat tahun 2013.							117.372	
a.	Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Meningkatnya Pemberdayaan dan Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Percentase Guru Inti yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme	20%	40%	60%	80%	100%	Kemendiknas Kemenag
b.	Peningkatan mutu dan Pembinaan lembaga diklat dan penjaminan mutu pendidikan	Meningkatnya Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bermutu yang merata antar Provinsi, Kabupaten dan Kota	Jumlah Pengembangan Standar, Sistem, Program, Bahan dan Model Diklat Bagi Guru Per Tahun	20	20	20	20	20	Kemendiknas Kemenag
c.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Dikti	Menguatnya tata kelola dan sistem pengendalian manajemen di Ditjen Dikti	Percentase PT BHMN Bersertifikat ISO 9001:2008	100%	100%	100%	100%	100%	Kemendiknas Kemenag
	Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Tinggi Islam	Tersedianya akses terhadap pendidikan tinggi bermutu berbasiskan keagamaan	Percentase PTAN bersertifikat ISO 9001: 2008	20%	40%	60%	80%	100%	
	Penyediaan dan Peningkatan Pendidikan SMK	Tercapainya Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan SMK Bermutu Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat, di Semua Kab/Kota	Percentase SMK Bersertifikat ISO 9001:2000/ 9001:2008	26%	44%	63%	81%	100%	Kemendiknas
d.	Penyediaan Layanan Kelembagaan	Tersedianya dan Keluasan Akses PT yang Bermutu dan Berdaya saing Internasional	Jumlah PT Mengembangkan Kerjasama Kelembagaan Dalam dan Luar Negeri	40	48	56	64	72	Kemendiknas Kemenag
	Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Tinggi Islam	Tersedianya akses terhadap pendidikan tinggi bermutu berbasiskan keagamaan							

No	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp. Miliar)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014		
e.	Penyediaan Layanan Akademik Program Studi	Tersedianya Prodi yang Bermutu, Berdaya Saing Internasional, dan Relevan	Jumlah PT 500 Terbaik Dunia Versi THES	3	5	6	8	11		Kemendikna s
f.	Penyediaan Guru untuk Seluruh Jenjang Pendidikan	Tersedianya Guru SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB Bermutu dan merata antar Provinsi, Kab/Kota	Persentase Kab/ Kota yang Telah Memiliki Rasio Pen-didik dan Peserta Didik SD/MI 1:32	48,0%	60%	75%	85%	100%		Kemendikna s Kemenag
	Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Madrasah		Persentase Kab/ Kota yang Telah Memiliki Rasio Pen-didik dan Peserta Didik 1:40	47,4%	50,5%	53,7%	56,8%	60,0%		
g.	Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Agama Islam pada Sekolah	Terlaksananya Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama dan Keagamaan	Penyusunan dan penerapan Standar Nasional Pendidikan bagi Pendidikan Agama dan Keagamaan	Penyu-sunan Standar	Uji coba penerapan	Penera-pan secara bertahap	Penera-pan secara bertahap	Penera-pan secara bertahap		Kemenag

PRIORITAS 3		RENCANA AKSI BIDANG KESEHATAN					
TEMA PRIORITAS		<i>Penitikberatan pembangunan bidang kesehatan melalui pendekatan preventif, tidak hanya kuratif, melalui peningkatan kesehatan masyarakat dan lingkungan diantaranya dengan perluasan penyediaan air bersih, pengurangan wilayah kumuh sehingga secara keseluruhan dapat meningkatkan angka harapan hidup dari 70,7 tahun pada tahun 2009 menjadi 72,0 tahun pada tahun 2014, dan pencapaian keseluruhan sasaran Millennium Development Goals (MDGs) tahun 2015.</i>					
PENANGGUNGJAWAB		Menteri Kesehatan					
BEKERJASAMA DENGAN		Menteri Pekerjaan Umum; Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat					

No.	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp. Miliar)	K/L	
				2010	2011	2012	2013	2014			
<b>1. KESEHATAN MASYARAKAT</b>											
1	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu dan Reproduksi	1. Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih (cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (PN)) 2. Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal (cakupan kunjungan kehamilan ke empat (K4)) 3. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan KB sesuai standar	84	86	88	89	90	2.194,0	Kementerian Kesehatan	
				84	86	90	93	95			
				10	40	75	90	100			

2.	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan anak	1. Cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1) 2. Cakupan pelayanan kesehatan bayi 3. Cakupan pelayanan kesehatan balita	84 84 78	86 85 80	88 86 81	89 87 83	90 90 85	1.723,0	Kementerian Kesehatan
3	Pembinaan Imunisasi dan Karantina Kesehatan	Meningkatnya pembinaan di bidang imunisasi dan karantina kesehatan	Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	80	82	85	88	90	1.205,9	Kementerian Kesehatan
4	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	Tersedianya Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk puskesmas	Jumlah puskesmas yang mendapatkan bantuan operasional kesehatan dan menyelenggarakan lokakarya mini untuk menunjang pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	300	8.608	8.737	8.868	9.000	4.940,0	Kementerian Kesehatan
5	Penyehatan Lingkungan	Meningkatnya penyehatan dan pengawasan kualitas lingkungan	1. Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas 2. Persentase kualitas air minum yang memenuhi syarat 3. Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat	62 85 64	62,5 90 67	63 95 69	63,5 100 72	67 100 75	2.054,5	Kementerian Kesehatan
6	Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1.063 kawasan dan 4.650 desa	Jumlah kawasan dan desa yang terfasilitasi pembangunan air minum	159 kawasan dan 1.472 desa	179 kawasan dan 1.165 desa	195 kawasan dan 500 desa	247 kawasan dan 1000 desa	263 kawasan dan 700 desa	9.900,00	Kementerian Pekerjaan Umum
7	Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan	387 *) Kawasan *) bukan target kumulatif	Jumlah kawasan dan desa yang terfasilitasi pembangunan sanitasi (air limbah, persampahan, dan drainase)	94	107	122	137	138	10.845,0	Kementerian Pekerjaan Umum

	Dan Pola Investasi, serta Pengelolaan Pengembangan Infrastruktur Sanitasi Dan Persampahan									
<b>2. SARANA KESEHATAN</b> Ketersediaan dan peningkatan kualitas layanan rumah sakit berakreditasi internasional di minimal 5 kota besar di Indonesia dengan target 3 kota pada tahun 2012 dan 5 kota pada tahun 2014										
1	Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan	Meningkatnya pelayanan medik spesialistik kepada masyarakat	Jumlah kota di Indonesia yang memiliki RS standar kelas dunia ( <i>world class</i> )	1	2	3	4	5	434,5	Kementerian Kesehatan
<b>3. OBAT</b> Pemberlakuan Daftar Obat Esensial Nasional sebagai dasar pengadaan obat di seluruh Indonesia dan pembatasan harga obat generik bermerek pada tahun 2010										
1	Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan	Meningkatnya ketersediaan obat esensial generik di sarana pelayanan kesehatan dasar	Persentase ketersediaan obat dan vaksin	80	85	90	95	100	7.473,2	Kementerian Kesehatan
<b>4. ASURANSI KESEHATAN NASIONAL</b> Penerapan Asuransi Kesehatan Nasional untuk seluruh keluarga miskin dengan cakupan 100% pada tahun 2011 dan diperluas secara bertahap untuk keluarga Indonesia lainnya antara tahun 2012-2014										
1	Pembinaan, Pengembangan Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	Terumuskananya kebijakan pembiayaan dan jaminan kesehatan	Persentase penduduk (termasuk seluruh penduduk miskin) yang memiliki jaminan kesehatan	59	70,3	84,4	94,5	100	842,4	Kementerian Kesehatan
2	Pelayanan Kesehatan Rujukan Bagi Masyarakat Miskin (Jamkesmas)	Meningkatnya pelayanan kesehatan rujukan bagi penduduk miskin di RS	Persentase RS yang melayani pasien penduduk miskin peserta program Jamkesmas	75	80	85	90	95	24.782,7	Kementerian Kesehatan
3	Pelayanan	Meningkatnya	Jumlah puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan dasar	8.481	8.608	8.737	8.868	9.000	6.447,2	Kementerian

	Kesehatan Dasar Bagi Masyarakat Miskin (Jamkesmas)	pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk miskin di puskesmas	bagi penduduk miskin								Kesehatan
4	Penataan Kelembagaan Jaminan Sosial Nasional	Terselenggaranya jaminan sosial berbasis asuransi bagi seluruh pekerja formal maupun informal dengan prioritas utama asuransi kesehatan.	Tingkat kesiapan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) pusat maupun daerah untuk melaksanakan jaminan sosial.	100%						50,09	Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat
<b>5. KELUARGA BERENCANA</b>											
Peningkatan kualitas dan jangkauan layanan KB melalui 23.500 klinik pemerintah dan swasta selama 2010-2014											
1	Pengembangan kebijakan dan pembinaan kesertaan ber-KB	Meningkatnya pembinaan, kesertaan, dan kemandirian ber-KB melalui 23.500 klinik KB pemerintah dan swasta	1. Jumlah klinik KB pemerintah dan swasta yang melayani KB 2. Jumlah klinik KB pemerintah dan swasta yang mendapat dukungan sarana prasarana	23.500 4.700	23.500 4.700	23.500 4.700	23.500 4.700	23.500 4.700	4.378,15	BKKBN	
<b>6. PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR</b>											
Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular pada 2014, yang ditandai dengan : Menurunnya prevalensi <i>Tuberculosis</i> dari 235 menjadi 224 per 100.000 penduduk; Menurunnya kasus malaria ( <i>Annual Parasite Index- API</i> ) dari 2 menjadi 1 per 1.000 penduduk; Terkendalinya prevalensi HIV pada populasi dewasa (persen) hingga menjadi < 0,5.											
1	Pengendalian Penyakit Menular Langsung	Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular langsung	1. Prevalensi kasus HIV 2. Jumlah kasus TB per 100.000 penduduk 3. Persentase kasus baru TB Paru (BTA positif) yang ditemukan 4. Persentase kasus baru TB Paru (BTA positif) yang disembuhkan 5. Persentase penduduk 15 tahun ke atas menurut pengetahuan tentang HIV dan AIDS	0,2 235 73 85 65	<0,5 231 75 86 75	<0,5 228 80 87 85	<0,5 226 85 87 90	<0,5 224 90 88 95	1.237,3	Kementerian Kesehatan	
2	Pengendalian Penyakit Bersumber	Meningkatnya pencegahan dan	Angka penemuan kasus malaria per 1.000 penduduk	2	1,75	1,5	1,25	1	1.254,0	Kementerian Kesehatan	

	Binatang	penanggulangan penyakit bersumber binatang									
--	----------	--------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PRIORITAS 4		PENANGGULANGAN KEMISKINAN					
TEMA PRIORITAS		<i>Penurunan tingkat kemiskinan absolut dari 14,1% pada 2009 menjadi 8-10% pada 2014 dan perbaikan distribusi pendapatan dengan pelindungan sosial yang berbasis keluarga, pemberdayaan masyarakat dan perluasan kesempatan ekonomi masyarakat yang berpendapatan rendah</i>					
PENANGGUNGJAWAB		Wakil Presiden					
BEKERJASAMA DENGAN		Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat; Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; Menteri Kesehatan; Menteri Pendidikan Nasional; Menteri Sosial; Menteri Keuangan; Menteri Negara Koperasi dan UKM ; Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas					

N o	SUBSTANSI INTI /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp. Milyar)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014		
1. BANTUAN SOSIAL TERPADU:										
1	Pembinaan, Pengembangan Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	Terumuskannya kebijakan pembiayaan dan jaminan kesehatan	1. Persentase penduduk (termasuk seluruh penduduk miskin) yang memiliki jaminan kesehatan	59	70,3	84,4	94,5	100	842,4	Kemenkes
2	Pelayanan Kesehatan Dasar Bagi Masyarakat Miskin (Jamkesmas)	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Dasar Bagi Penduduk Miskin di Puskesmas	Jumlah puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk miskin	8481	8608	8737	8868	9000	6.447,2	Kemenkes
3	Pelayanan Kesehatan Rujukan Bagi Masyarakat Miskin (Jamkesmas)	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Rujukan Bagi Penduduk Miskin di RS	1. Persentase RS yang melayani pasien penduduk miskin peserta program Jamkesmas	75	80	85	90	95	24.782,7	Kemenkes

N o	SUBSTANSI INTI / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp. Miliar)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	TOTAL	
4	Pengembangan kebijakan dan pembinaan kesetaraan ber-KB	Meningkatnya pembinaan, kesertaan, dan kemandirian ber-KB	1. Jumlah peserta KB baru miskin (KPS dan KS-I) dan rentan lainnya yang mendapatkan pembinaan dan alokasi gratis melalui 23.500 klinik KB pemerintah dan swasta (juta) 2. Jumlah peserta KB aktif miskin (KPS dan KS-I) dan rentan lainnya yang mendapatkan pembinaan dan alokasi gratis melalui 23.500 klinik KB pemerintah dan swasta (juta)	3,75  11,9	3,80  12,2	3,89  12,5	3,97  12,8	4,05  13,1	4.378,2	BKKBN
5	Peningkatan Kemandirian Ber-KB Keluarga Pra-S dan KS-1	Meningkatnya pembinaan dan kemandirian ber-KB keluarga Pra-S dan KS-1	1. Jumlah PUS anggota Kelompok Usaha Ekonomi Produktif yang menjadi peserta KB mandiri 2. Jumlah mitra kerja yang memberikan bantuan modal dan pembinaan kewirausahaan kepada kelompok Usaha Ekonomi Produktif 3. Jumlah mitra kerja yang menjadi pendamping kelompok Usaha Ekonomi Produktif	22.000  34  3	44.000  34  3	66.000  34  3	88.000  34  3	110.000  34  3	135,72	BKKBN
6	Kegiatan Penyediaan Subsidi Pendidikan SD/SDLB Berkualitas	Tersalurkannya subsidi pendidikan bagi siswa SD/SDLB	Jumlah siswa SD/SDLB sasaran beasiswa miskin	2.767.28 2	3.916.220	3.640.780	3.370.20 0	3.103.21 0	59.599,1*)	Kemendiknas
7	Kegiatan Penyediaan Subsidi Pendidikan SMP/SMPLB	Tercapainya kelausan dan kemerataan akses SMP bermutu dan berkesetaraan jender di semua kabupaten dan kota	Jumlah siswa SMP/SMPLB sasaran beasiswa miskin	966.064	1.395.100	1.346.020	1.275.84 0	1.195.70 0	31.512,2*)	Kemendiknas
8	Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Pendidikan SMA	Tercapainya perluasan dan pemerataan akses pendidikan	Jumlah siswa SMA sasaran beasiswa miskin	378.783	501.898	614.396	714.653	800.000	6.530,6 *)	Kemendiknas

N o	SUBSTANSI INTI / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp. Miliar)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014		
		SMA bermutu, berkesetaraan jender, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat di semua kabupaten dan kota								
9	Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Pendidikan SMK	Tercapainya perlakuan dan pemerataan akses pendidikan SMK bermutu, berkesetaraan gender dan relevan dengan kebutuhan masyarakat di semua kabupaten dan kota	Jumlah siswa SMK sasaran beasiswa miskin	305.535	390.476	475.417	560.358	645.298	9.243,0 *)	Kemendiknas
10	Kegiatan Penyediaan Layanan Kelembagaan	Tersedianya keluasan dan pemerataan akses PT yang bermutu dan berdaya saing internasional	Jumlah mahasiswa penerima beasiswa miskin	65.000	67.000	67.000	69.000	70.000	5.211,3*)	Kemendiknas
11	Penyediaan Subsidi Pendidikan Madrasah Bermutu	Tersedianya beasiswa miskin MI, MTs, dan MA	1. Jumlah siswa miskin penerima beasiswa miskin MI 2. Jumlah siswa miskin penerima beasiswa miskin MTs 3. Jumlah siswa miskin penerima beasiswa miskin MA	640.000 540.000  320.000	640.000 540.000  320.000	640.000 540.000  320.000	640.000 540.000  320.000	640.000 540.000  320.000	1.152,0 1.944,0  1.216,0	Kemen Agama
12	Penyediaan Subsidi Pendidikan Tinggi Islam	Tersedianya beasiswa mahasiswa miskin	Jumlah beasiswa miskin penerima beasiswa PTA	59.538	59.538	59.538	59.538	59.538	788,5	Kemen Agama
13	Bantuan Tunai Bersyarat	Terlaksananya pemberian bantuan Tunai Bersyarat bagi RTSM (PKH);	Jumlah RTS yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/PKH;	816 ribu RTSM	1.116 ribu RTSM	1.516 ribu RTSM	1.404 ribu RTSM	1.170 ribu RTSM	8.985,0	Kemensos
14	Penyediaan subsidi beras untuk masyarakat miskin	Penyediaan beras untuk seluruh rumah tangga sasaran dengan	Jumlah RTS penerima RASKIN (dengan 15 kg per RTS selama 12 bulan)	17,5 juta					11.800,0	Kemenko Kesra/ Perum

N o	SUBSTANSI INTI / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp. Miliar)	K/L	
				2010	2011	2012	2013	2014	TOTAL		
	(RASKIN)	jumlah yang memadai dalam 1 tahun								Bulog	
15	Pengelolaan Pertanahan Provinsi	Terwujudnya redistribusi tanah	Terlaksananya redistribusi tanah (bidang)	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	912,70	BPN	
16	Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja	Tersedianya pekerjaan untuk sementara waktu bagi penganggur dan terbangunnya sarana fisik yang dibutuhkan masyarakat	Jumlah penganggur yang mempunyai pekerjaan sementara	24.000 orang	90.000 orang	90.000 orang	90.000 orang	90.000 orang	856,7	Kemnakertrans	
			Jumlah kabupaten/kota yang menyelenggarakan program pengurangan pengangguran sementara	Kab/Kota	231	360	360	360	Kab/Kota		
17	Peningkatan Perlindungan Pekerja Perempuan dan Penghapusan Pekerja Anak	Memfasilitasi pekerja anak untuk kembali ke dunia pendidikan atau memperoleh pelatihan keterampilan  Berkurangnya jumlah anak yang bekerja pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak	Jumlah pekerja anak yang ditarik dari BPTA	3.000	4.300	5.600	6.900	8.400	212,1	Kemnakertrans	
			Percentase pekerja anak yang ditarik dari BPTA yang dikembalikan ke dunia pendidikan dan/atau memperoleh pelatihan keterampilan		100%	100%	100%	100%			
<b>2. PNPM MANDIRI:</b> Penambahan anggaran PNPM Mandiri dari Rp 10,3 trilyun pada 2009 menjadi Rp 12,1 trilyun pada 2010, pemenuhan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Rp 3 miliar per kecamatan untuk minimal 30% kecamatan termiskin di perdesaan, dan integrasi secara selektif PNPM Pendukung											
1	Pengaturan, Pembinaan, dan Pengawasan dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan Termasuk Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara serta Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Penataan	Pemberdayaan masyarakat dan percepatan penanggulangan kemiskinan & pengangguran di kelurahan/ kecamatan (PNPM Perkotaan)	Jumlah kelurahan/desa yang mendapatkan pendampingan pemberdayaan sosial	8.500 desa di 1.094 kec.	7.482 desa di 805 kec.	4.968 desa di 460 kec.	552 desa di 460 kec.	482 desa di 460 kec.	5.980,0	Kemen PU	

N o	SUBSTANSI INTI / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp. Miliar)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	TOTAL	
	Kawasan/Lingkungan Permukiman									
2	Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan (PNPM-MP)	Pemberdayaan masyarakat dan percepatan penanggulangan kemiskinan & pengangguran di kecamatan dan desa/(PNPM-Perdesaan)	1. Cakupan penerapan PNPM-MP dan Penguatan PNPM	4.791 kec	4.940 kec	4.943 kec	4.946 kec	4.949 kec	48.781,3	Kemendagri
			2. Cakupan wilayah kegiatan rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana krisis di Kab. Nias dan Nias Selatan	2 kab/9 kec.					39,8	
3	Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Penyelenggaraan dalam Pengembangan Permukiman	237 kecamatan (RISE)	1. Jumlah kecamatan yang dilayani oleh infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi dan sosial	237	237	237	237	237	1.188,0	Kemen PU
		Percepatan penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan infrastruktur & pemberdayaan masyarakat desa (RIS PNPM+PPIP)	2. Jumlah desa tertinggal yang terbangun prasarana dan sarana lingkungan permukiman	3.900	2.450	1.237	1.237	1.226	3.198,0	
4	Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengelolaan Pengembangan Sanitasi Lingkungan	210 kab/kota (SANIMAS)	Pembangunan prasarana dan sarana air limbah dengan sistem <i>on-site</i> (kab/kota)	30 kab/kota system on-site	35 kab/kota system on-site	40 kab/kota system on-site	50 kab/kota system on-site	55 kab/kota system on-site	331,0	Kemen PU
5	Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengembangan Sistem	4.650 desa (PAMSIMAS)	Jumlah desa yang terfasilitasi	1.472	1.165	500	700	813	4.224,0	Kemen. PU

N o	SUBSTANSI INTI / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp. Miliar)	K/L	
				2010	2011	2012	2013	2014	TOTAL		
	Penyediaan Air Minum										
6	Pelayanan Usaha dan Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya keberdayaan dan kemandirian 2 juta usaha skala mikro di seluruh kawasan minapolitan pesisir, beroperasiny sarana usaha mikro di 300 kabupaten/kota pesisir, dan 1 unit BLU pembiayaan.	Jumlah kelompok usaha mikro di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang <i>bankable</i>						1.300,6	KKP	
			1. Pengembangan sarana usaha mikro LKM	100 unit	100 unit	100 unit	100 unit	100 unit			
			2. Dana Pemberdayaan Masyarakat Desa/PNPM MK	120 kab/kota	120 kab/kota	120 kab/kota	120 kab/kota	120 kab/kota			
			3. Tenaga pendamping	480 orang	480 orang	480 orang	480 orang	480 orang			
			4. Kelompok Usaha Mikro	800.000 usaha	800.000 usaha	800.000 usaha	800.000 usaha	800.000 usaha			
7	Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) dan Penguatan Kelembagaan Ekonomi Perdesaan melalui LM3	Peningkatan realisasi penyaluran kredit program (KKP-E dan KUR), pembiayaan komersial, pembiayaan syariah, pengembangan sentra usaha pertanian perdesaan, dan pengembangan Gapoktan PUAP	1. Realisasi penyaluran kredit program untuk pertanian (KKP-E dan KUR) 2. Realisasi penyaluran pembiayaan Syariah dan pembiayaan komersial untuk sektor pertanian 3. Jumlah sentra-sentra usaha pertanian di perdesaan 4. Jumlah Gapoktan PUAP (unit)	1,5 triliun  4 triliun  200  10.000	2 triliun  5 triliun  200  10.000	2 triliun  6 triliun  200  10.000	2 triliun  7 triliun  200  10.000	2,5 triliun  8 triliun  200  10.000	4.500,0	Kementerian	
8	Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pemerintah Daerah Tertinggal (P2DTK/SPADA) – PNPM	Meningkatnya pemulihan dan pertumbuhan sosial ekonomi daerah-daerah tertinggal	Jumlah kab, kec dan desa daerah tertinggal	51 kab, 186 kec, 4.596 desa	80 kab **)	80 kab **)	80 kab **)	80 kab **)	2.491,1 **)	KPDT	
9	Peningkatan PNPM Mandiri Bidang Pariwisata	Meningkatnya jumlah desa wisata melalui PNPM bidang pariwisata	Jumlah desa wisata	200	450	550	450	350	406,0	Kemen Budpar	

N o	SUBSTANSI INTI / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp. Miliar)	K/L	
				2010	2011	2012	2013	2014			
<b>3. KREDIT USAHA RAKYAT (KUR):</b> Pelaksanaan penyempurnaan mekanisme penyaluran KUR mulai 2010 dan perluasan cakupan KUR mulai 2011											
1	Dukungan Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR)	Tersedianya anggaran penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR)	Persentase tersedianya anggaran penjaminan KUR	100%	100%	100%	100%	100%	10.000,0	Kemenkeu (Anggaran 99)	
2	Koordinasi Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR)	Meningkatnya koordinasi kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR)	Persentase rekomendasi kebijakan KUR yang terimplementasikan	60%	65%	70%	75%	80%	3,1	Menko Perekonomian	
Akses Usaha Mikro dan Kecil kepada Sumber Permodalan											
3	Perluasan pelayanan kredit/pembiayaan bank bagi koperasi dan UMKM, yang didukung pengembangan sinergi dan kerja sama dengan lembaga keuangan/pembiayaan lainnya.	Meningkatnya jangkauan pelayanan kredit/pembiayaan bank bagi koperasi dan UMKM.	1. Kerja sama pembiayaan yang melibatkan bank dan lembaga keuangan/ pembiayaan lainnya.	5 MOU	5 MOU	5 MOU	5 MOU	5 MOU	8,2	Kemeneg KUKM	
			2. Terfasilitasinya Lembaga Penjaminan Kredit Daerah (LPKD) yang melakukan co-guarantee dengan lembaga penjaminan nasional	7 Prov	8 Prov	9 Prov	10 Prov	10 Prov	15,7	Kemeneg KUKM	
			3. Jumlah Koperasi yang dapat mengakses kredit/ pembiayaan bank melalui linkage	100	100	100	100	100	1,8	Kemeneg KUKM	
			4. Jumlah LKM (koperasi dan BPR) yang melakukan kerjasama pembiayaan dengan Bank	100	100	100	100	100	5,0	Kemeneg KUKM	
			5. Jumlah Lembaga Penjaminan Kredit Daerah	2	2	2	3	3	10,0	Kemeneg KUKM	
4	Peningkatan peran lembaga keuangan bukan bank, seperti KSP/KJKS, perusahaan	Meningkatnya kapasitas dan jangkauan lembaga keuangan bukan bank untuk menyediakan	Jumlah lembaga pembiayaan bukan bank yang dibentuk.	100 KSP/KJK S	100 KSP/KJKS 1 LMVD	100 KSP/KJK S	100 KSP/KJK S	100 KSP/KJK S	13,1	Kemeneg KUKM	

N o	SUBSTANSI INTI / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp. Miliar)	K/L	
				2010	2011	2012	2013	2014	TOTAL		
	modal ventura, anjak piutang, sewa guna usaha, pegadaian dalam mendukung pembiayaan bagi koperasi dan UMKM, disertai dengan pengembangan jaringan informasinya.	pembiayaan usaha bagi koperasi dan UMKM.		1 LMVD			1 LMVD	1 LMVD			
5	Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas layanan lembaga keuangan mikro (LKM), termasuk untuk akreditasi dan sertifikasi pelayanan LKM, termasuk LKM yang berbadan hukum koperasi.	1. Meningkatnya kapasitas kelembagaan LKM.	Jumlah LKM yang terdaftar dan terakreditasi sesuai ketentuan hukum tentang LKM.	100 LKM	100 LKM	100 LKM	100 LKM	100 LKM	2,5	Kemeneg KUKM	
		2. Meningkatnya kapasitas dan kualitas layanan lembaga keuangan mikro (LKM).	1. Jumlah pengelola LKM yang mengikuti pelatihan.	-	1.000 pengelola LKM	1.000 pengelola LKM	1.000 pengelola LKM	1.000 pengelola LKM	4,0	Kemeneg KUKM	
			2. Jumlah SDM Pengelola KSP/KJKS yang bersertifikat	1.200 org	1.200 org	1.200 Org	1.200 Org	1.200 Org	5,0		
			3. Jumlah LDP KJK dan TUK yang diperkuat	-	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	6,0		
			4. Jumlah Manajer/kepala cabang KJK yang diikutkan diklat dan sertifikasi kompetensi LKM	900 org	900 org	900 org	900 org	900 org	5,0		
	Kelembagaan Koperasi										
6	Revitalisasi sistem pendidikan, pelatihan dan penyuluhan perkoperasian bagi anggota dan pengelola koperasi, serta calon anggota dan kader koperasi	Sistem pendidikan, pelatihan dan penyuluhan perkoperasian bagi anggota dan pengelola koperasi, serta calon anggota dan kader koperasi semakin efektif.	1. Jumlah peserta peningkatan pemahaman koperasi di kalangan masyarakat kelompok strategis.	1000 org	1000 org	1000 org	1000 org	1000 org	2,5	Kemeneg KUKM	
			2. Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan	-	1750 org	1750 org	1750 org	1750 org	6,0	Kemeneg	

N o	SUBSTANSI INTI / KEGIATAN PRIORITY	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp. Miliar)	K/L	
				2010	2011	2012	2013	2014			
			peningkatan pemahaman koperasi pada SDM koperasi.							KUKM	
<b>4. TIM PENANGGULANGAN KEMISKINAN:</b> Revitalisasi Komite Nasional Penanggulangan Kemiskinan (KNPK) di bawah koordinasi Wakil Presiden, penggunaan unified database untuk penetapan sasaran program mulai 2009-2010, dan penerapan sistem monitoring dan evaluasi yang akurat sebagai dasar keputusan dan alokasi anggaran											
1	Koordinasi Pengarusutamaan Kebijakan dan Anggaran Penanggulangan Kemiskinan	Meningkatnya jumlah koordinasi, sinkronisasi, kajian serta pemantauan dan evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di bidang pengarusutamaan kebijakan dan anggaran	1. Jumlah kegiatan dan koordinasi kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan, kajian kebijakan, pemantauan dan evaluasi penanggulangan kemiskinan di bidang pengarusutamaan kebijakan dan anggaran						10 kegiatan	15,1	Kemenko Kesra
2	Koordinasi Penguatan Kelembagaan TKPK	Meningkatnya jumlah koordinasi, sinkronisasi, kajian serta pemantauan dan evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di bidang penguatan kelembagaan TKPK	1. Jumlah dan persentase hasil kegiatan koordinasi kelembagaan TKPK 2. Jumlah dan persentase hasil kegiatan koordinasi pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan						12 kegiatan	13,5	
3	Koordinasi Penguatan Masyarakat dan Kawasan	Meningkatnya jumlah koordinasi, sinkronisasi, kajian serta pemantauan dan evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di bidang penguatan masyarakat dan kawasan	1. Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan kebijakan program pemberdayaan masyarakat 2. Jumlah sinkronisasi kebijakan program pemberdayaan masyarakat di bidang penguatan masyarakat dan kawasan						8 kegiatan	7,6	
4	Koordinasi Urusan Kelembagaan dan Kemitraan	Meningkatnya jumlah koordinasi, sinkronisasi, kajian serta pemantauan dan evaluasi	1. Jumlah kegiatan dan persentase pelaksanaan rekomendasi hasil koordinasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di						5 kegiatan	17,1	

N o	SUBSTANSI INTI / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp. Miliar)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014		
		kebijakan penanggulangan kemiskinan di bidang kelembagaan dan kemitraan	bidang kelembagaan dan kemitraan 2. Jumlah kegiatan dan persentase pelaksanaan rekomendasi sinkronisasi hasil kebijakan penanggulangan kemiskinan di bidang kelembagaan dan kemitraan							
5	Koordinasi Urusan Keuangan Mikro dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Meningkatnya jumlah koordinasi, sinkronisasi, kajian serta pemantauan dan evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di bidang keuangan mikro dan pemanfaatan TTG	1. Jumlah pengusaha mikro yang telah mendapatkan kredit modal usaha 2. Jumlah kegiatan/lembaga hasil sinkronisasi pengembangan akses sumber pendanaan bagi usaha mikro 3. Jumlah kegiatan koordinasi pengembangan teknologi tepat guna bagi usaha mikro 4. Persentase pelaksanaan rekomendasi pembentukan LPDA-PK dan DME sebagai program pemberdayaan masyarakat dan usaha mikro						8 kegiatan	7,1

**Catatan:**

1. \*) merupakan angka program, bukan angka kegiatan
2. \*\*) masih merupakan usulan dari kegiatan P2DTK Fase II

<b>PRIORITAS 5</b>		<b>PROGRAM AKSI DI BIDANG PANGAN</b>
TEMA PRIORITAS		<i>Peningkatan ketahanan pangan dan lanjutan revitalisasi pertanian untuk mewujudkan kemandirian pangan, peningkatan daya saing produk pertanian, peningkatan pendapatan petani, serta kelestarian lingkungan dan sumber daya alam. Peningkatan pertumbuhan PDB sektor pertanian sebesar 3,7% per tahun dan Indeks Nilai Tukar Petani sebesar 115-120 pada 2014</i>
PENANGGUNGJAWAB		Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
BEKERJASAMA DENGAN		Menteri Pertanian; Menteri Pekerjaan Umum; Menteri Komunikasi dan Informatika; Menteri Perhubungan; Menteri Perindustrian; Menteri Keuangan; Menteri Negara Riset dan Teknologi; Menteri Kesehatan; Menteri Negara Lingkungan Hidup; Kepala Badan Penerapan & Pengkajian Teknologi; Kepala Badan Pertanahan Nasional

No	SUBSTANSI INTI / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ANGGARAN (Miliar Rp)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014		
1	Koordinasi Kebijakan Ketahanan Pangan	Meningkatnya Koordinasi Urusan Ketahanan Pangan	Presentase rekomendasi hasil koordinasi kebijakan bidang ketahanan pangan yang diimplementasikan	50%	60%	70%	80%	90%	19,45	Menko Perekonomian
2	Koordinasi Bidang Perkebunan dan hortikultura	Meningkatnya koordinasi Kebijakan Perkebunan dan Hortikultura	Presentase rekomendasi kebijakan Perkebunan dan Hortikultura yang diimplementasikan	85%	85%	90%	95%	100%	11,6	Menko Perekonomian
3	Koordinasi Bidang Pengembangan Urusan Perikanan dan Peternakan	Meningkatnya koordinasi Kebijakan	Presentase rekomendasi kebijakan bidang Pengembangan urusan perikanan dan peternakan yang diimplementasikan	85%	85%	90%	95%	100%	11,8	Menko Perekonomian

No	SUBSTANSI INTI / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ANGGARAN (Miliar Rp)	K/L					
				2010	2011	2012	2013	2014							
<b>1. LAHAN, PENGEMBANGAN KAWASAN DAN TATA RUANG PERTANIAN:</b> <i>Penataan regulasi untuk menjamin kepastian hukum atas lahan pertanian, pengembangan areal pertanian baru seluas 2 juta hektar, penertiban serta optimisasi penggunaan lahan terlantar</i>															
<b>a. Penataan regulasi untuk menjamin kepastian hukum atas lahan pertanian</b>															
1	Pengembangan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pertanahan dan Hubungan Masyarakat	Terlaksananya pengembangan peraturan perundang-undangan bidang pertanahan dan Hubungan Masyarakat	Jumlah paket rancangan peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang pertanahan dalam rangka mendukung pelaksanaan Undang-undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	1	1	1	1	1	19,34	BPN					
2	Penataan ruang dan perencanaan pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil	Tersedianya 145 rencana zonasi nasional/provinsi/kabupaten/kota, 50 masterplan minapolitan, 30 masterplan kluster pulau-pulau kecil bernilai ekonomi tinggi serta 12 master plan kawasan sentra produksi kelautan	Jumlah kawasan laut dan pesisir yang memiliki peta potensi dan arahan pemanfaatan yang terintegrasi, akuntabel dan terkini	6	9	11	13	11	481,11	KKP					
			Jumlah kawasan pulau-pulau kecil yang memiliki peta potensi dan arahan pemanfaatan yang terintegrasi, akuntabel dan terkini	23	28	33	33	28							
<b>b. Pengembangan areal pertanian baru seluas 2 juta hektar</b>															
1	Perluasan areal pertanian	Meningkatnya luasan areal baru lahan pertanian dalam mendukung peningkatan produksi pertanian	Luasan (Ha) perluasan areal Tanaman pangan (sawah dan lahan Kering), hortikultura, perkebunan dan kawasan peternakan	32.505	519.570	483.965	482.600	481.360	13.085,81	Kementerian					
<b>c. Penertiban, serta optimisasi penggunaan lahan terlantar.</b>															
1	Pengembangan pengelolaan lahan pertanian	Meningkatnya produktivitas lahan pertanian, dan prasarana Jalan Usaha Tani/Jalan Produksi serta pengendalian lahan untuk mendukung peningkatan produksi pertanian	Luasan (Ha) lahan yang dioptimasi, dikonservasi dan direhabilitasi, direklamasi (Pengembangan rumah kompos)	25.709	67.813	76.675	74.790	74.648	2.892,48	Kementerian					

No	SUBSTANSI INTI / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ANGGARAN (Miliar Rp)	K/L						
				2010	2011	2012	2013	2014								
<b>2. INFRASTRUKTUR:</b> <i>Pembangunan dan pemeliharaan sarana transportasi dan angkutan, pengairan, jaringan listrik, serta teknologi komunikasi dan sistem informasi nasional yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi serta kemampuan pemasarannya</i>																
a. Pembangunan dan pemeliharaan sarana transportasi dan angkutan yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi serta kemampuan pemasarannya																
1	Pengembangan pengelolaan lahan pertanian	Meningkatnya produk-tivitas lahan pertanian, dan prasarana Jalan Usaha Tani/Jalan Produksi serta pengendalian lahan	Tersedianya jalan sepanjang 12.500 km untuk JUT dan jalan produksi, serta tersedianya data bidang tanah petani yang layak disertifikasi	952	3.481	2.867	2.600	2.600	804,02	Kementerian						
2	Pengembangan pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan	Meningkatnya pembangunan dan pencapaian standar pelayanan prima di pelabuhan perikanan dengan fasilitas penunjang produksi, pengolahan, pemasaran dan kesyahbandaran yang sesuai standar.	Jumlah pelabuhan perikanan dengan fokus pembangunan di lingkar luar dan daerah perbatasan yang potensial Jumlah pelabuhan perikanan yang mempunyai Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan (WKOPP)	968 unit 10	973 unit 20	978 unit 30	983 unit 40	988 unit 50	6.084,77	KKP						
3	Pembinaan dan pengembangan kapal perikanan, alat penangkapan ikan dan pengawakan kapal perikanan	Terwujudnya kecukupan kapal perikanan yg laik laut, laik tangkap dan laik simpan, alat tangkap ikan (sesuai SNI) dan pengawakan yang standar di setiap WPP	Jumlah & jenis kapal penangkap ikan yang memenuhi standar laik laut, laik tangkap dan laik simpan Jumlah alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang memenuhi standar Jumlah awak kapal perikanan yang memenuhi standar kompetensi	500 unit 600 unit 60 orang	550 unit 976 unit 120 orang	600 unit 1.552 unit 180 orang	650 unit 2.259 unit 210 orang	700 unit 2.929 unit 240 orang	384,03	KKP						
1	Pengelolaan air untuk pertanian	Meningkatnya ketersediaan air irigasi dalam mendukung	Tersedianya unit peng-embangan sumber air alternatif skala kecil yang berfungsi.	1.005	1.520	1.520	1.520	1.520	3.649,71	Kementerian						

No	SUBSTANSI INTI / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ANGGARAN (Miliar Rp)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
			Tersedianya optimasi pe manfaata Air irigasi mela lui perbaikan JITUT/JI-DES dan pengembangan TAM yang berfungsi (ha)	108.486	497.434	490.000	485.000	479.080		
			Tersedianya (unit) peng-embangan Konservasi air (melalui pengembangan Embung, chek dam, sumur resapan, Antisipasi kekeringan dan banjir)	464	4.378	4.524	4.651	4.782		
2	Pengembangan sistem prasarana dan sarana pembudidayaan ikan	Kawasan perikanan budidaya yang memiliki prasarana dan sarana sesuai kebutuhan	Luas lahan (Ha) budidaya sesuai target produksi disertai data potensi yang akurat	1.115.666 Ha	1.167.66 Ha	1.226.66 Ha	1.291.66 Ha	1.365.416 Ha	667,45	KKP
			Data potensi kawasan yang akurat	70	90	100	130	150		
3	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Meningkatnya kualitas dan cakupan layanan pada 2,55 juta hektar daerah irigasi; 1,21 juta daerah rawa dan pemanfaatan air tanah untuk irigasi seluas 44,89 ribu hektar	Luas layanan jaringan irigasi yang meningkat (ha)	115 ribu	1 ribu	2,4 ribu	4,5 ribu	6,5 ribu	2.924,50	Kemen. PU
			Luas layanan jaringan irigasi yang direhabilitasi (ha)	200 ribu	300 ribu	375 ribu	255 ribu	210 ribu	13.000,00	
			Luas layanan jaringan irigasi yang dioperasikan dan dipelihara (ha)	2,315 juta	2,315 juta	2,315 juta	2,315 juta	2,315 juta	2.000,00	
			Luas layanan jaringan rawa yang meningkat (Ha)	10 ribu					60,00	
			Luas layanan jaringan rawa yang direhabilitasi (Ha)	85 ribu	100 ribu	105 ribu	110 ribu	50 ribu	1.700,00	
			Luas layanan jaringan rawa yang dioperasikan dan dipelihara (ha)	800 ribu	900 ribu	1 juta	1,1 juta	1,2 juta	1.000,00	
			Jumlah sumur air tanah yang dibangun / ditingkatkan (unit)	70					77,00	
			Jumlah sumur air tanah yang direhabilitasi (unit)	230	300	350	450	545	615,80	

No	SUBSTANSI INTI / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ANGGARAN (Miliar Rp)	K/L	
				2010	2011	2012	2013	2014	Total		
			Jumlah sumur air tanah yang dioperasikan dan dipelihara (unit)	425	440	442	442	443	219,20		
			Luas layanan jaringan tata air tambak yang dibangun / ditingkatkan (ha)	1.000					7,50		
			Luas layanan jaringan tata air tambak yang direhabilitasi (ha)	4.000	42.000	42.000	43.000	44.000	525,00		
4	Pengelolaan dan Konservasi Waduk, Embung, Situ serta Bangunan Penampung Air Lainnya	Meningkatnya ketersediaan dan terjaganya kelestarian air dengan kapasitas 12,0 miliar m <sup>3</sup>	Jumlah waduk yang dibangun:						6.481,29	Kemen. PU	
			• waduk selesai dibangun	1		1	3	6			
			• embung/ situ selesai dibangun	20	34	35	44	25			
			• waduk dalam pelaksanaan	5	5	8	7	1	1.845,25		
			Jumlah waduk yang direhabilitasi								
			• Jumlah waduk selesai direhabilitasi	2	2	8	5	12			
			• waduk dalam pelaksanaan rehabilitasi	9	13	17	12	-			
			• Embung/ situ selesai direhabilitasi	37	50	60	69	82			
			Jumlah waduk/embung/situ yang diperasik dan dipelihara	182	179	176	172	166	1.320,00		
	c. Pembangunan dan pemeliharaan teknologi komunikasi dan sistem informasi nasional yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi serta kemampuan pemasarannya										
1	Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pemerataan Pembangunan Sarana dan Prasarana Informatika	Layanan komunikasi dan informatika di wilayah non komersial	▪ Prosentase desa yang dilayani akses telekomunikasi	100%	100%	100%	100%	100%	3.163,70	Kemenkominfo	
			▪ Prosentase desa yang dilayani akses internet	5%	20%	40%	60%	80%			
<b>3. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN:</b> Peningkatan upaya penelitian dan pengembangan bidang pertanian yang mampu menciptakan benih unggul dan hasil penelitian lainnya menuju kualitas dan produktivitas hasil pertanian nasional yang tinggi											
1	Penelitian Dan Pengembangan Peternakan Dan Veteriner	Meningkatkan Inovasi Teknologi Peternakan dan Veteriner Mendukung Program	Jumlah rekomendasi pembangunan peterna-kan & veteriner, disemai nasi, promosi, publikasi	10	10	10	10	10	511,32	Kementerian	

No	SUBSTANSI INTI / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ANGGARAN (Miliar Rp)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014		
		Percepatan Produksi Swasembada Daging Sapi (P2SDS)	Jumlah SDG peternak-an, TPT dan veteriner yang dikonservasi dan dikarakterisasi	112	112	112	112	112		
			Jumlah galur baru ternak dan TPT yang dihasilkan	6	6	8	8	8		
			Jumlah inovasi peterna-kan, TPT dan veteriner yang dihasilkan dan dialihkan/didesiminasi kepada pengguna	22	24	22	22	25		
2	Penelitian dan pengembangan tanaman pangan	Peningkatan inovasi teknologi tanaman pangan mendukung ketahanan dan kemandirian pangan yang mencakup padi, serealia, kacang-kacangan dan umbi-umbian,	Jumlah varietas unggul baru	5 – 6	5 – 6	8 – 9	10 – 12	14 – 15	657,28	Kementerian
			Jumlah teknologi budaya, panen dan pasca panen primer	5	5	8	7	8		
			Jumlah akses sumberdaya sistem (SDG) teridentifikasi, terkoleksi dan terkonservasi sifat_varietas	800	800	800	800	800		
			Jumlah produksi benih sumber (BS, FS) padi, serealia, kacang-kacangan & umbi-umbian dengan SMM ISO 9001-2000	BS 10 ton FS 20 ton	BS 10 ton FS 20 ton	BS 15 ton FS 20 ton	BS 15 ton FS 20 ton	BS 15 ton FS 20 ton		
3	Penelitian dan Pengembangan hortikultura	Meningkatnya inovasi teknologi tan. Hortikul-tura mendukung pe-ngembangan kawasan hortikultura	Jumlah VUB yg diminati konsumen	40	131	235	414	1032	377,29	Kementerian
			Jumlah PN yang terkonservasi dan terkarakterisasi	20 Bw, 455 acc, 3925	600 acc 3978	600 acc 4020	600 acc 4060	600 acc 4100		
			Jumlah benih sumber :							
			Sayuran	20.000 GO 20 ton	22.000 GO 25 ton	24.000 GO 16 ton	26.000 GO 35 ton	28.000 GO 40 ton		
				14335 batang	15035 batang	16000 batang	17200 batang	18700 batang		
			VUB buah trop dan sub trop	960		960		960		
			Akses mutasi buah trop	151800	960	253100	960	254000		

No	SUBSTANSI INTI / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ANGGARAN (Miliar Rp)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
			Planlet, benih, stek tan hias		202400		253700			
			Jumlah benih bt bwh dan bt atas hsl SE	100000	500000	1000000	2500000	5000000		
			Jumlah teknologi prod hortikultura ramah lingkungan	12	12	12	12	12		
4	Penelitian dan pengembangan tanaman perkebunan	Peningkatan inovasi tek. Tan. Perkebunan untuk meningkatkan produktivitas, diversifikasi dan nilai tambah tan. Perkebunan	Jumlah varietas/klon unggul tanaman perkebunan	10	10	10	12	15	579,83	Kementan
			Jumlah teknologi untuk peningkatan produktivitas tanaman perkebunan	42	47	47	52	52		
			Jumlah produk olahan tanaman perkebunan	20	24	24	29	33		
5	Penelitian dan pengembangan bioteknologi dan sumber daya sistem pertanian	Peningkatan inovasi dan adopsi hasil bioteknologi dan pemanfaatan sumberdaya sistem pertanian (SDGP) untuk mendukung ketahanan pangan dan peningkatan daya saing produk pertanian	Jumlah aksesi SDGP dan database yang dikonservasi atau diremajakan	2250 aksesi; 4 dtbase	2250 aksesi; 4 dtbase	2250 aksesi; 4 dtbase	2250 aksesi; 4 dtbase	2250 aksesi; 4 dtbase	173,13	Kementan
			Jumlah varietas atau galur harapan padi, kedelai, dan jagung berproduktivitas tinggi dan berumur genjeh	51 galur kedelai dan padi; 3 populasi baru padi; 6 galur transgenik	Keraga man 50 galur harapan kedelai; 5 Galur transgenik (FUT)	50 galur harapan padi baru: 5 Galur transgenik (LUT)	1 var. unggul padi baru: 5 Galur transgenik (LUT)	5 Galur transgenik (LUT)		
			Jumlah galur harapan gandum tropis		Galur gandum transgenik ZmDre	Galur gandum adaptif iklim	Galur gandum adaptif iklim LUT	Galur gandum adaptif iklim LUT		

No	SUBSTANSI INTI / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ANGGARAN (Miliar Rp)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014		
			Jumlah galur padi dan jagung efisien penggunaan pupuk sintetik	b2A					2-4 varietas unggul hibrida jagung Galur padi transgenik	
			Jumlah biofertilizer untuk padi dan tebu	125 galur calon hibrida jagung unggul	20-35 galur hibrida jagung adaptif kondisi pupuk rendah	8-10 galur hibrida jagung harapan dan padi harapan	2 Galur harapan jagung hibrida dan padi transgenik			
			Jumlah tanaman manggis dan durian tanpa biji	20 isolat potensial biofertilizer	20 isolat potensial biofertilizer	3 formula bahan pembawa	2 biofertilizer padi	1 biofertilizer tebu		
			Jumlah peta gen sifat-sifat penting pada kelapa sawit, jarak pagar dan sapi	2 metode regenerasi dan transformasi	2 metode transformasi dan perbaikan	2 jenis tanaman transgenik putatif	2 jenis tanaman transgenik	Bahan sambungan		

No	SUBSTANSI INTI / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ANGGARAN (Miliar Rp)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014		
6	Pengembangan Sistem Informasi dan Peningkatan sistem Pengawasan Keamanan Hayati	Kebijakan teknis pengawasan keamanan hayati yang efektif dalam operasional pengawasan keamanan hayati hewani dan Nabati; dan sistem informasi yang optimal dalam mendukung operasional Program Barantan	Jumlah Rumusan Kebijakan teknis operasional peng-awasan keamanan hayati	2	2	2	2	2	70,00	Kementerian
			Tingkat kesiapan infrastruktur sistem informasi Barantan	40%	50%	75%	80%	90%		
			Prosentase peningkatan akses informasi melalui jaringan ke pusat data Barantan	25%	50%	50%	50%	25%		
7	Penelitian dan pengembangan pascapanen pertanian	Meningkatnya inovasi teknologi pascapanen dan pengembangan produk hasil pertanian	Jumlah teknologi penanganan segar produk hortikultura	5	4	4	4	2	93,28	Kementerian
			Jumlah produk diversifikasi pangan dan substitusi pangan impor	6	6	6	6	8		
			Produk baru dengan peningkatan nilai tambah	2	4	6	8	10		
8	Pengawalan dan penerapan teknologi terapan adaptif perikanan budidaya	Sentra produksi perikanan budidaya dengan komoditas unggulan dan teknologi inovatif.	Persentase unit usaha yang mendapatkan pelayanan sertifikasi sesuai standar dengan informasi yang akurat.	100%	100%	100%	100%	100%	1.109,55	KKP
9	Penelitian dan pengembangan IPTEK perikanan tangkap	Wilayah perairan yang teridentifikasi potensi produksi, karakteristik, kebutuhan konservasi SDlnya	Jumlah rekomendasi pengelolaan	6 buah	6 buah	4 buah	4 buah	3 buah	413,00	KKP
10	Penelitian dan pengembangan IPTEK perikanan budidaya	HKI, rekomendasi, inovasi teknologi dan produk biologi yang meningkatkan efisiensi produksi, ragam, kualitas dan keamanan komoditas unggulan.	Jumlah rekomendasi , ragam varietas baru/unggul, kualitas dan keamanan komoditas unggulan	5	5	5	5	5	434,4	KKP
11	Penelitian dan Pengembangan IPTEK Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan	HKI, rekomendasi serta inovasi teknologi dan bioteknologi yang meningkatkan efisiensi pengolahan secara optimal, ragam, nilai tambah, kualitas dan keamanan produk unggulan/ prospektif.	Jumlah HKI, rekomendasi serta inovasi teknologi dan bioteknologi yang meningkatkan efisiensi pengolahan secara optimal, ragam, nilai tambah, kualitas dan keamanan produk unggulan/ prospektif.	Paket Teknologi : 3	HKI : 1 Paket Teknologi: 3	Paket Teknologi: 3	HKI : 1 Rekom endasi : 1 Paket Teknol ogi: 3	Paket Teknol ogi: 4	241,93	KKP

No	SUBSTANSI INTI / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ANGGARAN (Miliar Rp)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014		
12	Litbang Ketahanan Pangan	Kebijakan peningkatan dukungan litbang untuk ketahanan pangan khususnya pengembangan pupuk ekologis dan benih unggul-adaptif terhadap lingkungan sub-optimal, teknologi panen, teknologi pengelolaan lahan marginal untuk produksi pangan,	Jumlah kebijakan	3	3	3	3	3	50,0	KRT
			Jumlah riset bersama	4	4	4	4	4		
13	Litbang Benih Unggul Berbasis Biologi Molekuler	Benih unggul berbasis biologi molekuler	Jumlah varietas Benih unggul	1	2	2	3	4	45,00	LIPI
	Litbang pupuk organik dari mikroba hayati Indonesia	Pupuk organik dari mikroba hayati Indonesia	Percontohan produksi pupuk organik di pedesaan	1						
			Aplikasi pupuk organik pada paket <i>biovillage</i>		1	1	10	10		
14	Penelitian Bioteknologi Peternakan Modern	Terbangunnya fasilitas litbang bioteknologi peternakan modern	Jumlah varietas	2	2	2	2	2	25,0	LIPI
			Fasilitas Laboratorium dan peralatannya	2	1					
			Paket pengembangan program biotek peternakan			1	1	1		
15	Pengembangan Aplikasi Teknologi Isotop dan Radiasi	Peningkatan upaya penelitian dan pengembangan bidang pertanian yang mampu menciptakan benih unggul dan hasil penelitian lainnya menuju kualitas dan produktivitas hasil pertanian nasional yang tinggi.	varietas padi (padi sawah, padi gogo, padi dataran tinggi dan padi hibrida)		1	1	2	3	21,00	BATAN
			varietas kedelai (jenis biji besar, genjah, produksi tinggi dan jenis biji hitam)	1		1	1	1		
			varietas kacang tanah dan kacang hijau			1		1		
			varietas gandum tropis dan sorghum	1	1	2		2		
			Survei, pilot plant	1						
16	Pengembangan dan Penerapan Teknologi Pupuk Berimbang	Termanfaatkannya teknologi pupuk berimbang untuk mendukung ketahanan pangan	Pilot project, pengujian		3				79,00	BPPT
			Pilot plant, biofertilizer			3				
			Pengujian, alih tekn				3			
			Rekomendasi					1		

No	SUBSTANSI INTI / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ANGGARAN (Miliar Rp)	K/L					
				2010	2011	2012	2013	2014							
<b>4. INVESTASI, PEMBIAYAAN, DAN SUBSIDI:</b>															
<i>Dorongan untuk investasi pangan, pertanian, dan industri perdesaan berbasis produk lokal oleh pelaku usaha dan pemerintah, penyediaan pembiayaan yang terjangkau, serta sistem subsidi yang menjamin ketersediaan benih varietas unggul yang teruji, pupuk, teknologi dan sarana pasca panen yang sesuai secara tepat waktu, tepat jumlah, dan terjangkau</i>															
	<b>a. Dorongan untuk investasi pangan, pertanian, dan industri perdesaan berbasis produk yste oleh pelaku usaha dan pemerintah</b>														
1	Pengelolaan produksi tanaman serealia	Meningkatnya perlama-san penerapan budidaya tanaman serealia yang tepat dan berkel-anjutan untuk pening-katan produksi melalui peningkatan produktivitas per satuan luas.	Penerapan budidaya serealia yang tepat dan berkelanjutan (ribu ha) :	2650,2	2975,25	3200,3	3475,35	3750,4	2.258,97	Kementerian					
			SLPTT padi non hibrida (ribu ha)	2000	2200	2300	2400	2500							
			SLPTT padi hibrida (ribu ha)	200	250	300	400	500							
			SLPTT Padi lahan kering (ribu ha)	300	350	400	450	500							
			SLPTT Jagung hibrida (ribu ha)	150	175	200	225	250							
			Peningkatan area produksi gandum (ribu ha)	0,1	0,13	0,15	0,18	0,2							
			Peningkatan area produksi sorghum (ribu ha)	0,1	0,13	0,15	0,18	0,2							
			Peta sentra produksi serealia (paket)	1	1	1	1	1							
			Data luas tanam komoditas serealia	1	1	1	1	1							
2	Pengelolaan produksi tanaman kacang-kacangan dan umbi-umbian	Meningkatnya perlusan penerapan budidaya tanaman kacang-kacangan dan ubi-umbian yang tepat dan berkelanjutan untuk peningkatan produksi melalui peningkatan produktivitas per satuan luas.	Penerapan budidaya (ribu ha) :	319,29	426,56	536,98	662,43	742,91	1.256,50	Kementerian					
			SLPTT kedelai (ribu ha)	250	300	350	425	500							
			SLPTT kacang tanah (ribu ha)	50	100	150	200	200							
			SLPTT kacang hijau (ribu ha)	-	10	20	20	25							
			PTT kacang hijau (ribu ha)	3,21	-	-	-	-							
			PTT ubi kayu (ribu ha)	6,53	6,54	6,56	6,58	6,61							
			PTT ubi jalar (ribu ha)	9,5	9,96	10,35	10,76	11,2							
			PTT pangan lokal (ribu ha)	0,05	0,06	0,08	0,09	0,1							
			Peta sentra produksi Kabi (paket)	1	1	1	1	1							

No	SUBSTANSI INTI / EGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ANGGARAN (Miliar Rp)	K/L	
				2010	2011	2012	2013	2014	Total		
3	Pengelolaan sistem penyediaan benih tanaman pangan	Pembinaan lembaga perbenihan tanaman pangan yang efisien dan berkelanjutan di lokasi penerapan budi-daya tanaman pangan yang tepat	Data luas tanam komoditas Kabi (paket)	1	1	1	1	1		334,00	Kementerian
			Lembaga perbenihan tanaman pangan yang dibina di lokasi penerapan budidaya tanaman pangan yang tepat :								
			BPSBTPH (Balai)	32	32	32	32	32			
			BBI (Balai)	31	31	31	31	31			
4	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Buah Berkelanjutan	Berkembangnya sistem agribisnis yang mampu menyediakan produk buah yang cukup, bermutu dan aman konsumsi	Laju pertumbuhan produksi tanaman buah	0,05	0,053	0,055	0,056	0,056		429,94	Kementerian
			Proporsi produk buah bermutu di pasar	0,2	0,25	0,32	0,4	0,5			
5	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Sayuran dan Biofarmaka Berkelanjutan	Berkembangnya sistem agribisnis yang mampu menyediakan produk sayuran dan biofarmaka yang cukup, bermutu dan aman konsumsi	Laju pertumbuhan produksi Tanaman Sayuran dan Biofarmaka	3,5%	3,8%	3,8%	4,2%	4,2%		442,04	Kementerian
			Laju pertumbuhan luas panen Tanaman sayuran dan biofarmaka	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%			
6	Pengembangan sistem perbenihan, pupuk dan sarana produksi lainnya	Peningkatan usaha/pro-dusen benih, pupuk dan sarana produksi lainnya guna mendukung keberlanjutan ketersediaan produk hortikultura yang berdaya saing.	% jumlah usaha/produsen benih hortikultura							312,85	Kementerian
			Benih buah (%)	3	3	3	3	3			
			Benih sayur umbi (%)	2	2	2	2	2			
			Benih sayur biji (%)	1	1	1	1	1			
			Benih tanaman hias (%)	2	2	2	2	2			
			% penggunaan benih bermutu								
			buah (%)	60	65	70	75	80			
			sayur umbi (%)	17	19.5	22	24.5	30			
			benih sayur biji (%)	75.2	76.6	78.1	79.5	80.9			

No	SUBSTANSI INTI / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ANGGARAN (Miliar Rp)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014		
7	Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman semusim	Terfasilitasinya pengembangan budidaya tanaman semusim (tebu,kapas, tembakau dan nilam)	Capaian luas areal (ribu hektar) pembinaan dan pengembangan tanaman semusim (tebu, kapas, nilam, tembakau, dan aneka tanaman semusim lainnya) (Intensifikasi, diversifikasi, rehabilitasi dan ekstensifikasi)	-	-	-	-	-	251,81	Kementerian
			Swasembada Gula Nasional							
			Ø Tebu	465	509	553	597	641		
			Pengembangan Komoditas Pemenuhan Konsumsi Dalam Negeri							
			Ø Kapas	15	18	20	24	25		
			Pengembangan Komoditas Ekspor							
			Ø Tembakau	205	205	205	205	205		
			Ø Nilam	14	15	16	17	18		
8	Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman rempah dan penyegar	Terfasilitasinya pengembangan budidaya tanaman rempah dan penyegar (kopi, teh, kakao, lada, cengkeh)	Peningkatan luas areal (ribu hektar) pembinaan dan pengembangan tanaman rempah dan penyegar (kopi, teh, kakao, lada, cengkeh dan aneka tanaman rempah dan penyegar lainnya) (Intensifikasi, diversifikasi, rehabilitasi dan ekstensifikasi):						254,57	Kementerian
			Pengembangan Komoditas Ekspor							
			Ø Kopi	1291	1308	1328	1331	1354		
			Ø Teh	129	130	130	130	130		
			Ø Kakao	1655	1746	1837	1929	2020		
			Ø Lada	192	193	194	195	196		
			Pengembangan Komoditas Pemenuhan Konsumsi Dalam Negeri							
			Ø Cengkeh	465	469	474	479	484		

No	SUBSTANSI INTI / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ANGGARAN (Miliar Rp)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014		
			Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional (ribu ha)							
			Rehabilitasi	81,85	93,15	15,00	15,00	10,00		
			Intensifikasi	30,55	49,45	15,00	20,00	20,00		
			Peremajaan	22,60	27,40	5,00	5,00	5,00		
			Pengendalian OPT	135,00	170,00	35,00	40,00	35,00		
			Pemberdayaan petani (kelompok Tani)	6750,00	8500,00	1750,00	2000,00	1750,00		
9	Dukungan penyediaan benih unggul bermutu dan sarana produksi perkebunan	Terfasilitasinya penye-dianan benih unggul ber-mutu	Ø Jumlah penggunaan benih unggul bermutu	45	48	52	55	60	169,41	Kementan
10	Peningkatan kuantitas dan kualitas benih dan bibit dengan mengoptimalkan sumber daya lokal	Peningkatan kualitas & kuantitas benih dan bi-bit ternak	Peningkatan kuantitas semen (dosis)	2.700	3.050	3.400	3.700	4.000	1.020,96	Kementan
		Penguatan kelembaga-an perbibitan dgn Good Breeding Practices	- Peningkatan produksi embrio	400	490	580	640	700		
		Penerapan standar mu-u benih dan bibit ternak	ibit sapi	2625	3068	3354	3666	4150		
		Penerapan teknologi perbibitan	- Bibit unggas lokal	60.000	60.600	70.800	77.400	84.800		
		Pengembangan usaha dan investasi perbibitan	- Bibit Kambing/domba	2.000	2.020	2.030	2.580	2.820		
10	Peningkatan produksi ternak ruminansia dengan pendayagunaan sumber daya local	Meningkatnya populasi dan produksi ternak ruminansia	Pengembangan ternak potong (ekor)	21.000	23.760	26.136	28.750	31.625	1.749,69	Kementan
			Pengembangan sapi perah (ekor)	1.250	1.375	1.513	1.664	1.830		
			Pengembangan Integrasi tanaman ternak (unit)	75	83	91	100	110		
			Pengembangan alsin ternak ruminansia	425	468	514	566	622		
12	Peningkatan produksi ternak	Meningkatnya populasi dan produksi, serta	Pengembangan kelompok unggas lokal	230	290	350	410	470	611,40	Kementan

No	SUBSTANSI INTI / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ANGGARAN (Miliar Rp)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
	non ruminansia dengan pendaragunaan sumber daya lokal ternak non ruminansia	meningkatnya penda-yagunaan sumber daya lokal ternak non ruminansia	Pengembangan kelompok non unggas	28	45	58	65	72		
			Pengembangan pakan ternak	25	35	50	60	70		
			Pengembangan alsin ternak	50	45	45	45	45		
13	Pelayanan perizinan dan investasi	Peningkatan penerima-an penyiaian bahan analisa, fasilitas proses teknis permohonan ijin, pendaftaran di bidang pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian, benih/bibit, produk ternak dan pangan segr serta penyiaian bahan pemantauan dan evaluasi	Jumlah ijin usaha pertanian, ijin pemasukan/ pengeluaran benih/bibit, obat hewan dan pakan ternak, produk ternak dan agensi hayati, serta rekomendasi produk pangan	2.500	2.850	4.200	4.500	5.000	51,71	Kementerian
			Bahan informasi dan bahan kebijakan pengembangan investasi pertanian	1 paket	12,43					
14	Pengembangan mutu dan standardisasi pertanian	Meningkatnya mutu dan keamanan pangan hasil pertanian	Jumlah usaha pasca panen dan pengolahan yang menerapkan sistem jaminan mutu.	330 unit	303,00	Kementerian				
			+ 54 unit organik	+ 54 unit organik	+ 54 unit organik	+ 54 unit organik	+ 54 unit organik	+ 54 unit organik		
			Jumlah pengujian mutu alat mesin pertanian	42 sertifikat	42 sertifika t	42 sertifika t	42 sertifika t	42 sertifika t		
15	Pengembangan pengolahan hasil pertanian	Berkembangnya pengolahan hasil pertanian yang berkelanjutan	Jumlah usaha pengolah-an hasil pertanian yang bernilai tambah dan berdaya saing	11.200 .	3.400	3.600	3.800	4.000	777,50	Kementerian
16	Pengembangan pemasaran internasional	Meningkatnya pemasaran internasional hasil pertanian	Meningkatnya jumlah ekspor hasil pertanian	15%	15%	15%	15%	15%	278,50	Kementerian
			Meningkatnya jumlah surplus neraca perdagangan hasil pertanian	30%	30%	30%	30%	30%		
17	Pengembangan penanganan pasca panen pertanian	Meningkatnya penanganan pasca panen hasil pertanian	Jumlah kelompok tani (poktan/gapoktan) yg menerapkan penanganan pasca panen sesuai GHP dan standar mutu	1.800	1.980	2.160	2.340	2.520	328,80	Kementerian
18	Pemantapan sistem penyuluhan	Meningkatkan mutu penyelenggaraan	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang terbentuk		245	345	410	458	4.202,41	Kementerian

No	SUBSTANSI INTI / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ANGGARAN (Miliar Rp)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
	pertanian	penyuluhan pertanian	Jumlah kelembagaan petani (gapoktan)		28.304	38.304	51.304	63.304		
			Jumlah BPP model		336	350	380	425		
			Jumlah tenaga penyuluhan pertanian yang berkualitas (orang)		27.393	36.000	45.000	55.000		
			Persentase jumlah kegiatan yang mendukung penyelenggaraan penyuluhan pertanian		30	50	65	80		
19	Peningkatan Kualitas Pelayanan karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati.	Pelayanan karantina pertanian dan pengawasan keamanan hayati yang efektif	Vol. dan frek. Operasional Karantina pertanian dan pengawasan keamanan hayati	350 rb	400 rb	420 rb	450 rb	450 rb	1.476,40	Kementerian
			Tingkat kesesuaian tin-dakan karantina dan operasional pengawasan keamanan hayati.	100%	100%	100%	100%	100%		
			Tingkat penurunan NNC (Notification of Non Compliance)	50%	50%	50%	50%	50%		
			Peningkatan Indeks kepuasan dan ketepatan pengguna jasa	75%	80%	85%	90%	90%		
20	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan laboratorium yang berkualitas dalam mendukung efektifitas penilaian dan pengendalian resiko ditempat pemasukan dan pengeluaran	Penyelenggaraan laboratorium yang berkualitas dalam mendukung efektifitas penilaian dan pengendalian resiko ditempat pemasukan dan pengeluaran	Jml uji/coba teknik dan metoda tindakan karan-tina dan pengawasan keamanan hayati	4	5	5	5	5	99,30	Kementerian
			Jumlah sampel lab. yang diperiksa sesuai ruang lingkup pengujian (Uji Standar, rujukan, konfirmasi dan profisiensi)	5.000	6.000	7.200	8.000	8.000		
			Jumlah laboratorium karantina yang diakreditasi	4	6	2	2	2		
21	Pengembangan sistem usaha pembudidayaan ikan	Kawasan potensi perikanan budidaya menjadi kawasan Minapolitan dengan usaha yang bankable.	Jumlah kelompok usaha perikanan budidaya yang memenuhi standar kelembagaan dan jumlah tenagakerja yang memiliki koperensi.	157 kelompok 394 orang	788 kelompok 1.182 orang	1.576 kelompok 1.892 orang	1.957 kelompok 1.970 orang	3.388 kelompok 2.364 orang	466,36	KKP
			Jumlah usaha perikanan budidaya yang memperoleh SNI serta jumlah lembaga sertifikasi yang terakreditasi	936 unit usaha 19 Lab uji 3 LSSM	1.203 unit usaha 26 Lab	1.826 unit usaha 33 Lab	3.061 unit usaha 36 Lab	4.948 unit usaha 43 Lab		

No	SUBSTANSI INTI / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ANGGARAN (Miliar Rp)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
22	Pengembangan sistem produksi pembudidayaan ikan	Meningkatnya produksi perikanan budidaya dengan mutu terjamin dan data akurat.	(lembaga sertifikat sistem mutu)	ujl 4 LSSM	ujl 7 LSSM	ujl 11 LSSM	ujl 15 LSSM			
			Jumlah produksi perikanan budidaya air tawar (juta ton)	1,4	1,8	2,5	3,4	4,6	620,84	KKP
			Jumlah produksi perikanan budidaya air payau. (ton)	1.137.920 80	1.322.2 40	1.587.6 20	1.831.6 20	2.022.2 20		
			Jumlah produksi perikanan budidaya laut	2.846.475 ton	3.703.4 00 ton	5.348.8 50 ton	7.780.6 75 ton	10.288. 175 ton		
23	Pengembangan usaha penangkapan ikan dan pemberdayaan nelayan skala kecil	Terbangunnya kawasan potensi perikanan tangkap yang menjadi kawasan Minapolitan dengan usaha yang bankable serta realisasi investasi usaha perikanan tangkap.	Jumlah kawasan yang memiliki Kelompok Usaha Bersama (KUB)	1 PP 5 PPI	1 PP 5 PPI	1 PP 5 PPI	1 PP 5 PPI	1 PP 5 PPI	454,08	KKP
			Jumlah KUB yang Mandiri.	999 KUB	1.200 KUB	1.500 KUB	1.800 KUB	2.000 KUB		
			Jumlah usaha perikanan tangkap yang layak dan bankable	999 KUB	1.200 KUB	1.500 KUB	1.800 KUB	2.000 KUB		
24	Fasilitasi pengembangan industri pengolahan hasil perikanan	Meningkatnya volume produk olahan hasil perikanan dengan kemasan dan mutu terjamin	Jumlah sarana prasara-na pengolahan (lokasi)	58	66	72	78	84	245,46	KKP
			Jumlah sentra pengolahan (lokasi)	5	5	5	5	5		
			Volume produksi dari UKM (juta ton)	2,3	2,4	2,5	2,7	2,8		

No	SUBSTANSI INTI / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ANGGARAN (Miliar Rp)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
25	Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap yang efisien, tertib, dan berkelanjutan	Meningkatnya pelayanan prima dan ketertiban usaha perikanan tangkap sesuai ketersediaan SDI di setiap WPP secara akuntabel dan tepat waktu	Jumlah keabsahan dan kelengkapan dokumen usaha perikanan tangkap	8.000 SIUP, SIP/SIKP I	9.000 SIUP, SIP/SI KPI	10.000 SIUP, SIP/SI KPI	11.000 SIUP, SIP/SI KPI	12.000 SIUP, SIP/SI KPI	200,86	KKP
		Jumlah pelaku usaha perikanan tangkap yang memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Jumlah pelaku usaha perikanan tangkap yang memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku	2.500	3.000	3.500	4.000	4.500		
		Jumlah kapal dan jenis alat penangkap ikan yang diperbolehkan sesuai dengan ketersediaan sumberdaya ikan di setiap WPP	Jumlah kapal dan jenis alat penangkap ikan yang diperbolehkan sesuai dengan ketersediaan sumberdaya ikan di setiap WPP	4.900 SIP	5.900 SIP	6.900 SIP	7.900 SIP	8.900 SIP		
26	Fasilitasi pembinaan dan pengembangan sistem usaha dan investasi perikanan	Meningkatnya jumlah nilai investasi (PMA dan PMDN)	Jumlah unit I perikanan yang memenuhi standar ketenagakerjaan sesuai SKKNI	430 UPI	430 UPI	860 UPI	1.280 UPI	860 UPI	244,93	KKP
27	Fasilitasi penguatan dan pengembangan pemasaran luar negeri hasil perikanan	Meningkatnya jumlah pangsa pasar ekspor perikanan	Jumlah penambahan negara tujuan ekspor	3	3	4	4	5	94,12	KKP
28	Penyuluhan kelautan dan perikanan	Meningkatnya kawasan potensi perikanan yang memiliki kelompok pela-ku utama yang mandiri dalam mengembangkan usaha perikanan	Jumlah kelompok potensi perikanan yang disuluh	300 Kelompok di 50 kawasan	400 kelompo k di 60 kawasan	500 kelompo k di 70 kawasan	600 kelompo k di 80 kawasan	700 kelompo k di 90 kawasan	447,07	KKP
29	Pelatihan kelautan dan perikanan	Terselenggaranya pela-tihan yang sesuai standar kompetensi dan kebutuhan pasar	Jumlah lulusan pelatihan yang sesuai standar serta jumlah lulusan yang meningkat kinerjanya sesuai standar kompetensi dan kebutuhan pasar	6.160 masyarakat 1.103 aparatur	8000 masyarakat 1.300 aparatur	10000 masyarakat 1.600 aparatur	12000 masyarakat 1.900 aparatur	15000 masyarakat 2.200 aparatur	347,55	KKP

No	SUBSTANSI INTI / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ANGGARAN (Miliar Rp)	K/L	
				2010	2011	2012	2013	2014			
30	Revitalisasi Industri Pupuk	Fasilitasi pembangunan restrukturisasi 1 pabrik	Persen kemajuan	20%	40%	60%	80%	100%	35,00	Kemenperin	
		Fasilitasi pembangunan restrukturisasi 5 pabrik urea baru	Persen kemajuan	20%	40%	60%	80%	100%			
		Fasilitasi pembangunan restrukturisasi 5 pabrik pupuk NPK	Persen kemajuan	20%	40%	60%	80%	100%			
31	Revitalisasi Industri Gula	(1) Restrukturisasi 3 industri permesinan untuk pendukung PG (2) Otomatisasi 19 PG (3) Perpres tentang kebijakan terpadu revita-lisasi PG, koordinator kelembagaan	Pabrik	20%	40%	60%	80%	100%	9,00	Kemenperin	
		Fasilitasi pembangunan pabrik gula baru	Pabrik	10	10	10	10	11			
<b>b. Penyediaan pembiayaan yang terjangkau</b>											
1	Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan belanja subsidi dan belanja lain-lain (BSBL)	Tersusunnya laporan keuangan BSBL yang transparan dan akuntabel	Laporan Keuangan belanja subsidi lain-lain (BSBL) yang lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	18,04	Kemenkeu	
2	Pengelolaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat (ABPP)	Terlaksananya kebijakan penganggaran yang transparan dan akuntabel	1. Pengalokasian belanja pemerintah pusat yang tepat waktu dan efisien	100%	100%	100%	100%	100%	36,47	Kemenkeu	
			2. Penyediaan anggaran secara tepat waktu dan tepat jumlah untuk menunjang program di bidang pangan, pertanian, dan industri perdesaan sesuai dengan persetujuan	100%	100%	100%	100%	100%			
			3. PMK No.261/2008 tentang tata cara penyediaan anggaran, perhitungan, pembayaran, dan pertanggungjawaban subsidi pupuk	-	40%	60%	80%	100%			

No	SUBSTANSI INTI / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ANGGARAN (Miliar Rp)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
			4. Dokumen RAPBN-P 2010 tentang perubahan system pengelolaan pendanaan BLU Tanah dan <i>Land Capping</i> untuk ditampung dalam APBN-P 2010	100%	-	-	-	-		
			5. Peraturan pelaksanaan anggaran R&D berdasarkan program prioritas K/L yang bersangkutan sesuai dengan alokasi anggaran dalam APBN	100%	-	-	-	-		
	c. Sistem subsidi yang menjamin ketersediaan benih varietas unggul yang teruji, pupuk, teknologi dan sarana pasca panen yang sesuai secara tepat waktu, tepat jumlah, dan terjangkau.									
1	Penyaluran subsidi benih tanaman pangan	Tersalurnya benih tanaman pangan bersubsidi	Jumlah benih tanaman pangan bersubsidi (ribu ton)	178,18	211,99	217,55	222,19	226,92		Kementerian
2	Penyaluran pupuk bersubsidi	Tersalurnya pupuk bersubsidi	Jumlah pupuk bersubsidi (juta ton)	11,06	11,32	11,6	11,89	12,2		Kementerian
3	Pengembangan sistem perbenihan ikan	Terpenuhinya kebutuhan benih untuk produksi dan pasar dengan mutu terjamin dan data akurat.	Jumlah produksi induk unggul (ekor, berat, unit kebun bibit)	6,5 juta; 267.280 ton; 2.784 unit	8 juta; 350.42 0 ton; 3.650 unit	10,1 juta; 510.00 0 ton; 5.312 unit	12,6 juta; 750.00 0 ton; 7.812 unit	15 juta; 1.juta ton; 10.417 unit	534,33	KKP
			Jumlah unit perbenihan yang bersertifikat	51 unit	63 unit	78 unit	96 unit	116 unit		
<b>5. PANGAN DAN GIZI:</b> <i>Peningkatan Kualitas Gizi dan Keanekaragaman Pangan Melalui Pola Pangan Harapan</i>										
1	Penjaminan pangan asal hewan yang aman dan halal serta pemenuhan persyaratan produk hewan non pangan	Penguatan peran dan fungsi lembaga otoritas veteriner	Jumlah kebijaka kesmavet (pedoman)	25	27	29	30	31	1.059,73	Kementerian
		Kesadaran masyarakat akan resiko residu dan cemaran pada produk hewan serta zoonosis terbangun.	Jumlah produk hewan pangan dan non pangan (RPU,RPH,RPB,TPU,KIOS DAGING,TPS) yang memenuhi standar	169	210	260	310	400		

No	SUBSTANSI INTI / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ANGGARAN (Miliar Rp)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
		Peningkatan penerapan kesrawan di RPH/RPU	Jumlah lab yang dibina (unit)	35	41	41	41	41		
2	Pengembangan ketersediaan dan penanganan rawan pangan.	Meningkatnya pemantapan ketersediaan pangan dan penanganan rawan pangan.	Jumlah Desa Mandiri Pangan yang dikembangkan.	1.750 Desa	2.550 Desa	3.350 Desa	4.150 Desa	5.000 Desa	982,60	Kementerian
			Jmlh Lumbung Pangan yang dikembangkan.	800 Lb	1.225 Lb	1.650 Lb	2.075 Lb	2.500 Lb		
			Lokasi Rawan Pangan.	350 Kab	400 Kab	450 Kab	450 Kab	450 Kab		
			Tersedanya Data dan	33 Prop	33 Prop	33 Prop	33 Prop	33 Prop		
			Pemantauan dan peman tapan ketersediaan dan kerawanan pangan.	33 Prop	33 Prop	33 Prop	33 Prop	33 Prop		
3	Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan.	Meningkatnya pemantapan distribusi dan harga pangan.	Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)	750 Gap	1.000 Gap	1.250 Gap	1.500 Gap	2.000 Gap	798,70	Kementerian
			tersedianya data dan informasi tentang distribusi, harga dan akses pangan.	33 Prop	33 Prop	33 Prop	33 Prop	33 Prop		
			terlaksananya peman-tuan dan pemantapan distribusi, harga dan akses pangan.	33 Prop	33 Prop	33 Prop	33 Prop	33 Prop		
4	Pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan dan peningkatan keamanan pangan segar	Meningkatnya pemanta-pan penganekaraga-man konsumsi pangan dan keamanan pangan	Desa P2KP (Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan.	2.000 Desa	4.000 Desa	6.000 Desa	8.000 Desa	10.000 Desa	994,34	Kementerian
			Promosi penganekaraga man konsumsi pangan dan keamanan pangan	383 Pusat/ Prop/ Kab	434 Pusat/ Prop/ Kab	484 Pusat/ Prop/ Kab	484 Pusat/ Prop/ Kab	484 Pusat/ Prop/ Kab		

No	SUBSTANSI INTI / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ANGGARAN (Miliar Rp)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
			Penanganan keamanan pangan tingkat produsen dan konsumen	33 Prop	363 Prop/ Kab	396 Prop/ Kab	429 Prop/ Kab	429 Prop/ Kab		
			Terlaksananya pemantauan dan pemantapan penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan	33 Prop	33 Prop	33 Prop	33 Prop	33 Prop		
			Tersedianya data dan informasi tentang pola konsumsi, penganeka-ragaman dan keamanan pangan.	33 Prop	33 Prop	33 Prop	33 Prop	33 Prop		
5	Fasilitasi pengembangan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan	Meningkatnya unit penanganan, pengolahan dan distribusi hasil perikanan yang memperoleh sertifikasi sesuai standar nasional dan internasional	Jumlah laboratorium sertifikasi dgn sarana prasa rana yang memadai	17 lab	22 lab	12 lab	18 lab	20 lab	233,8	KKP
			Jumlah unit yang memperoleh SNI dan persyaratan internasional	179 SNI	199 SNI	219 SNI	239 SNI	259 SNI		
			Jumlah lab uji mutu hasil perikanan yang terakreditasi KAN	17 lab	22 lab	12 lab	18 lab	20 lab		
			Jumlah Unit Pengolahan Ikan (UPI) & hasil perikanan yg bersertifikat	424 UPI	429 UPI	434 UPI	439 UPI	444 UPI		
6	Fasilitasi penguatan dan pengembangan pemasaran dalam negeri hasil perikanan	Meningkatnya jumlah desa yang memiliki pasar yang mampu memfasilitasi penjualan hasil perikanan dan tingkat konsumsi ikan	Jumlah pelelangan ikan dan pasar ikan yang berfungsi sesuai standar	18 TPI 7.061 pasar	36 TPI 7000 pasar	54 TPI 7000 pasar	72 TPI 7000 pasar	91 TPI 7000 pasar	590,85	KKP
			Jumlah lokasi pelaksanaan kegiatan Gemarikan	33 provinsi	33 provinsi	33 provinsi	33 provinsi	33 provinsi		
7	Pengembangan dan Pembinaan Perkarantinaan Ikan		Persentase media pembawa hama penyakit ikan impor, ekspor dan antar area yang bebas hama penyakit ikan karantina dengan laboratorium karantina yang sesuai standar OIE dan SNI	63.34%	70 %	75%	80%	83.34%	1.702,0	KKP

No	SUBSTANSI INTI / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ANGGARAN (Miliar Rp)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
8	Pembinaan Gizi Masyarakat	Meningkatnya kualitas penanganan masalah gizi masyarakat	Prosentase balita ditimbang berat badannya (D/S)	65	70	75	80	85	2.804,2	Kemenkes
<b>6. ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM:</b> <i>Pengambilan langkah-langkah konkret terkait adaptasi dan antisipasi sistem pangan dan pertanian terhadap perubahan iklim</i>										
1	Penelitian Dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian	Tersedianya data, informasi dan peningkatan inovasi teknologi pengelolaan sumberdaya lahan pertanian	Tersedianya peta potensi sumberdaya lahan pertanian	2,5 juta ha di Sulawesi	2,5juta ha di Sulawesi dan NTT	3,5juta ha di Maluku dan Papua	3,5juta ha di Papua	3,5juta ha di Papua	295,10	Kementerian
			Paket komponen teknologi pengelolaan SDL	12 paket	12 paket	12 paket	11 paket	11 paket		
2	Peningkatan Produksi Ternak Ruminansia dengan pendayagunaan sumberdaya lokal	Meningkatnya populasi dan produksi hasil olahan ternak ruminansia terkait dengan Dampak Perubahan Iklim	Pemanfaatan kotoran ternak menjadi pupuk organik dan pemberian paket bantuan sosial pupuk organik (rumah kompos) (Dampak Perubahan Iklim)	-	10000	10000	10000	10000	669,00	Kementerian
			Pengembangan dan pembinaan Biogas Asal Ternak Bersama Masyarakat (BATAMAS) terutama di sentra terpencil dan padat ternak (unit) (Dampak Perubahan Iklim)	100	150	200	250	300		
			Pengembangan integrasi ternak dan tanaman melalui pengelolaan kotoran ternak (padat & cair) menjadi pupuk organik dan pengolahan limbah tanaman untuk ternak terutama di sentra perkebunan, tanaman pangan dan holti kulture (klp) (Dampak Perubahan Iklim)	75	83	91	100	110		
3	Pengembangan Pengelolalan lahan pertanian	Meningkatnya produk-tivitas lahan pertanian, dan prasarana Jalan Usaha Tani/Jalan Produksi serta pengendalian lahan untuk mendukung peningkatan	Terlaksananya Pengembangan System of Rice Intesification (SRI) (paket)	62	538	600	500	300	87,21	Kementerian

No	SUBSTANSI INTI / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ANGGARAN (Miliar Rp)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014		
		produksi pertanian								
4	Pengembangan sistem kesehatan ikan dan lingkungan pembudidayaan ikan	Kawasan perikanan budidaya yang sehat serta produk perikanan yang aman dikonsumsi.	Jumlah laboratorium uji yang memenuhi standar teknis. Lab kualitas air (unit) Lab HPI (unit) Lab Residu (unit)	25 20 9	31 24 11	38 28 14	43 32 18	48 35 25	678,33	KKP
			Jumlah kawasan perikanan budidaya yang sehat serta persentasi jenis biota perairan yang dikonservasi.	35 kab	350 kab	400 kab	350 kab	450 kab		
5	Pengelolaan sumber daya ikan	Meningkatnya Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yang terjamin ketersediaan sumber daya ikan dengan data dan pengelolaan pemanfaatan yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu.	• Jumlah lokasi pemantauan dan evaluasi perlindungan dan pengkayaan SDI	6 prov	33 prov	33 prov	33 prov	33 prov	354,6	KKP
			• Jumlah ekosistem PUD yang teridentifikasi	8 prov	8 prov	8 prov	8 prov	8 prov		
			• Jumlah peraan territorial dan kepulauan yang teridentifikasi sumber dayanya	1 WPP 33 prov	11 WPP 33 prov	11 WPP 33 prov	11 WPP 33 prov	11 WPP 33 prov		
			• Jumlah ZEEI yang teridentifikasi sumber dayanya	11 prov	4 prov	4 prov	4 prov	4 prov		

<b>PRIORITAS 6</b>		<b>PROGRAM AKSI DI BIDANG INFRASTRUKTUR</b>
TEMA PRIORITAS	<p><i>Pembangunan infrastruktur nasional yang memiliki daya dukung dan daya gerak terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial yang berkeadilan dan mengutamakan kepentingan masyarakat umum di seluruh bagian negara kepulauan Republik Indonesia dengan mendorong partisipasi masyarakat</i></p>	
PENANGGUNGJAWAB	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian	
BEKERJASAMA DENGAN	Menteri Pekerjaan Umum; Menteri Dalam Negeri; Menteri Kehutanan; Menteri Pertanian; Menteri Komunikasi dan Informatika; Menteri Perhubungan; Menteri Negara Perumahan Rakyat; Kepala Badan Pertanahan Nasional; Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal	

NO	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (RP MILIAR)	K/L	
				2010	2011	2012	2013	2014			
<b>1. TANAH DAN TATA RUANG:</b> Konsolidasi kebijakan penanganan dan pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum secara menyeluruh di bawah satu atap dan pengelolaan tata ruang secara terpadu											
1	Pengelolaan Pertanahan Propinsi	Terlaksananya pengaturan dan penataanpenguasaan dan pemilikan tanah, serta pemanfaatan dan penggunaan tanah secara optimal.	Neraca Penatagunaan Tanah di daerah	100 kab/kota	54,94	BPN					
2	Pengelolaan Pertanahan Propinsi	Terlaksananya pengaturan dan penataanpenguasaan dan pemilikan tanah, serta pemanfaatan dan penggunaan tanah secara optimal.	Inventarisasi P4T	335,67 ribu bidang	366,31	BPN					
3	Pengembangan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pertanahan dan Hubungan Masyarakat	Terlaksananya pengembangan peraturan perundang-undangan bidang pertanahan dan Hubungan Masyarakat	Tersusunnya peraturan perundangan pengadaan tanah untuk kepentingan umum	1 paket	10,41	BPN					
4	Perencanaan, Pemanfaatan, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Nasional termasuk Melakukan Koordinasi dan Fasilitasi Proses Penetapan Dokumen-dokumen yang dihasilkan	Keserasian dan keselarasan program pembangunan yaitu program dalam RTRWN, RTR Pulau, RTR KSN, RTR PKN, PKSN	Jumlah rencana tata ruang yang telah disinkronkan program pembangunannya	33	33	33	33	33	1143,58	Kemen. PU	

NO	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (RP MILIAR)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	TOTAL	
5	Pemetaan Dasar Rupabumi dan Tata Ruang	Tersusunnya kebijakan pemetaan dasar rupabumi dan meningkatnya jumlah cakupan peta rupabumi Indonesia	Jumlah Nomor Lembar Peta (NLP) Peta Rupabumi skala 1:10.000 (Sumatera dan selatan Jawa).	90	226	118	135	155	32,0	Bakosur tan al
			Jumlah NLP Peta Rupabumi skala 1:50.000 wilayah gap	160	631	201	231	267	411,5	
			Jumlah NLP Peta Rupabumi skala 1:250.000 wilayah gap	0	10	20	20	10	48,0	
			Jumlah NLP gasetir dan model penataan ruang provinsi	400	400	400	400	400	9,3	
6	Pemetaan dasar kelautan dan kedirgantaraan	Tersusunnya kebijakan pemetaan dasar kelautan dan kedirgantaraan serta meningkatnya cakupan peta dasar kelautan dan kedirgantaraan	Survei batimetri lepas pantai line km	13.680	13.680	13.680	13.680	13.680	21.4	Bakosur tan al
			Jumlah liputan data spasial batimetri, Pantai (LPI) dalam ln km	34.000	50.000	55.000	60.000	66.000	34.6	
			Percepatan Survei Hidrografi pantai multibeam line km	30.000	40.000	45.000	50.000	60.000	16.1	
			Jumlah NLP Peta LPI skala 1:25K, 1:50K, 1:250K dan LLN 1:500K	52	55	56	62	67	11.0	
			Pembuatan Peta LBI	2	2	3	4	4	3.3	

NO	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (RP MILIAR)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	TOTAL	
7	Pembangunan Infrastruktur Data Spasial	Tersusunnya rancangan rumusan kebijakan teknis, rencana dan program di bidang pembangunan Infrastruktur Data Spasial	Pembuatan peta navigasi udara (Aeronautical Chart)	8	9	10	12	12	5,6	Bakosurta al
			Jumlah simpul jaringan di pusat	14	0	0	0	0	0,8	
			Jumlah simpul jaringan di prov.	6	6	6	6	4	4,8	
			Jumlah simpul jaringan di kab/ kota.	50	70	110	120	130	16,4	
			Jumlah dokumen SNI kab/kota	12	12	12	12	12	13,5	
			Jumlah metadata simpul jaringan pusat.	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,5	
			Jumlah metadata simpul jaringan provinsi.	3,000	3,000	3,000	3,000	1,000	3,5	
			Jumlah metada ta simpul jaringan kab/kota	4,000	4,000	4,000	4,000	3,000	6,4	
			Jumlah pembangunan dan pengembangan penghubung simpul	1	1	1	1	1	36,2	
			Jumlah dokumen pembangunan dan pengembangan IDSN	1	1	1	1	1	795,3	

NO	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (RP MILIAR)	K/L	
				2010	2011	2012	2013	2014			
<b>2. JALAN:</b> Penyelesaian pembangunan Lintas Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, NTB, NTT, dan Papua sepanjang 19.370 km											
1	Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan dan Jembatan Nasional	Terjaganya kualitas jalan dan jembatan sepanjang 171.695 Km	Jumlah jalan yang dipreservasi sepanjang 171.695 Km	31.227,80 Km	35.058,94 Km	35.046,13 Km	35.094,41 Km	35.268,66 Km	47.545,9	Kemen. PU	
			Jumlah jembatan yang dipreservasi sepanjang 602.944,40 Meter	118.837,54 Meter	121.026,71 Meter	121.026,71 Meter	121.026,71 Meter	121.026,71 Meter	5.426,1		
		Meningkatnya kapasitas dan kualitas jalan sepanjang 19.407,27 Km jalan nasional dan 26.957,83 meter jembatan	Jumlah jalan yang ditingkatkan kapasitasnya (pelebaran) sepanjang 19.370 Km	3.660,30 Km	3.977,61 Km	4.004,89 Km	3.956,62 Km	3.771,39 Km	67.021,5		
			Jumlah jalan lingkar/bypass yang dibangun sepanjang 36,65 Km	0,24 Km	5,52 Km	8,74 Km	12,27 Km	9,87 Km	534,5		
			Jumlah jembatan yang bangun sepanjang 16.157,83 meter	3.170,42 Meter	3.258,26 Meter	3.287,60 Meter	3.258,20 Meter	3.183,35 Meter	4.000,9		
			Jumlah flyover/underpass yang dibangun sepanjang 10.800 meter	4.345,00 Meter	2.816,50 Meter	2.598,50 Meter	640,00 Meter	400,00 Meter	2.437,0		
			Jumlah jalan strategis di lintas Selatan Jawa, perbatasan, terpencil dan terluar yang dibangun sepanjang 1.377,94 Km	113,43 Km	181,54 Km	303,42 Km	392,70 Km	386,86 Km	7.403,9		

NO	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (RP MILIAR)	K/L	
				2010	2011	2012	2013	2014			
2	Pembinaan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan dan Fasilitasi Jalan Bebas Hambatan dan Perkotaan	Meningkatnya kapasitas jalan tol sepanjang 120,35 Km	Jumlah jalan tol yang dibangun sepanjang 120,35Km	5,05 Km	1,50 Km	37,20 Km	47,20 Km	29,40 Km	8.815,0		
<b>3. PERHUBUNGAN:</b> Pembangunan jaringan prasarana dan penyediaan sarana transportasi antar-modra dan antar-pulau yang terintegrasi sesuai dengan Sistem Transportasi Nasional dan Cetak Biru Transportasi Multimoda dan penurunan tingkat kecelakaan transportasi sehingga pada 2014 lebih kecil dari 50% keadaan saat ini											
1	Terbangunnya ter minal antarnegara dan antarprovinsi di 15 lokasi per tahun	15 lokasi per tahun	lokasi	15 Lokasi	22 Lokasi	22 Lokasi	29 Lokasi	29 Lokasi	609,6	Kemenhub	
2	Terbangunnya 3 paket akses Pelabuhan Tanjung Priok, Belawan, Bandara Juanda Surabaya	3 paket	paket	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	3.300,0	Kemenhub	
3	Pembangunan Bus Air	Terbangunnya unit bus air	unit bus air	4	4	4	3	3	51,6	Kemenhub	
4	Pembangunan dan pengelolaan prasarana KA	954,43 km jalur KA baru/jalur ganda	Panjang km jalur KA baru yang dibangun termasuk jalur ganda	68,67 km	141,14 km	210,38 km	272,69 km	261,55 km	9.751,7	Kemenhub	
		71 paket peningkatan pelistrikan (diantaranya elektrifikasi sepanjang 289 km)	Jumlah paket pekerjaan peningkatan pelistrikan	13 Paket	13 Paket	14 Paket	15 Paket	16 Paket	2.088,4	Kemenhub	

NO	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (RP MILIAR)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014		
5	Pembangunan sarana KA	186 unit Sarana KA (Lokomotif, KRDI, KRDE, KRL, Tram, Railbus)	Jumlah unit pengadaan lokomotif, KRDI, KRDE, KRL, Tram, Railbus	7 paket	30 paket	34 paket	48 paket	67 paket	880,8	Kemenhub
6	Terbangunnya Bandara Kualanamu	1 paket	paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	2.000,0	Kemenhub
7	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana Bandar Udara	205 paket bandara yang dikembangkan dan direhabilitasi	Jumlah bandar udara yang dikembangkan, direhabilitasi	205	205	205	205	205	6.976,3	Kemenhub
		28 paket bandara yang dikembangkan di daerah perbatasan dan rawan bencana	Jumlah Bandar udara yang dikembangkan didaerah perbatasan dan rawan bencana	4	8	11	12	14	1.066,1	Kemenhub
8	Rehabilitasi fasilitas keselamatan transportasi darat	5 Paket	Jumlah Rehabilitasi Fasilitas Keselamatan LLAJ	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	21,4	
9	Pengadaan peralatan/fasilitas sarana dan keselamatan perkeretaapian	72 paket	Jumlah paket pengadaan peralatan/fasilitas sarana dan keselamatan perkeretaapian	11 paket	13 paket	16 paket	15 paket	17 paket	391,6	Kemenhub
10	Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang Kenavigasian	Terbangunnya sarana bantu navigasi pelayaran terdiri 93 menara suar; 185 rambu suar; 153 pelampung suar;	Unit (menara suar;rambu suar; pelampung suar)	18; 23 ; 30	18 ; 29 ; 30	18; 38 ; 35	19 ; 42 ; 40	20 ; 53 ; 18	1.127,6	Kemenhub
		Terpasangnya 39 VTS a.l Selat Malaka, Selat Sunda, Selat lombok	Unit	15	7	8	4	5	1.024,9	Kemenhub

NO	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (RP MILIAR)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	TOTAL	
		Tersedianya 15 unit kapal kenavigasian	Unit Kapal Navigasi	1	2	3	4	5	120,0	Kemenhub
11	Pengelolaan dan Penyelenggaraan kegiatan di bidang Pelabuhan dan Pengerukan	Tersedianya alur pelayaran yang aman untuk kapal melalui pengeringan 61.7150.00 m3 sedimen	volume lumpur/sedimen yang dikeruk (juta m3)	6	15	11.32	16.08	13.03	880,0	Kemenhub
		Terbangunnya/Meningkatnya kapasitas 275lokasi prasarana dan fasilitas pelabuhan utama, pengumpul,pengumpan ( non strategis)	lokasi prasarana dan fasilitas pelabuhan	55	55	55	55	55	3.500,0	Kemenhub
12	Paket/Unit/set peralatan keamanan penerbangan	1.423 Paket/	Paket/Unit/set	473	109	114	113	140	865,3	Kemenhub
13	412 unit/paket/set peralatan navigasi	412 unit/paket/set	unit/paket/set	124	49	39	29	27	1.676,9	Kemenhub
14	pesawat udara kalibrasi termasuk console (FIS) kalibrasi	3 unit	unit pesawat udara kalibrasi	1	1	-	1	-	443,3	Kemenhub
15	Koordinasi Pengembangan Urusan Infrastruktur Transportasi	Meningkatnya koordinasi urusan infrastruktur transportasi	Percentase rekomendasi hasil koordinasi kebijakan urusan infrastruktur transportasi yang terimplementasi	60%	70%	75%	80%	85%	19,3	Kemenko Perekonomian

NO	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (RP MILIAR)	K/L	
				2010	2011	2012	2013	2014			
<b>4. PERUMAHAN RAKYAT:</b> Pembangunan 685.000 Rumah Sederhana Sehat Bersubsidi, 180 Rusunami dan 650 twin block berikut fasilitas pendukung kawasan permukiman yang dapat menampung 836.000 keluarga yang kurang mampu pada 2012											
1	Pembangunan rumah susun sederhana sewa	380 twin block	Jumlah rusunawa terbangun	100	100	180	0	0	4.560,0	Kemenpera	
2	Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Penyelenggaraan dalam Pengembangan Permukiman	26.700 unit (270 twin block)	Jumlah satuan unit hunian rumah susun yang terbangun dan infrastruktur pendukungnya	3.960	7.041	7.041	5.200	3.458	3.330,00	Kemen. PU	
3	Fasilitasi pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas kawasan perumahan dan permukiman	700.000 unit	Jumlah fasilitasi dan stimulasi prasarana, sarana, dan utilitas kawasan perumahan dan permukiman	90.374	117.010	145.000	161.616	186.000	4.375,00	Kemenpera	
4	Bantuan subsidi perumahan Tahun 2010-2014	1.350.000 unit	Jumlah bantuan subsidi perumahan	21.000	25.000	290.000	290.000	310.000	20.700,00	Kemenpera	
5	Pembayaran Tunggakan Subsidi Tahun 2008-2009	187.006 unit	Jumlah bantuan subsidi perumahan	187.006	-	-	-	-	923,51	Kemenpera	
6	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan baru perumahan swadaya	200.000 unit	Jumlah fasilitasi dan stimulasi pembangunan baru perumahan swadaya	30.000	50.000	65.000	30.000	25.000	2.145,00	Kemenpera	
7	Fasilitasi dan stimulasi peningkatan kualitas perumahan swadaya	400.000 unit	Jumlah fasilitasi dan stimulasi peningkatan kualitas perumahan	50.000	75.000	85.000	90.000	100.000	625,00	Kemenpera	

NO	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (RP MILIAR)	K/L	
				2010	2011	2012	2013	2014			
			swadaya								
<b>5.PENGENDALIAN BANJIR:</b> Penyelesaian pembangunan prasarana pengendalian banjir, diantaranya Banjir Kanal Timur Jakarta sebelum 2012 dan penanganan secara terpadu Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo sebelum 2013											
1	Pengendalian Banjir, Lahar Gunung Berapi dan Pengamanan Pantai	Terlindunginya kawasan seluas 48,66 ribu hektar dari bahaya banjir dan terlindunginya kawasan pantai sepanjang 80 km dari abrasi pantai serta terkendaliinya 16 juta m <sup>3</sup> lahar gunung berapi/sedimen	Panjang sarana/prasarana pengendali banjir yang dibangun (216 km)	168 km	12 km	12 km	11 km	13 km	2,508.6	Kemenneg PU	
			Panjang sarana/prasarana pengendali banjir yang direhabilitasi (386 km)	139 km	153 km	90 km	2 km	1 km	3,745.0	Kemenneg PU	
			Panjang sarana / prasarana pengendali banjir yang dioperasikan dan dipelihara (2.000 km) untuk mengamankan kawasan seluas 35,7 ribu hektar	700 km	1.000 km	1.500 km	1.750 km	2.000 km	927.5	Kemenneg PU	
			Jumlah sarana/prasarana pengendali lahar/sedimen yang dibangun (28 buah) untuk mengendalikan lahar/sedimen dengan volume 16 juta m <sup>3</sup>	28 buah					116.5	Kemenneg PU	

NO	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (RP MILIAR)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014		
			Jumlah sarana/prasarana pengendali lahar/sedimen yang direhabilitasi (85 unit) untuk mengendalikan lahar/sedimen dengan volume 6 juta m <sup>3</sup>	4 buah	13 buah	20 buah	23 buah	25 buah	145.0	Kemenneg PU
			Jumlah sarana/prasarana pengendali lahar/sedimen yang dioperasikan dan dipelihara (150 unit) untuk mengendalikan lahar/sedimen dengan volume 12 juta m <sup>3</sup>	10 buah	20 buah	30 buah	40 buah	50 buah	75.0	Kemenneg PU
			Panjang sarana/prasarana pengaman pantai yang dibangun (30 km)	30 km					200.0	Kemenneg PU
			Panjang sarana/prasarana pengaman pantai yang direhabilitasi (50 km)	3 km	10 km	10 km	10 km	17 km	278.5	Kemenneg PU
			Panjang sarana/prasarana pengaman pantai yang dipelihara (50 km)	30 km	5 km	5 km	5 km	5 km	50.0	Kemenneg PU

NO	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (RP MILIAR)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014		
	Diselesaikannya dan berfungsinya Banjir Kanal Timur untuk mengurangi daerah genangan akibat banjir di Wilayah Jakarta		Diselesaikannya pembangunan kanal timur paket 22 s/d 29	paket 22 s/d 29					613.7	Kemenneg PU
			Diselesaikannya kegiatan supervisi konstruksi Banjir Kanal Timur	1 kegiatan					5.7	
			Terbangunnya bangunan akhir / jetty di muara Banjir Kanal Timur		800 meter				196.1	
			Terbangunnya jalan inspeksi		19 km				76.4	
			Terbangunnya perkuatan tebing		17 km				59.3	
			Diselesaikannya normalisasi Kali Blencong		1 km				79.5	
			Terbangunnya inlet Cakung		1 buah				14.2	
	Diselesaikannya dan berfungsinya Banjir Kanal Timur untuk mengurangi daerah genangan akibat banjir di Wilayah Jakarta		Terbangunnya Saluran Gendong		7 km				17.8	Kemenneg PU
			Terbangunnya Utilitas (PGN Jaklim, PLN Jaktim, TPJ)		3 unit				20.2	
			Terbangunnya Jembatan penyeberangan orang (BKT 226)		1 buah				5.1	
			Terbangunnya Jembatan BKT 207		1 buah				5.1	
			Terbangunnya drain inlet		2 buah				2.2	
			Terbangunnya perkuatan bronjong		18.000 m3				41.8	

NO	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (RP MILIAR)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	TOTAL	
			Tebangunnya jalan oprit		2 buah				7.3	
			Diselesaikanya pekerjaan galian dan timbunan hulu Kali Sunter		100 meter				0.9	
			Diselesaikannya Pemasangan Grass Block		23,5 meter				28.2	
		Terkendalinya bahaya banjir di Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo	terbangunnya prasarana pengendali banjir di DAS Bengawan Solo	pompa banjir di 5 lokasi					40.0	Kemenneg PU
		Terkendalinya bahaya banjir di Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo	Terbangunnya prasarana pengendali banjir DAS Bengawan Solo	7 waduk	7 waduk	7 waduk	7 waduk	7 waduk	3.390,0	Kemenneg PU
			Terehabilitasinya prasarana pengendali banjir di DAS Bengawan Solo (8 Lokasi)	8 waduk	8 waduk	8 waduk	8 waduk	8 waduk	1.190,0	Kemenneg PU
			Terpeliharanya waduk di DAS Bengawan Solo	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	180,0	Kemenneg PU
			Terlaksananya konservasi di DAS Bengawan Solo (2 Lokasi)	-	2 lokasi	2 lokasi	2 lokasi	2 lokasi	190,0	Kemenneg PU

NO	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (RP MILIAR)	K/L	
				2010	2011	2012	2013	2014			
<b>6. TELEKOMUNIKASI:</b> Penuntasan pembangunan jaringan serat optik di Indonesia bagian timur sebelum 2013 dan maksimalisasi tersedianya akses komunikasi data dan suara bagi seluruh rakyat											
1	Perencanaan dan Rekayasa Alokasi Spektrum Frekuensi	Kebijakan, regulasi, rencana pemanfaatan dan rekayasa sumber daya spektrum frekuensi radio	Prosentase jumlah penetapan pita frekuensi radio dan pemanfaatan slot orbit satelit	95%	95%	95%	95%	95%	120,68	Kemenkominfo	
			Prosentase utilitas pemanfaatan spektrum frekuensi radio	40%	60%	80%	100%	100%			
2.	Pelaksanaan Layanan Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika	Kebijakan, regulasi, rencana optimalisasi sumber daya spektrum dan non spektrum	Prosentase pengelolaan sumber daya spektrum frekuensi radio dan orbit satelit	40%	60%	80%	100%	100%	519,68	Kemenkominfo	
			Prosentase pengelolaan sumber daya pos, penomoran telekomunikasi dan alamat IP	40%	60%	80%	100%	100%			
3.	Pengembangan Penyelenggaraan Telekomunikasi <b>Sub Kegiatan Prioritas:</b> Penyusunan <i>ICT Fund</i> untuk membiayai pembangunan jaringan <i>backbone</i> serat	Kebijakan, regulasi, perijinan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan telekomunikasi	Prosentase penyelesaian penyusunan dan pembahasan <i>ICT Fund</i> dan optimalisasi PNBP	100%	-	-	-	-	77,62	Kemenkominfo	
			Prosentase pencapaian terhadap kuantitas dan kualitas layanan pos	60%	70%	80%	90%	100%			

NO	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (RP MILIAR)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014		
	optik									
4.	Pengembangan Penyelenggaraan Penyiaran	Kebijakan, regulasi, perijinan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan penyiaran	Prosentase pencapaian terhadap ketepatan penyelesaian layanan perizinan	50%	65%	80%	95%	100%	498,92	Kemenkominfo
			Prosentase implementasi migrasi sistem penyiaran dari analog ke digital	10%	25%	50%	65%	70%		
5.	Pelaksanaan Pengamanan Jaringan Internet	Keamanan terhadap jaringan internet nasional	Prosentase pencapaian keamanan trafik nasional, POP penyelenggara jasa internet dan internet <i>exchange</i> , titik akses ke lembaga pemerintahan dan <i>critical infrastructure</i>	50%	55%	60%	65%	70%	116,16	Kemenkominfo
6.	Fasilitasi Penerapan dan Pengembangan E-Government	Kebijakan, regulasi, bimbingan teknis, dan evaluasi pengembangan <i>e-government</i> nasional untuk mendorong peningkatan nilai <i>e-government</i> nasional menjadi 3,4 dan tingkat e-literasi menjadi 50%	Prosentase penyelesaian penyusunan / pembahasan RPP Penyelenggaraan Sistem Elektronik Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah ( <i>e-Government</i> ) dan <i>Master Plan e-Government Nasional</i>	100%	-	-	-	-	877,88	Kemenkominfo

NO	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (RP MILIAR)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014		
7.	Fasilitasi Penerapan dan Pengembangan Sistem Keamanan Informasi Elektronik	Kebijakan, regulasi, bimbingan teknis dan evaluasi pengembangan sistem keamanan informasi elektronik	Prosentase peningkatan penerapan dan kualitas aplikasi <i>e-government</i> di pemerintah kab/kot	10%	40%	60%	80%	100%		120,36 Kemenkominfo
			Prosentase penyelesaian pembahasan dan perbaikan materi RUU Rencana Tindak Pidana Teknologi Informasi ( <i>Cyber Crime</i> )	50%	100%	-	-	-		
			Prosentase penyusunan peraturan pelaksana UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	100%	-	-	-	-		
8.	Pengembangan Standarisasi Perangkat Pos dan Informatika	Kebijakan, regulasi, standar, sertifikasi, interoperabilitas perangkat pos, telekomunikasi dan penyiaran	Prosentase pencapaian standar kelayakan teknis perangkat pos, telekomunikasi dan penyiaran	40%	60%	80%	100%	100%	65,42	Kemenkominfo

NO	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (RP MILIAR)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	TOTAL	
			Prosentase peningkatan interoperabilitas pada layanan perangkat, aplikasi dan layanan	40%	60%	80%	100%	100%		
9.	Pengembangan Standarisasi Layanan Pos dan Informatika	Kebijakan, regulasi, standar, sertifikasi, interoperabilitas layanan pos, telekomunikasi dan penyiaran	Paket penyusunan kebijakan, regulasi, sertifikasi di bidang layanan pos, telekomunikasi, dan penyiaran	10 paket	65,41	Kemenkominfo				
10.	Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pemerataan Pembangunan Sarana dan Prasarana Informatika	Layanan akses informasi dan komunikasi di wilayah non komersial	Prosentase ibukota provinsi yang terhubung dengan jaringan serat optik	10%	30%	50%	70%	100%	7.367,12	Kemenkominfo
			Prosentase ibukota kab/kota yang terhubung jaringan <i>broadband</i>	25%	30%	50%	60%	75%		
			Prosentase ibukota provinsi yang memiliki regional <i>internet exchange</i>	10%	30%	50%	80%	100%		
			Prosentase ibukota provinsi yang memiliki <i>international internet exchange</i>	10%	30%	50%	80%	100%		
			Jumlah Desa Informasi yang dilengkapi radio komunitas	15 desa	76 desa	200 desa	350 desa	500 desa		

NO	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (RP MILIAR)	K/L	
				2010	2011	2012	2013	2014			
			Prosentase desa yang dilayani akses telekomunikasi	100%	100%	100%	100%	100%			
			Prosentase desa yang dilayanani akses internet	5%	20%	40%	60%	80%			
<b>7.TRANSPORTASI PERKOTAAN:</b> Perbaikan sistem dan jaringan transportasi di 4 kota besar (Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan) sesuai dengan Cetak Biru Transportasi Perkotaan, termasuk penyelesaian pembangunan angkutan kereta listrik di Jakarta (MRT dan Monorail) selambat-lambatnya 2014.											
A	Pembinaan dan Pengembangan Sistem Transportasi Perkotaan	Tersusunnya 100% rencana dan program sistem transportasi dan evaluasi pelaksanaan program	Jumlah rencana Induk Angkutan Perkotaan, Rencana In-duk Sistem Infor-masi Lalu Lintas Perkotaan, Lapo-ran evaluasi, Ter-selenggarannya ATCS, Jumlah Fasilitas Kese-lamatan Trans-portasi Perkotaan.	1 Paket	2 Paket	3 Paket	4 Paket	4 Paket	282,5	Kemenhub	
		Terselenggaranya Transportasi Perkotaan	Jumlah Pengembangan Bus Rapid Transit (BRT), Kota Percontohan, Kawasan Percontohan.	1 Paket	379,2	Kemenhub					
		Transportasi Ramah lingkungan	Jumlah Penyelenggaraan Transportasi Ramah Lingkungan	1 Paket	137,6	Kemenhub					

NO	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (RP MILIAR)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014		
B	Penyelesaian pembangunan angkutan kereta listrik di Jakarta (MRT dan monorail)	*) Sasaran tidak tercapai dikarenakan besar pagu Ditjen KA Kemenhub hanya 30,79 T maka besar pagu untuk MRT dan Monorail baru ditampung sebagian	Paket Monorail dan Paket MRT	2 paket	2.000,0	Kemenhub				

PRIORITAS 7		<b>IKLIM INVESTASI DAN IKLIM USAHA</b>					
TEMA PRIORITAS		<i>Peningkatan investasi melalui perbaikan kepastian hukum, penyederhanaan prosedur, perbaikan sistem informasi, dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)</i>					
PENANGGUNGJAWAB		Menteri Koordinator Bidang Perekonomian					
BEKERJASAMA DENGAN		Menteri Keuangan; Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional; Menteri Perdagangan Menteri Perindustrian; Menteri Perhubungan; Menteri Pekerjaan Umum; Menteri Komunikasi dan Informatika; Menteri Dalam Negeri; Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; Kepala Badan Pertanahan Nasional					

No	SUBSTANSI INTI / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp.Miliar)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014		
<b>1. KEPASTIAN HUKUM:</b> Reformasi regulasi secara bertahap di tingkat nasional dan daerah sehingga terjadi harmonisasi peraturan perundang-undangan yang tidak menimbulkan ketidakjelasan dan inkonsistensi dalam implementasinya										
1.	Kegiatan Perancangan Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan kualitas RUU dan peraturan perundang-undangan di bawah UU (RanperUU) di DPR serta tenaga fungsional Perancang PerUUan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase yg mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan,</li> <li>• Persentase yg selesai dibahas di DPR secara tepat waktu,</li> <li>• Persentase tenaga fungsional perancang peraturan perUU yang mendapat kualifikasi dan promosi sesuai standar secara tepat waktu dan akuntabel</li> <li>• Persentase kelengkapan dokumentasi dan pustaka secara akurat dan up to date</li> <li>• Pemberhanan Peraturan perUUan di bidang Pertanahan, tata ruang, dan LH</li> <li>• Peraturan perUUan di bidang mekanisme</li> </ul>	20%	40%	60%	80%	100%	75,5	Kemenkumham

No	SUBSTANSI INTI / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp.Miliar)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014		
			Perlindungan Saksi dan Pelapor • Peraturan perUUan di bidang yang mendorong pembe-rantasan korupsi							
2.	Kegiatan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan	Meningkatkan keharmonisan rancangan peraturan perundang-undangan tingkat pusat bidang politik, hukum, keamanan, keuangan, perbankan, industri, perdagangan, sumber daya alam, riset, teknologi, kesejahteraan rakyat yang harmonis	• Persentase di bidang politik, hukum dan keamanan • Persentase di bidang keuangan dan perbankan • Persentase di bidang industri dan yang harmonis • Persentase di bidang Kesra • Pemberhanan Peraturan perUUan di bidang Pertanahan, tata ruang, dan LH • Peraturan Perundang-undangan di bidang mekanisme Perlindungan Saksi dan Pelapor • Peraturan perUUan yg mendorong pemberantasan korupsi	20%	40%	60%	80%	100%	38,5	Kemenkumham
3	Penataan Produk Hukum dan Pelayanan Bantuan Hukum Departemen	Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perUUan di tingkat pusat dan daerah	Jumlah Perda yang dikaji	Kajian 3.000 perda	Kajian 9.000 perda	Kajian 3.000 perda	Kajian 2.500 perda	Kajian 2.500 perda	12,5	Kemendagri

No	SUBSTANSI INTI / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp.Miliar)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014		
4	Peningkatan Deregulasi Kebijakan Penanaman Modal	Merealisasikan kegiatan kajian analisis kebijakan dan kegiatan sosialisasi kebijakan yang berorientasi pada peningkatan daya saing	Jumlah rumusan untuk bahan pertimbangan penyusunan kebijakan penanaman modal	1 rekomen dasi	1 rekomen dasi	1 rekomen dasi	1 rekomen dasi	1 rekomen dasi	92,33	BKPM
			Rumusan kebijakan sebagai masukan bagi penyempurnaan kebijakan dan pengembangan penanaman modal yg berdaya saing	1 rumusan	1 rumusan	1 rumusan	1 rumusan	1 rumusan		
			Kegiatan Sosialisasi dalam negeri	15	12	13	14	15		
			Kegiatan Sosialisasi luar negeri	5	4	4	5	5		
			Kegiatan Fasilitasi dalam negeri	20	17	17	18	20		
			Kegiatan Fasilitasi luar negeri	15	12	12	14	15		
5	Pengelolaan Pertanahan Propinsi	Terwujudnya pengembangan infrastruktur pertanahan secara nasional, regional, dan sektoral, yang kondusif bagi iklim usaha di seluruh Indonesia	Cakupan Peta Pertanahan	2.100.000 ha	2.100.000 ha	2.100.000 ha	2.100.000 ha	2.100.000 ha	228,33	BPN
		Terwujudnya percepatan legalisasi aset pertanahan, ketertiban adminis-trasi pertanahan dan kelengkapan informasi legalitas aset tanah	Terlaksananya legalisasi aset tanah	326.237 bidang	846.193 bidang	918.339 bidang	956.998 bidang	1.015.663 bidang	2.229,94	
		Berkurangnya sengketa,konflik & perkara pertanahan serta mencegah timbulnya sengketa, konflik dan perkara pertanahan	Penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan serta mencegah timbulnya kasus pertanahan baru	2.791 kasus	2.791 kasus	2.791 kasus	2.791 kasus	2.791 kasus	107,97	
6	Pengelolaan Data dan Informasi Pertanahan	Tersedianya data dan informasi per-tanahan yang terintegrasi	Peningkatan akses layanan pertanahan melalui LARASITA	156 kab/kota	419 kab/kota	419 kab/kota	419 kab/kota	419 kab/kota	254,29	BPN

No	SUBSTANSI INTI / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp.Miliar)	K/L	
				2010	2011	2012	2013	2014			
		secara nasional (Sistem Informasi Manajemen Pertanahan nasional/Simtan)									
7	Pengembangan Penyelenggaraan Pos	Kebijakan, regulasi, perijinan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan pos	Persentase penyelesaian penyusunan peraturan pelaksana UU No. 38 Tahun 2009 tentang Pos	60%	100%	-	-	-	57,35	Kemenkominfo	
8	Pengembangan Penyelenggaraan Telekomunikasi	Kebijakan, regulasi, perijinan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan telekomunikasi	Persentase pembahasan dan perbaikan materi RUU Multimedia (Konvergensi Telematika) sebagai pembaharuan UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	20%	40%	60%	80%	100%	85,57	Kemenkominfo	
9	Pengembangan Penyelenggaraan Penyiaran	Kebijakan, regulasi, perijinan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan penyiaran	Persentase pencapaian terhadap pembaharuan kebijakan, regulasi dan kelembagaan akibat adanya digitalisasi dan perkembangan industri	60%	70%	80%	90%	100%	498,92	Kemenkominfo	
<b>2. PENYEDERHANAAN PROSEDUR:</b>											
Penerapan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di beberapa kota yang dimulai di Batam, pembatalan perda bermasalah dan pengurangan biaya untuk memulai usaha seperti Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)											
1	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Penanaman Modal	Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal di pusat dan di daerah	Jumlah peserta Diklat Penyelenggaraan PTSP: pelatihan dasar, lanjutan I, lanjutan II, dan SPIPISE	2.000 orang	2.000 orang	2.000 orang	2.000 orang	2.000 orang	265,65	BKPM	
			Penetapan Kualifikasi Kelembagaan PTSP	265 PTSP	265 PTSP	265 PTSP	265 PTSP	265 PTSP			
			Pengadaan sarana dan prasarana penunjang Penyelenggaraan PTSP	33 Prov + 30 kab/kota	20 kab/kota	20 kab/kota	20 kab/kota	-			

No	SUBSTANSI INTI / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp.Miliar)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
2	Pengembangan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)	Meningkatnya kualitas pengembangan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik/ Online (SPIPISE)	Sosialisasi perizinan dan nonperizinan	33 Provinsi	33 Provinsi	33 Provinsi	33 Provinsi	33 Provinsi	100,29	BKPM
			Fasilitasi Penghubung di BKPM	19 instansi + 33 provinsi masing-masing 1 orang	19 instansi + 33 provinsi masing-masing 1 orang	19 instansi + 33 provinsi masing-masing 1 orang	19 instansi + 33 provinsi masing-masing 1 orang	19 instansi + 33 provinsi masing-masing 1 orang		
			Penyederhanaan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal	3 Instansi	3 Instansi	3 Instansi	3 Instansi	3 Instansi		
2	Pengembangan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)	Meningkatnya kualitas pengembangan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik/ Online (SPIPISE)	Peningkatan jumlah aplikasi perizinan dan non perizinan yang menjadi wewenang BKPM, PTSP Provinsi, PTSP Kab./Kota melalui SPIPISE	Perijinan di 3 sektor	Perijinan di 3 sektor	Perijinan di 2 sektor	Perijinan di 1 sektor	Implementasi nasional untuk semua sektor	100,29	BKPM
			Jumlah peningkatan PTSP Prov. dan Kab/Kota yang terhubung dalam SPIPISE	50 Kab/Kota dan 33 Prov	50 Kab/Kota dan 33 Prov	50 Kab/Kota dan 33 Prov	50 Kab/Kota dan 33 Prov	50 Kab/Kota dan 33 Prov		
			Terbangunnya infrastruktur dan database penanaman modal yang terintegrasi	Penambahan kapasitas dan kemampuan infrastruktur pada	Penambahan kapasitas dan kemampuan infrastruktur pada	Penambahan kapasitas dan kemampuan infrastruktur pada	Terbangunya Data Recovery Centre (DRC)	Penambahan kapasitas dan kemampuan infrastruktur pada jaringan.		

No	SUBSTANSI INTI / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp.Miliar)	K/L	
				2010	2011	2012	2013	2014			
			jaringan.	jaringan.	jaringan.						
		Jumlah provinsi dan Kab/Kota yang mengikuti sosialisasi dan pelatihan	50 Kab/Kota dan 33 Prov	50 Kab/Kota dan 33 Prov	50 Kab/Kota dan 33 Prov	50 Kab/Kota dan 33 Prov	50 Kab/Kota dan 33 Prov	50 Kab/Kota dan 33 Prov			
3	Koordinasi Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi (PEPI)	Meningkatnya koordinasi di bidang peningkatan ekspor dan peningkatan investasi	Persentase rekomendasi hasil koordinasi kebijakan di bidang peningkatan ekspor dan investasi yang terimplementasikan	65%	70%	75%	80%	85%	15,8	Kemenko Perekonomian	
4.	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Mempercepat proses perizinan di daerah	Jumlah daerah yang membentuk PTSP	5%	40%	50%	60%	70%	113,8	Kemendagri	
			PTSP yang siap menerapkan SPIPISE	5%	30%	40%	50%	60%			
			Pembatalan Perda bermasalah	100%	100%	100%	100%	100%			
			Daerah yang mengurangi biaya untuk berusaha	30%	40%	50%	60%	70%			
<b>3. LOGISTIK NASIONAL:</b> Pengembangan dan penetapan Sistem Logistik Nasional yang menjamin kelancaran arus barang dan mengurangi biaya transaksi/ekonomi biaya tinggi											
1	Peningkatan Kelancaran Distribusi Bahan Pokok	Terlaksananya kebijakan dan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kelancaran distribusi dan stabilisasi harga bahan pokok	Jumlah rumusan kebijakan dan standar, norma, kriteria dan prosedur di bidang pembinaan pasar dan distribusi (jenis)	6	6	5	4	4	226,75	Kemendag	
			Jumlah pelaku usaha yang mengikuti pembinaan, pelatihan dan bimbingan teknis	1.920	2.250	2.500	2.750	3.000			
			Persentase rata-rata perbedaan tingkat harga Bahan Pokok antar provinsi	15%	12%	11%	10%	9%			
			Persentase ketersediaan barang kebutuhan pokok bagi masyarakat	90%	92%	94%	96%	98%			

No	SUBSTANSI INTI / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp.Miliar)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014		
			Jumlah perijinan di bidang pembinaan pasar dan distribusi yang dijalani secara online	6	9	9	11	11		
			Waktu penyelesaian perijinan dan nonperijinan dibidang pembinaan pasar dan distribusi (hari)	6	6	5	4	2		
2	Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan	Terbangunnya sarana distribusi dalam rangka kelancaran distribusi barang pokok	Jumlah pasar percontohan (unit)	2	15	20	23	26	875,5	Kemendag
			Jumlah pembangunan pusat distribusi	-	1	1	1	1		
			Jumlah rekomendasi penataan sistem distribusi)	2	3	4	5	6		
3	Koordinasi Penataan dan Pengembangan Sistem Logistik Nasional	Terkoordinasinya pelaksanaan Kebijakan Penataan dan Pengembangan Sistem Logistik Nasional	Persentase rekomendasi hasil koordinasi kebijakan penataan dan pengembangan sistem logistik nasional yang ditindaklanjuti	60%	70%	75%	80%	85%	7,6	Kemenko Perekonomian
4	Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis Fasilitas Kepabeanan	Terciptanya administrator di bidang fasilitas kepabeanan yang dapat memberikan dukungan industry, perdagangan dan masyarakat serta optimalisasi pendapatan Terwujudnya pelayanan yang efisien dan pengawasan efektif	1. Persentase realisasi janji layanan publik terkait pemberian fasilitas pembebasan dan keriganan bea masuk	70%	72%	75%	77%	80%	133,04	Kemenkeu
			2. Persentase realisasi janji layanan publik terkait pemberian fasilitas pertambangan	70%	72%	75%	77%	80%		
			3. Persentase realisasi janji layanan publik terkait pemberian tempat penimbunan berikat (TPB).	70%	72%	75%	77%	80%		
			4. Persentase penyelesaian rancangan PMK dan aturan pelaksanaan lainnya terkait sistem pelayanan kepabeanan yang menunjang Sistem Logistik Nasional ( <i>Customs Advance Trade Systems</i> )	-	40%	60%	80%	100%		
			5. Persentase penyelesaian peraturan terkait sistem pelayanan kepabeanan dan cukai di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	-	100%	-	-	-		

No	SUBSTANSI INTI / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp.Miliar)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014		
			6. PMK untuk pengembangan sistem elektronik terkait dengan perijinan investasi di bidang kepabeanan dan perpajakan	-	40%	60%	80%	100%		
			7. PMK tentang <i>Authorized Economic Operator</i> (AEO) dan dukungan terkait dengan Sistem Logistik Nasional	-	40%	60%	80%	100%		
			8.PMK-PMK tentang pemberian fasilitas fiskal sesuai peraturan perundang-undangan dan skema pembiayaan infrastruktur ke dan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	-	40%	60%	80%	100%		
			9 .PMK untuk memadukan Kawasan Pelayanan Pabean Terpadu (KPPT) dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di 5 lokasi (di Jawa dan Sumatra)	-	100%	-	-	-		
5	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut	Terselenggaranya <i>National Single Window</i> pada 14 lokasi	lokasi pelabuhan	1 (Kantor Pusat)	2 (Adpel Palembang dan Adpel Panjang)	4 (Adpel Bitung, Ambon, Makassar dan Banjarmasin)	4 (Adpel Pekan Baru, Pontianak, Samarinda dan Sorong)	3 (Jayapura, Benoa dan Ternate)	151,0	Kemenhub
6	Pelaksanaan azas cabotage melalui Pengembangan dan Pemberdayaan armada kapal niaga Nasional	Meningkatnya armada niaga pelayaran nasional melalui program <i>Two Step Loan Project for Development of Domestic Shipping Industry Phase I</i> (1paket)	jumlah kapal niaga	0	0	2	2	3	1.200,0	Kemenhub
7	Pengelolaan <i>Cargo Information System</i>	Terselenggaranya <i>Cargo Information System</i>	Paket System informasi cargo	1	2	4	4	3	54,00	Kemenhub
8	Penataan Sistem	Terwujudnya Tatanan	Jumlah Peraturan Perundangan, peraturan	2	3	3	3	4	148,00	Kemenhub

No	SUBSTANSI INTI / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp.Miliar)	K/L	
				2010	2011	2012	2013	2014			
	Pelabuhan Nasional	Pelabuhan,Rencana Induk Pelabuhan Nasional, Rencana Induk Pelabuhan, serta Peraturan Perundungan Pelaksanaan	pelaksanaan teknis, dan laporan kajian								
9	Pengelolaan sarana dan fasilitas pelabuhan strategis dan pelabuhan untuk komoditas a.l Batubara, CPO	Optimalnya fungsi Sarana dan fasilitas 25 pelabuhan strategis Lhokseumawe, Belawan, Teluk Bayur, Dumai, Pekan Baru, Palembang, Panjang, Batam, Tg.Pinang, Tg.Priok, Tg.Emas, Tg.Perak, Cigading, Benoa, Kupang, Pontianak, Banjarmasin, Samarinda, Balikpapan,Bitung,Makasar, Sorong, Ambon, Biak dan Jayapura.	Jumlah lokasi yang dibangun dan di rehab	5 Lokasi	8.292,0	Kemenhub					
<b>4. SISTEM INFORMASI:</b> Beroperasinya secara penuh <i>National Single Window</i> (NSW) untuk impor (sebelum Januari 2010) dan ekspor. Percepatan realisasi proses penyelesaian bea cukai di luar pelabuhan dengan implementasi tahap pertama <i>Custom Advanced Trade System</i> (CATS) di dry port Cikarang											
1	Pengelolaan Fasilitasi Ekspor dan Impor	Tersedianya kebijakan, Koordinasi, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi di bidang fasilitasi ekspor dan impor	Jumlah penerbitan kebijakan fasilitasi ekspor dan impor; (peraturan)	4	4	4	4	4	100,76	Kemendag	
			Jumlah pengembangan sistem elektronik bidang fasilitasi pelayanan publik ; (kegiatan)	2	2	2	2	2			
			Jumlah pengguna perijinan ekspor/ impor <i>online</i> melalui INATRADE (perusahaan)	1.500	3.000	4.500	6.000	7.500			
			Jumlah bimbingan teknis bidang fasilitasi perdagangan; (kegiatan)	5	5	5	5	5			

No	SUBSTANSI INTI / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp.Miliar)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
2	Perumusan Kebijakan dan Pengembangan Teknologi Informasi Kepabeanan dan Cukai		Jumlah koordinasi bidang fasilitasi perdagangan; (kegiatan)	60	60	60	60	60	675.44	Kemenkeu
			Jumlah partisipasi sidang-sidang fasilitasi perdagangan didalam dan luar negeri; (kegiatan)	17	17	17	17	17		
			Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan monitoring fasilitasi perdagangan	5	5	5	5	5		
2	Perumusan Kebijakan dan Pengembangan Teknologi Informasi Kepabeanan dan Cukai	1. Terciptanya administrator kepabeanan dan cukai yang dapat memberikan fasilitasi terbaik berbasis teknologi informasi kepada industri, perdagangan, dan masyarakat serta optimalisasi penerimaan 2. Terwujudnya tingkat pelayanan yang efisien kepada pemangku kepentingan berkaitan dengan layanan berbasis teknologi informasi	1. Persentase sistem aplikasi dan infrastruktur TI yang sesuai dengan proses bisnis DJBC 2. Persentase penyelesaian aplikasi sistem kepabeanan yang terintegrasi dengan portal NSW 3. PMK untuk pengembangan sistem elektronik terkait dengan perijinan investasi di bidang kepabeanan dan perpajakan 4. PMK tentang <i>Authorized Economic Operator (AEO)</i> dan dukungan terkait dengan Sistem Logistik Nasional 5. PMK tentang Kawasan Pelayanan Pabean Terpadu (KPPT) dalam rangka pengembangan sistem logistik 6. PMK-PMK tentang pemberian fasilitas fiskal sesuai peraturan perundang-undangan dan skema pembiayaan infrastruktur ke dan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) 7. Percepatan operasionalisasi NSW. Untuk 5 pelabuhan, NSW untuk impor siap dilaksanakan akhir Desember 2009. Untuk pelabuhan yang lain, tergantung kebijakan dan kesiapan K/L lainnya	100%	100%	100%	100%	100%	675.44	Kemenkeu
				-	40%	60%	80%	100%		
				-	40%	60%	80%	100%		
				-	40%	60%	80%	100%		
				-	40%	60%	80%	100%		
				100%	-	-	-	-		

No	SUBSTANSI INTI / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp.MILIAH)	K/L	
				2010	2011	2012	2013	2014			
3	Pelaksanaan National Single Window di sektor perhubungan	Terselenggaranya <i>National Single Window</i> pada 14 lokasi	Paket jaringan sistem <i>National Single Window</i>	1 lokasi (Kantor Pusat)	2 lokasi (Adpel Palembang dan Adpel Panjang)	4 lokasi (Adpel Bitung, Ambon, Makassar, dan Banjarmasin)	4 lokasi (Adpel Pekan Baru, Pontianak, Samarinda, dan Sorong)	3 lokasi (Adpel Jayapura, Benoa, dan Ternate)	151,0	Kemenhub	
4	Koordinasi pengembangan dan penerapan sistem National Single Window/NSW dan ASEAN Single Window/ASW	Meningkatnya koordinasi di bidang pengembangan dan penerapan NSW dan ASW	Persentase rekomendasi di bidang pengembangan dan penerapan NSW dan ASW yang terimplementasikan	80%	80%	85%	90%	95%	16,20	Kemenko Perekonomian	
<b>5. KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK):</b> Pengembangan KEK di 5 lokasi melalui skema Public-Private Partnership sebelum 2012											
1	Dukungan Sektor Perdagangan Terhadap Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	Meningkatnya peranan sektor perdagangan di kawasan ekonomi khusus	Jumlah PP tentang Kawasan Ekonomi Khusus (peraturan)	1	-	-	-	2	10,90	Kemendag	
			Jumlah kebijakan perdagangan yang dilimpahkan ke KEK (peraturan)	1	1	1	1	1			
2	Pengembangan Penanaman Modal Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	Terbentuknya KEK di 5 lokasi	Persentase penyusunan peraturan pelaksanaan penye-lenggaraan KEK	100%	100%	100%	100%	100%	18,02	BKPM	
			Persentase penetapan institusi Sekretariat Dewan Nasional KEK	100%	100%	100%	100%	100%			

No	SUBSTANSI INTI / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp.Miliar)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014		
			Persentase pengoperasian Sekretariat Dewan Nasional KEK	-	100%	100%	100%	100%		
			Asistensi dan fasilitasi dalam rangka pene tapan dan pengem-bangan KEK	100%	100%	100%	100%	100%		
			Hasil Koordinasi masalah strategis di bidang pengembangan KEK	1 buku laporan						
			Jumlah promosi penanaman modal di KEK	2 Negara & 3 daerah	3 Negara & 3 daerah	4 Negara & 3 daerah	5 Negara & 4 daerah	7 Negara & 8 daerah		
			Kerja sama di bidang pengembangan KEK	-	2 Negara	2 Negara	5 Negara	5 Negara		
3	Fasilitasi Pengembangan KEK	Meningkatnya fasilitasi pengembangan zona industri di 5 KEK	Dokumentasi fasilitasi (AMDAL, Engineering Design/DED, dan kelembagaan) di 5 kawasan	5	5	5	5	5	32,40	Kemenperin
4	Perumusan kebijakan di bidang PPN, PBB, BPHTB, KUP, PPSP, dan Bea Materai	Peningkatan efektifitas pembuatan peraturan	1. Persentase penyelesaian usulan pembuatan / Revisi peraturan perundangan terhadap peraturan perundungan yang harus dibuat / direvisi 2. Tersedianya PMK-PMK Itg Pemberian Fasilitas Fiskal sesuai Peraturan Per-UU-an dan skema Pembayaran Infrastruktur ke & di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	100% -	100% 40%	100% 60%	100% 80%	100% 100%	12.47	Kemenkeu
5	Perumusan kebijakan di bidang PPh dan perjanjian kerjasama perpajakan	Peningkatan efektifitas pembuatan peraturan	1. Persentase penyelesaian usulan pembuatan / Revisi peraturan perundangan terhadap peraturan perundungan yang harus dibuat / direvisi 2. Tersedianya PMK-PMK Itg Pemberian Fasilitas	100% -	100% 40%	100% 60%	100% 80%	100% 100%	13.64	Kemenkeu

No	SUBSTANSI INTI / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp.Miliar)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014		
	internasional		Fiskal sesuai Peraturan Per-UU-an dan skema Pembiayaan Infrastruktur ke & di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) 3. Peraturan pelaksanaan mengenai insentif potongan PPh 5% bagi perusahaan yang melakukan R&D	100%	-	-	-	-		
6	Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis Fasilitas Kepabeanan	1. Terciptanya administrator di bidang fasilitas kepabeanan yang dapat memberikan dukungan industry, perdagangan dan masyarakat serta optimalisasi pendapatan 2. Terwujudnya pelayanan yang efisien dan pengawasan efektif	1. Persentase realisasi janji layanan publik terkait pemberian fasilitas pembebahan dan keriganan bea masuk 2. Persentase realisasi janji layanan public terkait pemberian fasilitas pertambangan 3. Persentase realisasi janji layanan public terkait pemberian tempat penimbunan berikat (TPB). 4. Persentase penyelesaian rancangan PMK dan aturan pelaksanaan lainnya terkait sistem pelayanan kepabeanan yang menunjang Sistem Logistik Nasional ( <i>Customs Advance Trade Systems</i> ) 5. Persentase penyelesaian peraturan terkait sistem pelayanan kepabeanan dan cukai di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) 6. PMK untuk pengembangan sistem elektronik terkait dengan perijinan investasi di bidang kepabeanan dan perpajakan 7. PMK tentang <i>Authorized Economic Operator (AEO)</i>	70%	72%	75%	77%	80%	*) Pagu sudah termasuk pada kegiatan di substansi inti ke tiga	Kemenkeu

No	SUBSTANSI INTI / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp.Miliar)	K/L	
				2010	2011	2012	2013	2014			
			dan dukungan terkait dengan Sistem Logistik Nasional 8.PMK-PMK tentang pemberian fasilitas fiskal sesuai peraturan perundang-undangan dan skema pembiayaan infrastruktur ke dan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) 9.PMK untuk memadukan Kawasan Pelayanan Pabean Terpadu (KPPT) dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di 5 lokasi (di Jawa dan Sumatra)	-	40%	60%	80%	-			
7	Koordinasi Pengembangan Urusan Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah	Meningkatnya koordinasi Urusan Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah	Persentase rekomendasi kebijakan Urusan Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah yang terimplementasi	75%	80%	80%	85%	90%	22,65	Kemenko Perekonomian	
		Terselesaikannya peraturan penyelenggaraan KEK dan penetapan lokasi KEK dan pengembangan KAPET	Persentase peraturan pelaksanaan UU KEK yang terselesaikan	60%	70%	80%	90%	95%			
			Jumlah lokasi KEK yang ditetapkan	1	2	2	1	1			
<b>6. KEBIJAKAN KETENAGAKERJAAN:</b> Sinkronisasi kebijakan ketenagakerjaan dan iklim usaha dalam rangka penciptaan lapangan kerja											
1.	Penyempurnaan Peraturan Ketenagakerjaan	Peraturan yang dapat mendorong penciptaan kesempatan kerja dan memperkuat lembaga HI	Tersusunnya peraturan kompensasi & penetapan PHK, hubungan kerja (PKWT & outsourcing), pengupahan, perlindungan pekerja, mogok kerja	Naskah Akademis	1 UU aman demen	Peraturan pelaksanaan, sosialisasi konsolidasi	Peraturan pelaksanaan, sosialisasi, konsolidasi	Peraturan pelaksanaan, sosialisasi, konsolidasi	182,0	Kemenakertrans	

No	SUBSTANSI INTI / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp.Miliar)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
2	Sinkronisasi Kebijakan Ketengakerjaan (Pusat) dengan Kebijakan / Peraturan Daerah	Tersusunnya peraturan ketenagakerjaan pusat dan daerah yang sinergis	Peraturan tentang organisasi pekerja/ buruh		Kajian & Naskah Akademis	1 UU amandemen	Peraturan pelaksanaan, Sosialisasi, Konsolidasi	Sosialisasi, Konsolidasi	145,0	Kemenakertrans
			Peraturan tentang penyelesaian perselisihan HI		Kajian & Naskah Akademis	1 UU amandemen	Peraturan pelaksanaan, Sosialisasi, Konsolidasi	Sosialisasi, Konsolidasi		
3.	Pengelolaan Kelembagaan dan Pemasyarakatan Hubungan Industrial	Tercapainya kesepakatan dalam hubungan kerja	Harmonisasi kebijakan jaminan sosial		4 rancangan naskah				368,5	Kemenakertrans
			Selarasnya peraturan bidang HI	Inventarisasi perda HI	Review & assessment	Sosialisasi dan konsolidasi dengan pemda	Sosialisasi dan konsolidasi dengan pemda	Sosialisasi dan konsolidasi dengan pemda		
			Mekanisme perundinan secara bipartit, pencatatan, keterwakilan dan verifikasi SP/SB	2 naskah	2 naskah					
		Diterapkannya manajemen dan standar K3.	Jumlah lembaga kerjasama (LKS) bipartit di perusahaan	naik 5%	naik 5%	naik 5%	naik 5%	naik 5%	460,0	Kemenakertrans
			Jumlah perusahaan yang menerapkan manajemen K3	500	750	1.000	1.250	1.500		
			% kenaikan tenaga pengawas K3 bersertifikat	% perusahaan naik 10%	% perusahaan naik 10%	% perusahaan naik 10%	% perusahaan naik 10%	% perusahaan naik 10%		

No	SUBSTANSI INTI / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp.Miliar)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014		
			kompetensi			30%				

PRIORITAS 8		<b>PROGRAM AKSI DI BIDANG ENERGI</b>					
TEMA PRIORITAS	<i>Pencapaian ketahanan energi nasional yang menjamin kelangsungan pertumbuhan nasional melalui restrukturisasi kelembagaan dan optimasi pemanfaatan energi alternatif seluas-luasnya</i>						
PENANGGUNGJAWAB	Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral						
BEKERJASAMA DENGAN	Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara; Menteri Negara Riset dan Teknologi; Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; Kepala Badan Pertanahan Nasional						

No	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp Miliar)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014		
<b>1. KEBIJAKAN:</b> Penetapan kebijakan energi yang memastikan penanganan energi nasional yang terintegrasi sesuai dengan Rencana Induk Energi Nasional										
a	Penyediaan dan Pengelolaan EBI dan Pelaksanaan Konservasi Energi	Terwujudnya penyediaan dan pengelolaan EBI dan konservasi energi	Jumlah regulasi	7	5	3	4	3	13,05	KESDM
b	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen LPE	Pelayanan yang optimal baik administratif/ teknis untuk pelaksanaan tupoksi DJPLE	Jumlah aturan perundang-undangan: PP	3	3				50,0	KESDM
			RPP	3						
			Aturan lain		3	6	6	6		
c	Penyusunan Kebijakan dan Program serta Evaluasi	Terpenuhinya kebijakan tenaga listrik dan meningkatnya rasio	Jumlah perencanaan ketenagalistrikan	7	7	7	7	8	172,4	KESDM

No	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp Miliar)	K/L	
				2010	2011	2012	2013	2014			
	Pelaksanaan Kebijakan Ketenagalistrikan	elektrifikasi									
d	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan bidang percepatan penyediaan dan pemanfaatan Energi Alternatif	Meningkatnya Koordinasi dan sinkronisasi implementasi kebijakan percepatan penyediaan dan pemanfaatan energi alternatif	Persentase rekomendasi hasil Kebijakan bidang percepatan penyediaan dan pemanfaatan energi alternatif yang terimplementasi	50%	60%	70%	80%	90%	30,0	Kemenko Perekonomian	
e	Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pengembangan Bahan Bakar Nabati	Meningkatnya koordinasi kebijakan pengembangan bahan bakar nabati	Persentase rekomendasi hasil koordinasi kebijakan bidang pengembangan bahan bakar nabati yang diimplementasikan	40%	50%	60%	70%	75%	4,65	Kemenko Perekonomian	
f	Koordinasi Pengembangan Desa Mandiri Energi	Meningkatnya koordinasi pengembangan desa mandiri energi	Persentase rekomendasi hasil koordinasi kebijakan desa mandiri energi yang dilindaklanjuti	40%	50%	60%	65%	70%	5,70	Kemenko Perekonomian	
g	Dukungan pelaksanaan program prioritas Pemerintah bidang energi	Tersusunnya paket regulasi di bidang energi	Risalah	5	5	5	5	5	13,75	Kemeneg BUMN	
			Surat	1	1	1	1	1			
			Laporan	5	5	5	5	5			
<b>2. RESTRUKTURISASI BUMN:</b> Transformasi dan konsolidasi BUMN bidang energi dimulai dari PLN dan Pertamina yang selesai selambat-lambatnya 2010 dan diikuti oleh BUMN lainnya											
a	Restrukturisasi BUMN besar / penting / strategis	Kajian Restrukturisasi BUMN	Laporan	1	1	1	1	1	29,17	Kameneg BUMN	
		pelaksanaan Restrukturisasi	Laporan	10	10	10	10	10	20,34		
		Monitoring dan Evaluasi	Laporan	6	6	6	6	6	12,7		
<b>3. KAPASITAS ENERGI:</b>											

No	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp Miliar)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014		
Peningkatan kapasitas pembangkit listrik sebesar rata-rata 3.000 MW per tahun mulai 2010 dengan rasio elektrifikasi yang mencakup 62% pada 2010 dan 80% pada 2014; dan produksi minyak bumi sebesar lebih dari 1,2 juta barrel per hari mulai 2014										
a	Penyusunan Kebijakan dan Program serta Evaluasi Pelaksanakan Kebijakan Ketenagalistrikan	Terpenuhinya kebutuhan te-naga listrik dan meningkatnya ratio elektifikasi-asi.	a. Pembangkit, Jaringan dan Gardu Transmisi							
			- Jumlah Kapasitas pembangkit (MW)	22	37				595,0	KESDM
			- Transmisi (kms)	3.381	4.129	3.881	3.774	4.297	16.094,7	KESDM
			- Gardu Induk	2.159	2.389	2.464	2.603	3.244	9.630,98	KESDM
			b. Jaringan dan Gardu Distribusi							
			- Gardu DAN Jaringan (kms/MVA)	18.004 dan 1.266	18.091 dan 1.311	18.960 dan 1.416	19.988 dan 1.548	20.508 dan 1.567	27.483,05	KESDM
			c. Jaringan dan Gardu Distribusi							
			- Gardu DAN Jaringan (kms/MVA)	18.004 dan 1.266	18.091 dan 1.311	18.960 dan 1.416	19.988 dan 1.548	20.508 dan 1.567	27.483,05	KESDM
			d. Jaringan dan Gardu Distribusi							
			- Gardu DAN Jaringan (kms/MVA)	18.004 dan 1.266	18.091 dan 1.311	18.960 dan 1.416	19.988 dan 1.548	20.508 dan 1.567	27.483,05	KESDM
b	Peningkatan produksi minyak bumi	Meningkatnya pengelolaan,pengusahaan dan pembinaan usaha hulu minyak dan gas bumi dan CBM	a. Jumlah Kontrak Kerja Sama Minyak dan gas Bumi dan CBM yang ditawarkan dan ditandatangani	40 KKS Migas dan 10 KKS GMB	40 KKKS Migas dan 10 KKS GMB	40 KKKS Migas dan 10 KKS GMB	40 KKKS Migas dan 10 KKS GMB	40 KKKS Migas dan 10 KKS GMB	117,3	KESDM
			b. Jumlah produksi migas dan CBM	1 lap	57,9	KESDM				
			- Minyak Bumi (MBOPD)	965	970	990	1000	1010(1.200) <sup>1)</sup>	-	KESDM
			- Gas Bumi (MBOEPD)	1593	1592	1594	1544	1633	-	KESDM
			- CBM (MBOEPD)	-	-	21,7	61,34	113,21	-	KESDM
			c. Jumlah investasi sub sektor minyak dan gas bumi dan CBM (dalam Juta USD)	554 dan 150 dari komitmen 3 tahun pertama	582 dan 160 dari komitmen 3 tahun pertama	609 dan 160 dari komitmen 3 tahun pertama	637 dan 180 dari komitmen 3 tahun pertama	665 dan 180 dari komitmen 3 tahun pertama	7,27	KESDM
			d. Jumlah investasi sub sektor minyak dan gas bumi dan CBM (dalam Juta USD)	554 dan 150 dari komitmen 3 tahun pertama	582 dan 160 dari komitmen 3 tahun pertama	609 dan 160 dari komitmen 3 tahun pertama	637 dan 180 dari komitmen 3 tahun pertama	665 dan 180 dari komitmen 3 tahun pertama	7,27	KESDM
			e. Jumlah investasi sub sektor minyak dan gas bumi dan CBM (dalam Juta USD)	554 dan 150 dari komitmen 3 tahun pertama	582 dan 160 dari komitmen 3 tahun pertama	609 dan 160 dari komitmen 3 tahun pertama	637 dan 180 dari komitmen 3 tahun pertama	665 dan 180 dari komitmen 3 tahun pertama	7,27	KESDM
			f. Jumlah investasi sub sektor minyak dan gas bumi dan CBM (dalam Juta USD)	554 dan 150 dari komitmen 3 tahun pertama	582 dan 160 dari komitmen 3 tahun pertama	609 dan 160 dari komitmen 3 tahun pertama	637 dan 180 dari komitmen 3 tahun pertama	665 dan 180 dari komitmen 3 tahun pertama	7,27	KESDM
			g. Jumlah investasi sub sektor minyak dan gas bumi dan CBM (dalam Juta USD)	554 dan 150 dari komitmen 3 tahun pertama	582 dan 160 dari komitmen 3 tahun pertama	609 dan 160 dari komitmen 3 tahun pertama	637 dan 180 dari komitmen 3 tahun pertama	665 dan 180 dari komitmen 3 tahun pertama	7,27	KESDM

## IM - 101

Catatan: 1) 1,2 Jt adalah target kinerja presiden, sedangkan 1.01 Jt adalah target Renstra KESDM yang diperkirakan dapat dilaksanakan

No	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITY	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp Miliar)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014		
			d. Jumlah kegiatan eksplorasi dalam upaya mencari cadangan migas baru	Survei Seismik 2D 14.700 km, Survei Seismik 3D 7.975 km <sup>2</sup> , Pemboran 63 sumur	Survei Seismik 2D 8.870 km, Survei Seismik 3D 4.500 km <sup>2</sup> , Pemboran 88 sumur	Survei Seismik 2D 8.700 km, Survei Seismik 3D 5.650 km <sup>2</sup> , Pemboran 69 sumur	Survei Seismik 2D 2.520 km, Survei Seismik 3D 4.420 km <sup>2</sup> , Pemboran 34 sumur	Survei Seismik 2D 2.000 km, Survei Seismik 3D 1.000 km <sup>2</sup> , Pemboran 45 sumur	59,94	KESDM
			e. Jumlah pelaksanaan Survei Umum di Wilayah Terbuka	Data seismik 2D dan hasil pengolahannya di Lepas Pantai Sulawesi Selatan sepanjang 2000 km	Data seismik 2D dan hasil pengolahannya di Lepas Pantai Timur Indonesia sepanjang 2000 km	Data seismik 2D dan hasil pengolahannya di Lepas Pantai Indonesia Barat Selatan sepanjang 2000 km	Data seismik 2D dan hasil pengolahannya di Lepas Pantai Indonesia Timur sepanjang 2000 km	Data seismik 2D dan hasil pengolahannya di Lepas Pantai Indonesia Barat sepanjang 2000 km	213,68	KESDM
			f. Jumlah kegiatan penyiapan, promosi dan penawaran Wilayah Kerja Baru Migas	8 (delapan) event	9 (sembilan) event	10 (sepuluh) event	11 (sebelas) event	12 (duabelas) event	28,66	KESDM

4. ENERGI ALTERNATIF:

Peningkatan pemanfaatan energi terbarukan termasuk energi alternatif geothermal sehingga mencapai 2.000 MW pada 2012 dan 5.000 MW pada 2014 dan dimulainya produksi coal bed methane untuk membangkitkan listrik pada 2011 disertai pemanfaatan potensi tenaga surya, microhydro, bio-energy, dan nuklir secara bertahap

ENERGI ALTERNATIF										
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

No	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp Miliar)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014		
a	Peningkatan pemanfaatan energi terbarukan termasuk energi alternatif geothermal sehingga mencapai 2.000 MW pada 2012 dan 5.000 MW pada 2014 dimulainya produksi coal bed methane untuk membangkitkan listrik pada 2011 disertai pemanfaatan potensi tenaga surya	Tercapainya target kontribusi PLTP pada program 10.000 MW tahap II	Jumlah kapasitas PLTP terpasang sebesar 5795 MW di tahun 2014	1.261	1.419	2.260	3.000	5.795	296,4	KESDM
b	Penyediaan Pengelolaan EBT dan Pelaksanaan Konservasi Energi	Terwujudnya penyediaan dan pengelolaan energi baru terbarukan dan konservasi energi	Lisdes (EBT)						-	KESDM PEMDA (DAK)
			- PLTS 50 Wp Tersebar	3,55	24,49	24,59	24,69	24,78	492,6	KESDM - DAK
			- PLTMH (kW)	1,53	10,42	10,9	11,38	11,94	68,96	KESDM - DAK
			- PLT Angin (kW)	0	5,16	5,32	5,55	5,64	-	DAK
			- Biomassa (MW)	0	0,1	0,1	0,1	0,1	-	DAK
			- Jumlah studi kelayakan energi laut (laporan)	1	1	1	1	1	5,00	KESDM
			- Jumlah Pilot project pembangkit listrik dari sumber energi laut	0	1	2	3	4	25,00	KESDM
			DME	50	50	50	50	50	300,00	KESDM
c	Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hilir	Peningkatan Kapasitas, kehandalan dan efisiensi	Pembangunan unit pengolahan Biofuel (40 desa terpilih)	unit pengolahan biofuel di 8 desa	unit pengolahan biofuel di 8 desa	unit pengolahan	unit pengolahan	unit pengolahan biofuel di 8	40,00	KESDM

No	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp Miliar)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014		
	Migas	infrastruktur sistem penyediaan bahan bakar dan bahan baku industri				biofuel di 8 desa	biofuel di 8 desa	desa		
d	Dukungan Kebijakan Iptek untuk Penciptaan dan Pemanfaatan Sumber Energi Baru dan Terbarukan	Kebijakan peningkatan dukungan iptek untuk penciptaan dan pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan, termasuk koordinasi kebijakan untuk persiapan pembangunan PLTN	Jumlah kebijakan	1	1	1	1	1	25,0	KRT
			Jumlah riset bersama	2	2	2	2	2		
			Paket koordinasi		1	1	1	1	50,0	
e	Pengembangan PLTP Skala Kecil	Termafaatkannya sistem teknologi pembangkit listrik skala kecil	Jumlah prototype, alih teknologi sistem dan komponen Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi/PLTP (alih teknologi 2 MW)	1	1	1	1	1	177,0	BPPT
f	Penelitian Konversi Energi	Demo <i>pilot plant bio-gasoline</i> dari ligno selulosa	paket	1	1	1	1	1	21,28	LIPI
		Standardisasi teknologi pengujian konversi energi	paket	1	1	1	1	1		
g	Penyusunan Infrastruktur Dasar Pendukung Program Energi Nuklir Nasional	Pemanfaatan potensi tenaga nuklir secara bertahap.	Dokumen Infrastruktur Dasar Pendukung Program Energi Nuklir Nasional	3	3	3	3	3	453,55	BATAN
h	Diseminasi Hasil Litbang Iptek Nuklir	Sosialisasi PLTN	Paket Sosialisasi PLTN (media)	3	3	3	3	3	188,0	

No	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp Miliar)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014		
i	Pengelolaan Pertanahan Propinsi	Terwujudnya Pengendalian, Pegusaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Peningkatan akses terhadap sumber ekonomi	Inventarisasi dan identifikasi tanah terindikasi terlantar (hektar)	75.900	75.900	75.900	75.900	75.900	36,27	BPN
j	Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman Tahunan	Terfasilitasinya pengembangan budidaya tanaman tahunan (kelapa, kelapa sawit, karet, jambu mete, jarak pagar)	<i>Peningkatan luas areal (ribu hektar) pembinaan dan pengembangan tanaman tahunan</i>						437,36	Kementerian
			Pengembangan Komoditas Ekspor							
			Karet	3.445	3.456	3.466	3.476	3.487		
			Jambu Mete	573	574	575	576	577		
			<i>Penyediaan bahan tanaman sumber bahan bakar nabati (bio energy)</i>							
			Jarak pagar	10	12	15	18	21		
			Kelapa	3.807	3.814	3.820	3.827	3.833		
			Kelapa Sawit	8.127	8.342	8.557	8.772	8.987		
			Kemiri sunan	1	2	4	7	10		
			Revitalisasi perkebunan							
			Kelapa sawit	125	153	153	153	148		
			Karet	10	53	53	53	51		

No	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp Miliar)	K/L					
				2010	2011	2012	2013	2014							
			Kakao	0	34	34	34	32							
			Penyusunan kebijakan Pengembangan bio energy												
			Pengembangan integrasi kebun ternak (paket)	27	28	29	30	31							
<b>5. HASIL IKUTAN DAN TURUNAN MINYAK BUMI / GAS:</b>															
Revitalisasi industri pengolah hasil ikutan/turunan minyak bumi dan gas sebagai bahan baku industri tekstil, pupuk dan industri hilir lainnya															
a	Pengembangan klaster industri berbasis migas, kondesat	Berkembangnya klaster industri berbasis migas	2 Lokasi (Jatim dan Kalimantan)	2	2	2	2	2	29,00	Kemenperin					
<b>6. KONVERSI MENUJU PENGGUNAAN GAS:</b>															
Perluasan program konversi minyak tanah ke gas sehingga mencakup 42 juta Kepala Keluarga pada 2010; penggunaan gas alam sebagai bahan bakar angkutan umum perkotaan di Palembang, Surabaya, dan Denpasar															
a	Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hilir Migas	Peningkatan kapasitas, kehandalan dan efisiensi infrastruktur sistem penyediaan bahan bakar dan bahan baku industri	Pembangunan LPG miniplant	1 Kajian Pembangunan	1 Kajian Pembangunan	1 unit kilang miniplant LPG			382,00	KESDM					
			Pembangunan Jaringan Gas Kota	3 kota/ 16.000 SR	4 kota/ 16.000 SR	4 kota/ 16.000 SR	4 kota/ 16.000 SR	4 kota/ 16.000 SR	1.370,84						
b	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya DJ Migas	Meningkatnya pembinaan, koordinasi, dan dukungan teknis bagi DJ Migas	Pembangunan SPBG (gas untuk transpotasi)	FEED 1 kota	FEED 1 kota / 7 SPBG	FEED 1 kota / 7 SPBG	FEED 1 kota / 7 SPBG	FEED 1 kota	367,20	KESDM					

<b>PRIORITAS 9</b>		<b>PROGRAM AKSI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN BENCANA</b>					
TEMA PRIORITAS	<i>Konservasi dan pemanfaatan lingkungan hidup mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang keberlanjutan, disertai penguasaan dan pengelolaan risiko bencana untuk mengantisipasi perubahan iklim</i>						
PENANGGUNGJAWAB	Menteri Negara Lingkungan Hidup						
BEKERJASAMA DENGAN	Menteri Kehutanan; Menteri Negara Riset dan Teknologi; Menteri Keuangan; Menteri Perdagangan						

No	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp Miliar)	K/L					
				2010	2011	2012	2013	2014							
<b>1. PERUBAHAN IKLIM:</b>															
Peningkatan keberdayaan pengelolaan lahan gambut, peningkatan hasil rehabilitasi seluas 500,000 ha per tahun, dan penekanan laju deforestasi secara sungguh-sungguh diantaranya melalui kerjasama lintas kementerian terkait serta optimalisasi dan efisiensi sumber pendanaan seperti dana luran Hak Pemanfaatan Hutan (IHPH), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), dan Dana Reboisasi															
1	Peningkatan keberdayaan pengelolaan lahan gambut														
a.	Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dan Reklamasi Hutan di DAS Prioritas	Berkurangnya lahan kritis melalui rehabilitasi dan reklamasi hutan	Fasilitasi rehabilitasi hutan mangrove, gambut dan rawa seluas 295.000 ha	60.000 Ha	120.000 Ha	180.000 Ha	240.000 Ha	295.000 Ha	375 *)Sudah termasuk dalam substansi inti 1.2	Kemenhut					

No	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp Miliar)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
b.	Pengelolaan Kualitas Air dan Kawasan Gambut	Tersedianya perangkat kebijakan pengelolaan kualitas ekosistem gambut, yang terpadu dan bersifat lintas K/L, antara lain dengan Kemen PU, Kemenhut, Kementan, dan Pemda	Penyelesaian pemetaan kesatuan hidrologi gambut di 8 provinsi yang terkoordinasi dengan K/L terkait Verifikasi karakteristik ekosistem gambut di 5 provinsi yang terkoordinasi antar K/L terkait	20%	40%	60%	80%	100%	53,0	KLH
2	<b>Peningkatan hasil rehabilitasi seluas 500.000 ha per tahun</b>									
a.	Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dan Reklamasi Hutan di DAS Prioritas	Berkurangnya lahan kritis melalui rehabilitasi dan reklamasi hutan	Fasilitasi dan pelaksanaan rehabilitasi hutan pada DAS prioritas seluas 800 ribu ha  Fasilitasi rehabilitasi lahan kritis pada DAS prioritas seluas 500 ribu ha  Fasilitasi pengembangan hutan kota seluas 5 ribu ha  Fasilitasi rehabilitasi hutan mangrove, gambut dan rawa seluas 295.000 ha	160.000 Ha	320.000 Ha	480.000 Ha	640.000 Ha	800.000 Ha	8,222.5	Kemenhut
b.	Pengembangan Perhutanan Sosial	Meningkatnya pengelolaan hutan melalui pemberdayaan masyarakat	Fasilitasi penetapan areal kerja pengelolaan hutan kemasyarakatan (HKm) seluas 2 juta ha  Fasilitasi 500 kelompok/unit ijin usaha pengelolaan HKm	400.000 ha	800.000 ha	1.200.000 ha	1.600.000 ha	2.000.000 ha	6,239.2	Kemenhut

No	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp Miliar)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
			Fasilitasi 50 unit kemitraan usaha HKm	10 Unit	20 Unit	30 Unit	40 Unit	50 Unit		
			Fasilitasi dukungan kelembagaan ketahanan pangan di 32 provinsi	4 Prov	8 Prov	16 Prov	22 Prov	32 Prov		
			Fasilitasi pembangunan hutan rakyat Kemitraan untuk bahan baku kayu industri pertukangan seluas 250.000 ha	50.000 ha	100.000 ha	150.000 ha	200.000 ha	250.000 ha		
			Fasilitasi pembentukan dan berfungsinya sentra HHBK Unggulan di 30 kabupaten	6 Kab	12 Kab	18 Kab	24 Kab	30 Kab		
			Areal kerja hutan desa seluas 500.000 ha	100.000 ha	200.000 ha	300.000 ha	400.000 ha	500.000 ha		
c.	Peningkatan Konservasi dan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan	Meningkatnya kualitas kebijakan konservasi dan pengendalian kerusakan hutan dan lahan yang terpadu dan bersifat lintas K/L, antara lain dengan Kemenhut, BPN dan Pemda	Jumlah kebijakan konservasi dan pengendalian kerusakan hutan dan lahan yang ditetapkan/ diterbitkan (kriteria dan pedoman) yang terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait	3	3	3	3	3	143,3	KLH
			Data sebaran hotspot di 8 Provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan yang didiseminasi ke K/L dan daerah terkait	80%	80%	80%	80%	80%		
			Diterapkannya mekanisme pencegahan kebakaran hutan dan lahan di 8 Provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan yang terkoordinasi antar K/L dan daerah	8	8	8	8	8		
			Data kondisi kerusakan hutan dan lahan pada 11 DAS prioritas dan berpotensi rawan longsor yang terkoordinasi antar K/L terkait	80%	80%	80%	80%	80%		
			Data tutupan lahan dan perubahan penggunaan lahan ( <i>land</i> )	100%	100%	100%	100%	100%		

No	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp Miliar)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
			<i>use change) melalui Program Menuju Indonesia Hijau</i>							
			Jumlah provinsi (pendekatan ekosistem) yang dipantau sesuai data potensi dan kejadian bencana	10	15	20	25	30		
			% rekomendasi kebijakan konservasi dan pengendalian kerusakan hutan dan lahan yang diimplementasikan daerah dari jumlah propinsi yang dipantau setiap tahunnya	50%	50%	50%	50%	50%		
c.	Pengawasan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang	Terlaksananya pengawasan pemanfaatan ruang dan evaluasi pemanfaatan ruang berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang terpadu dan bersifat lintas K/L	% penyelesaian dokumen konsep, naskah akademis, pedoman dan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan [dari 12 dokumen yang direncanakan] yang terkoordinasi antar K/L	16,7%	41,7%	58,3%	83,3%	100%	95,7	KLH
			% penyelesaian dokumen pedoman kebijakan pengawasan pemanfaatan ruang berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan [dari 5 dokumen yang direncanakan] yang terkoordinasi antar K/L	20%	40%	60%	80%	100%		
			% penyelesaian kajian daya dukung 4 pulau besar yang terkoordinasi antar K/L	0	25%	50%	75%	100%		
			% penyelesaian kajian penyimpangan pemanfaatan ruang dan dampaknya terhadap lingkungan kerusakan dan bencana [dari 20 lokasi yang direncanakan] dan didiseminasi kepada K/L dan daerah terkait	0	25%	50%	75%	100%		
			% penerapan instrumen daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dalam perencanaan ruang dan evaluasi pemanfaatan ruang di kabupaten dan propinsi [dari 11	6,7%	26,7%	46,7%	66,7%	100%		

No	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp Miliar)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014		
			kabupaten dan 4 propinsi yang direncanakan] yang terkoordinasi antar K/L dan daerah							
			% penerapan instrumen daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di wilayah ekoregion yang terkoordinasi antar K/L dan daerah	0	25%	50%	75%	100%		
			Jumlah provinsi dilaksanakannya pengawasan dan evaluasi pemanfaatan ruang dan alih fungsi lahan/ruang dan pelaksanaan instrumen pengawasan pemanfaatan ruang dan kawasan lahan gambut, hutan dan DAS prioritas untuk menunjang pencapaian Prioritas Nasional 9 RPJMN 2010-2014	2	33	33	33	33		
			% PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pengawasan pemanfaatan ruang [dari 250 orang PPLHD yang direncanakan]	10%	33%	55%	78%	100%		
d.	Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan dan Jenis	Terkelolanya 20% kawasan ekosistem terumbu karang, lamun, mangrove dan 15 jenis biota perairan yang terancam punah	Kawasan konservasi laut dan kawasan konservasi perairan tawar dan payau yang dikelola secara berkelanjutan seluas 4,5 juta ha	900 ribu ha	900 ribu ha	900 ribu ha	900 ribu ha	900 ribu ha	745,46	KKP
3	Penekanan laju deforestasi secara sungguh-sungguh diantaranya melalui kerjasama lintas kementerian terkait serta optimalisasi dan efisiensi sumber pendanaan seperti dana luran Hak Pemanfaatan Hutan (IHPH), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), dan Dana Reboisasi									

No	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp Miliar)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
a.	Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dan Reklamasi Hutan di DAS Prioritas	Berkurangnya lahan kritis melalui rehabilitasi dan reklamasi hutan	Fasilitasi dan pelaksanaan rehabilitasi hutan pada DAS prioritas seluas 800 ribu ha	160.000 Ha	320.000 Ha	480.000 Ha	640.000 Ha	800.000 Ha	*)Sudah termasuk dalam substansi inti 1.2	Kemenhut
			Fasilitasi rehabilitasi lahan kritis pada DAS prioritas seluas 500 ribu ha	100.000 Ha	200.000 Ha	300.000 Ha	400.000 Ha	500.000 Ha		
			Fasilitasi pengembangan hutan kota seluas 5 ribu ha	1.000 Ha	2.000 Ha	3.000 Ha	4.000 Ha	5.000 Ha		
			Fasilitasi rehabilitasi hutan mangrove, gambut dan rawa seluas 295.000 ha	60.000 Ha	120.000 Ha	180.000 Ha	240.000 Ha	295.000 Ha		
b.	Peningkatan Konservasi dan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan	Meningkatnya kualitas kebijakan konservasi dan pengendalian kerusakan hutan dan lahan yang terpadu dan bersifat lintas K/L, antara lain dengan Kemenhut, BPN dan Pemda	Jumlah kebijakan konservasi dan pengendalian kerusakan hutan dan lahan yang ditetapkan/ diterbitkan (kriteria dan pedoman) yang terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait	3	3	3	3	3	*)Sudah termasuk dalam substansi inti 1.2	KLH
			Data sebaran hotspot di 8 Provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan yang didiseminasikan ke K/L dan daerah terkait	80%	80%	80%	80%	80%		
			Diterapkannya mekanisme pencegahan kebakaran hutan dan lahan di 8 Provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan yang terkoordinasi antar K/L dan daerah	8	8	8	8	8		
			Data kondisi kerusakan hutan dan lahan pada 11 DAS prioritas dan berpotensi rawan longsor yang terkoordinasi antar K/L terkait	80%	80%	80%	80%	80%		
			Data tutupan lahan dan perubahan penggunaan lahan ( <i>land</i> )	100%	100%	100%	100%	100%		

No	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp Miliar)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
			<i>use change) melalui Program Menuju Indonesia Hijau</i>							
			Jumlah provinsi (pendekatan ekosistem) yang dipantau sesuai data potensi dan kejadian bencana	10	15	20	25	30		
			% rekomendasi kebijakan konservasi dan pengendalian kerusakan hutan dan lahan yang diimplementasikan daerah dari jumlah propinsi yang dipantau setiap tahunnya	50%	50%	50%	50%	50%		
C	Pengawasan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang	Terlaksananya pengawasan pemanfaatan ruang dan evaluasi pemanfaatan ruang berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang terpadu dan bersifat lintas K/L	% penyelesaian dokumen konsep, naskah akademis, pedoman dan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan [dari 12 dokumen yang direncanakan] yang terkoordinasi antar K/L	16,7%	41,7%	58,3%	83,3%	100%	*)Sudah termasuk dalam substansi inti 1.2	KLH
			% penyelesaian dokumen pedoman kebijakan pengawasan pemanfaatan ruang berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan [dari 5 dokumen yang direncanakan] yang terkoordinasi antar K/L	20%	40%	60%	80%	100%		
			% penyelesaian kajian daya dukung 4 pulau besar yang terkoordinasi antar K/L	0	25%	50%	75%	100%		
			% penyelesaian kajian penyimpangan pemanfaatan ruang dan dampaknya terhadap lingkungan kerusakan dan bencana [dari 20 lokasi yang direncanakan] dan didiseminasi kepada K/L dan daerah terkait	0	25%	50%	75%	100%		
			% penerapan instrumen daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dalam perencanaan ruang dan evaluasi pemanfaatan ruang di kabupaten dan propinsi [dari 11	6,7%	26,7%	46,7%	66,7%	100%		

No	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp Miliar)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014		
			kabupaten dan 4 propinsi yang direncanakan] yang terkoordinasi antar K/L dan daerah							
			% penerapan instrumen daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di wilayah ekoregion yang terkoordinasi antar K/L dan daerah	0	25%	50%	75%	100%		
			Jumlah provinsi dilaksanakannya pengawasan dan evaluasi pemanfaatan ruang dan alih fungsi lahan/ruang dan pelaksanaan instrumen pengawasan pemanfaatan ruang dan kawasan lahan gambut, hutan dan DAS prioritas untuk menunjang pencapaian Prioritas Nasional 9 RPJMN 2010-2014	2	33	33	33	33		
			% PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pengawasan pemanfaatan ruang [dari 250 orang PPLHD yang direncanakan]	10%	33%	55%	78%	100%		
d.	Penguatan Kebijakan Iptek dan Dukungan Litbang untuk Penurunan Emisi gas CO2 dan Adaptasi Perubahan Iklim	Kebijakan dukungan litbang untuk penurunan emisi gas CO2 dan adaptasi perubahan iklim	Jumlah kebijakan	5	5	5	5	5	49,00	KRT
<b>2. PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN:</b>										
Pengendalian Kerusakan Lingkungan: Penurunan beban pencemaran lingkungan melalui pengawasan ketataan pengendalian pencemaran air limbah dan emisi di 680 kegiatan industri dan jasa pada 2010 dan terus berlanjut; penurunan jumlah hotspot kebakaran hutan sebesar 20% per tahun dan penurunan tingkat polusi keseluruhan sebesar 50% pada 2014; penghentian kerusakan lingkungan di 11 Daerah Aliran Sungai yang rawan bencana mulai 2010 dan seterusnya										
1	Penurunan beban pencemaran lingkungan melalui pengawasan ketataan pengendalian pencemaran air limbah dan emisi di 680 kegiatan industri									

No	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp Miliar)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
	dan jasa pada 2010 dan terus berlanjut;									
a.	Pengendalian Pencemaran Air	Menurunnya beban pencemar air dari industri yang dipantau dan diawasi	Jumlah industri pertambangan, energi dan migas yang dipantau dan diawasi	200	205	210	215	220	142,0	KLH
			Jumlah agroindustri yang dipantau dan diawasi	220	220	225	235	245		
			Jumlah industri manufaktur yang dipantau dan diawasi	260	296	310	320	330		
			Jumlah industri yang taat terhadap peraturan LH	480	555	606	660	720		
			Jumlah izin pembuangan air limbah ke laut yang dikeluarkan	20	20	20	20	20		
			Jumlah pedoman teknis/peraturan perundang-undangan	2	6	6	6	6		
b.	Pengendalian Pencemaran Udara	Menurunnya beban pencemar udara dari industri yang dipantau dan diawasi	Jumlah industri pertambangan, energi dan migas yang dipantau dan diawasi	200	205	210	215	220	120,84	KLH
			Jumlah agroindustri yang dipantau dan diawasi	220	220	225	235	245		
			Jumlah industri manufaktur yang dipantau dan diawasi	260	296	310	320	330		
			Jumlah industri yang taat terhadap peraturan LH	480	555	606	660	720		
			Jumlah penurunan beban pencemar udara dari industri yang dipantau dan diawasi	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%		
			Jumlah pedoman teknis/peraturan perundang-undangan	2	6	6	6	6		
c.	Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Kegiatan Pertambangan, Energi, Minyak dan Gas	Meningkatnya kebijakan dan penaatan pengelolaan B3 dan limbah B3 serta meningkatnya jumlah limbah B3 yang dikelola dalam kegiatan pertambangan, energi, minyak dan gas	Jumlah produk perumusan kebijakan dan/atau standar dan/atau pedoman pengelolaan B3 & limbah B3 kegiatan pertambangan, energi, minyak dan gas [Draft Permen LH]	1	1	1	1	1	106,0	KLH
			Jumlah kegiatan pemantauan dan/atau analisis dan/atau evaluasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan B3 & limbah B3	1	1	1	1	1		

No	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp Miliar)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
			kegiatan pertambangan, energi, minyak dan gas							
			Jumlah perusahaan yang mendapat pengawasan kinerja penaanan pengelolaan B3 & limbah B3 kegiatan pertambangan, energi, minyak dan gas	200	205	210	215	220		
			Jumlah daerah dan/ atau perusahaan yang mendapat bimbingan teknis pengelolaan B3 & limbah B3 kegiatan pertambangan, energi, minyak dan gas	5	10	10	10	10		
			Jumlah lingkup kegiatan dari seluruh ketentuan konvensi internasional pengelolaan B3 dan Limbah B3 yang ada	3	4	4	4	4		
d.	Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Manufaktur, Agro industri dan Jasa	Meningkatnya kebijakan dan pertimbangan teknis dalam pengawasan penaanan pengelolaan limbah B3 serta meningkatnya jumlah limbah B3 yang dikelola dalam kegiatan manufaktur, agroindustri dan jasa	Jumlah kebijakan, pedoman teknis yang diterapkan dalam Pengelolaan Limbah B3 pada kegiatan manufaktur dan agroindustri [dalam bentuk pedoman]	2	2	2	2	2	107,83	KLH
			Jumlah pengawasan kinerja industri yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	480	516	535	555	575		
			Jumlah daerah dan/ atau perusahaan yang mendapat bimbingan teknis pengelolaan B3 dan limbah B3 kegiatan manufaktur agroindustri dan jasa	5	10	10	10	10		
			Jumlah lingkup kegiatan dalam pelaksanaan ketentuan konvensi internasional pengelolaan B3 dan Limbah B3 (dari seluruh ketentuan Internasional yang ada)	4	4	4	4	4		
e.	Administrasi Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Meningkatnya penaanan pengelolaan bahan dan limbah B3	Jumlah kebijakan/ pedoman/ standar/ data base yang dihasilkan dalam rangka kegiatan administrasi pengelolaan B3 & limbah B3 [Permen LH dan pedoman]	2	3	3	3	3	88,80	KLH

No	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp Miliar)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
			Jumlah registrasi B3 dan rekomendasi, ijin dan notifikasi pengelolaan limbah B3	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
			Jumlah porpinsi yang mendapat bimbingan teknis administrasi, pengelolaan B3 dan limbah B3	5	33	33	33	33		
			Jumlah kegiatan dalam pelaksanaan ketentuan konvensi internasional pengelolaan B3 dan Limbah B3 (dari seluruh ketentuan Internasional yang ada)	4	4	4	4	4		
f.	Penelitian Oseanografi	Pengembangan Sistem Informasi dan penelitian Kerusakan terumbu karang	Paket informasi dasar	3	3	3	3	3	70,40	LIPI
2	<b>Penurunan jumlah <i>hotspot</i> kebakaran hutan sebesar 20% per tahun</b>									
a.	Pengendalian kebakaran hutan	Meningkatkan sistem pencegahan pemadaman, penanggulangan, dampak kebakaran hutan dan lahan	Hotspot di Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, dan Pulau Sulawesi berkurang 20% setiap tahun. Luas kawasan hutan yang terbakar ditekan hingga 50% dibandingkan kondisi tahun 2008	20%	36%	48,8%	59,2%	67,2%	1.275,00	Kemenhut
b.	Peningkatan Konservasi dan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan	Tersedianya kebijakan, data dan informasi untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang terpadu dan terkoordinasi dengan K/L terkait	Tersedianya data sebaran hotspot di 8 Provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan yang didiseminasi ke K/L dan daerah terkait, sebagai indikator keberhasilan pelaksanaan mekanisme pencegahan kebakaran hutan	80%	80%	80%	80%	80%	31,96 * Merupakan bagian dari total pagu kegiatan dalam substansi inti 1.2	KLH

No	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp Miliar)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
3	Penurunan tingkat polusi keseluruhan sebesar 50% pada 2014									
a.	Pengendalian Pencemaran Udara	Menurunnya beban pencemar udara dari industri yang dipantau dan diawasi	Jumlah industri pertambangan, energi dan migas yang dipantau dan diawasi Jumlah agroindustri yang dipantau dan diawasi Jumlah industri manufaktur yang dipantau dan diawasi Jumlah industri yang taat terhadap peraturan LH Jumlah penurunan beban pencemar udara dari industri yang dipantau dan diawasi Jumlah pedoman teknis/ peraturan perundang-undangan	200 220 260 480 2,5% 2	205 220 296 555 2,5% 6	210 225 310 606 2,5% 6	215 235 320 660 2,5% 6	220 245 330 720 2,5% 6	* Sudah termasuk dalam substansi inti 2.1	KLH
b.	Pengendalian Pencemaran Udara dari Emisi dan Kebisingan Kendaraan Bermotor	Menurunnya emisi dan kebisingan dari kendaraan di prioritas kota-kota yang dipantau	Jumlah peraturan perundangan yang ditetapkan Jumlah daerah (provinsi/ kota) yang difasilitasi dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang pengendalian pencemaran udara khususnya sumber bergerak Jumlah kota yang difasilitasi dalam penerapan pemeriksaan emisi dan perawatan kendaraan bermotor (P&P) Jumlah kebijakan sektor yang difasilitasi dalam mendukung reduksi emisi (penetapan standar emisi dan kebisingan, bahan bakar, manajemen transportasi, kendaraan tidak bermotor (NMT), uji emisi bagi kendaraan pribadi, land use planning)	2 4 4 2	10 8 8 2	7 8 8 2	10 8 8 2	8 8 8 2	104,8	KLH

No	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp Miliar)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
			Jumlah kota yang dievaluasi kualitas udaranya	16	20	24	28	36		
			Jumlah pembinaan teknis dalam pengendalian pencemaran sumber bergerak	5	5	5	5	5		
c.	Pengendalian Pencemaran Air	Menurunnya beban pencemar air dari industri yang dipantau dan diawasi	Jumlah industri pertambangan, energi dan migas yang dipantau dan diawasi	200	205	210	215	220	* Sudah termasuk dalam substansi inti 2.1	KLH
			Jumlah agroindustri yang dipantau dan diawasi	220	220	225	235	245		
			Jumlah industri manufaktur yang dipantau dan diawasi	260	296	310	320	330		
			Jumlah industri yang taat terhadap peraturan LH	480	555	606	660	720		
			Jumlah izin pembuangan air limbah ke laut yang dikeluarkan	20	20	20	20	20		
			Jumlah pedoman teknis/peraturan perundang-undangan	2	6	6	6	6		
d.	Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Kegiatan Pertambangan, Energi, Minyak dan Gas	Meningkatnya kebijakan dan penaatan pengelolaan B3 dan limbah B3 serta meningkatnya jumlah limbah B3 yang dikelola dalam kegiatan pertambangan, energi, minyak dan gas	Jumlah produk perumusan kebijakan dan/atau standar dan/atau pedoman pengelolaan B3 & limbah B3 kegiatan pertambangan, energi, minyak dan gas [Draft Permen LH]	1	1	1	1	1	* Sudah termasuk pagu 2.1	KLH
			Jumlah kegiatan pemantauan dan/atau analisis dan/atau evaluasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan B3 & limbah B3 kegiatan pertambangan, energi, minyak dan gas	1	1	1	1	1		
			Jumlah perusahaan yang mendapat pengawasan kinerja penaatan pengelolaan B3 & limbah B3 kegiatan pertambangan, energi, minyak dan gas	200	205	210	215	220		
			Jumlah daerah dan/ atau perusahaan yang mendapat bimbingan teknis pengelolaan B3 & limbah B3 kegiatan pertambangan, energi, minyak dan gas	5	10	10	10	10		

No	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp Miliar)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
			Jumlah lingkup kegiatan dari seluruh ketentuan konvensi internasional pengelolaan B3 dan Limbah B3 yang ada	3	4	4	4	4		
e.	Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Manufaktur, Agro Industri dan Jasa	Meningkatnya kebijakan dan pertimbangan teknis dalam pengawasan penataan pengelolaan limbah B3 serta meningkatnya jumlah limbah B3 yang dikelola dalam kegiatan manufaktur, agroindustri dan jasa	Jumlah kebijakan, pedoman teknis yang diterapkan dalam Pengelolaan Limbah B3 pada kegiatan manufaktur dan agroindustri [dalam bentuk pedoman]	2	2	2	2	2	* Sudah termasuk pagu 2.1	KLH
			Jumlah pengawasan kinerja industri yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	480	516	535	555	575		
			Jumlah daerah dan/ atau perusahaan yang mendapat bimbingan teknis pengelolaan B3 dan limbah B3 kegiatan manufaktur agroindustri dan jasa	5	10	10	10	10		
			Jumlah lingkup kegiatan dalam pelaksanaan ketentuan konvensi internasional pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah B3 (dari seluruh ketentuan Internasional yang ada)	4	4	4	4	4		
f.	Administrasi Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Meningkatnya penataan pengelolaan bahan dan limbah B3	Jumlah kebijakan/ pedoman/ standar/ data base yang dihasilkan dalam rangka kegiatan administrasi pengelolaan B3 & limbah B3 [Permen LH dan pedoman]	2	3	3	3	3	* Sudah termasuk pagu 2.1	KLH
			Jumlah registrasi B3 dan rekomendasi, ijin dan notifikasi pengelolaan limbah B3	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
			Jumlah porpsi yang mendapat bimbingan teknis administrasi pengelolaan B3 dan limbah B3	5	33	33	33	33		
			Jumlah kegiatan dalam pelaksanaan ketentuan konvensi internasional pengelolaan B3 dan Limbah B3 (dari seluruh	4	4	4	4	4		

No	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp Miliar)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
			kelentuan Internasional yang ada)							
g.	Penanganan Kasus Lingkungan	Meningkatnya kualitas penanganan kasus lingkungan	% pengaduan masyarakat yang dikelola melalui penerimaan, penelaahan dan klasifikasi, penerusan kepada pihak terkait yang berwenang, atau ditangani langsung	100%	100%	100%	100%	100%	89,65	KLH
			% dugaan tindak pidana LH yang ditindaklanjuti melalui proses penyelidikan dan penyidikan (pulbaket) sampai proses pengadilan [perkiraan 100 kasus per tahun]	80%	85%	90%	95%	100%		
			% penanganan kasus perdata LH yang ditindaklanjuti secara perdata di dalam maupun di luar pengadilan [perkiraan 100 kasus per tahun]	80%	85%	90%	95%	100%		
			Jumlah kasus lingkungan yang terevaluasi dan terekamasi	2	4	4	4	4		
h.	Peningkatan Instrumen Ekonomi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	Meningkatkan kualitas kebijakan insentif dan pendanaan lingkungan dalam pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah penerimaan target program pinjaman lunak terhadap % jumlah UMKM yang mengajukan permohonan pinjaman	90%	90%				96,5	KLH
			% telaahan teknis diterima menjadi rekomendasi teknis pinjaman lunak lingkungan (90-100 proposal per tahun)	80%	80%					
			% jumlah pemantauan terhadap UMKM yang telah mendapat pinjaman yang sudah jatuh tempo	80%	80%	80%	80%	80%		
			Jumlah pedoman dan fasilitas teknis yang terkait dengan valuasi ekonomi SDA dan LH	5	5	6	6	6		
			Jumlah dokumen tentang bahan rumusan kebijakan insentif dan pendanaan lingkungan	4	4	4	4	4		

No	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp Miliar)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
			% Bimbingan teknis pengembangan instrument ekonomi dan perhitungan PDRB Hijau di daerah iklim	100%	100%	100%	100%	100%		
i.	Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Perikanan	Meningkatnya usaha perikanan yang sesuai ketentuan	Jumlah usaha penangkapan ikan di wilayah bagian barat yang sesuai ketentuan	280 kapal	880 kapal	1.480 kapal	2.080 kapal	2.680 kapal	170,10	KKP
			Jumlah usaha penangkapan ikan di wilayah bagian timur yang sesuai ketentuan	180 kapal	563 kapal	946 kapal	1.329 kapal	1.712 kapal		
j.	Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Kelautan	Meningkatnya wilayah perairan Indonesia yang bebas kegiatan ilegal dan merusak	Jumlah wilayah perairan yang bebas kegiatan perusakan ekosistem perairan	4 wilayah	9 wilayah	15 wilayah	21 wilayah	27 wilayah	86,95	KKP
			Jumlah wilayah perairan yang bebas kegiatan pencemaran	7 wilayah perairan	14 wilayah perairan	21 wilayah perairan	28 wilayah perairan	40 wilayah perairan		
4	Penghentian kerusakan lingkungan di 13 Daerah Aliran Sungai yang rawan bencana mulai 2010 dan seterusnya									
a.	Pembinaan Penyelenggaraan Pengelolaan DAS	Terselenggaranya pengelolaan DAS secara terpadu pada DAS prioritas	Rencana pengelolaan DAS terpadu di 108 DAS prioritas	22 DAS	44 DAS	66 DAS	88 DAS	108 DAS	721,9	Kemenhut
			Terbangunnya base line data pengelolaan DAS di 36 BPDAS	7 BPDAS	14 BPDAS	21 BPDAS	28 BPDAS	36 BPDAS		
			Tersedianya data dan peta lahan kritis di 36 BPDAS	7 BPDAS	14 BPDAS	21 BPDAS	28 BPDAS	36 BPDAS		
b.	Pengelolaan Kualitas Air dan Kawasan Gambut	Tersedianya perangkat kebijakan	% penyelarasan penetapan kelas air di tingkat kabupaten/ kota	25%	25%	20%	20%	10%	97,54	KLH

No	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp Miliar)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014		
		pengelolaan kualitas air yang terpadu dan bersifat lintas K/L	untuk 13 sungai-sungai prioritas dari 119 kab/kota, yang terkoordinasi lintas K/L dan daerah Jumlah pembinaan teknis pengelolaan kualitas air terhadap 119 kabupaten/ kota di 13 DAS yang terkoordinasi dengan K/L terkait							
				20%	20%	20%	20%	20%		
<b>3. SISTEM PERINGATAN DINI:</b> Penjaminan berjalannya fungsi Sistem Peringatan Dini Tsunami (TEWS) dan Sistem Peringatan Dini Cuaca (MEWS) yang dimulai pada 2010, serta Sistem Peringatan Dini Iklim (CEWS) pada 2013										
a.	Pengelolaan Meteorologi Publik BMKG	Meningkatnya pelayanan data dan informasi meteorologi publik serta peringatan dini cuaca ekstrim	Persentase tingkat kemampuan pelayanan data dan informasi meteorologi publik	50%	60%	70%	75%	80%	899,67	BMKG
			Persentase tingkat kemampuan pelayanan data dan informasi potensi kebakaran hutan	50%	60%	70%	75%	80%		
			Persentase tingkat kemampuan pelayanan data dan informasi cuaca ekstrim	50%	60%	70%	75%	80%		
b.	Pengelolaan Gempa Bumi dan Tsunami BMKG	Tersedianya kebijakan teknis dalam penanganan penyediaan informasi gempa bumi dan tsunami	Kesinambungan (sustainability) Ina-TEWS	100%	100%	100%	100%	100%	515,04	BMKG
			Kesinambungan sistem pengamatan di bidang gempabumi dan tsunami	90%	90%	90%	80%	80%		
			Kesinambungan sistem analisa data di bidang gempabumi dan tsunami	90%	90%	90%	90%	90%		
c.	Pengelolaan Iklim Agroklimat dan Iklim Maritim BMKG	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan data dan informasi di bidang iklim agroklimat dan iklim maritim	Jumlah pelayanan informasi perubahan iklim dan kualitas udara	75%	85%	90%	95%	95%	151,55	BMKG
			% pengguna informasi perubahan iklim dan kualitas udara	75%	80%	85%	90%	90%		

No	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp Miliar)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
d.	Pemetaan Dasar Kelautan dan Kedirgantaraan	Tersusunnya kebijakan pemetaan dasar kelautan dan kedirgantaraan serta meningkatnya cakupan peta dasar kelautan dan kedirgantaraan	Peta Resmi tingkat peringatan Tsunami	2	2	3	4	5	1.9	Bakosurtanal
<b>4. PENANGGULANGAN BENCANA:</b>										
Peningkatan kemampuan penanggulangan bencana melalui: 1) penguatan kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat dalam usaha mitigasi risiko serta penanganan bencana dan bahaya kebakaran hutan di 33 propinsi, dan 2) pembentukan tim gerak cepat (unit khusus penanganan bencana) dengan dukungan peralatan dan alat transportasi yang memadai dengan basis di dua lokasi strategis (Jakarta dan Malang) yang dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia										
1	Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat dalam usaha pengurangan risiko, mitigasi dan penanganan bencana dan bahaya kebakaran hutan di 33 propinsi									
a.	Pengendalian Kebakaran Hutan	Meningkatkan sistem pencegahan pemanaman, penanggulangan, dampak kebakaran hutan dan lahan	Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bahaya kebakaran hutan di 30 DAOPS	6 DAOPS	12 DAOPS	18 DAOPS	24 DAOPS	30 DAOPS	*)Sudah termasuk dalam substansi inti 2.2	Kemenhut
b.	Penyiapan Peralatan dan Logistik Dikawasan Rawan Bencana	1. Pemenuhan kebutuhan logistik kebencanaan 2. Pendistribusian logistik kebencanaan pada derah bencana  1. Pemenuhan kebutuhan peralatan kebencanaan 2. Pendistribusian peralatan kebencanaan pada bencana	1. Terlaksananya pemenuhan kebutuhan logistik kebencanaan 2. Terlaksananya pendistribusian logistik kebencanaan pada derah bencana  1. Terlaksanannya pemenuhan kebutuhan peralatan kebencanaan 2. Terlaksananya pendistribusian peralatan kebencanaan pada derah bencana	16 Prov	17 Prov	17 Prov	77 kab/kota	77 kab/kota	230,18	BNPB
				16 Prov	17 Prov	17 Prov	77 Kab/Kota	77 Kab/Kota	144,82	

No	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp Miliar)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
c.	Pendayagunaan Pesisir dan Lautan	Terkelola 50 Kawasan minapolitan yang lahan terhadap ancaman kerusakan dan mempunyai infrastruktur dasar, serta 3 produk kelautan	Jumlah luasan kawasan pesisir rusak yang pulih kembali. Jumlah ragam dan volume produk kelautan yang dikembangkan BMKT (kapal) Garam (ribu ton) Deep sea water (ribu liter)	60 Ha	1.000 Ha	1.100 Ha	1.400 Ha	1.440 Ha	404,6	KKP
d.	Penelitian dan Pengembangan IPTEK kewilayahann, Dinamika dan Sumber Daya Nonhayati Pesisir dan Laut	Wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang teridentifikasi potensi, karakteristik, kebutuhan konservasi SDNHL dan fenomena alamnya serta jumlah rekomendasi pengelolaan dan model pemanfaatannya	Jumlah rekomendasi pengelolaan dan model pemanfaatannya Jumlah paket data terkait fenomena alam dan sumberdaya nonhayati	3	3	3	3	3	260,8	KKP

No	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp Miliar)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
				dan laut						
e.	Pendayagunaan Teknologi dan Pengembangan Kapasitas Untuk Mitigasi Bencana	Kebijakan pendaya-gunaan teknologi mitigasi bencana Tersusunnya <i>Standard Operation Procedure (SOP)</i>	Jumlah kebijakan Jumlah SOP	1 0	1 0	1 0	1 1	1 1	49,00	KRT
f.	Teknologi Pengendalian dan Mitigasi Dampak Pemanasan Global	Model fisik kolamkultur penyerap CO2, Penyempurnaan dan pengujian peralatan produksi flare	Rekomendasi kebijakan pengurangan emisi dan peningkatan <i>carbon sink</i> dan <i>pilot plant</i> fotobioreaktor untuk penyerap CO2	1	1	1	1	1	14,85	BPPT
g.	Penelitian Geoteknologi	Dokumen ilmiah kontribusi Indonesia untuk perubahan iklim	Paket pengumpulan data Paket dokumen ilmiah	1 Draft I		Draft II	Penyempurnaan	Final	10,00	LIPI
h.	Penelitian Oseanografi	Panduan dan sosialisasi kesiapsiagaan masyarakat	Paket	2	2	2	2	2	17,00	LIPI
i.	Pengembangan Konservasi Tumbuhan Indonesia - Kebun Raya Bogor	Konservasi ex-situ dalam bentuk kebun raya daerah	Kebun raya (paket kawasan)	2	2	3	3	4	25,00	LIPI
j.	Peningkatan Ketersediaan Data dan Informasi Survei Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup Matra Darat	Tersedianya data dan informasi spasial SDA dan LH tematik matra darat.	(1) Jumlah NLP produk inventarisasi, neraca, kebencanaan, kajian aplikasi teknosurta, <i>remote sensing</i> , dinamika geografis dan kajian wilayah, SDA dan LH matra darat yang diatur dan dikelola sebagai basis data pemetaan nasional. (2) Jumlah akses, diseminasi dan utilitas informasi data spasial tematik SDA dan LH matra darat.	25 33 Prov 6 K/L	50 33 Prov 6 K/L	50 33 Prov 6 K/L	50 33 Prov 6 K/L	50 33 Prov 6 K/L	31.9 12.7	Bakosurtanal

No	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp Miliar)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
k.	Peningkalan Ketersediaan Data dan Informasi Survei Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Matra Laut	Tersedianya data dan informasi spasial SDA dan LH tematik matra laut berupa produk inventarisasi, neraca, kajian aplikasi teknologi , <i>remote sensing/GIS</i> , dinamika geografis SDA	(1) Jumlah NLP dan tema dan laporan kajian wilayah LH matra laut yang diatur dan dikelola sebagai basis data pemetaan nasional	18 NLP (@5 tema) dan 4 dok	46.5	Bakosurtanal				
			(2) Jumlah akses, diseminasi dan utilitas informasi data spasial tematik SDA dan LH matra laut	33 Prov, 6 K/L	13.3					
I.	Penyusunan Atlas Sumberdaya dan Kajian Pengembangan Wilayah.	Tersedianya data dan informasi atlas serta kajian pengembangan wilayah.	(1) Jumlah dokumen kajian model spasial dinamis serta difusi, diseminasi atlas dan kajian pengembangan wilayah. (2) Jumlah provinsi dan kabupaten untuk pelaksanaan akses, utilitas data dan informasi atlas sumber-daya dan kajian pengembangan wilayah.	2	2	2	-	-	93.3	Bakosurtanal
m.	Pembangunan Data dan Informasi Geodesi Dan Geodinamika	Tersusunnya rancangan rumusan kebijakan teknis, rencana dan program di bidang pembangunan data dan informasi geodesi dan geodinamika	(1) Jumlah stasiun tetap GPS dan perawatan sistem (2) Jumlah pembangunan stasiun tetap GPS (3) Jumlah pembangunan stasiun pasang surut laut	78	90	90	100	100	40.5	Bakosurtanal
2	Pembentukan tim gerak cepat (unit khusus penanganan bencana) dengan dukungan alat transportasi yang memadai dengan basis 2 lokasi strategis (Jakarta-Malang) yang dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia								7.0	
a	Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Bencana	1. Terlaksananya pendampingan dalam penyusunan rencana kontijensi	1. Jumlah rencana kontijensi yang tersusun; dan 2. Terbentuknya satuan reaksi cepat (SRC-PB)	5	5	5	10	8	3.5	BNPB
									157,64	

No	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp Miliar)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014		
		2. Terlaksananya kesiapsiagaan dengan pembentukan satuan reaksi cepat penanggulangan bencana (SRC-PB)								
b.	Tanggap Darurat di Daerah Terkena Bencana	Koordinasi dan pelaksanaan penanganan tanggap darurat dipusat dan daerah	Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan penanganan tanggap darurat dipusat dan daerah	55	80	125	150	175	137,89	BNPB

<b>PRIORITAS 10</b>		<b>DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, TERLUAR, DAN PASCA-KONFLIK</b>					
TEMA PRIORITAS	<i>Pengutamaan dan penjaminan pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar serta keberlangsungan kehidupan damai di wilayah pasca-konflik</i>						
PENANGGUNGJAWAB	Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan						
BEKERJSAMA DENGAN	Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal; Menteri Pendidikan Nasional; Menteri Kesehatan; Menteri Pekerjaan Umum; Menteri Perhubungan; Menteri Negara Komunikasi dan Informatika; Menteri Pertahanan; Menteri Kelautan dan Perikanan; Menteri Luar Negeri; Menteri Sosial; Menteri Dalam Negeri; Menteri Pertahanan; Menteri Negara Riset dan Teknologi; Kepala Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional						

No	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN/PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU	K/L	
				2010	2011	2012	2013	2014			
<b>Substansi Inti 1, KEBIJAKAN :</b> Pelaksanaan kebijakan khusus dalam bidang infrastruktur dan pendukung kesejahteraan lainnya yang dapat mendorong pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca-konflik selambat-lambatnya dimulai pada 2011											
1	Pelaksanaan Koordinasi dan Evaluasi Hubungan Multilateral, Wilayah Negara, dan Tata Ruang Pertahanan, serta Koordinasi Pengelolaan Masyarakat Kawasan Tertinggal	Terlaksananya koordinasi dan evaluasi hubungan multilateral, wilayah negara dan tata ruang pertahanan, serta koordinasi penge-lolaan masyarakat kawasan	Jumlah rapat koordinasi	12 kali	26,824	Kemenko Polhukam					
			Jumlah pemantauan dan evaluasi	4 kali							

No	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN/PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
		tertinggal								
2	Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi daerah tertinggal di kawasan perbatasan	Meningkatnya koordinasi antar sektor dalam pengembangan daerah tertinggal di kawasan perbatasan	Jumlah rapat koordinasi Jumlah rencana aksi pengembangan daerah tertinggal di kawasan perbatasan yg dilaksanakan	4 27	4 27	4 27	4 27	4 27	147	KPDT
3	Pengembangan dan Penataaan Wilayah Administrasi dan Perbatasan	Meningkatnya sarpras dalam pelayanan umum pemerintahan	Prosentase jumlah kab/kota di wilayah perbatasan yang mendapat sarpras perbatasan antar negara	25	50	75	85	100	977,18	Kemendagri
		Meningkatnya kerjasama perbatasan antar negara (SOSEKMALINDO, JBC RI-RDTL, JBC RI-PNG)	Jumlah provinsi yang termasuk ke dalam perbatasan antar negara	6	6	6	6	6		
		Terfasilitasinya penguatan kelembagaan wilayah perbatasan antar negara	Prosentase penguatan kelembagaan di pusat dan daerah dalam rangka penanganan perbatasan antar negara	25	50	75	85	100		
		Meningkatnya kemampuan pengelolaan Pos Lintas Batas (PLB) internasional dan tradisional secara terpadu yang telah disepakati antar negara	Jumlah Pos lintas Batas tradisional dan internasional dengan kualitas manajemen pengelolaan serta fasilitas pendukung yang memadai	3	3	3	3	3		
		17 provinsi/ 100 rute	Jumlah rute yang terselenggara	tersebar			tersebar	tersebar		

No	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN/PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014		
4	Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pemerataan Pembangunan Sarana dan Prasarana Informatika	Layanan komunikasi dan informatika di wilayah non komersial	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Prosentase desa yang dilayani akses telekomunikasi</li> <li>▪ Prosentase desa yang dilayani akses internet</li> <li>▪ Prosentase ibukota provinsi yang memiliki regional <i>internet exchange</i></li> <li>▪ Prosentase ibukota provinsi yang memiliki <i>international internet exchange</i></li> <li>▪ Jumlah Desa Informasi yang dilengkapi radio komunitas</li> </ul>	100%	100%	100%	100%	100%	4.036,42	Kemenkominfo
5	Pembinaan pelayanan kesehatan komunitas*	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Jumlah puskesmas yg menjadi puskes-mas perawatan di perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar berpenduduk	76	81	86	91	96		Kemenkes

No	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN/ PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014		
6	Pelayanan Kesehatan Dasar Bagi Masyarakat Miskin (Jamkesmas)*	Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat miskin di puskesmas	Terselenggaranya pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat miskin di puskesmas prioritas dipernatahan dan pulau terluar	101	101	101	101	101		Kemenkes
7	Pembinaan Pelayanan Medik Spesialistik*	Meningkatnya pe-layanan medik spesialistik kepada masyarakat	Jumlah RS bergerak yang memberikan pelayanan kesehatan rujukan di DTPK	14	14	10	10	10		Kemenkes
8	Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan*	Meningkatnya perencanaan dan pendayagunaan SDM Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah tenaga kesehatan yang didaya gunakan di DTPK</li> <li>• Jumlah residen senior dan tenaga kesehatan yang diberikan insentif melalui pendayagunaan di DTPK</li> <li>• Jumlah residen senior yang didaya gunakan di DTPK</li> </ul>	1200 1900 700	1260 2050 790	1320 2210 890	1380 2370 990	1470 2560 1090		Kemenkes
9	Penyediaan guru untuk seluruh jenjang pendidikan	Tersedianya guru yang bermutu dan merata antar prov, kab, dan kota.	Jumlah guru penerima tunjangan khusus	30.000 orang	300	Kemendiknas				
10	Pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan	Meningkatnya pem berdayaan dan pengembangan pendidikan tenaga kependidikan	Percentase guru di daerah terpencil yang mengikuti peningkatan kompetensi dan profesionalisme	10%	20%	30%	40%	50%	*) Pagu termasuk dalam Prioritas 2	Kemendiknas
11	Pendayagunaan pulau-pulau kecil	Terwujudnya 200 pulau kecil yang memiliki infrastruktur mamadai,	Jumlah pulau kecil yang diidentifikasi dan ditetapkan potensinya termasuk pulau-pulau kecil terluar	20 pulau	55 pulau	60 pulau	50 pulau	20 pulau	578.49	KKP

No	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN/PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
		ekosistem baik, siap terhadap bencana, dan 25 di antaranya terinvestasi	Jumlah pulau kecil yang memiliki infrastuktur memadai secara terintegrasi, termasuk pulau-pulau kecil terluar	20 pulau	55 pulau	60 pulau	50 pulau	20 pulau		
12	Dukungan pengembangan dan penda-yagunaan teknologi pendukung pembangunan daerah tertinggal, terdepan dan pasca konflik	Kebijakan, penda-yagunaan teknologi pendukung pembangunan	Jumlah kebijakan	1	1	1	1	1	5,00	KRT
			Jumlah pilot pendukung teknologi untuk pembangunan daerah tertinggal		1	1	1	1		
13	Teknologi Efisiensi Pemanfaatan Sumberdaya Air	Termanfaatkannya teknologi efisiensi pemanfaatan sumberdaya air di daerah tertinggal	Rekomendasi dan pilot plant untuk pemanfaatan sumberdaya air	1	1	1	1	1	6,25	BPPT
<b>Substansi Inti 2, KERJASAMA INTERNASIONAL :</b> Pembentukan kerjasama dengan negara-negara tetangga dalam rangka pengamanan wilayah dan sumber daya kelautan										
1	Peningkatan operasional dan pemeliharaan kapal pengawas	Meningkatnya wilayah pengelolaan perikanan bebas <i>IUU fishing</i>	Jumlah wilayah pengelolaan perikanan bagian barat	3 WPP	3 WPP	4 WPP	5 WPP	5 WPP	1617.32	KKP
			Jumlah wilayah pengelolaan perikanan bagian timur	6 WPP						
2	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengawasan dan Pemantuan Kapal Perikanan	Terpenuhinya sarana dan prasarana pengawasan dengan rancang bangun dan sistem pemantauan yang terintegrasi dan tepat sasaran	Jumlah pemenuhan sarana pengawasan yang memadai secara terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu :						536.85	KKP
			• Kapal Pengawas	0	4	18	18	15		
			• Speedboat	15	32	28	32	30		
			• Stasiun Rabar Satelit	0	0	0	0	0		
			• Transmitter	0	1000	0	0	0		

No	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN/PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014		
			• Pemenuhan prasarana pengawasan yang memadai secara terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu							
			• Kantor dan bangunan pengawas	5	6	6	7	6		
			• Dermaga	2	6	6	7	6		
			• Pos pengawas	15	10	15	15	15		
3	Pembangunan sarana dan prasarana pertahanan di wilayah perbatasan	Meningkatnya sa-rana dan prasarana pertahanan di wilayah perbatasan	Jumlah sarana dan prasarana pertahanan di wilayah perbatasan	10%	6%	7%	9%	10%	12.86	Kemenhan
4	Operasi Pemberdayaan Wilayah Pertahanan	Terselenggaranya operasi wilayah per-tahanan	Prosentase kualitas dan kuantitas pembinaan wilayah pertahanan nasional	45%	44%	45%	46%	47%	54.68	Kemenhan
<b>Substansi Inti 3, KEUTUHAN WILAYAH:</b> Penyelesaian pemetaan wilayah perbatasan RI dengan Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste, dan Filipina pada 2010-2014										
1	Pelaksanaan Pe-rundingan Perbatasan RI-Malaysia, Singapura, Timor Leste, Filipina, Vietnam, dan Palau.	Terselenggaranya perundingan perbatasan RI-Malaysia, Singapura, Timor Leste, Filipina, Vietnam, dan Palau	Jumlah pelaksanaan perundingan perbatasan maritim dan darat	12 perundingan	12 perundinan	12 perundingan	12 perundingan	12 perundingan	12,82	Kemenlu
2	Pemetaan Batas wilayah	Tersusunnya kebijakan pemetaan batas wilayah dan meningkatnya cakupan peta batas wilayah	Jumlah NLP Peta batas wilayah negara (joint Mapping) kori-dor perbatasan darat RI-PNG, RI-Malaysia skala 1:50.000	-	12	12	15	5	4.4	BAKOSURTA NAL
			Jumlah NLP pemetaan kecamatan kawasan perbatasan darat RI-PNG, RI-Malaysia, dan RI-RDTL skala 1:50.000 serta skala 1:25.000	72	89	-	-	-	13.1	

No	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN/PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
			Jumlah pemetaan pulau-pulau terluar	25	20	13	-	-	2.4	
			Jumlah (Border Sign Post) BSP RI-RDTL	-	60	60	60	60	2.6	
			Jumlah Perapatan pilar batas RI-Malaysia	22	22	22	22	22	12.1	
			Jumlah Perapatan pilar batas RI-PNG	-	5	5	5	5	4.9	
			Jumlah Perapatan pilar batas RI-RDTL	60	60	60	60	60	6.1	
			Jumlah dokumen perundungan teknis batas darat	3	3	3	3	3	6.4	
			Jumlah dokumen perundungan teknis batas maritim	3	3	3	4	4	6	
3	Pengelolaan Pertanahan Provinsi	Data hasil inventarisasi Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu (WP3WT)	Inventarisasi Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu (WP3WT)	200 SP	187 SP	184 SP	157 SP	157 SP	98,76	BPN
4	Pengelolaan Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu (WP3WT) (di pusat)	Data hasil inventarisasi Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu (WP3WT)	Inventarisasi Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu (WP3WT)	1 Paket	1 Paket	1Paket	1 Paket	1 Paket	29,62	BPN
<b>Substansi Inti 4, DAERAH TERTINGGAL:</b> Pengentasan daerah tertinggal di sedikitnya 50 kabupaten paling lambat 2014										
1	Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Terpenuhinya kebutuhan dasar, aksesibilitas dan pelayanan sosial dasar bagi warga KAT	Tersedianya permukiman dan infrastruktur Pemberian jaminan hidup	2.515 unit 2.515 KK	2.650 unit 2.650 KK	3.150 unit 3.150 KK	3.850 unit 3.850 KK	4.250 unit 4.250 KK	763.6	Kemensos

No	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN/PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014		
2	Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi pusat produksi daerah tertinggal	1. Meningkatnya pengembangan pusat produksi di daerah tertinggal 2. Terfasilitasinya pemulihan ekonomi dan pengurangan kemiskinan, dengan menciptakan dan memberdayakan lingkungan pendukung bagi perbaikan kegiatan usaha dan pembangunan manusia	1. Persentase kabupaten di daerah tertinggal yang memiliki pusat produksi 2. (a). meningkatkan kemampuan dan keberdayaan petani skala kecil dan aparat pemerintah untuk mendukung kegiatan usaha berbasis kelompok di perdesaan, (b). Melaksanakan kegiatan perbaikan usaha pertanian dan usaha lainnya, (c). Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam perencanaan belanja publik, manajemen pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi program.	20%  100%	40%  100%	60%  100%	80%  	100%  	309.60	KPDT
3	Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi Pusat Pertumbuhan Daerah Tertinggal	1. Meningkatnya pengembangan pusat pertumbuhan di Daerah Tertinggal 2. Terfasilitasinya pembiayaan untuk pengembangan ekonomi	1. Persentase kabupaten di daerah tertinggal yang memiliki Pusat Pertumbuhan 2. Persentase kabupaten di daerah tertinggal yang mendapatkan fasilitasi pembiayaan untuk pengembangan ekonomi melalui (a) Berkembangnya sektor usaha swasta berorientasi pasar, (b) meningkatnya kualitas dan nilai tambah produksi pertanian, perikanan, dan perkebunan, (c). Meningkatkan perdagangan internasional, dan (d). Meningkatkan investasi dalam negeri maupun luar negeri	20%  100%	40%  100%	60%  100%	80%  	100%  	676.59	KPDT

No	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN/PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014		
4	Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi usaha mikro kecil menengah dan koperasi daerah tertinggal	Meningkatnya pengembangan usaha mikro kecil menengah dan koperasi di daerah tertinggal	Percentase daerah tertinggal yang mengembangkan usaha mikro kecil menengah dan koperasi di daerah tertinggal	20%	40%	60%	80%	100%	93.00	KPDT
5	Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi pendanaan dan kemitraan usaha daerah tertinggal	Meningkatnya ketersediaan sumber pendanaan dan pengembangan kemitraan usaha di daerah tertinggal	Percentase kabupaten didaerah tertinggal yang telah memiliki sumber pendanaan dan melaksanakan kemitraan usaha dengan daerah lain.	20%	40%	60%	80%	100%	92.00	KPDT
6	Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi investasi ekonomi daerah daerah tertinggal	Meningkatnya jumlah dan nilai investasi di daerah tertinggal	Percentase kabupaten di daerah tertinggal yang telah meningkatkan jumlah dan nilai investasi	20%	40%	60%	80%	100%	96.00	KPDT

No	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN/PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014		
7	Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan pemerintah daerah tertinggal , terdepan, terluar, dan pasca konflik.	1. Meningkatnya kemampuan sistem, organisasi, dan SDM pemerintahan daerah untuk mewujudkan good governance 2. (i) Meningkatnya kemampuan kelembagaan Pemda dan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya lokal. (ii) Meningkatnya kegiatan ekonomi, pengembangan sumberdaya manusia, dan infrastruktur lingkungan perdesaan secara terpadu di daerah tertinggal, dan (iii) Meningkatkan mobilitas penduduk dan arus barang antara daerah tertinggal ke pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik Mandiri	1. Persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memperoleh fasilitasi penguatan kelembagaan pemerintah daerah dan mengalami peningkatan indeks good governance 2. (i) Persentase jumlah kabupaten tertinggal yang kemampuan kelembagaan pembangunan masyarakat dan pemda meningkat dalam pengelolaan sumberdaya lokal, (ii) Persentase jumlah kawasan pembangunan perdesaan yang terpadu dari aspek ekonomi, sumberdaya manusia, dan infratruktur lingkungan, dan (iii) Persentase kabupaten didaerah tertinggal yang mengalami peningkatan mobilitas penduduk dan arus barang antara daerah tertinggal ke pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik	20%	40%	60%	80%	100%	1,227.49	KPDT

No	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN/PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014		
8	Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan sosial masyarakat daerah tertinggal	Meningkatnya kapasitas kelembagaan sosial masyarakat daerah tertinggal	Percentase kabupaten didaerah tertinggal yang memperoleh fasilitasi penguatan kelembagaan sosial masyarakat daerah tertinggal	20%	40%	60%	80%	100%	89.00	KPDT
9	Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi lembaga kerjasama antar daerah daerah tertinggal	Meningkatnya kerjasama antar lembaga pemerintah di daerah tertinggal	persentase kabupaten daerah tertinggal yang menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah lain.	20%	40%	60%	80%	100%	85.00	KPDT
10	Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi lembaga perekonomian daerah tertinggal	Meningkatnya kapasitas lembaga perekonomian daerah tertinggal	persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memperoleh fasilitasi penguatan lembaga perekonomian di daerah tertinggal	20%	40%	60%	80%	100%	77.00	KPDT
11	Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi kemitraan antar lembaga pemerintahan kabupaten daerah tertinggal	Meningkatnya kemitraan antar lembaga pemerintahan kabupaten daerah tertinggal	persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memperoleh fasilitasi penguatan kemitraan antar lembaga daerah tertinggal	20%	40%	60%	80%	100%	77.00	KPDT
12	Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi pembangunan infrastruktur kesehatan daerah tertinggal	Meningkatnya koordinasi pembangunan infrastruktur kesehatan daerah tertinggal	Percentase kabupaten didaerah tertinggal yang memperoleh fasilitasi pembangunan infrastruktur kesehatan daerah tertinggal	20%	40%	60%	80%	100%	70.00	KPDT
13	Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi Kesehatan Dasar, Lanjutan Daerah Tertinggal	Meningkatnya persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memiliki kebijakan di bidang Kesehatan Dasar	Percentase kabupaten didaerah tertinggal yang memiliki kebijakan di bidang Kesehatan Dasar Daerah Tertinggal	20%	40%	60%	80%	100%	62.00	KPDT

No	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN/PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014		
14	Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi pembangunan infrastruktur pendidikan daerah tertinggal	Meningkatnya persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memiliki kebijakan di bidang pembangunan infrastruktur pendidikan daerah tertinggal	Percentase kabupaten didaerah tertinggal yang memiliki kebijakan di bidang pembangunan infrastruktur pendidikan daerah tertinggal	20%	40%	60%	80%	100%	48.00	KPDT
15	Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi Pendidikan Dasar, Menengah Dan Kejuruan di Daerah Tertinggal	Meningkatnya persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memiliki kebijakan Pendidikan Dasar, Menengah Dan Kejuruan Daerah Tertinggal	Percentase kabupaten didaerah tertinggal yang memiliki kebijakan Pendidikan Dasar, Menengah Dan Kejuruan Daerah Tertinggal	20%	40%	60%	80%	100%	48.00	KPDT
16	Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi Pendidikan Luar Sekolah Daerah Tertinggal	Meningkatnya persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memiliki kebijakan di bidang Pendidikan Luar Sekolah Daerah Tertinggal	Percentase kabupaten didaerah tertinggal yang memiliki kebijakan di bidang Pendidikan Luar Sekolah Daerah Tertinggal	20%	40%	60%	80%	100%	87.00	KPDT
17	Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi pembangunan infrastruktur ekonomi daerah tertinggal	Meningkatnya persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memiliki kebijakan pembangunan infrastruktur ekonomi daerah tertinggal	Percentase kabupaten didaerah tertinggal yang memiliki kebijakan pembangunan infrastruktur ekonomi daerah tertinggal	20%	40%	60%	80%	100%	170.00	KPDT

No	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN/PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014		
18	Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi pembangunan infrastruktur energi daerah tertinggal	1. Meningkatnya persentase kabupaten daerah tertinggal yang memiliki kebijakan pembangunan infrastruktur energi daerah tertinggal 2. Meningkatnya Pemanfaatan Energi Matahari untuk Pengembangan Infrastruktur Dasar di Wilayah Perdesaan Tertinggal Terpencil	1. Persentase kabupaten daerah tertinggal yang memiliki kebijakan pembangunan infrastruktur energi daerah tertinggal 2. Persentase kabupaten daerah tertinggal yang memiliki database permintaan kelistrikan dengan menggunakan teknologi GIS dan memanfaatkan energi matahari untuk pengembangan infrastruktur serta peringkat kemampuan masyarakat yang dapat melakukan pemetaan Wilayah Rentan Perubahan Iklim dan Kegiatan Adaptasi Untuk Mengantisipasi Perubahan Iklim	20%	40%	60%	80%	100%	220.49	KPDT
19	Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi pembangunan infrastruktur telekomunikasi daerah tertinggal	Meningkatnya persentase kabupaten daerah tertinggal yang memiliki kebijakan pembangunan infrastruktur telekomunikasi daerah tertinggal	Persentase kabupaten daerah tertinggal yang memiliki kebijakan pembangunan infrastruktur telekomunikasi daerah tertinggal	20%	40%	60%	80%	100%	60.00	KPDT
20	Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Transportasi Daerah Tertinggal	Meningkatnya persentase kabupaten daerah tertinggal yang memiliki kebijakan di bidang pembangunan infrastruktur transportasi daerah tertinggal	Persentase kabupaten daerah tertinggal yang memiliki kebijakan di bidang pembangunan infrastruktur transportasi daerah tertinggal	20%	40%	60%	80%	100%	232.00	KPDT

No	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN/PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014		
21	Pengelolaan dan Penyelenggaraan kegiatan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut	Tersedianya kapal penumpang dan perintis 34 unit	Unit kapal	2	5	10	8	9	2.793,7	Kemenhub
		Tersedianya subsidi perintis angkutan laut 76 trayek di 17 provinsi	Trayek	60	64	68	72	76	2.135,0	
22	Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan	Pelayanan Keperintisan Angkutan Jalan (577 bus perintis dan 907 lintas perintis)	Lintas bus perintis	175	177	180	185	190	284,89	Kemenhub
			Unit bus perintis	37	100	120	150	170	200,25	
23	Pembangunan Sarana & Prasarana Transportasi SDP dan pengelolaan prasarana lalulintas SDP	Terbangunnya 20 Sarana Keperintisan	Jumlah Sarana	4	3	4	5	4	1.264,8	Kemenhub
		Tersedianya 510 pelayanan Keperintisan	Jumlah Lintas	85	95	100	110	120	775,9	
24	Pelayanan Angkutan Udara Perintis	Tersedianya 580 rute perintis	Jumlah rute perintis yang terlayani	118	118	114	115	115	892,42	Kemenhub

<b>PRIORITAS 11</b>		<b>KEBUDAYAAN, KREATIVITAS, DAN INOVASI TEKNOLOGI</b>						
TEMA PRIORITAS		<i>Pengembangan dan perlindungan kebhinekaan budaya, karya seni, dan ilmu serta apresiasinya, untuk memperkaya khazanah artistik dan intelektual bagi tumbuh-mapannya jati diri dan kemampuan adaptif kompetitif bangsa yang disertai pengembangan inovasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang dilandasi oleh keunggulan Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan</i>						
PENANGGUNGJAWAB		Menteri Kebudayaan dan Pariwisata						
BEKERJASAMA DENGAN		Menteri Negara Riset dan Teknologi						

No.	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp Miliar)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014		
<b>1. PERAWATAN:</b> Penetapan dan pembentukan pengelolaan terpadu untuk pengelolaan Cagar Budaya, revitalisasi museum dan perpustakaan di seluruh Indonesia sebelum Oktober 2011										
1	Pengembangan Pengelolaan Peninggalan Kepurbakalaan	Meningkatnya kualitas perlindungan, pemeliharaan, pengembangan, dan pemanfaatan BCB/ Situs dan Kawasan kepurbakalaan secara terpadu	Penetapan dan pembentukan pengelolaan terpadu cagar budaya (Kawasan Warisan Budaya Dunia yang dimulai dengan Candi Borobudur, Situs Manusia Purba Sangiran, dan Candi Prambanan )	1	3	-	-	-	6,0	Kemenbudpar
2.	Pengembangan Pengelolaan Permuseuman	Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pelayanan museum, termasuk museum daerah	Jumlah Museum yang direvitalisasi	4	30	-	-	-	104,5	Kemenbudpar
3	Layanan Jasa Perpustakaan dan Informasi	Meningkatnya kegiatan layanan jasa perpustakaan dan informasi yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai	Jumlah perpustakaan provinsi yang memiliki perangkat perpustakaan digital ( <i>e-library</i> )	33	33	-	-	-	60,0	Perpusnas
4	Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian	Meningkatnya upaya pengembangan perpustakaan dan budaya gemar membaca	Jumlah perpustakaan keliling	88	33	-	-	-	46,5	Perpusnas

No.	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp Miliar)	K/L	
				2010	2011	2012	2013	2014	Total		
	Minat Baca		Jumlah perpustakaan umum; provinsi, kabupaten/kota dan desa/kelurahan yang dikembangkan a. Provinsi b. Kab/kota c. Desa/kelurahan	2.283  33 250 2.000	2.333  33 300 2.000						
<b>2. SARANA:</b> Penyediaan sarana yang memadai bagi pengembangan, pendalaman dan pagelaran seni budaya di kota besar dan ibukota kabupaten selambat-lambatnya Oktober 2012											
1	Pelestarian dan Pengembangan Kesenian	Meningkatnya apresiasi, kreativitas dan produktivitas para pelaku seni.	Jumlah fasilitasi sarana bagi pengembangan, pendalaman dan pagelaran seni budaya. - Propinsi - Kabupaten/Kota	-  -	14 238	14 238	-  -	-  -	53,2	Kemenbudpar	
2	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film	Meningkatnya manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam rangka pengembangan nilai budaya, seni dan perfilman	Jumlah fasilitasi sarana pengembangan, pendalaman, dan pergelaran seni budaya - Propinsi - Kabupaten/Kota	5 20			-  -	-  -	3,0	Kemenbudpar	
<b>3. PENCIPTAAN:</b> Pengembangan kapasitas nasional untuk pelaksanaan Penelitian, Penciptaan dan Inovasi dan memudahkan akses dan penggunaannya oleh masyarakat luas											
1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Arkeologi	Meningkatnya litbang bidang arkeologi	Jumlah litbang di bidang arkeologi	144	147	148	148	148	226,1	Kemenbudpar	
2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Kebudayaan	Meningkatnya litbang kebudayaan dalam mendukung kebijakan pembangunan kebudayaan	Jumlah penelitian dan pengembangan bidang kebudayaan	13	13	13	13	13	36,0	Kemenbudpar	
3	Fasilitasi proses perolehan hak paten dan kepemilikan HKI produk teknologi dan produk kreatif	Kebijakan untuk fasilitasi proses perolehan hak paten dan kepemilikan HKI produk teknologi dan produk kreatif	Jumlah kebijakan	1	1	1	1	1	10,00	KRT	

No.	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp Miliar)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
4	Pelaksanaan Insentif Perolehan Paten dan Kepemilikan HKI	Terlaksananya insentif perolehan paten dan kepemilikan HKI	Jumlah usulan paten dan kepemilikan HKI yang difasilitasi	10	10	10	10	10		
5	Peningkatan Kapasitas SDM Iptek	Meningkatnya kapasitas SDM iptek	Jumlah karyasiswa	S2 = 50, S3 = 10	S2 = 50, S3 = 20	S2 = 50, S3 = 20	S2 = 50, S3 = 25	S2 = 50, S3 = 25	250,00	KRT
6	Pengembangan dan perlindungan kekayaan budaya	Pengembangan dan perlindungan bahasa masyarakat lokal	Paket	1	1	1	1	1	13,10	LIPI
7	Pengembangan Pranata Inovasi	Drafting paten dan pendaftaran HKI atas produk inovasi teknologi	Pendaftaran HKI	20	21	22	24	27	8,20	LIPI
		Kapitalisasi dan pemanfaatan paten serta invensi LIPI	Paket teknologi/HKI	3	3	4	4	4	8,70	LIPI
8	Pengkajian dan Penerapan Inkubasi Teknologi	Termanfaatkannya in kubasi teknologi utk sinergi antara lembaga litbang yasa, industri dan pemerintah	Paket rekomendasi, advokasi, survei dan konsultasi mengenai inkubasi	3	3	3	3	3	65,40	BPPT
9	Pengkajian dan Penerapan Audit Teknologi	Termanfaatkannya Audit Teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas litbang	Paket rekomendasi, advokasi, survei dan konsultasi mengenai audit teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas litbang	3	3	3	3	3	26,0	BPPT
<b>4. KEBIJAKAN :</b> Peningkatan perhatian dan kesertahan Pemerintah dalam program-program seni budaya yang diinisiasi oleh mayarakat dan mendorong berkembangnya apresiasi terhadap kemajemukan budaya										
1	Pelestarian dan Pengembangan Kesenian	Meningkatnya apresiasi, kreativitas, dan produktivitas para pelaku seni	Jumlah fasilitasi pergelaran, pameran, festival, lomba, dan pawai	20	20	20	20	20	91,0	Kemenbudpar
			Jumlah reaktualisasi kesenian yang hampir punah	2	2	2	2	2		
			Jumlah naskah inventarisasi karya seni budaya	25	25	25	25	25		
2	Pengembangan Perfilman	Meningkatnya kualitas dan kuantitas produksi	Jumlah Fasilitasi Festival Film dalam dan luar negeri	11	11	11	11	11	81,0	Kemenbudpar

No.	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp Miliar)	K/L	
				2010	2011	2012	2013	2014	Total		
	Nasional	film nasional	Jumlah fasilitasi organisasi dan komunitas perfilman	18	18	18	18	18			
3	Peningkatan Sensor Film	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan lembaga sensor film	Jumlah film/video/ iklan lulus sensor	40.000	42.000	44.000	45.000	50.000	103,8	Kemenbudpar	
<b>5. INOVASI TEKNLOGI :</b> Peningkatan keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif yang mencakup pengelolaan sumber daya maritim menuju ketahanan energi, pangan, dan antisipasi perubahan iklim; dan pengembangan penguasaan teknologi dan kreativitas pemuda											
1	Peningkatan Kapasitas Pemuda	Meningkatnya kapasitas pemuda kader di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta iman dan taqwa	Jumlah pemuda kader yang difasilitasi dalam peningkatan kapasitas di bidang iptek dan imtaq	3.180	3.180	3.180	3.180	3.180	41,50	Kemenpora	
2	Pengembangan Kreativitas dan Kualitas Pemuda	Meningkatnya kreativitas pemuda kader di bidang seni, budaya, dan industri kreatif	Jumlah pemuda kader yang difasilitasi dalam peningkatan kapasitas di bidang seni, budaya, dan industri kreatif	3.180	3.180	3.180	3.180	3.180	34,40	Kemenpora	
3	Peningkatan kemampuan inovasi dan kreativitas pemuda	Kebijakan peningkatan kemampuan inovasi dan kreativitas pemuda	Jumlah kebijakan	1	1	1	1	1	15,00	KRT	
			Jumlah <i>pilot</i> peningkatan inovasi dan kreativitas pemuda	4	4	4	4	4			
4	Pelaksanaan Insentif riset dasar dan terapan	Terlaksananya insentif riset dasar dan terapan	Jumlah paket riset dasar	44	40	35	35	35	150,00	KRT	
			Jumlah paket riset terapan	78	70	65	60	60			
5	Peningkatan litbang iptek unggulan di bidang kesehatan, obat-obatan dan instrumentasi medis	Meningkatnya litbang iptek unggulan di bidang kesehatan, obat-obatan dan instrumentasi medis	Jumlah paket penelitian	5	5	5	5	5	100,00	KRT	
6	Pelaksanaan insentif difusi iptek	Terlaksananya insentif difusi iptek	Jumlah paket	92	85	80	75	75	125,00	KRT	
7	Pelaksanaan insentif peningkatan kapasitas iptek sistem produksi	Terlaksananya insentif peningkatan kapasitas iptek sistem produksi	Jumlah paket insentif	130	120	115	110	100	200,00	KRT	

No.	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp Miliar)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014		
8	Pengkajian dan Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Terbangun dan terma nfaatkannya prototipe Perangkat PC USG <i>Multi Chanel</i> , Perangkat Lunak <i>Free-Open Source Software</i> dan Komputasi serta Sistem pengenal wicara pada Perisalah	Jumlah paket prototype, advokasi, dan rekomendasi	3	3	3	3	3	30,00	BPPT

<b>PRIORITAS LAINNYA</b>	<b>BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>
PENANGGUNGJAWAB	Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

No.	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					PAGU INDIKATIF (Rp Miliar)	K/L	
				2010	2011	2012	2013	2014			
<b>Pelaksanaan ibadah haji yang tertib dan lancar paling lambat pada 2010</b>											
1.	Pelayanan Haji dan Umrah	Terlaksananya Pelayanan Ibadah Haji dan Umrah serta Pengawasan Haji	Pelaksanaan Ibadah Haji dan Umrah serta Pengawasan Haji yang tertib dan lancar (jemaah)	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	775,40	Kemenag	
2.	Pelayanan Kesehatan Ibadah Haji	Meningkatnya pelayanan kesehatan jemaah haji	Pelayanan kesehatan kepada jamaah haji						943,5	Kemenkes	
<b>Peningkatan kerukunan umat beragama melalui pembentukan dan peningkatan efektivitas Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)</b>											
1.	Pembinaan kerukunan hidup umat beragama (FKUB)	Meningkatnya dan terpeliharanya kondisi dan suasana yang aman dan damai di kalangan umat beragama	1. Pembangunan Sekretariat Bersama FKUB Kab/Kota (unit) 2. Operasional FKUB (unit) - Tk Provinsi - Kab/Kota 3. Pemulihan Paska Konflik (Kegiatan)	15	15	20	20	30	33,50	Kemenag	
				33	33	33	33	33	5,00		
				150	150	300	440	440	33,00		
				1	1	1	1	1	37,64		

No.	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					PAGU INDIKATIF (Rp Miliar)	K/L	
				2010	2011	2012	2013	2014			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan jumlah wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara sebesar 20% secara bertahap dalam 5 tahun</li> <li>• Promosi 10 tujuan pariwisata Indonesia melalui saluran pemasaran dan pengiklanan yang kreatif dan efektif</li> <li>• Perbaikan dan peningkatan kualitas jaringan prasarana dan sarana pendukung pariwisata</li> <li>• Peningkatan kapasitas pemerintah dan pemangku kepentingan pariwisata lokal untuk mencapai tingkat mutu pelayanan dan <i>hospitality management</i> yang kompetitif di kawasan Asia</li> </ul>											
1.	Pengembangan Daya Tarik Pariwisata	Meningkatnya kualitas dan kuantitas penataan daya tarik wisata	Jumlah daya tarik wisata alam, bahari dan budaya	7	29	29	29	29	101,3	Kemenbudpar	
2.	Peningkatan PNPM Mandiri bidang Pariwisata	Meningkatnya jumlah desa wisata	Jumlah desa wisata	200	450	550	450	350	406,0	Kemenbudpar	
3.	Pengembangan Usaha, Industri dan Investasi Pariwisata	Berkembangnya usaha, industri dan investasi pariwisata	Jumlah profil investasi pariwisata	5	7	7	7	7	73,0	Kemenbudpar	
4.	Pengembangan Standardisasi Pariwisata	Terlaksananya penyusunan dan pemutakhiran standad pariwisata serta penerapan standard dan kompetensi pariwisata	1. Jumlah standard kompetensi 2. Jumlah standard usaha 3. Jumlah tenaga kerja yang disertifikasi (ribu orang)	8 6 10	10 6 10	10 8 15	6 8 9	4 4 6	140,0	Kemenbudpar	
5.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata	Terselenggaranya kegiatan perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, penyusunan kebijakan, peningkatan kualitas SDM aparatur, dan pendukungan teknis dalam meningkatkan kapasitas pengelolaan destinasi pariwisata	1. Jumlah Organisasi Pengelolaan Destinasi ( <i>Destination Management Organization/DMO</i> ) (buah) 2. Jumlah dukungan fasilitas pariwisata (daya tarik)	2 7	5 29	10 29	12 29	15 29	596,2	Kemenbudpar	

No.	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					PAGU INDIKATIF (Rp Miliar)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
6.	Peningkatan Promosi Pariwisata Luar Negeri	Meningkatnya partisipasi pariwisata Indonesia pada bursa, misi penjualan ( <i>sales mission</i> ) dan festival di tingkat internasional	1. Jumlah partisipasi pada bursa pariwisata internasional, pelaksanaan misi penjualan ( <i>sales mission</i> ), dan pendukungan penyelenggaraan festival ( <i>event</i> ) 2. Jumlah perwakilan promosi pariwisata Indonesia ( <i>Indonesia Tourism Promotion Representative Officers</i> ) di luar negeri (kota)	72	74	74	77	64	544,6	Kemenbudpar
7.	Peningkatan Promosi Pariwisata Dalam Negeri	Meningkatnya jumlah <i>event</i> pariwisata dalam negeri	Jumlah penyelenggaraan promosi langsung ( <i>direct promotion</i> ), dan penyelenggaraan <i>event</i> pariwisata berskala nasional dan internasional.	43	43	44	45	45	225,6	Kemenbudpar
8.	Pengembangan Informasi Pasar Pariwisata	Meningkatnya pemanfaatan informasi pasar pariwisata	1. Jumlah penyebaran informasi fokus pasar pariwisata Indonesia (naskah) 2. Jumlah permintaan pasar untuk berkunjung ke Indonesia (transaksi)	640 8.000	640 8.000	640 8.000	640 9.600	640 10.400	211,0	Kemenbudpar
9.	Peningkatan Publikasi Pariwisata	Meningkatnya kelengkapan informasi tujuan pariwisata Indonesia	1. Jumlah destinasi yang memiliki data dan informasi yang lengkap (daerah) 2. Jumlah bahan promosi cetak, promosi elektronik, publikasi media cetak, media elektronik dan media luar ruang (ribu)	10 1.150	10 1.150	10 1.146	10 1.135	10 1.125	724,7	Kemenbudpar

No.	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					PAGU INDIKATIF (Rp Miliar)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
			buah) 3. Jumlah bahan promosi cetak dan promosi elektronik yang terdistribusikan (ribu eksemplar)	709	709	709	708	709		
10.	Peningkatan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran ( <i>Meeting, Incentive Travel, Conference, and Exhibition/MICE</i> )	Meningkatnya penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran ( <i>Meeting, Incentive Travel, Conference, and Exhibition/MICE</i> ) nasional dan internasional di Indonesia	Jumlah daerah yang dikembangkan menjadi tujuan wisata MICE (daerah)	5	5	5	8	9	229,7	Kemenbudpar
11.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pemasaran	Terselenggaranya kegiatan koordinasi perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, penyusunan kebijakan, peningkatan kualitas SDM aparatur, dan pendukungan teknis peningkatan pemasaran pariwisata	Jumlah <i>event</i> pengembangan kebijakan pemasaran dan promosi pariwisata oleh masyarakat dan daerah	102	96	95	92	91	501,4	Kemenbudpar
12.	Pengembangan SDM Kebudayaan dan Pariwisata	Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia aparatur/industri dan masyarakat bidang kebudayaan dan pariwisata	Jumlah sumber daya yang dilatih di bidang kebudayaan dan pariwisata (orang)	1.150	1.150	1.175	1.190	1.200	34,0	Kemenbudpar
13.	Pengembangan Pendidikan Tinggi Bidang Pariwisata	Meningkatnya profesionalisme dan daya saing SDM bidang pariwisata di lembaga	Jumlah program studi	34	36	38	40	42	1.088,5	Kemenbudpar

No.	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					PAGU INDIKATIF (Rp Miliar)	K/L	
				2010	2011	2012	2013	2014			
		pendidikan tinggi pariwisata									
<p>• Perumusan kebijakan dan pedoman bagi penerapan pengarusutamaan (<i>mainstreaming</i>) Gender (PUG) oleh Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian lainnya, termasuk perlindungan bagi perempuan dan anak terhadap berbagai tindak kekerasan</p>											
1.	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang pendidikan yang responsif gender	Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan PUG bidang pendidikan	1. Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan 2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang pendidikan (K/L dan prov)	2 5	1 2	- 2	- 5	- 5	11,1	KPP&PA	
2.	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang kesehatan yang responsif gender	Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan PUG bidang kesehatan	1. Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang kesehatan 2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang kesehatan (K/L dan prov)	3 5	1 5	- 1	- 1	- 5	12,5	KPP&PA	
3.	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan partisipasi perempuan di bidang politik dan pengambilan keputusan	Meningkatnya jumlah kebijakan partisipasi perempuan di bidang politik dan pengambilan keputusan	1. Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang politik dan pengambilan keputusan 2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang politik	2 7	1 7	1 6	1 6	- 7	18,5	KPP&PA	

No.	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					PAGU INDIKATIF (Rp Miliar)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
			dan pengambilan keputusan (K/L dan prov)							
4.	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang ketenagakerjaan yang responsif gender	Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan PUG bidang ketenagakerjaan	1. Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang ketenagakerjaan 2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang ketenagakerjaan (K/L dan prov)	1 5	1 5	1 5	- 5	- 5	14,6	KPP&PA
5.	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan	Meningkatnya jumlah kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan	1. Jumlah kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan 2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan (K/L dan prov)	5 6	4 14	- 33	- 33	- 33	50,1	KPP&PA
6.	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan penyusunan data gender	Meningkatnya jumlah kebijakan penerapan sistem data gender	1. Jumlah kebijakan penerapan sistem data gender 2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan penerapan sistem data terpisah gender (K/L dan prov)	2 -	2 4 8	- 4 8	- 4 8	- 4 9	62,4	KPP&PA
7.	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan perlindungan tenaga kerja	Meningkatnya jumlah kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan	1. Jumlah kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan	1	-	-	-	3	13,0	KPP&PA

No.	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					PAGU INDIKATIF (Rp Miliar)	K/L	
				2010	2011	2012	2013	2014	Total		
	perempuan		2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan (K/L dan prov)	1 5	1 5	1 5	1 5	1 3			
8.	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan perlindungan korban perdagangan orang	Meningkatnya jumlah kebijakan perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang	1. Jumlah kebijakan perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang 2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang (K/L dan prov)	2 1 5	1 10 15	- 10 15	- 10 15	- 10 15	33,8	KPP&PA	
9.	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan penghapusan kekerasan pada anak	Meningkatnya jumlah kebijakan penghapusan kekerasan pada anak	1. Jumlah kebijakan penghapusan kekerasan pada anak 2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi tentang penghapusan kekerasan pada anak (K/L dan prov)	1 1 5	1 1 5	1 1 6	- 1 5	1 2 5	11,8	KPP&PA	
<b>• Pencapaian posisi papan atas pada South East Asia (SEA) Games pada tahun 2011, peningkatan perolehan medali di Asian Games tahun 2010 dan Olimpiade tahun 2012</b>											
1.	Peningkatan prasarana dan sarana keolahragaan	Meningkatnya penyediaan prasarana dan sarana keolahragaan yang memenuhi standar kelayakan	1. Jumlah fasilitasi penyediaan prasarana olahraga. 2. Jumlah penyediaan sarana olahraga	- -	4 36	- -	- -	- -	100,00	Kemenpora	

No.	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					PAGU INDIKATIF (Rp Miliar)	K/L	
				2010	2011	2012	2013	2014	Total		
2.	Pembinaan Olahraga Prestasi	Meningkatnya pembinaan olahraga prestasi	1. Jumlah olahragawan andalan nasional 2. Jumlah fasilitasi penyelenggaraan SEA Games dan Para Games pada tahun 2011 3. Jumlah fasilitasi keikutsertaan pada Asian Games, SEA Games, Olympic Games, Asian Para Games, Para Games, dan Paralympic Games	520 - 2	520 2 2	520 - 2	- - -	- - -	1.216,05	Kemenpora	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan character building melalui gerakan, revitalisasi dan konsolidasi gerakan kepemudaan</li> <li>• Revitalisasi Gerakan Pramuka</li> </ul>											
1.	Peningkatan Wawasan Pemuda	Meningkatnya wawasan pemuda kader di bidang kebangsaan, perdamaian, dan lingkungan hidup	Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam peningkatan wawasan kebangsaan, perdamaian, dan lingkungan hidup,	5.500	6.000	6.500	7.000	7.500	40,35	Kemenpora	
2.	Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan	Meningkatnya kapasitas pengelolaan organisasi kepemudaan	1. Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pelatihan kepemimpinan, manajemen, dan perencanaan program, 2. Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam memenuhi kualifikasi berdasarkan standar organisasi kepemudaan	6.000 98	7.000 100	8.000 110	9.000 120	10.000 140	30,40	Kemenpora	

No.	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					PAGU INDIKATIF (Rp Miliar)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
3.	Pengembangan Kependidikan	Terlaksananya pendidikan, pengembangan, dan pemasyarakatan kependidikan	1. Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam pendidikan kepemudaan, 2. Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam pendidikan kependidikan	250 3.100	450 4.850	500 5.100	500 5.350	500 5.600	412,04	Kemenpora
4.	Pengembangan Kepemimpinan Pemuda	Meningkatnya kapasitas dan potensi kepemimpinan pemuda	Jumlah pemuda kader kepemimpinan	4.500	6.000	7.500	9.000	11.500	44,41	Kemenpora
5.	Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	Meningkatnya kapasitas dan potensi kewirausahaan pemuda	Jumlah pemuda yang difasilitasi sebagai kader kewirausahaan	3.175	3.200	3.300	3.400	3.500	46,01	Kemenpora

<b>PRIORITAS LAINNYA</b>	<b>BIDANG PEREKONOMIAN</b>						
PENANGGUNGJAWAB	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian						

No.	SUBSTANSI INTI / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp. MILYAR)	K/L	
				2010	2011	2012	2013	2014			
Pelaksanaan pengembangan industri sesuai dengan Peraturan Presiden No.28/2008 tentang Kebijakan Industri Nasional											
1	Pengembangan klaster industri berbasis pertanian, oleochemical	Fasilitasi Terbentuknya Kawasan Industri Berbasis CPO di 3 provinsi	Provinsi Sumut, Kaltim, dan Riau	20%	40%	60%	80%	100%	30.4	Kemenperin	
			Jumlah Perusahaan	40	100	100	100	100			
			Pilot project industri turunan kelapasawit	1	1						
Peningkatan peran dan kemampuan Republik Indonesia dalam diplomasi perdagangan internasional											
1	Peningkatan Peran Diplomasi Ekonomi dalam Forum Multilateral	Terlaksananya partisipasi aktif dalam berbagai sidang di forum multilateral	Jumlah posisi Pemri yang disampaikan dalam sidang internasional terkait isu perdagangan, perindustrian, investasi, HAKI, ekonomi dan keuangan	25 posisi	27 posisi	31 posisi	31 posisi	33 posisi	154,2	Kemenlu	
			Jumlah koordinasi teknis/ penyelenggaraan pertemuan/ partisipasi dalam sidang terkait isu perdagangan, perindustrian, investasi, HAKI, ekonomi dan keuangan	114 kali	115 kali	116 kali	117 kali	116 kali			

No.	SUBSTANSI INTI / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp. MILYAR)	K/L	
				2010	2011	2012	2013	2014			
2	Pelaksanaan Kerja Sama Bilateral dalam promosi/kerjasama ekonomi, perdagangan, dan investasi	Terfasilitasinya promosi/ kerjasama ekonomi, perdagangan, dan investasi	% fasilitasi untuk sidang/pameran/forum bisnis ( <i>Trade, Tourism and Investment</i> ) di kawasan Asia Timur dan Pasifik, Sub Sahara Afrika, Eropa Tengah dan Timur	100%	100%	100%	100%	100%	11,9	Kemenlu	
3	Perluasan Pasar Non Tradisional	Terfasilitasinya penyelenggaraan kerjasama bilateral di kawasan Asia Timur, dan Sub Sahara Afrika	% fasilitasi penyelenggaraan kerjasama di bidang ekonomi dengan negara-negara di kawasan Asia Timur dan Sub Sahara Afrka	100%	100%	100%	100%	100%	9,3	Kemenlu	
4	Peningkatan Peran Dan Kemampuan Diplomasi Perdagangan Internasional	Meningkatnya peran dan kemampuan Indonesia di bidang diplomasi perdagangan internasional guna pembukaan, peningkatan dan pengamanan akses pasar	Jumlah partisipasi dalam perundingan perdagangan internasional	40	40	45	50	55	179,9	Kemendag	
			Jumlah posisi runding yang disusun	40	40	45	50	55			
			Jumlah penyelenggaraan sidang internasional di Dalam Negeri	8	8	8	8	8			
			Jumlah hasilperundingan Perdagangan Internasional (MRA, MOU, Agreement, Agreed Minutes, Declaration, Chair Report)	34	34	34	34	34			
			Jumlah forum konsultasi tek-nis kesepakatan perundingan internasional	6	8	8	8	8			
<b>Peningkatan pelayanan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) selama proses persiapan, pemberangkatan, dan kepulangan</b>											
1	Regulasi dan Sertifikasi Sistem Elektronik Jasa Aplikasi dan Konten	Tersedianya sistem informasi layanan TKI antar instansi/lembaga	a. Adanya sistem informasi layanan TKI	Electronic Form; Document	Contact mgmt; Change	Case mgmt; Incident & Problem	Operasional dan pemeliharaan	Operasional dan pemeliharaan	10,0	Kemenkominfo	

No.	SUBSTANSI INTI / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp. MILYAR)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014		
			b. Jumlah instansi/lembaga yang terhubung dengan sistem	mgmt; Job Order mgmt; Recruitment mgmt; Selection mgmt; Security; Interoperability; Placement mgmt; Campaign mgmt; Operasional	mgmt; Service Desk mgmt; Payment System mgmt; Performance & Capacity mgmt; Campaign mgmt; Service Order mgmt; Skill & Competency mgmt; Sertifikasi ISO 9001; Sistem mgmt Mutu	mgmt; Business Continuity; Service Level mgmt; Serifikasi ISO 20000 : IT Service mgmt	Kemenakertrans, BNP2TKI, Kemendagri, Dephukham Kemenlu, Depdiknas, Kemenkominfo „Kemenkes, , Daerah	Kemenakertrans, BNP2TKI, Kemendagri, Dephukham, Kemenlu, Depdiknas, Kemenkominfo, Kemenkes, Daerah	Kemenakertrans, BNP2TKI, Kemendagri, Dephukham, Kemenlu, Depdiknas, Kemenkominfo, Kemenkes, Daerah Kantong TKI, POLRI, Menko	-

No.	SUBSTANSI INTI / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp. MILYAR)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014		
			c. Adanya Infrastruktur SIM TKI  d. Adanya Business Process Reengineering  e. Adanya regulasi berjalanya SIM TKI	kantong TKI  a. Server b. Network c. Koneksi Internet  Business Process Reengineering  Regulasi Pendukung	Daerah Kantong TKI, POLRI, Menko Perekonomian, Menko Kesra  a. Server b. Network c. Koneksi Internet  Business Process Reengineering  Regulasi Pendukung	Menko Perekonomian, Menko Kesra  a. Server b. Network c. Koneksi Internet  Business Process Reengineering  Regulasi Pendukung	Perekonomian, Menko Kesra  a. Server b. Network c. Koneksi Internet  Business Process Reengineering  Regulasi Pendukung	Perekonomian, Menko Kesra  a. Server b. Network c. Koneksi Internet  Business Process Reengineering  Regulasi Pendukung	8,0  3,0  3,0	
2	Pembinaan Administrasi Pendaftaran Penduduk	Tersedianya pelayanan dokumen kependudukan yang cepat, mudah, murah dan aman bagi TKI	a. Jumlah SKPLN (Surat Keterangan Pindah LN) yang diterbitkan sesuai dengan identitas calon TKI  b. Jumlah TKI yang terdaftar di Perwakilan RI/NIK calon TKI	500 ribu TKI  500 ribu TKI	1 juta TKI  1 juta TKI	1 juta TKI  1 juta TKI	1 juta TKI  1 juta TKI	1 juta TKI  1 juta TKI	4,6	Kemendagri
3	Pengelolaan Informasi Kependudukan	Tersedianya layanan informasi calon TKI tingkat kecamatan di daerah asal calon TKI	a. Jumlah pos pelayanan calon TKI tingkat kecamatan di daerah asal calon TKI	Persiapan	1.500 kecamatan	3.000 kecamatan	4.500 kecamatan	6.500 kecamatan	16,8	Kemendagri

No.	SUBSTANSI INTI / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp. MILYAR)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014		
			b. Jumlah calon TKI yang tercatat di pos pelayanan	500 ribu TKI	1 juta TKI	1 juta TKI	1 juta TKI	1 juta TKI		
4	Pelayanan Dokumen Perjalanan Visa dan Fasilitas Keimigrasian	Terselenggaranya akses pelayanan paspor yang mudah dan tidak duplikasi	a. Pelayanan keimigrasian yang transparan  b. Persentase penerbitan visa yang memenuhi standar dengan data akurat  c. Persentase pemberian paspor TKI Timur Tengah yang memenuhi standar  d. Jumlah dan jenis fasilitas keimigrasian yang diberikan memenuhi standar	Meningkat 20%  Meningkat 20%  Meningkat 20%  Meningkat 20%	Meningkat 40%  Meningkat 40%  Meningkat 40%  Meningkat 40%	Meningkat 60%  Meningkat 60%  Meningkat 60%  Meningkat 60%	Meningkat 80%  Meningkat 80%  Meningkat 80%  Meningkat 80%	Meningkat 100%  Meningkat 100%  Meningkat 100%  Meningkat 100%	49,1	Kemenkumham
5	Pembinaan, penempatan, dan perlindungan TKI Luar Negeri	Terintegrasinya pelayanan penempatan calon TKI di daerah	% calon TKI yang terlayani dan tercatat pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi dan Kab/Kota	100% calon TKI terlayani	130,0	Kemenakertrans				

No.	SUBSTANSI INTI / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp. MILYAR)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014		
6	Fasilitasi Pelayanan Dokumen Calon TKI	Meningkatnya kualitas pelayanan penempatan calon TKI	Jumlah calon TKI yang mendapat layanan dokumen sesuai standar	500 ribu TKI	1 juta TKI	1 juta TKI	1 juta TKI	1 juta TKI	19,4	BNP2TKI
7	Penyiapan pemberangkatan	Meningkatnya pemahaman hak dan kewajiban TKI	a. Persentase jumlah calon TKI yang ditempatkan sesuai dengan job order	100% TKI	110,0	BNP2TKI				
			b. Jumlah Calon TKI yang Terlayani KTKLN sesuai dengan NIK	500 ribu TKI	1 juta TKI	1 juta TKI	1 juta TKI	1 juta TKI	174,0	
			c. Jumlah TKI yang memahami standar perlindungan dan prinsip-prinsip HAM.	500 ribu TKI	1 juta TKI	1 juta TKI	1 juta TKI	1 juta TKI	244,0	
8	Koordinasi Kebijakan Penyusunan Skim Pembiayaan Kredit untuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI)	Meningkatnya Koordinasi Kebijakan Penyusunan Skim Pembiayaan Kredit untuk TKI	Persentase Rekomendasi Kebijakan Koordinasi Pembiayaan Kredit untuk TKI yang Diimplementasikan	60 %	65 %	70 %	75 %	80 %	0,6	Menko Perekonomian
9	Pelayanan Advokasi dan Perlindungan Hukum	Terlaksananya Pelayanan Advokasi dan Perlindungan Hukum TKI	a. Kemudahan penyampaian pengaduan 24 jam (bebas pulsa)	-	1 hotline services	1 hotline services	1 hotline services	1 hotline services	20,0	BNP2TKI
			b. Jumlah pengaduan yang ditangani	100% pengaduan tertangani	15,0					
			c. Kualitas pelayanan hotline service	-	100% TKI yang diproses	30,0				
			d. Jumlah orang yang berminal	-	100% orang	100% orang	100% orang	100% orang	30,0	

No.	SUBSTANSI INTI / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp. MILYAR)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014		
			bekerja ke luar negeri yang mendapat advokasi  e. Persentase TKI purna bermasalah yang direhabilitasi	60% TKI bermasalah ditangani	70% TKI bermasalah ditangani	80% TKI bermasalah ditangani	90% TKI bermasalah ditangani	100% bermasalah ditangani	40,0	
10	Pengamanan Keberangkatan	Pencegahan keberangkatan TKI non prosedural	Presentase TKI yang memiliki dokumen resmi bekerja ke luar negeri	100%	100%	100%	100%	100%	15,0	BNP2TKI
11	Peningkatan Pemberdayaan TKI Purna	Kesadaran pengelolaan remitansi untuk kegiatan produktif	Jumlah calon TKI /purna yang mendapat edukasi pengelolaan remitansi	2.000 TKI	3.000 TKI	3.500 TKI	4.000 TKI	4.500 TKI	8,6	BNP2TKI
12	Peningkatan Pemulangan TKI Bermasalah/TKIB	Terlayaninya pemulangan TKI bermasalah/TKIB yang dideportasi secara sehat dan bermartabat.	Terselenggaranya koordinasi pemulangan TKI/TKI B dari entry point ke daerah asal	Rapat koordinasi	4,3	Menko kesra				
13	Peningkatan Pelayanan Pemulangan TKI Bermasalah/TKIB	Terlayaninya pemulangan TKI bermasalah/TKIB yang dideportasi sampai di daerah asal	Jumlah pemulangan TKI bermasalah/TKIB yang dideportasi	100% TKIB dipulangkan ke daerah asal	123,29	Kemensos				
14	Peningkatan Ketenteraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat	Terselenggaranya ketentraman dan ketertiban umum di lokasi debakarsi dan embarkasi	Kesiap siagaan Satgas entry/Transit/daerah asal	100% TKIB deportasi terlayani	28,8	Kemendagri				

No.	SUBSTANSI INTI / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp. MILYAR)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014		
15	Peningkatan Keamanan Pemulangan TKI Bermasalah/TKIB	Tersedianya pengamanan pemulangan TKI bermasalah	Terjaminnya keamanan pemulangan TKI bermasalah/TKIB	100% kasus tertangani	100% kasus tertangani	100% kasus tertangani	100% kasus tertangani	100% kasus tertangani	22,5	POLRI
<b>Peningkatan upaya pelayanan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri</b>										
1	Koordinasi Kebijakan Penyusunan Skim Asuransi dan Remitansi untuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI)	Meningkatnya Koordinasi Kebijakan Penyusunan Skim Asuransi dan Remitansi untuk TKI	Persentase Rekomendasi Kebijakan Koordinasi Asuransi dan Remitansi untuk TKI Diimplementasikan	60 %	65 %	70 %	75 %	80 %	1,2	Menko Perekonomian
2	Pembinaan Penempatan dan Perlindungan TKI Luar Negeri	Tersedianya regulasi yang melindungi TKI	a. Ratifikasi konvensi buruh migran dan keluarganya	Penyiapan ratifikasi konvensi buruh migran	Ratifikasi konvensi buruh migran	6,0	Kemenakertrans			
			b. Amandemen UU 39/2004	Persiapan amandemen UU 39/2004	Persiapan amandemen UU	Persiapan amandemen UU	Amandemen UU	Amandemen UU	5,5	
			c. Persentase peraturan turunan amandemen UU					100% peraturan turunan tersusun	10,9	
			d. Jumlah atase ketenagakerjaan yang memberi perlindungan TKI	13 atase	13 atase	13 atase	13 atase	13 atase	222,0	
3	Peningkatan Perlindungan dan Pelayanan WNI/BHI di Luar Negeri	Tersedianya bantuan hukum bagi kepentingan TKI	a. Jumlah pertemuan dengan negara sahabat terkait perlindungan WNI/BHI dengan negara lain	5 kali	6 kali	7 kali	8 kali	9 kali	1.120,3	Kemenlu

No.	SUBSTANSI INTI / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp. MILYAR)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014		
			b. Jumlah Citizen Services yang diperkuat  c. Jumlah WNI/TKI yang memperoleh fasilitas penampungan  d. Persentase pemberian bantuan hukum ( Advokasi dan <i>lawyer</i> ) bagi WNI  e. Jumlah WNI/TKI yang deportasi	24 Citizen Services  -  -  -	24 Citizen Services  14.998  29,17%  9.608	24 Citizen Services  8.498  41,20%  4.804	24 Citizen Services  4.998  60,10%  4.804	24 Citizen Services  1.998  100%  4.804		

PRIORITAS LAINNYA	<b>BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN</b>					
PENANGGUNGJAWAB	Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan					

No	SUBSTANSI INTI / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (RP Miliar)	K/L	
				2010	2011	2012	2013	2014			
Pelaksanaan koordinasi terhadap mekanisme prosedur penanganan terorisme											
a.	Operasi Militer Selain Perang (OMSP).	Terlaksananya tugas OMSP secara efektif	Jumlah dan cakupan wilayah penyelenggaraan OMSP	30%	29%	30%	31%	32%	1.485,02	MABES TNI	
b.	Kegiatan Penyelenggaraan Dukungan Administrasi Operasi Intelijen	Terselenggaranya dukungan administrasi operasi intelijen	Jumlah anggaran yang tersedia	30%	30%	30%	31%	32%	1.055,29	BADAN INTELIJEN NEGARA	
c.	Pembinaan forum kemitraan Polisi dan Masyarakat	Meningkatnya jumlah forum kemitraan Polisi dan masyarakat	Jumlah Forum Kemitraan Polmas	41.000	45.100	49.600	54.560	60.000	824,47	POLRI	
d.	Penindakan Tindak Pidana Terorisme	Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara Terorisme	Jumlah Perkara dan Clearance Rate Tindak Pidana Terorisme lk Nasional	100%	100%	102%	102%	103%	59,67	POLRI	
e.	Kegiatan Koordinasi Penanganan Kejahatan Transnasional dan Terorisme	Terselenggaranya Koordinasi Kebijakan Penanganan Kejahatan Transnasional dan Terorisme	Jumlah Rakor Urusan Kejahatan Transnasional dan Terorisme	12 kali	3,959	Kemenko Polhukam					
			Jumlah pemantauan dan evaluasi	4 kali							
			Jumlah Rakor Urusan Terorisme Bersama dengan DKPT	12 kali							
Pelaksanaan program deradikalasi untuk menangkal terorisme											
a	Peningkatan Wawasan Kebangsaan melalui Sosialisasi yang Berkelanjutan	Terlaksananya penyusunan kebijakan, dukungan & fasilitasi pengembangan nilai-nilai Kebangsaan	Jumlah modul pengembangan nilai kebangsaan	NA	1 Modul	1 Modul	1 Modul	1 Modul	7,80	Kemendagri	
			Jumlah sosialisasi pengembangan nilai kebangsaan untuk pemuda, perempuan,	NA	15 kali	20 kali	25 kali	25 kali	30,00		

No	SUBSTANSI INTI / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp MILIAR)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
			aparatur pemerintah							
b	Kegiatan Koordinasi Wawasan Kebangsaan	Terselenggaranya Koordinasi Kebijakan Wawasan Kebangsaan	Jumlah Rakor Wawasan Kebangsaan	12 kali	3.431	Kemenko Polhukam				
			Jumlah pemantauan dan evaluasi	4 kali						
c	Ops Gaktib dan Ops Yustisi.	Meningkatnya kondisi ketertiban di daerah rawan.	Prosentase kualitas dan kuantitas operasi Gaktib.	45%	44%	45%	46%	47%	95.60	MABES TNI
d	Operasi Pemberdayaan Wilayah Pertahanan	Terselenggaranya operasi wilayah pertahanan	Prosentase kualitas dan kuantitas pembinaan wilayah pertahanan nasional	45%	44%	45%	46%	47%	54.68	MABES TNI
e	Operasi intelijen Strategis	Dapat ditangkalnya ATHG pertahanan negara.	Prosentase kualitas dan kuantitas data intelijen dan pengamanan yang dibutuhkan	45%	44%	45%	46%	47%	267.57	MABES TNI
f	Operasi Militer Selain Perang (OMSP).	Terlaksananya tugas OMSP secara efektif	Jumlah dan cakupan wilayah penyelenggaraan OMSP	30%	29%	30%	31%	32%	1,485.02	MABES TNI
g	Penyelenggaraan Intelijen dan Pengamanan Matra Darat	Kesiapan kekuatan dan kemampuan matra darat	% Peningkalan Pengamanan Personel, Material dan Dokumen serta Efektifitas dan Efisiensi Deteksi Dini	40%	40%	41%	43%	45%	731.85	TNI AD
h	Kegiatan Operasi Intelijen Dalam Negeri	Meningkatnya pelaksanaan penyelidikan beraspek dalam negeri	Rasio personil daerah terhadap jumlah kabupaten/kota	30%	30%	30%	32%	33%	1,362.56	BADAN INTELIJEN NEGARA
<b>Peningkatan peran Republik Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia</b>										
a	Peran Indonesia dalam Reformasi PBB dan Dewan Keamanan PBB dan kontribusi Indonesia dalam Menjaga Perdamaian Dunia	Meningkatnya partisipasi Indonesia dalam setiap forum PBB dan DK PBB	Jumlah prakarsa Indonesia untuk mendorong reformasi Dewan Keamanan PBB.	4 kali prakarsa	20,64	Kemenlu				
		Meningkatnya kerjasama multilateral untuk menjaga perdamaian dunia dalam isu keamanan internasional, senjata pemusnah massal dan senjata	Jumlah koordinasi teknis	19 kali	25 kali	25 kali	25 kali	25 kali		
			Jumlah posisi pemri yang disampaikan dalam sidang internasional	10 posisi						
			Jumlah partisipasi Indonesia pada sidang	7 kali						

No	SUBSTANSI INTI / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp MILIAR)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
		konvensional, kejahatan lintas negara dan terorisme	internasional yang dihadiri Jumlah penyelenggaraan pertemuan/kerja sama	-----	2 kali	1 kali	-----	-----		
<b>Peningkatan pelayanan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri</b>										
a	Perluasan, Pengembangan dan penguatan sistem pelayanan warga ( <i>citizen service</i> )	Terlaksananya penguatan sistem pelayanan warga ( <i>citizen service</i> )	Jumlah citizen services yang diperkuat	24	24	24	24	24	139,405	Kemenlu
b	Pertemuan dan perundingan dengan negara sahabat	Terlaksananya pertemuan dan perundingan dengan negara sahabat terkait dengan perlindungan WNI/BHI	Jumlah pertemuan dengan negara sahabat terkait perlindungan WNI/BHI dengan negara lain	5 kali	6 kali	7 kali	8 kali	9 kali	8,45	Kemenlu
c	Penanganan Kasus TKI di luar negeri	Tertanganinya kasus TKI di luar negeri	Tersedianya database mengenai penyebaran WNI terdaftar di seluruh perwakilan di luar negeri	Database WNI/BHI di seluruh perwakilan	1,69	Kemenlu				
			Jumlah WNI/TKI yang memperoleh fasilitas di penampungan	-	14.998	8.498	4.998	1.998	970,17	
			Jumlah WNI/TKI yang direpatriasi	-	6.500	3.500	3.000	1.998	58,23	
			Jumlah WNI/TKI yang dideportasi	-	9.608	4.804	4.804	4.804	58,23	
			Prosentase pemberian bantuan hukum (advokasi dan lawyer) bagi WNI terutama tenaga kerja wanita	-	29,17%	41,20%	60,10%	100%	10,16	
			Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelayanan dan perlindungan WNI/TKI	-	100%	100%	100%	100%	3,2	
d	Sosialisasi dan Koordinasi Teknis	Terlaksananya sosialisasi dan koordinasi teknis pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri	Jumlah sosialisasi untuk PJTKI tentang pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri	3 kali	1,69	Kemenlu				
			Jumlah koordinasi dengan instansi terkait	65 kali	70 kali	80 kali	85 kali	90 kali	1,69	

No	SUBSTANSI INTI / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp MILIAR)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
			baik di dalam maupun di luar negeri							
			Jumlah kota yang menjadi program diseminasi perlindungan WNI melalui media elektronik	15 kota	20 kota	25 kota	30 kota	35 kota	1,69	
			Jumlah tayangan iklan tentang pelayanan dan perlindungan WNI/BHI di luar negeri	6 kali	10 kali	15 kali	20 kali	25 kali	1,69	
<b>Penguatan dan pemantapan hubungan kelembagaan pencegahan dan pemberantasan korupsi</b>										
a	Penanganan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi	Meningkatnya penyelesaian perkara tindak pidana korupsi secara cepat, tepat dan akuntabel.	Jumlah Penyidikan perkara tindak pidana Korupsi yang diselesaikan	145 pkr	53.33	Kejagung				
b	Peningkatan Penuntutan Tipikor	Meningkatnya peyelesaian perkara tipikor secara cepat, tepat dan akuntabel	Jumlah perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan dalam tahap Penuntutan	145 pkr	100 pkr	100 pkr	100 pkr	100 pkr	18.96	Kejagung
c	Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Kejati, Kejari dan Cabjari	Meningkatnya penyelesaian perkara tipikor secara cepat, tepat & akuntabel yang dilaksanakan oleh jajaran Kejaksaan di daerah	Jumlah perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan oleh Kejati, Kejari dan Cabjari	1.700 pkr	1.400 pkr	1.400 pkr	1.400 pkr	1.400 pkr	736.8	Kejagung
<b>Pelaksanaan perlindungan saksi dan pelapor</b>										
a	Kegiatan Perancangan Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan kualitas RUU dan peraturan perundang-undangan di bawah UU di DPR serta tenaga fungsional perancangan peraturan perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bidang politik, hukum &amp; keamanan</li> <li>• Bidang keuangan dan perbankan</li> <li>• Bidang industri dan perdagangan</li> <li>• Bidang kesejahteraan rakyat</li> <li>• Bidang pertanahan, tata ruang, dan LH</li> <li>• Peraturan Perundang-undangan di bidang mekanisme perlindungan saksi dan pelapor</li> </ul>	20%	40%	60%	80%	100%	75,0	Kemenkumham

No	SUBSTANSI INTI / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp MILIAR)	K/L	
				2010	2011	2012	2013	2014			
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Perundang-undangan di bidang yg mendorong pemberantasan korupsi</li> </ul>								
<b>Pengembalian asset (asset recovery)</b>											
a	Kegiatan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan	Meningkatkan keharmonisan rancangan peraturan perundang-undangan tingkat pusat bidang politik, hukum, keamanan, keuangan, perbankan, industri, perdagangan, sumber daya alam, riset, teknologi, kesejahteraan rakyat yang harmonis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bidang politik, hukum &amp; keamanan</li> <li>• Bidang keuangan dan perbankan</li> <li>• Bidang industri dan perdagangan</li> <li>• Bidang kesejahteraan rakyat</li> <li>• Bidang pertanahan, tata ruang, dan LH</li> <li>• Peraturan perundang-undangan di bidang mekanisme perlindungan saksi dan pelapor</li> <li>• Peraturan perundang-undangan di bidang yg mendorong pemberantasan korupsi</li> </ul>	20%	40%	60%	80%	100%	38.5	Kemenkumham	
b	Kegiatan Peningkatan Profesionalitas Tenaga Teknis Peradilan dan Aparatur Peradilan di bidang Manajemen dan Kepemimpinan	Tersedianya sumber daya aparatur hukum yang profesional dan kompeten dalam melaksanakan penyelenggaraan peradilan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jmlh SDM mendapatkan pelatihan teknis peradilan dan manajemen &amp; Kepemimpinan yang memenuhi standar kompetensi, tugas dan kinerja</li> <li>• Jmlh pelatihan bagi Hakim/Hakim Adhoc dan tenaga teknis lainnya mengenai Tipikor, asset recovery dll</li> <li>• Jmlh kurikulum, silabus, materi ajar yg dikembangkan berdasarkan kebutuhan pelatihan</li> <li>• Jmlh pengembangan sistem diklat yang</li> </ul>	3.826 org	6.450 org	7.860 org	7.880 org	8.290 org	203.5	MA-RI	

No	SUBSTANSI INTI / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp MILIAR)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014		
			terhubung dengan sistem rekrutmen, sistem pengawasan dan sistem karir bagi hakim dan aparatur peradilan							
c	Pelayanan Penyusunan Peraturan Perundang – Undangan dan kerjasama hukum	Meningkatnya pemberian pertimbangan hukum kepada satuan organisasi Kejaksaan dan instansi pemerintah, serta turut melakukan penelaahan & penyusunan perumusan peraturan perundang-undangan & pembinaan hubungan dengan lembaga negara, lembaga pemerintah dan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri.	Jumlah kegiatan kerja sama hukum untuk penyusunan kesepakatan MLA dalam rangka penelusuran dan pengembalian aset negara hasil lindak pidana korupsi yang disembunyikan di luar negeri.	7 keg	8 Keg	10 keg	10 keg	10 keg	8,57	Kejaksaan Agung
<b>Peningkatan kepastian hukum</b>										
a	Kegiatan Percepatan peningkatan penyelesaian perkara	Terselesaikannya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah penyelesaian perkara termasuk perkara-perkara yg menarik perhatian masyarakat (KKN, HAM)</li> <li>Jumlah penyelesaian minutasi perkara yg tepat waktu.</li> <li>Terselenggaranya pengelolaan informasi administrasi perkara secara akurat, efektif dan efisien</li> <li>Tersedianya biaya penyelesaian perkara yang memadai</li> </ul>	10.000 pkr	10.200 pkr	10.300 pkr	10.400 Pkr	10.500 pkr	146,9	MA-RI
b	Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan penyelesaian dan penanganan perkara	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jmlh penyelesaian administrasi perkara (yg sederhana, dan tepat waktu) di tingkat Pertama dan Banding di lingkungan Peradilan Umum</li> <li>Jmlh penyelesaian perkara yg kurang</li> </ul>	145.000 pkr	147.900 pkr	149.380 pkr	150.870 pkr	153.100 pkr	320.2	MA-RI

No	SUBSTANSI INTI / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp MILIAR)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
			<p>dari 6 bulan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jmlh penyampaian berkas perkara Kasasi, PK dan Grasi yang lengkap dan tepat waktu</li> <li>• Penyusunan kebijakan mengenai manajemen dan tata laksana di lingkungan Peradilan Umum</li> </ul>							
c	Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan penyelesaian dan penanganan perkara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah penyelesaian administrasi perkara (yang sederhana, dan tepat waktu) di tingkat pertama dan banding di lingkungan Peradilan Agama</li> <li>• Jumlah penyelesaian perkara yang kurang dari 6 (enam) bulan</li> <li>• Jumlah penyampaian berkas perkara kasasi, PK dan kesyariahan yang lengkap dan tepat waktu</li> <li>• Penyusunan kebijakan mengenai manajemen dan tata laksana di lingkungan Peradilan Umum</li> </ul>	80.000 pkr	81.600 pkr	82.400 pkr	83.200 pkr	84.400 pkr	102.8	MA-RI
d	Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan TUN	Peningkatan penyelesaian dan penanganan perkara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah penyelesaian administrasi perkara (yg sederhana, dan tepat waktu) di tingkat Pertama &amp; Banding di lingkungan Peradilan Peradilan Militer dan TUN</li> <li>• Jumlah Penyelesaian Perkara yang kurang dari 6 (enam) bulan</li> <li>• Jumlah penyampaian berkas perkara Kasasi, PK dan Grasi yang lengkap dan</li> </ul>	5.000 pkr	5.100 pkr	5.151 pkr	5.200 pkr	5.280 pkr	26	MA-RI

No	SUBSTANSI INTI / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp MILIAR)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014		
			• tepat waktu • Penyusunan kebijakan mengenai manajemen dan tata laksana di lingkungan Peradilan Umum							
<b>Penguatan perlindungan HAM</b>										
a	Kegiatan Kerjasama HAM	Peningkatan kerjasama dalam dan luar negeri dlm rangka pemajuan HAM dan harmonisasi rancangan peraturan Perundang-undangan dalam perspektif HAM serta Naskah Akademik (NA) instrmnt HAM internasional	Percentase harmonisasi rancangan peraturan perUUan dalam perspektif HAM	100%	100%	100%	100%	100%	9.0	Kemenkumham
			Jumlah analisis laporan pelaksanaan instrument HAM Internasional dan Naskah Akademik instrmnt HAM Internasional	6 instrmnt HAM Internasional dan 2 N.A						
			Jumlah kerjasama luar negeri dalam rangka pemajuan HAM	10 Negara/ NGO;						
			Jumlah kerjasama dalam negeri dalam rangka implementasi HAM/RANHAM	440 pusat dan daerah						
b	Kegiatan Penguatan HAM	Presentasi KL pemerintah propinsi dan kabupaten/ kota yang telah mengikuti pelatihan HAM	Jumlah program pembelajaran HAM	10	10	10	10	10	10.0	Kemenkumham
			Jumlah bahan ajar HAM	10	10	10	10	10		
			Jumlah fasilitator pelatihan HAM	40	40	40	40	40		
			Jumlah pelatihan HAM	10	10	10	10	10		
			Jumlah K/L atau daerah yg telah melaksanakan RAN HAM	34 kab/kota						
			Jumlah penyuluhan HAM	136	136	136	136	136		

No	SUBSTANSI INTI / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp MILIAR)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014		
c	Kegiatan Diseminasi HAM	Meningkatnya Ke-menterian/Lembaga, Pemerintah Propinsi dan Kab/Kota yang telah memperoleh diseminasi HAM	Jumlah evaluasi dan pengembangan diseminasi HAM	34 kab/kota	8.0	Kemenkumham				
			Jumlah data HAM yg diolah dari K/L, Prov, Kab & Kota	156	156	156	156	226		
			Jumlah evaluasi dan laporan tentang HAM	156	156	156	156	226		
d	Kegiatan Informasi HAM	Informasi yang dapat diakses dari K/L, Provinsi dan Kabupaten/Kota tentang HAM	Jumlah akses jalur informasi HAM melalui penyediaan koneksi internet	156	156	156	156	226	7.0	Kemenkumham
			Jumlah layanan informasi melalui media cetak dan elektronik	156	156	156	156	226		
e	Kegiatan Penyediaan dana bantuan hukum di Pengadilan Umum Tingkat Pertama	Penyelesaian perkara pidana bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Jumlah penyediaan dana bantuan hukum di Pengadilan Tingkat Pertama Kebijakan mengenai bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan terpinggiran Jumlah pembangunan atau perbaikan fungsi operasionalisasi Zitting Plaatz dan pelaksanaan sidang keliling untuk menjangkau segenap lapisan masyarakat	33.960 pkr	34.639 pkr	34.986 pkr	35.335 pkr	35.865 pkr	174.7	MA-RI
f	Kegiatan Penyediaan dana bantuan hukum di Pengadilan Agama	Penyelesaian perkara peradilan agama bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Penyediaan dana prodeo di pengadilan Tingkat Pertama Mengoptimalkan fungsi pelaksanaan sidang keliling untuk menjangkau segenap lapisan masyarakat	372 satker	388 satker	388 satker	388 satker	388 satker	102.7	MA-RI
g	Kegiatan Penyediaan dana bantuan hukum di Pengadilan Militer dan TUN	Penyelesaian perkara peradilan Militer dan TUN di wilayah yang belum terjangkau peradilan Militer dan TUN	Pelaksanaan sidang keliling (hakim terbang) untuk menjangkau segenap lapisan masyarakat	23 satker	26	MA-RI				

No	SUBSTANSI INTI / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp MILIAR)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
h	Penanganan Penyidikan Pelanggaran HAM yang Berat	Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara pelanggaran HAM yang berat secara cepat, tepat dan akuntabel.	Jumlah penyidikan perkara pelanggaran HAM yang berat yang diselesaikan	10 pkr	5 pkr	5 pkr	5 pkr	5 pkr	0,79	Kejaksaan Agung
i	Peningkatan Penututan pelanggaran HAM yang Berat	Meningkatnya penyelesaian perkara pelanggaran HAM yang berat secara cepat, tepat dan akuntabel	Jumlah perkara pelanggaran HAM yang berat yang diselesaikan dalam tahap penututan.	5 pkr	5 pkr	5 pkr	5 pkr	5	0,54	Kejaksaan Agung
<b>Pemberdayaan industri strategis bidang pertahanan</b>										
a	Penyusunan Rencana induk, master plan dan road map revitalisasi industri pertahanan	Tersusunnya rencana pengembangan & pengadaan alutsista TNI dan Alut Polri 2010 – 2014	Dokumen rencana pengembangan dan pengadaan	50%	50%	-	-	-	-	Kemenhan/TNI POLRI
b	Konsolidasi RPJMN 2010-2014 beserta RKP, Penguantan basis pendanaan, dan Perumusan Kerangka Pendanaan 5 thn	Tersusunnya mekanisme pendanaan Industri Pertahanan dalam negeri yang bersifat multiyears	Rumusan pendanaan Industri Pertahanan Dalam Negeri yang bersifat multiyears	100%	-	-	-	-	-	Kemenhan/TNI POLRI
c	Revisi Keppres 80 Tahun 2003 untuk mendukung revitalisasi industri pertahanan	Tersedianya payung hukum untuk mendukung revitalisasi industri pertahanan	Ditetapkannya Keppres Pengadaan barang dan jasa	100%	-	-	-	-	-	LKPP Kemenhan/TNI POLRI
d	Identifikasi teknologi – Alutsista TNI dan Alut POLRI yang dibutuhkan dalam PJP I	Tersedianya data kemampuan produksi alutsista TNI dan Alut Polri oleh Industri Pertahanan dalam Negeri	Jumlah item produk alutsista TNI dan Alut Polri yang mampu diproduksi oleh Industri Pertahanan dalam Negeri	25%	25 %	50%	-	-	-	Bappenas Kemenhan/TNI POLRI
e	Pembentukan Komite Kebijakan Industri Pertahanan sbg Clearing House	Tersedianya badan <i>Clearing House</i> lintas bidang dan lintas K/L	Efisiensi dan Efektivitas pengadaan Alutsista TNI dan Alut POLRI	100%	-	-	-	-	-	Bappenas Kemenhan/TNI POLRI

No	SUBSTANSI INTI / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp MILIAR)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
f	Refocusing, intensifikasi dan kolaborasi R & D	Terwujudnya model dan/atau prototype alat peralatan pertahanan matra darat, laut, dan udara yang sesuai dengan kemajuan IPTEK dan mampu dikembangkan secara mandiri	Jumlah model dan/ atau prototype alat peralatan pertahanan matra darat, laut, dan udara yang sesuai dengan kemajuan IPTEK dan mampu dikembangkan secara mandiri	30%	30 %	30%	30 %	30 %	-	Kemenhan/TNI
g	Penelitian, dan pengembangan alat peralatan pertahanan	Terwujudnya model dan/ atau prototype alat peralatan pertahanan matra darat, matra laut dan matra udara yang sesuai kemajuan IPTEK dan mampu dikembangkan secara mandiri	Jumlah model dan/ atau prototype alat peralatan pertahanan matra darat, matra laut dan matra udara yang sesuai kemajuan IPTEK dan mampu dikembangkan secara mandiri	30%	30%	30%	30%	30%	19.29	Kemenhan
h	Produksi Alutsista Industri dalam negeri	Meningkatnya produksi Alutsista Industri dalam negeri	Jumlah produksi Alutsista Industri dalam negeri	20%	24%	25%	25%	25%	7100.00	Kemenhan
i	Pengkajian dan pengembangan peralatan sandi	Tersedianya kajian pengembangan peralatan sandi	Jumlah hasil pengkajian dan pengembangan peralatan sandi	3	3	2	3	2	22.77	LSN
j	Pengembangan Alut Kepolisian Produksi Dalam Negeri	Meningkatkan kemandirian alut Polri produksi dalam negeri	Jumlah dan jenis peralatan utama dan peralatan teknis Polri yang memenuhi standar keamanan internasional.	20%	20%	25%	25%	25%	1,000.00	POLRI
k	Pembuatan Prototype	Meningkatkan Kemandirian Polri dalam memberikan yanmas	Jumlah Prototype yang dihasilkan	5	4	3	5	5	43.11	POLRI
l	Pengkajian dan Penerapan Teknologi Industri Pertahanan dan Keamanan	Termanfaatkannya teknologi pertahanan, keamanan dan keselamatan	Prototipe pesawat udara nir awak	1					10,02	BPPT
			Rekomendasi		1	1	1	1		
m	Peningkatan dukungan teknologi bagi pemberdayaan industri strategis bidang pertahanan	Kebijakan dukungan teknologi untuk revitalisasi industri pertahanan	Jumlah kebijakan	1	1	1	1	1	25,00	KRT
			Jumlah kegiatan ber sama hasil koordinasi dan sinkronisasi	1	1	1	1	1		